

BEYOND THE CLOSET

NEGOSIASI IDENTITAS DIGITAL LGBTQA+ DI INDONESIA

SANKSI PELANGGARAN PASAL 72 UNDANG-UNDANG, NOMOR 19.

TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan ataudenda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BEYOND THE CLOSET: Negosiasi Identitas Digital LGBTQA+ di Indonesia

REFTI HANDINI LISTYANI

M. JACKY



JUDUL BUKU

**BEYOND THE CLOSET: Negosiasi Identitas Digital
LGBTQA+ di Indonesia**

Penulis:

REFTI HANDINI LISTYANI

M. JACKY

Editor

FX SRI SADEWO

Perancang Sampul:

Tim Prapanca

Penata Letak:

Tim Prapanca

ISBN: 978-634-97143-4-1

Redaksi:

Cetakan, Juli 2026

Copyright ©2026

Oleh Penerbit Yayasan Giri Prapanca Loka

All Right Reserved

Alamat Kantor Penerbit:

Dusun Pesanan, RT 003/RW 002, Desa Bicak, Kecamatan
Trowulan, Kabupaten Mojokerto.

Email: giriprapancaloka@gmail.com

Hp. 082131032384

Website: www.giriprapancaloka.or.id

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

**Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa seizin tertulis dari
penerbit**

PENGANTAR

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara mendasar cara masyarakat membangun hubungan sosial, memproduksi pengetahuan, dan membentuk identitas. Media sosial tidak lagi sekadar menjadi saluran komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang sosial yang memungkinkan berbagai identitas diproduksi, dipertahankan, diperdebatkan, dan memperoleh pengakuan. Perubahan tersebut menghadirkan tantangan baru bagi ilmu-ilmu sosial untuk menjelaskan bagaimana relasi antara individu, masyarakat, teknologi, dan kekuasaan mengalami transformasi dalam era platform digital.

Dalam konteks tersebut, kajian mengenai identitas seksual dan identitas gender memperoleh perhatian yang semakin besar dalam perkembangan sosiologi kontemporer. Akan tetapi, sebagian besar literatur masih didominasi oleh pengalaman masyarakat Barat, sedangkan kajian yang berangkat dari konteks sosial Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, masyarakat Indonesia memiliki karakteristik sosial, budaya, agama, dan kelembagaan yang membentuk dinamika identitas secara berbeda. Kondisi tersebut menjadikan kehadiran buku *Beyond the Closet: Negosiasi Identitas Digital LGBTQA+ di Indonesia* sebagai kontribusi yang penting dalam memperluas khazanah sosiologi Indonesia, khususnya pada bidang kajian masyarakat digital, gender, dan perubahan sosial.

Keunggulan buku ini terletak pada cara penulis memandang identitas sebagai proses sosial yang terus dinegosiasikan, bukan sebagai kategori yang bersifat

tetap. Melalui dialog antara konstruksionisme sosial, teori performativitas gender, Digital Sociology, Queer Studies, teori representasi, serta pemikiran Michel Foucault mengenai relasi kuasa, buku ini menunjukkan bahwa identitas digital berkembang melalui hubungan yang kompleks antara pengalaman personal, norma sosial, institusi, media digital, algoritma platform, dan pengakuan publik. Pendekatan tersebut menghasilkan pembacaan yang lebih utuh mengenai bagaimana identitas dibentuk dan mengalami perubahan dalam masyarakat digital.

Salah satu kontribusi konseptual yang menonjol dari buku ini adalah penggunaan konsep *Beyond the Closet* sebagai kerangka analitis untuk memahami identitas sebagai proses negosiasi yang berlangsung secara berkelanjutan. Berbeda dengan pendekatan yang menjadikan coming out sebagai titik utama pembentukan identitas, buku ini memperlihatkan bahwa identitas selalu dinegosiasikan melalui pengelolaan visibilitas, representasi diri, relasi sosial, serta interaksi dengan berbagai mekanisme yang bekerja dalam ruang digital. Perspektif tersebut memberikan alternatif konseptual yang relevan untuk memahami pengalaman identitas dalam masyarakat yang memiliki konfigurasi budaya dan norma sosial seperti Indonesia.

Perkembangan kajian sosiologi digital di Indonesia selama beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada media sosial sebagai ruang komunikasi, budaya populer, partisipasi politik, atau perilaku pengguna platform digital. Kajian yang secara khusus menempatkan identitas sebagai hasil negosiasi antara relasi kuasa, representasi digital, pengakuan sosial, dan transformasi norma masih relatif

terbatas. Dalam konteks tersebut, buku ini menawarkan arah pembacaan yang berbeda. Penulis tidak memosisikan media digital sebagai objek utama analisis, melainkan sebagai arena sosial tempat identitas diproduksi, dinegosiasikan, dan memperoleh legitimasi melalui interaksi antara individu, komunitas, institusi, dan tata kelola platform. Pergeseran fokus tersebut memperlihatkan upaya yang penting untuk menghubungkan tradisi sosiologi klasik mengenai kekuasaan, konstruksi sosial, dan interaksi simbolik dengan perkembangan Digital Sociology serta kajian platform kontemporer. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya memperkaya kajian mengenai media digital di Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori sosiologi dalam menjelaskan perubahan masyarakat pada era digital.

Dari sisi akademik, buku ini juga menunjukkan upaya yang serius dalam membangun sintesis teoritis melalui telaah literatur mutakhir dan integrasi berbagai perspektif sosiologi. Pembahasan tidak berhenti pada deskripsi mengenai media sosial ataupun identitas digital, tetapi berusaha menjelaskan mekanisme sosial yang menghubungkan relasi kuasa, representasi, resistensi, pengakuan sosial, serta transformasi norma dalam satu kerangka analitis yang koheren. Pendekatan seperti ini memperlihatkan bahwa media digital tidak dapat dipahami hanya sebagai perkembangan teknologi komunikasi, melainkan sebagai bagian dari struktur sosial yang membentuk dinamika kehidupan masyarakat kontemporer.

Sebagai editor, saya menilai buku ini merupakan kontribusi akademik yang penting bagi pengembangan Sosiologi, Sosiologi Gender, Digital Sociology, dan Queer Studies di Indonesia. Nilai utama buku ini tidak hanya

terletak pada keluasan telaah teoritis yang disajikan, tetapi juga pada kemampuannya menyusun sintesis konseptual yang menjelaskan hubungan antara identitas, relasi kuasa, teknologi digital, dan perubahan sosial dalam satu kerangka analitis yang utuh. Kerangka tersebut memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan penelitian lanjutan mengenai identitas digital dan masyarakat platform di Indonesia.

Saya berharap buku ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan bagi dosen, mahasiswa, peneliti, pembuat kebijakan, maupun pembaca yang memiliki perhatian terhadap perkembangan masyarakat digital. Lebih jauh, saya berharap buku ini dapat mendorong lahirnya diskusi ilmiah dan penelitian lanjutan yang semakin memperkaya perkembangan ilmu sosiologi di Indonesia dalam menjelaskan perubahan masyarakat pada era digital.

Surabaya, 2026

FX Sri Sadewo, S.Sos., M.Si.

Editor

PRAKATA

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara mendasar cara individu membangun, menampilkan, dan menegosiasikan identitas dalam kehidupan sosial. Media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang sosial tempat berbagai identitas diproduksi, dipertahankan, diperdebatkan, serta memperoleh pengakuan. Dalam konteks tersebut, identitas tidak lagi dapat dipahami sebagai atribut yang bersifat tetap, melainkan sebagai proses sosial yang berlangsung melalui interaksi antara individu, komunitas, institusi, dan infrastruktur digital.

Perubahan tersebut menghadirkan tantangan baru bagi ilmu sosiologi dalam memahami hubungan antara identitas, kekuasaan, teknologi, dan perubahan sosial. Salah satu kelompok yang mengalami dinamika tersebut adalah komunitas LGBTQA+, yang identitasnya terus dinegosiasikan dalam relasi dengan norma budaya, agama, keluarga, negara, media, dan berbagai bentuk tata kelola platform digital. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa ruang digital tidak sekadar memperluas kesempatan berekspresi, tetapi juga membentuk arena baru bagi pengakuan, resistensi, pengawasan, serta pembentukan batas-batas sosial.

Buku ini merupakan luaran penelitian yang bertujuan menjelaskan bagaimana identitas digital LGBTQA+ dinegosiasikan dalam konteks masyarakat Indonesia. Analisis dibangun melalui dialog antara perspektif sosiologi, sosiologi gender, digital sociology, queer studies, teori representasi, teori identitas sosial,

dan kajian platform digital. Pendekatan multidisipliner tersebut digunakan untuk memahami identitas bukan sebagai kategori yang statis, melainkan sebagai proses sosial yang terus dibentuk melalui hubungan antara representasi, relasi kuasa, pengakuan sosial, dan transformasi norma dalam masyarakat digital.

Berbeda dengan sebagian kajian yang masih memusatkan perhatian pada konsep coming out sebagai titik utama pembentukan identitas, buku ini menawarkan perspektif *Beyond the Closet* sebagai kerangka analitis untuk memahami identitas sebagai proses negosiasi yang berlangsung secara berkelanjutan. Dalam kerangka ini, identitas digital dipahami sebagai hasil interaksi yang dinamis antara pengalaman personal, struktur sosial, karakteristik platform digital, serta berbagai praktik komunikasi yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan tersebut menghasilkan suatu model konseptual mengenai negosiasi identitas digital yang diharapkan dapat memperkaya pengembangan kajian Sosiologi Gender, Digital Sociology, dan Queer Studies, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia.

Pembahasan dalam buku disusun secara sistematis. Bab pertama menjelaskan landasan konseptual mengenai identitas, seksualitas, ruang digital, dan transformasi pembentukan identitas. Bab kedua menguraikan perspektif-perspektif teoretis yang menjadi fondasi analisis, mulai dari Michel Foucault, konstruksionisme sosial, teori performativitas gender, hingga kajian digital kontemporer. Bab-bab berikutnya membahas dinamika negosiasi identitas digital, representasi, resistensi, pengakuan sosial, serta transformasi norma yang berkembang melalui media sosial. Pada bagian akhir, buku ini menawarkan sintesis

konseptual berupa model negosiasi identitas digital yang merangkum keseluruhan temuan dan argumentasi.

Buku ini disusun sebagai kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Analisis yang disajikan tidak dimaksudkan untuk memberikan penilaian normatif terhadap identitas tertentu, melainkan untuk menjelaskan proses sosial yang membentuk pengalaman identitas dalam masyarakat digital berdasarkan pendekatan ilmiah dan kajian sosiologis. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi dosen, mahasiswa, peneliti, pembuat kebijakan, maupun pembaca yang memiliki perhatian terhadap perkembangan studi identitas, gender, media digital, dan perubahan sosial di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa perubahan teknologi digital berlangsung sangat cepat sehingga perkembangan teori maupun temuan empiris akan terus memperkaya pembahasan mengenai identitas digital di masa mendatang. Oleh karena itu, buku ini diharapkan tidak menjadi akhir dari diskusi akademik, melainkan menjadi salah satu pijakan untuk memperluas dialog ilmiah mengenai hubungan antara identitas, masyarakat, dan teknologi digital dalam konteks Indonesia.

Surabaya, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR	v
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI	13
Daftar Gambar	16
Daftar Tabel.....	17
PENDAHULUAN	19
1.1 Seksualitas sebagai konstruksi sosial.....	27
1.2 LGBTQA+ dalam perspektif sosiologi.....	31
1.2.1 Memahami LGBTQA+ sebagai Kategori Sosial	31
1.2.2 Dari Kategori Identitas Menuju Proses Sosial	36
1.2.3 LGBTQA+ sebagai Kelompok Sosial yang Dinegosiasikan	42
1.2.4 Perspektif Sosiologi terhadap Pengalaman LGBTQA+	46
1.2.5 Konteks Indonesia	52
1.2.6 Transisi Menuju Negosiasi Identitas Digital.....	57
1.3 Beyond the Closet, coming out, dan identitas sosial.....	61
2.1.1 Pergeseran Konsep Kekuasaan	81

2.1.2 Seksualitas sebagai Produksi Sosial	84
2.1.3 Disiplin, Normalisasi, dan Tubuh	88
2.1.4 Kuasa, Pengetahuan, dan Produksi Identitas.....	93
2.1.5 Resistensi sebagai Bagian dari Relasi Kuasa.....	98
2.1.6 Relevansi Foucault bagi Negosiasi Identitas Digital LGBTQA+	102
2.2 Erving Goffman: Dramaturgi dan presentasi diri	107
2.2.1 Kehidupan Sosial sebagai Pertunjukan	107
2.2.2 Front Stage, Back Stage, dan Pengelolaan Identitas	109
2.2.3 Dramaturgi dalam Masyarakat Platform.....	110
2.2.4 Dramaturgi dan Negosiasi Identitas Digital LGBTQA+	111
2.3.1 Semiotika Roland Barthes	114
2.3.2 Denotasi dan Konotasi	115
2.3.3 Mitos sebagai Ideologi.....	116
2.3.4 Representasi dalam Media Digital.....	118
2.3.5 Barthes dan Representasi Identitas Digital LGBTQA+	119
2.4.1 Kritik Butler terhadap Esensialisme Gender	120
2.4.2 Performativitas Gender	124
2.4.3 Repetisi, Norma, dan Subjektivitas	128

2.4.4 Performativitas dalam Media Digital	133
2.4.5 Butler dan Negosiasi Identitas Digital LGBTQA+	139
DAFTAR PUSTAKA	384
INDEKS.....	404
GLOSARIUM.....	410

Daftar Gambar

Gambar 6.1. The Beyond the Closet Model: A Multi-Level Ecological Framework of Digital Identity Negotiation

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Kontribusi Perspektif Sosiologi terhadap Analisis Negosiasi Identitas Digital LGBTQA+

Tabel 6.1. Karakteristik Dimensi dalam Beyond the Closet Model of Digital Identity Negotiation

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara individu membangun, menampilkan, dan menegosiasikan identitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial tidak lagi berfungsi sebagai sarana komunikasi semata, melainkan telah berkembang menjadi ruang sosial tempat berbagai identitas diproduksi, dipertukarkan, dipertanyakan, dan memperoleh pengakuan. Dalam ruang digital, identitas tidak hadir sebagai sesuatu yang tetap, melainkan sebagai hasil interaksi sosial yang terus berlangsung melalui representasi visual, narasi personal, respons pengguna lain, serta mekanisme algoritma yang menentukan tingkat visibilitas suatu konten. Perubahan tersebut menempatkan media digital sebagai salah satu arena terpenting dalam memahami dinamika identitas masyarakat kontemporer.

Transformasi tersebut menjadi semakin signifikan ketika dikaitkan dengan kelompok-kelompok yang selama ini mengalami marginalisasi sosial, termasuk komunitas LGBTQA+. Dalam berbagai masyarakat, identitas seksual dan identitas gender tidak pernah sepenuhnya dipahami sebagai persoalan individual.

Keduanya selalu berada dalam relasi dengan norma sosial, institusi keluarga, agama, hukum, pendidikan, media, dan berbagai mekanisme pengendalian sosial lainnya. Oleh karena itu, pengalaman menjadi LGBTQA+ tidak dapat dipahami hanya sebagai pengalaman personal, tetapi sebagai proses sosial yang berlangsung dalam hubungan kuasa yang terus membentuk batas-batas mengenai identitas yang dianggap sah, menyimpang, dapat diterima, atau harus disembunyikan.

Dalam perspektif sosiologi, seksualitas merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses historis, budaya, politik, dan institusional. Norma mengenai maskulinitas, feminitas, relasi seksual, serta orientasi seksual berkembang melalui praktik sosial yang berbeda pada setiap masyarakat. Dengan demikian, identitas LGBTQA+ bukan sekadar kategori individual, melainkan bagian dari proses sosial yang selalu dinegosiasikan di dalam struktur kekuasaan yang lebih luas. Pandangan ini menempatkan identitas sebagai sesuatu yang dinamis, kontekstual, dan terus mengalami perubahan seiring perubahan masyarakat.

Perkembangan media digital menghadirkan dimensi baru dalam proses tersebut. Jika pada masa sebelumnya pembentukan identitas berlangsung terutama melalui interaksi tatap muka, komunitas

lokal, dan institusi sosial konvensional, kini media sosial memungkinkan individu membangun identitas dalam ruang yang lebih terbuka, lebih luas, dan melampaui batas geografis. Platform seperti TikTok, Instagram, X, Facebook, dan berbagai media digital lainnya membuka peluang baru bagi individu untuk mengekspresikan diri, menemukan komunitas, membangun solidaritas, sekaligus menghadapi bentuk-bentuk pengawasan, diskriminasi, dan kekerasan digital yang tidak kalah kompleks dibandingkan ruang sosial offline.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ruang digital bukan sekadar tempat identitas dipublikasikan. Ruang digital merupakan arena tempat identitas diproduksi melalui interaksi yang terus berlangsung antara pengguna, komunitas, algoritma platform, kebijakan perusahaan teknologi, media massa, serta berbagai institusi sosial lainnya. Identitas digital dengan demikian tidak dapat dipahami sebagai representasi diri yang bersifat individual, tetapi sebagai hasil negosiasi sosial yang melibatkan relasi kuasa, praktik representasi, mekanisme pengakuan, dan berbagai bentuk resistensi terhadap norma dominan.

Bagi komunitas LGBTQA+, ruang digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, media sosial memungkinkan munculnya ruang aman untuk berbagi

pengalaman, membangun jejaring sosial, memperkuat solidaritas komunitas, dan meningkatkan visibilitas identitas yang selama ini berada di pinggiran masyarakat. Di sisi lain, ruang digital juga menjadi lokasi berlangsungnya cyberbullying, ujaran kebencian, moral policing, stigmatisasi berbasis agama, pelaporan massal terhadap akun, hingga pengawasan algoritmik yang memengaruhi visibilitas identitas tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media digital bukan ruang yang netral, melainkan arena kontestasi berbagai kepentingan sosial, politik, budaya, dan moral.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa konsep "coming out" yang selama ini banyak digunakan dalam literatur internasional tidak selalu mampu menjelaskan pengalaman identitas LGBTQA+ di berbagai konteks sosial. Dalam masyarakat yang memiliki konfigurasi budaya, agama, dan norma sosial yang kuat seperti Indonesia, proses keluar dari "closet" tidak selalu diwujudkan melalui deklarasi identitas secara terbuka. Banyak individu justru mengembangkan berbagai strategi negosiasi identitas yang lebih kompleks melalui pengaturan visibilitas akun, penggunaan simbol tertentu, pengelolaan audiens, komunikasi visual, humor, satire, maupun pembentukan komunitas digital. Dengan demikian, "beyond the closet" dalam konteks Indonesia lebih

tepat dipahami sebagai proses negosiasi identitas yang berlangsung secara terus-menerus daripada sebagai peristiwa tunggal berupa pengungkapan identitas.

Berangkat dari pemahaman tersebut, buku ini memandang identitas digital sebagai proses sosial yang selalu dinegosiasikan melalui hubungan antara representasi, disiplin sosial, resistensi, dan pengakuan. Proses tersebut dipahami menggunakan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan perspektif sosiologi, sosiologi gender, digital sociology, queer studies, teori representasi, teori identitas sosial, dan analisis kekuasaan. Pendekatan tersebut memungkinkan pembahasan mengenai identitas digital tidak berhenti pada tingkat pengalaman individual, tetapi menjelaskan bagaimana identitas dibentuk oleh struktur sosial sekaligus memiliki kapasitas untuk memengaruhi perubahan norma dalam masyarakat.

Atas dasar itu, buku ini bertujuan menjelaskan bagaimana identitas digital LGBTQA+ dibentuk, dipertahankan, diperdebatkan, dan dinegosiasikan dalam ruang digital Indonesia. Analisis difokuskan pada hubungan antara representasi identitas, praktik resistensi, mekanisme pengakuan sosial, serta transformasi norma yang muncul melalui interaksi

digital. Melalui pembahasan tersebut, buku ini menawarkan suatu model konseptual mengenai negosiasi identitas digital yang menjelaskan bahwa pembentukan identitas merupakan proses sosial yang bersifat dinamis, relasional, dan berlangsung secara simultan dalam berbagai arena kehidupan digital. Model tersebut diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan Sosiologi Gender, Digital Sociology, dan Queer Studies, sekaligus memperluas pemahaman mengenai perubahan hubungan antara identitas, teknologi digital, dan transformasi masyarakat kontemporer.

BAB I BEYOND THE CLOSET: Dari Identitas Tersembunyi Menuju Ruang Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara individu membangun dan menampilkan identitas dalam kehidupan sosial. Media sosial menghadirkan ruang interaksi yang memungkinkan berbagai pengalaman, pandangan, dan ekspresi diri dipublikasikan kepada khalayak yang lebih luas. Dalam ruang tersebut, identitas tidak lagi dipahami sebagai karakteristik yang bersifat tetap, melainkan sebagai hasil proses sosial yang terus dibentuk melalui komunikasi, representasi, dan interaksi antar pengguna. Perubahan ini mendorong lahirnya bentuk-bentuk baru dalam pembentukan identitas yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada ruang sosial konvensional.

Perubahan tersebut memiliki arti penting bagi kelompok-kelompok yang selama ini berada dalam posisi marginal, termasuk komunitas LGBTQA+. Dalam berbagai konteks masyarakat, identitas seksual dan identitas gender sering kali berhadapan dengan norma sosial, nilai budaya, keyakinan agama, serta

berbagai mekanisme pengendalian sosial yang menentukan batas antara identitas yang diterima dan yang dipersoalkan. Akibatnya, pengalaman menjadi LGBTQA+ tidak hanya berkaitan dengan bagaimana seseorang memahami dirinya sendiri, tetapi juga dengan bagaimana identitas tersebut dipersepsikan, dinegosiasikan, dan direspons oleh lingkungan sosial.

Kemunculan media digital mengubah sebagian mekanisme tersebut. Ruang digital membuka peluang bagi individu untuk membangun jejaring sosial, berbagi pengalaman, menemukan komunitas, serta menampilkan identitas melalui berbagai bentuk representasi visual maupun naratif. Pada saat yang sama, ruang digital juga menghadirkan tantangan berupa pengawasan, stigmatisasi, diskriminasi, ujaran kebencian, dan berbagai praktik eksklusi yang berlangsung melalui teknologi digital. Dengan demikian, media sosial menjadi arena tempat identitas dibangun sekaligus diperdebatkan secara terus-menerus.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa identitas LGBTQA+ tidak dapat dipahami sebagai kondisi yang bersifat statis ataupun semata-mata sebagai atribut personal. Identitas merupakan hasil dari proses negosiasi yang berlangsung dalam hubungan antara individu, komunitas, norma sosial, institusi, dan

teknologi digital. Negosiasi tersebut melibatkan berbagai strategi untuk memperoleh ruang ekspresi, mengurangi risiko stigma, membangun solidaritas, sekaligus memperoleh pengakuan sosial dalam masyarakat yang terus mengalami perubahan.

Berangkat dari pemahaman tersebut, bab ini membahas landasan sosiologis mengenai pembentukan identitas LGBTQA+ dalam masyarakat digital. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai seksualitas sebagai konstruksi sosial, dilanjutkan dengan perspektif sosiologis mengenai LGBTQA+, perkembangan konsep *beyond the closet* dan *coming out*, serta perubahan ruang sosial menuju ruang digital. Pada bagian akhir, bab ini menjelaskan bagaimana media sosial mengubah mekanisme pembentukan identitas dan menjadi titik awal bagi pembahasan mengenai negosiasi identitas digital pada bab-bab berikutnya.

1.1 Seksualitas sebagai konstruksi sosial

Seksualitas merupakan salah satu dimensi kehidupan manusia yang paling sering dipahami sebagai sesuatu yang bersifat alamiah, biologis, dan melekat sejak lahir. Pandangan tersebut berkembang karena karakteristik biologis seperti kromosom, hormon, dan organ reproduksi memang menjadi bagian penting dalam

kehidupan manusia. Namun, sosiologi memandang bahwa makna seksualitas tidak pernah sepenuhnya ditentukan oleh faktor biologis. Cara masyarakat memahami tubuh, hubungan seksual, identitas gender, orientasi seksual, serta perilaku yang dianggap pantas atau menyimpang selalu dipengaruhi oleh proses sosial yang berlangsung dalam ruang budaya, agama, politik, ekonomi, dan sejarah (Berger & Luckmann, 1966; Michel Foucault, 1978; Jeffrey Weeks, 2018).

Oleh karena itu, perlu dibedakan antara seks (sex) sebagai kategori biologis dan seksualitas (sexuality) sebagai konstruksi sosial. Seks mengacu pada karakteristik biologis yang berkaitan dengan anatomi dan fungsi reproduksi. Sebaliknya, seksualitas mencakup seperangkat makna sosial mengenai bagaimana tubuh dipahami, bagaimana identitas dibentuk, bagaimana relasi intim dijalankan, serta bagaimana masyarakat menetapkan norma mengenai perilaku seksual yang dianggap dapat diterima. Dengan demikian, seksualitas tidak hanya berkaitan dengan aktivitas seksual, tetapi juga mencakup identitas, ekspresi diri, relasi sosial, dan posisi seseorang dalam struktur masyarakat (Weeks, 2018; Judith Butler, 1990).

Perspektif konstruksionisme sosial menjelaskan bahwa norma mengenai seksualitas tidak pernah bersifat universal ataupun tetap. Apa yang dianggap normal dalam suatu masyarakat belum tentu dipandang sama oleh masyarakat lain maupun pada periode sejarah yang berbeda. Nilai mengenai

maskulinitas, femininitas, perkawinan, keluarga, dan orientasi seksual terus berubah mengikuti dinamika sosial, perubahan institusi, perkembangan ilmu pengetahuan, serta transformasi budaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa seksualitas selalu merupakan hasil negosiasi sosial yang dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu (Berger & Luckmann, 1966; Weeks, 2018; Foucault, 1978).

Dalam masyarakat modern, berbagai institusi sosial memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman mengenai seksualitas. Keluarga menjadi ruang pertama tempat individu mempelajari norma gender dan perilaku yang dianggap sesuai. Pendidikan memperkuat kategori-kategori sosial mengenai laki-laki dan perempuan melalui proses sosialisasi formal. Agama memberikan kerangka moral yang menentukan batas-batas perilaku seksual yang dinilai sah ataupun menyimpang. Negara membentuk berbagai regulasi yang mengatur perkawinan, keluarga, administrasi kependudukan, dan hak-hak kewargaan. Sementara itu, media massa dan media digital menghasilkan representasi yang terus membentuk persepsi publik mengenai identitas seksual dan identitas gender. Melalui interaksi berbagai institusi tersebut, seksualitas diproduksi sebagai fakta sosial yang tampak alamiah meskipun sebenarnya merupakan hasil konstruksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus (Berger & Luckmann, 1966; Foucault, 1978).

Michel Foucault memberikan kontribusi penting dengan menunjukkan bahwa seksualitas tidak semata-mata ditekan melalui larangan, tetapi diproduksi melalui berbagai mekanisme pengetahuan dan kekuasaan. Diskursus ilmiah, agama, hukum, pendidikan, dan praktik medis membentuk kategori-kategori mengenai seksualitas sekaligus menentukan siapa yang dianggap normal, sehat, bermoral, atau menyimpang. Dalam perspektif ini, seksualitas merupakan arena tempat relasi kuasa bekerja melalui klasifikasi, pengawasan, normalisasi, dan disiplin sosial. Dengan demikian, identitas seksual bukan sekadar ekspresi individual, tetapi juga hasil dari proses sosial yang terus mengatur kehidupan manusia (Foucault, 1978; Butler, 1990).

Pemahaman tersebut memiliki implikasi penting dalam melihat pengalaman LGBTQA+. Identitas LGBTQA+ tidak dapat dijelaskan hanya melalui karakteristik biologis ataupun pilihan individual. Pengalaman menjadi lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, aseksual, maupun identitas seksual lainnya selalu berlangsung dalam hubungan dengan norma sosial yang berlaku. Individu terus berhadapan dengan proses penerimaan, penolakan, stereotip, stigma, diskriminasi, maupun dukungan yang membentuk cara mereka memahami dan menampilkan identitasnya. Oleh karena itu, identitas LGBTQA+ merupakan proses sosial yang selalu dinegosiasikan, bukan kategori yang berdiri di luar masyarakat (Butler, 1990; Talbot et al., 2022; Döring et al., 2022).

Perkembangan teknologi digital memperluas ruang berlangsungnya negosiasi tersebut. Jika sebelumnya konstruksi seksualitas terutama dibentuk melalui interaksi dalam keluarga, sekolah, komunitas, dan institusi formal, kini media digital menjadi arena baru yang memungkinkan identitas diproduksi, dipresentasikan, diperdebatkan, dan dinegosiasikan secara lebih luas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa individu LGBTQ+ secara aktif menggunakan media sosial untuk mengeksplorasi identitas, mengelola visibilitas, membangun komunitas, melindungi diri dari stigma, serta menegosiasikan ekspresi diri sesuai dengan karakteristik setiap platform digital. Perubahan inilah yang menjadi titik awal pembahasan buku ini. Identitas LGBTQA+ dipahami bukan sebagai kondisi yang bersifat tetap, melainkan sebagai hasil proses negosiasi sosial yang berlangsung secara dinamis dalam ruang digital Indonesia (Talbot et al., 2022; Chan, 2023; Noon et al., 2024).

1.2 LGBTQA+ dalam perspektif sosiologi

1.2.1 Memahami LGBTQA+ sebagai Kategori Sosial

Dalam perspektif sosiologi, LGBTQA+ tidak dipahami semata-mata sebagai kumpulan identitas individual, melainkan sebagai kategori sosial yang terbentuk melalui proses historis, budaya, politik, dan

institusional. Kategori tersebut berkembang melalui perubahan cara masyarakat mendefinisikan seksualitas, gender, relasi sosial, serta batas-batas mengenai identitas yang dianggap normal atau menyimpang. Dengan demikian, istilah LGBTQA+ bukan sekadar klasifikasi demografis, tetapi merepresentasikan posisi sosial yang terus dibentuk melalui interaksi antara individu, institusi, dan struktur masyarakat (Weeks, 2018; Butler, 1990; Aggleton et al., 2024).

Jeffrey Weeks menjelaskan bahwa seksualitas merupakan fenomena sosial yang selalu diproduksi melalui nilai, norma, dan praktik budaya yang berkembang dalam masyarakat. Cara individu memahami dirinya sebagai laki-laki, perempuan, lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, aseksual, maupun identitas lainnya tidak pernah terlepas dari proses sosialisasi, pengalaman hidup, relasi kuasa, dan perubahan sejarah. Oleh karena itu, identitas seksual tidak dapat dipandang sebagai kategori biologis yang bersifat tetap, melainkan sebagai konstruksi sosial yang terus mengalami perubahan sesuai dengan konteks ruang dan waktu (Weeks, 2018).

Pandangan tersebut diperluas oleh Judith Butler melalui konsep performativitas gender. Butler berpendapat bahwa gender bukanlah identitas yang secara otomatis muncul dari jenis kelamin biologis, melainkan dihasilkan melalui tindakan, bahasa, simbol, dan praktik sosial yang diulang secara terus-menerus. Pengulangan tersebut menciptakan kesan

bahwa identitas gender bersifat alamiah, padahal sesungguhnya merupakan hasil proses sosial yang berlangsung dalam relasi kuasa. Perspektif ini menunjukkan bahwa identitas gender selalu terbuka terhadap negosiasi, perubahan, maupun resistensi terhadap norma yang dominan (Butler, 1990).

Pemahaman tersebut mengharuskan adanya pembedaan yang jelas antara beberapa konsep yang sering digunakan secara bergantian dalam pembahasan mengenai LGBTQA+, yaitu seks biologis, identitas gender, ekspresi gender, dan orientasi seksual. Keempat konsep tersebut saling berkaitan, tetapi memiliki makna sosiologis yang berbeda.

Seks biologis (*sex*) mengacu pada karakteristik biologis yang umumnya ditentukan melalui kromosom, hormon, anatomi reproduksi, dan karakteristik fisik sejak lahir. Dalam praktik sosial, kategori laki-laki dan perempuan sering kali ditetapkan berdasarkan karakteristik biologis tersebut. Namun, sosiologi menekankan bahwa makna sosial yang dilekatkan pada kategori biologis tersebut tidak bersifat alamiah, melainkan dibentuk melalui proses budaya, hukum, agama, pendidikan, dan berbagai institusi sosial lainnya (Weeks, 2018; Aggleton et al., 2024).

Identitas gender (*gender identity*) merujuk pada bagaimana individu memahami, merasakan, dan mendefinisikan dirinya dalam kaitannya dengan kategori gender. Identitas tersebut merupakan

pengalaman personal yang berkembang melalui interaksi antara pengalaman individual dan lingkungan sosial. Dalam perspektif sosiologi, identitas gender tidak hanya berkaitan dengan kesadaran individu, tetapi juga dipengaruhi oleh ekspektasi sosial mengenai bagaimana seseorang seharusnya menjadi laki-laki, perempuan, atau identitas gender lainnya (Butler, 1990; Aggleton et al., 2024).

Berbeda dengan identitas gender, ekspresi gender (*gender expression*) mengacu pada bagaimana seseorang menampilkan identitasnya kepada orang lain melalui cara berpakaian, penampilan fisik, gaya komunikasi, perilaku, bahasa tubuh, maupun simbol-simbol budaya lainnya. Ekspresi gender merupakan bentuk presentasi diri yang selalu berlangsung dalam interaksi sosial sehingga dapat diterima, dinegosiasikan, maupun dipersoalkan oleh lingkungan sosial. Oleh karena itu, ekspresi gender menjadi salah satu arena tempat norma gender diproduksi sekaligus dipertanyakan (Butler, 1990; Goffman, 1959).

Sementara itu, orientasi seksual (*sexual orientation*) berkaitan dengan pola ketertarikan emosional, romantis, maupun seksual seseorang terhadap individu lain. Orientasi seksual berbeda dari identitas gender maupun ekspresi gender. Seorang individu dapat memiliki identitas gender tertentu dengan orientasi seksual yang beragam, sebagaimana ekspresi gender juga tidak selalu menunjukkan

orientasi seksual seseorang. Perbedaan konseptual tersebut penting karena dalam praktik sosial keempat konsep tersebut sering kali disederhanakan menjadi satu kategori yang sama, sehingga melahirkan stereotip dan kesalahpahaman dalam memahami pengalaman kelompok LGBTQA+ (Weeks, 2018; Aggleton et al., 2024).

Dari perspektif sosiologi, LGBTQA+ pada akhirnya dipahami sebagai kategori sosial yang terus dibentuk melalui proses klasifikasi, pengakuan, penolakan, serta negosiasi yang berlangsung dalam masyarakat. Individu tidak membangun identitasnya secara terpisah dari lingkungan sosial, tetapi selalu berhadapan dengan norma budaya, institusi keagamaan, regulasi negara, relasi keluarga, media, dan dinamika kehidupan sehari-hari. Karena itu, pengalaman menjadi bagian dari komunitas LGBTQA+ merupakan hasil interaksi yang terus berlangsung antara pengalaman personal dan struktur sosial yang lebih luas (Weeks, 2018; Butler, 1990; Aggleton et al., 2024).

Perkembangan teknologi digital kemudian memperluas ruang berlangsungnya proses tersebut. Media sosial memungkinkan individu menampilkan identitas, membangun komunitas, memperoleh pengakuan, sekaligus menghadapi bentuk-bentuk baru pengawasan, stigma, dan kontestasi sosial. Dengan demikian, kategori sosial LGBTQA+ tidak lagi dinegosiasikan hanya dalam ruang keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun komunitas lokal, tetapi juga

melalui ruang digital yang memiliki karakter interaktif, terbuka, dan melampaui batas geografis. Perubahan inilah yang menjadi dasar untuk memahami negosiasi identitas digital yang dibahas pada bagian-bagian berikutnya (Aggleton et al., 2024).

1.2.2 Dari Kategori Identitas Menuju Proses Sosial

Dalam perspektif sosiologi, identitas tidak dipahami sebagai atribut yang melekat secara tetap pada diri seseorang. Identitas merupakan hasil dari proses sosial yang berlangsung secara terus-menerus melalui interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya. Menurut Berger dan Luckmann (1966), realitas sosial dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Melalui proses tersebut, individu tidak hanya membentuk identitasnya sendiri, tetapi juga mengadopsi berbagai kategori sosial yang telah diproduksi dan dilembagakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, identitas selalu berada dalam hubungan timbal balik antara pengalaman personal dan struktur sosial yang lebih luas.

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa kategori LGBTQA+ tidak dapat dipandang sebagai klasifikasi yang berdiri sendiri. Sebaliknya, kategori tersebut memperoleh makna melalui interaksi dengan norma budaya, nilai agama, kebijakan negara, institusi

pendidikan, media, serta relasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berger dan Luckmann (1966) menegaskan bahwa makna sosial tidak muncul secara alamiah, melainkan dikonstruksi melalui proses komunikasi dan interaksi yang terus berlangsung. Dalam konteks ini, identitas LGBTQA+ merupakan hasil negosiasi antara bagaimana individu memahami dirinya dengan bagaimana masyarakat mendefinisikan, menerima, ataupun menolak identitas tersebut.

Pandangan mengenai identitas sebagai proses sosial juga diperkuat oleh perspektif interaksionisme simbolik. Goffman (1959) menjelaskan bahwa kehidupan sosial menyerupai sebuah pertunjukan, ketika individu secara aktif mengelola kesan yang ingin ditampilkan kepada orang lain. Identitas tidak sekadar dimiliki, tetapi dipresentasikan melalui berbagai simbol, bahasa, penampilan, ekspresi, dan perilaku yang disesuaikan dengan situasi sosial tertentu. Dengan demikian, presentasi diri merupakan proses yang dinamis karena individu terus mempertimbangkan harapan sosial, risiko penolakan, maupun peluang memperoleh pengakuan dari lingkungan sekitarnya.

Bagi kelompok LGBTQA+, proses tersebut menjadi semakin kompleks karena identitas sering kali

dinegosiasikan dalam situasi yang ditandai oleh ketimpangan relasi kuasa. Butler (1990) berpendapat bahwa identitas gender bukan merupakan esensi yang tetap, melainkan dihasilkan melalui praktik-praktik sosial yang terus diulang. Pengulangan tersebut menciptakan kesan seolah-olah identitas bersifat alamiah, padahal sesungguhnya merupakan hasil performativitas yang berlangsung dalam konteks norma sosial tertentu. Perspektif ini menunjukkan bahwa identitas selalu memiliki kemungkinan untuk dipertahankan, diubah, diperdebatkan, maupun dilawan melalui praktik sosial sehari-hari.

Pemahaman mengenai identitas sebagai proses sosial juga memperoleh penjelasan melalui Social Identity Theory yang dikembangkan oleh Tajfel dan Turner. Teori ini menjelaskan bahwa individu membangun identitas dirinya melalui keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Keanggotaan tersebut tidak hanya memberikan rasa memiliki, tetapi juga membentuk cara individu menilai dirinya sendiri maupun kelompok lain. Identitas sosial berkembang melalui proses kategorisasi sosial, identifikasi kelompok, dan perbandingan sosial. Karena itu, hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas sering kali menghasilkan proses inklusi maupun eksklusivitas yang memengaruhi pengalaman sosial setiap individu (Tajfel & Turner, 1979).

Dalam konteks LGBTQA+, identitas sosial tidak hanya dibentuk melalui afiliasi dengan komunitas tertentu, tetapi juga melalui pengalaman menghadapi stereotip, diskriminasi, maupun pengakuan sosial. Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa konstruksi identitas LGBTQ+ berkembang melalui hubungan yang dinamis antara pengalaman personal, dukungan komunitas, norma budaya, dan ruang digital yang memungkinkan individu mengelola visibilitas identitasnya secara lebih fleksibel (Döring, Bhana, & Albury, 2022; Chan, 2023). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa identitas bukan sekadar persoalan siapa seseorang, melainkan bagaimana identitas tersebut terus dibangun melalui relasi sosial yang berubah.

Proses pembentukan identitas juga tidak dapat dipisahkan dari praktik stigma dan pelabelan sosial. Dalam karya klasiknya, Goffman (1963) menjelaskan bahwa stigma merupakan atribut sosial yang menyebabkan seseorang dipandang berbeda dari kategori yang dianggap normal oleh masyarakat. Stigma tidak melekat secara alamiah pada individu, tetapi muncul karena adanya definisi sosial mengenai karakteristik yang dinilai menyimpang. Melalui proses tersebut, masyarakat membangun batas simbolik antara kelompok yang dianggap normal dan kelompok yang diposisikan sebagai "yang lain". Pelabelan

tersebut kemudian memengaruhi kesempatan sosial, relasi interpersonal, hingga pembentukan citra diri individu.

Perspektif tersebut selaras dengan teori labeling yang menjelaskan bahwa penyimpangan bukan semata-mata ditentukan oleh tindakan seseorang, melainkan oleh respons sosial terhadap tindakan tersebut. Identitas LGBTQA+ sering kali memperoleh makna melalui proses pelabelan yang dilakukan oleh institusi sosial, media, maupun kelompok mayoritas. Akibatnya, pengalaman sosial individu tidak hanya dipengaruhi oleh identitas yang dimilikinya, tetapi juga oleh kategori-kategori yang dilekatkan masyarakat terhadap identitas tersebut.

Dalam perkembangan kajian sosiologi kontemporer, proses tersebut semakin sering dijelaskan melalui konsep boundary-making. Batas-batas sosial dibentuk melalui praktik klasifikasi yang membedakan siapa yang dianggap termasuk ke dalam kelompok yang diterima dan siapa yang ditempatkan di luar batas tersebut. Boundary-making berlangsung melalui bahasa, simbol, kebijakan, representasi media, praktik keagamaan, hingga interaksi sehari-hari. Karena bersifat sosial, batas-batas tersebut tidak pernah benar-benar tetap, melainkan selalu dapat dipertahankan, diperdebatkan, maupun

dinegosiasikan kembali (Lamont & Molna'r, 2002; Butler, 1990).

Perkembangan media digital memperluas arena berlangsungnya proses identitas, stigma, pelabelan, dan boundary-making tersebut. Media sosial memungkinkan individu membangun komunitas, mengembangkan identitas kolektif, serta memperoleh pengakuan dari jaringan sosial yang lebih luas. Pada saat yang sama, ruang digital juga menghadirkan bentuk-bentuk baru pengawasan, diskriminasi, ujaran kebencian, dan moral policing yang memengaruhi cara identitas dinegosiasikan. Berbagai studi terbaru menunjukkan bahwa individu LGBTQ+ secara aktif menggunakan platform digital untuk mengatur visibilitas identitas, membangun solidaritas komunitas, sekaligus mengembangkan strategi menghadapi stigma dalam lingkungan digital (Talbot et al., 2022; Chan, 2023; Fisher et al., 2024). Dengan demikian, identitas LGBTQA+ tidak lagi dipahami sebagai kategori yang bersifat statis, tetapi sebagai proses sosial yang terus berlangsung melalui interaksi antara individu, komunitas, institusi, dan teknologi digital.

1.2.3 LGBTQA+ sebagai Kelompok Sosial yang Dinegosiasikan

Dalam perspektif sosiologi, LGBTQA+ tidak dipahami semata-mata sebagai kumpulan individu yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender tertentu. Sebaliknya, LGBTQA+ dipandang sebagai kelompok sosial yang keberadaannya terus dibentuk melalui proses klasifikasi, pengakuan, penolakan, dan negosiasi yang berlangsung dalam masyarakat. Posisi sosial suatu kelompok tidak muncul secara alamiah, melainkan dihasilkan melalui interaksi antara norma sosial, institusi, relasi kuasa, serta praktik-praktik budaya yang menentukan siapa yang dianggap sesuai dengan tatanan sosial dan siapa yang ditempatkan di luar batas-batas tersebut (Butler, 1990; Gedro & Rocco, 2024).

Salah satu konsep penting untuk memahami proses tersebut adalah heteronormativitas. Heteronormativitas mengacu pada seperangkat asumsi sosial yang menempatkan heteroseksualitas dan identitas gender biner sebagai standar yang dianggap wajar, alamiah, dan ideal dalam kehidupan masyarakat. Melalui norma tersebut, berbagai institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, hukum, maupun media mereproduksi ekspektasi mengenai bagaimana seseorang seharusnya menjalani identitas gender, relasi intim, serta kehidupan

keluarga. Akibatnya, identitas yang berada di luar norma tersebut sering kali diposisikan sebagai penyimpangan, pengecualian, atau bahkan ancaman terhadap keteraturan sosial (Butler, 1990; Aggleton et al., 2024).

Dalam kerangka tersebut, relasi kuasa tidak bekerja hanya melalui aturan formal atau larangan yang bersifat langsung. Michel Foucault menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja secara produktif melalui pembentukan pengetahuan, kategorisasi, normalisasi, dan praktik-praktik sehari-hari yang menentukan apa yang dianggap benar, normal, atau menyimpang. Individu kemudian belajar mengawasi dirinya sendiri sesuai dengan norma yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, pengalaman LGBTQA+ tidak hanya dipengaruhi oleh tindakan diskriminatif yang tampak, tetapi juga oleh mekanisme sosial yang secara terus-menerus membentuk cara individu memahami dirinya sendiri dan cara masyarakat menilai identitas tersebut (Foucault, 1978).

Judith Butler memperluas pemahaman tersebut melalui konsep performativitas gender. Menurut Butler, norma heteronormatif memperoleh kekuatannya bukan karena bersifat alamiah, tetapi karena terus diproduksi melalui praktik sosial yang berulang. Bahasa, simbol, institusi, media, serta

interaksi sehari-hari secara terus-menerus mereproduksi definisi mengenai laki-laki, perempuan, maskulinitas, dan femininitas sehingga tampak sebagai sesuatu yang tidak dapat dipertanyakan. Dalam kondisi tersebut, identitas LGBTQA+ tidak hanya menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma dominan, tetapi juga terus mengembangkan berbagai bentuk resistensi terhadap definisi-definisi yang membatasi keberagaman identitas (Butler, 1990).

Proses tersebut menghasilkan dinamika eksklusi dan inklusi sosial yang berlangsung secara bersamaan. Eksklusi muncul ketika individu atau kelompok mengalami pembatasan akses terhadap pengakuan sosial, kesempatan ekonomi, partisipasi politik, maupun perlindungan hukum akibat identitas seksual atau identitas gender yang dimilikinya. Sebaliknya, inklusi sosial berkembang ketika masyarakat mulai membuka ruang bagi keberagaman identitas melalui pengakuan, representasi, perlindungan hak, serta kesempatan berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, posisi sosial LGBTQA+ tidak pernah bersifat tetap, tetapi selalu berubah mengikuti dinamika budaya, kebijakan publik, perkembangan media, dan perubahan nilai masyarakat (Gedro & Rocco, 2024).

Kajian-kajian mutakhir menunjukkan bahwa identitas LGBTQ+ semakin dipahami sebagai hasil interaksi antara pengalaman personal, konteks sosial, dan perubahan historis. Tinjauan konseptual oleh *Expanding Notions of LGBTQ+* menunjukkan bahwa kategori LGBTQ+ terus berkembang melalui meningkatnya visibilitas sosial, munculnya bentuk-bentuk identitas baru, serta semakin kuatnya perspektif interseksionalitas dalam memahami pengalaman seksual dan gender. Identitas tersebut tidak lagi dipahami sebagai kategori yang tetap, tetapi sebagai proses yang berkembang sepanjang perjalanan hidup dan selalu dipengaruhi oleh perubahan masyarakat.

Perubahan tersebut juga terlihat pada bagaimana individu membangun rasa memiliki terhadap komunitas sosialnya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ruang-ruang sosial yang aman memungkinkan individu LGBTQ+ membangun identitas kolektif, memperkuat solidaritas, serta mengembangkan rasa percaya diri dalam menampilkan identitasnya. Identitas kolektif tersebut tidak terbentuk hanya karena kesamaan orientasi seksual atau identitas gender, tetapi juga melalui pengalaman bersama menghadapi stigma, membangun jejaring sosial, dan memperoleh pengakuan dari komunitas yang lebih luas. Dengan demikian, identitas sosial selalu

merupakan hasil proses negosiasi antara pengalaman individual dengan struktur sosial yang terus berubah.

Atas dasar itu, buku ini memandang LGBTQA+ bukan sebagai kategori sosial yang bersifat tetap, melainkan sebagai kelompok sosial yang posisinya terus dinegosiasikan melalui hubungan antara heteronormativitas, relasi kuasa, serta proses eksklusi dan inklusi sosial. Pemahaman tersebut menjadi landasan untuk menjelaskan bagaimana negosiasi tersebut kemudian berpindah dan mengalami transformasi di ruang digital, ketika media sosial menghadirkan arena baru bagi pembentukan identitas, representasi, dan pengakuan sosial.

1.2.4 Perspektif Sosiologi terhadap Pengalaman LGBTQA+

Pengalaman LGBTQA+ telah menjadi salah satu tema yang berkembang pesat dalam kajian sosiologi kontemporer. Berbagai perspektif sosiologi menawarkan penjelasan yang berbeda mengenai bagaimana identitas seksual dan identitas gender terbentuk, dipertahankan, dinegosiasikan, maupun dipersoalkan dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman LGBTQA+ tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu pendekatan teoretis. Sebaliknya, pemahaman yang komprehensif memerlukan dialog antara berbagai

perspektif sosiologi yang saling melengkapi sekaligus saling mengkritisi (Weeks, 2018; Plummer, 2021).

Perspektif fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang tersusun atas berbagai institusi yang saling berkaitan untuk menjaga keteraturan sosial. Dalam kerangka ini, keluarga, agama, pendidikan, dan hukum dipahami sebagai institusi yang memiliki fungsi dalam mempertahankan nilai serta norma sosial. Oleh karena itu, berbagai bentuk identitas seksual yang berada di luar norma dominan sering dipahami sebagai tantangan terhadap keteraturan sosial yang telah terbentuk. Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa masyarakat berupaya mempertahankan norma heteroseksualitas melalui proses sosialisasi dan kontrol sosial. Namun, pendekatan fungsionalisme cenderung menganggap norma yang berlaku sebagai sesuatu yang relatif stabil sehingga kurang mampu menjelaskan perubahan sosial serta meningkatnya keberagaman identitas seksual dalam masyarakat modern (Macionis, 2022; Giddens & Sutton, 2021).

Berbeda dengan fungsionalisme, perspektif konflik memandang masyarakat sebagai arena perebutan sumber daya, kekuasaan, dan legitimasi sosial. Identitas seksual dipahami sebagai bagian dari relasi kuasa yang menghasilkan ketimpangan akses

terhadap hak, pengakuan, dan partisipasi sosial. Kelompok mayoritas memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mendefinisikan norma yang dianggap benar, sedangkan kelompok minoritas sering menghadapi marginalisasi maupun diskriminasi. Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa pengalaman LGBTQA+ berkaitan erat dengan perjuangan memperoleh pengakuan sosial, perlindungan hukum, dan kesetaraan hak. Akan tetapi, pendekatan konflik terkadang lebih menekankan struktur ketimpangan dibandingkan pengalaman subjektif individu dalam membangun identitasnya (Collins, 2020; Plummer, 2021).

Perspektif interaksionisme simbolik memberikan perhatian pada proses interaksi sehari-hari sebagai arena pembentukan identitas. Goffman (1959) menunjukkan bahwa individu secara aktif mengelola kesan melalui berbagai bentuk presentasi diri sesuai dengan situasi sosial yang dihadapi. Dalam konteks LGBTQA+, identitas dipahami sebagai hasil interaksi yang terus berlangsung antara individu dengan keluarga, teman sebaya, komunitas, maupun masyarakat yang lebih luas. Pendekatan ini menjelaskan bagaimana proses penerimaan, penolakan, pelabelan, maupun pengakuan memengaruhi cara individu memahami dan menampilkan identitasnya. Kelebihan perspektif ini

terletak pada kemampuannya menjelaskan dinamika pengalaman sehari-hari, meskipun kurang memberikan perhatian terhadap struktur sosial yang lebih luas.

Konstruksionisme sosial memandang bahwa identitas seksual dan identitas gender tidak bersifat alamiah, tetapi dibentuk melalui proses historis, budaya, dan institusional. Berger dan Luckmann (1966) menjelaskan bahwa realitas sosial berkembang melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sehingga berbagai kategori sosial tampak sebagai sesuatu yang wajar meskipun sebenarnya merupakan hasil konstruksi masyarakat. Dalam konteks LGBTQA+, pendekatan ini menunjukkan bahwa makna mengenai normalitas, penyimpangan, maupun keberagaman seksual selalu berubah mengikuti perubahan sosial. Perspektif ini sangat berguna untuk menjelaskan mengapa pengalaman LGBTQA+ berbeda pada setiap masyarakat dan setiap periode sejarah. Namun, konstruksionisme sosial relatif kurang menjelaskan bagaimana individu secara aktif melakukan perlawanan terhadap konstruksi sosial yang membatasi identitasnya (Berger & Luckmann, 1966; Burr, 2015).

Perkembangan kajian queer kemudian menghadirkan kritik terhadap berbagai perspektif sebelumnya.

Queer Theory tidak hanya mempertanyakan bagaimana identitas dibentuk, tetapi juga mengkritik kategori-kategori sosial yang selama ini dianggap tetap dan universal. Butler (1990) menjelaskan bahwa identitas gender diproduksi melalui praktik performatif yang terus diulang sehingga tampak sebagai sesuatu yang alamiah. Sementara itu, Foucault (1978) menunjukkan bahwa seksualitas diproduksi melalui relasi antara pengetahuan dan kekuasaan yang membentuk kategori normal maupun menyimpang. Dengan demikian, Queer Theory tidak berupaya mencari definisi yang paling tepat mengenai identitas LGBTQA+, tetapi justru mempertanyakan proses sosial yang menghasilkan kategori-kategori tersebut. Pendekatan ini menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan studi gender, seksualitas, dan identitas digital kontemporer (Jagose, 1996; Butler, 1990).

Kajian-kajian mutakhir juga menunjukkan bahwa pengalaman LGBTQA+ semakin kompleks seiring berkembangnya ruang digital. Penelitian Döring, Bhana, dan Albury (2022) menunjukkan bahwa identitas seksual di era digital berkembang melalui hubungan yang dinamis antara pengalaman personal, komunitas daring, representasi media, dan struktur sosial yang lebih luas. Talbot dkk. (2022) memperlihatkan bahwa individu LGBTQ+ secara aktif

mengelola identitasnya di media sosial melalui berbagai strategi representasi, pengungkapan, maupun penyembunyian identitas. Sementara itu, Chan (2023) menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang pembentukan identitas, tetapi juga ruang untuk membangun dukungan sosial, rasa memiliki, dan ketahanan menghadapi stigma. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan identitas tidak lagi berlangsung hanya dalam ruang sosial konvensional, tetapi juga melalui interaksi digital yang semakin memengaruhi kehidupan sehari-hari.

Jika dibandingkan secara keseluruhan, setiap perspektif memiliki kontribusi yang berbeda. Fungsionalisme membantu menjelaskan bagaimana norma sosial dipertahankan melalui institusi. Perspektif konflik menyoroti ketimpangan kekuasaan dan perjuangan memperoleh pengakuan sosial. Interaksionisme simbolik menjelaskan proses pembentukan identitas melalui interaksi sehari-hari. Konstruksionisme sosial menunjukkan bahwa identitas merupakan hasil proses historis dan budaya. Sementara itu, Queer Theory mengkritik asumsi mengenai kategori identitas yang dianggap tetap dan universal. Tidak satu pun perspektif tersebut mampu menjelaskan seluruh kompleksitas pengalaman LGBTQA+ secara mandiri, tetapi masing-masing

memberikan kontribusi analitis yang saling melengkapi.

Atas dasar itu, buku ini tidak mengadopsi satu perspektif secara eksklusif. Analisis dalam buku ini mengintegrasikan konstruksionisme sosial sebagai landasan memahami pembentukan identitas, interaksionisme simbolik untuk menjelaskan negosiasi identitas dalam interaksi sosial, Queer Theory untuk mengkritisi heteronormativitas dan relasi kuasa, serta Digital Sociology untuk memahami transformasi pembentukan identitas dalam ruang digital. Pendekatan multidisipliner tersebut memungkinkan pengalaman LGBTQA+ dipahami sebagai proses sosial yang dinamis, relasional, dan terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat serta teknologi digital.

1.2.5 Konteks Indonesia

Pengalaman LGBTQA+ di Indonesia tidak dapat dipahami hanya melalui konsep-konsep universal mengenai seksualitas dan identitas gender. Sebaliknya, pengalaman tersebut selalu berlangsung dalam konteks sosial yang dibentuk oleh sejarah, agama, budaya, keluarga, negara, serta dinamika media yang saling berinteraksi. Karena itu, identitas LGBTQA+ di Indonesia tidak hanya merupakan pengalaman personal, tetapi juga merupakan posisi sosial yang

terus dinegosiasikan dalam berbagai arena kehidupan masyarakat. Analisis sosiologis tidak berangkat dari pertanyaan apakah identitas tersebut benar atau salah, melainkan bagaimana masyarakat membangun kategori, norma, dan relasi sosial yang menentukan posisi kelompok LGBTQA+ dalam struktur sosial (Boellstorff, 2005; Wijaya, 2020).

Kajian antropologi Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman identitas seksual dan gender bukanlah fenomena baru yang muncul akibat globalisasi ataupun media digital. Berbagai bentuk ekspresi gender nonbiner maupun relasi sesama jenis telah lama ditemukan dalam berbagai komunitas lokal di Nusantara dengan bentuk, istilah, dan makna sosial yang berbeda-beda. Namun, proses modernisasi, pembentukan negara-bangsa, perkembangan institusi keagamaan, serta perubahan politik identitas secara bertahap membentuk kategori LGBTQA+ sebagai identitas sosial yang semakin dikenali sekaligus semakin diperdebatkan dalam ruang publik (Boellstorff, 2005; Wieringa, 2024).

Salah satu faktor yang paling memengaruhi pengalaman sosial LGBTQA+ di Indonesia adalah agama. Dalam masyarakat Indonesia, agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang membentuk norma

mengenai keluarga, perkawinan, relasi gender, dan moralitas publik. Karena norma keagamaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan sosial, pengalaman LGBTQA+ sering kali dinegosiasikan melalui interpretasi keagamaan yang beragam, mulai dari penolakan, pembatasan, hingga berbagai bentuk pendampingan pastoral maupun dialog komunitas. Dengan demikian, hubungan antara agama dan LGBTQA+ tidak dapat dipahami sebagai hubungan yang tunggal, tetapi sebagai arena interpretasi sosial yang terus berkembang (García Rodríguez, 2026).

Selain agama, keluarga memiliki posisi yang sangat penting dalam pembentukan identitas di Indonesia. Berbeda dengan masyarakat yang lebih menekankan individualisme, keluarga di Indonesia masih menjadi institusi utama dalam proses sosialisasi, pembentukan identitas, serta pengambilan keputusan mengenai pendidikan, pekerjaan, perkawinan, dan kehidupan sosial. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengungkapan maupun menyembunyian identitas seksual sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan menjaga keharmonisan keluarga, reputasi sosial, serta kewajiban terhadap orang tua. Dalam konteks ini, identitas LGBTQA+ tidak hanya dinegosiasikan pada tingkat individu, tetapi juga melalui relasi kekeluargaan yang menjadi bagian penting dari

struktur masyarakat Indonesia (Wijaya, 2020; Wieringa, 2024).

Negara juga berperan dalam membentuk posisi sosial kelompok LGBTQA+ melalui regulasi, kebijakan publik, dan praktik birokrasi. Dari perspektif sosiologi politik, negara tidak hanya menghasilkan aturan hukum, tetapi juga membentuk batas-batas mengenai kategori warga negara yang memperoleh pengakuan sosial. Berbagai perdebatan mengenai regulasi penyiaran, pendidikan, moralitas publik, maupun kebijakan daerah menunjukkan bahwa identitas seksual menjadi bagian dari diskursus politik yang lebih luas mengenai kewargaan, ketertiban sosial, dan identitas nasional. Dengan demikian, posisi sosial LGBTQA+ terus dipengaruhi oleh perubahan hubungan antara negara, masyarakat sipil, dan institusi keagamaan.

Media massa dan media digital kemudian memperluas arena berlangsungnya proses tersebut. Jika sebelumnya representasi LGBTQA+ terutama dibentuk melalui institusi formal, kini media sosial memungkinkan individu membangun komunitas, memperluas jejaring sosial, serta memproduksi narasi mengenai identitasnya sendiri. Namun, ruang digital juga menjadi arena berlangsungnya kontestasi yang mempertemukan dukungan, resistensi, stigma, ujaran kebencian, hingga praktik pengawasan berbasis

platform. Akibatnya, media digital tidak hanya meningkatkan visibilitas kelompok LGBTQA+, tetapi juga mempercepat proses negosiasi mengenai batas-batas identitas yang dapat diterima dalam ruang publik (Talbot et al., 2022; Chan, 2023; Wong, 2024).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak dapat dipahami melalui dikotomi sederhana antara menerima atau menolak LGBTQA+. Yang lebih terlihat adalah berlangsungnya proses negosiasi sosial yang melibatkan berbagai aktor, termasuk keluarga, organisasi keagamaan, media, komunitas sipil, negara, dan platform digital. Masing-masing aktor memiliki kapasitas untuk membentuk definisi mengenai identitas seksual, menetapkan batas-batas penerimaan sosial, maupun menghasilkan ruang-ruang baru bagi pengakuan identitas. Oleh karena itu, pengalaman LGBTQA+ di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai proses sosial yang terus berubah mengikuti dinamika hubungan antara struktur sosial, perubahan budaya, dan perkembangan teknologi digital.

Atas dasar itu, buku ini tidak memposisikan LGBTQA+ sebagai kategori yang berdiri di luar masyarakat Indonesia maupun sebagai fenomena yang sepenuhnya ditentukan oleh pengaruh global. Sebaliknya, identitas LGBTQA+ dipahami sebagai

bagian dari dinamika masyarakat Indonesia yang terus dinegosiasikan melalui interaksi antara agama, budaya, keluarga, negara, media, dan teknologi digital. Perspektif tersebut menjadi landasan untuk memahami mengapa ruang digital kemudian berkembang menjadi arena baru pembentukan identitas, representasi, dan pengakuan sosial yang dibahas pada bab-bab berikutnya.

1.2.6 Transisi Menuju Negosiasi Identitas Digital

Perkembangan media digital telah mengubah secara mendasar cara individu membangun, menampilkan, dan mempertahankan identitas sosialnya. Jika pada masyarakat sebelumnya pembentukan identitas lebih banyak berlangsung melalui interaksi tatap muka dalam keluarga, sekolah, komunitas, maupun lingkungan kerja, kini media digital menghadirkan ruang sosial baru yang memungkinkan identitas dibentuk melalui jaringan komunikasi yang lebih luas, berkelanjutan, dan tidak lagi dibatasi oleh kedekatan geografis. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa identitas tidak lagi semata-mata diproduksi melalui relasi sosial konvensional, tetapi juga melalui interaksi yang berlangsung dalam ekosistem platform digital (Talbot et al., 2022).

Berbeda dengan media massa konvensional yang cenderung bersifat satu arah, media sosial memberikan kesempatan kepada setiap pengguna untuk secara aktif memproduksi, mengedit, dan mendistribusikan representasi dirinya sendiri. Identitas tidak lagi dibentuk terutama oleh institusi sosial, tetapi juga melalui proses komunikasi yang melibatkan produksi konten, respons audiens, algoritma platform, dan jejaring digital. Dalam konteks tersebut, individu menjadi aktor yang secara terus-menerus menegosiasikan bagaimana dirinya ingin dipersepsikan, kepada siapa identitas tersebut ditampilkan, serta batas-batas informasi yang ingin dibagikan kepada publik (Talbot et al., 2022).

Bagi kelompok LGBTQA+, perubahan tersebut memiliki arti yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar bertambahnya media komunikasi. Ruang digital memungkinkan individu membangun komunitas yang sebelumnya sulit dijangkau dalam kehidupan luring, memperoleh dukungan sosial dari kelompok sebaya, berbagi pengalaman hidup, sekaligus mengembangkan berbagai strategi dalam mengelola visibilitas identitasnya. Berger dkk. (2022) menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam memperkuat rasa memiliki (*sense of belonging*), meningkatkan akses terhadap informasi kesehatan, serta menyediakan ruang afirmasi identitas bagi

kelompok LGBTQ+, terutama pada masyarakat yang masih menghadapi stigma sosial.

Namun, media digital juga menghadirkan tantangan baru. Identitas yang semakin terlihat di ruang digital membuka peluang terjadinya pengawasan, perundungan siber, ujaran kebencian, *doxxing*, maupun penyebaran stigma secara lebih luas. Chan (2023) menunjukkan bahwa media sosial memiliki karakter yang paradoksal. Di satu sisi, platform digital memperluas kesempatan bagi kelompok minoritas seksual untuk membangun jejaring sosial dan memperoleh dukungan psikososial. Di sisi lain, ruang yang sama juga meningkatkan paparan terhadap diskriminasi digital, tekanan psikologis, dan kekerasan berbasis identitas. Dengan demikian, ruang digital tidak dapat dipahami hanya sebagai ruang emansipasi, tetapi juga sebagai arena kontestasi berbagai bentuk relasi kuasa yang terus berubah.

Kondisi tersebut menyebabkan pembentukan identitas tidak lagi dapat dipahami sebagai proses yang bersifat linear. Individu tidak hanya memutuskan apakah akan mengungkapkan identitasnya, tetapi juga secara terus-menerus mempertimbangkan kapan identitas tersebut ditampilkan, kepada siapa identitas tersebut diperlihatkan, serta bagaimana identitas tersebut direpresentasikan melalui berbagai fitur

platform digital. Penelitian Ong (2025) menunjukkan bahwa identitas digital berkembang melalui proses negosiasi yang berlangsung secara situasional, ketika individu menyesuaikan representasi dirinya dengan karakteristik audiens, budaya platform, tingkat keamanan, serta tujuan komunikasi yang ingin dicapai. Dengan demikian, identitas digital merupakan hasil interaksi yang dinamis antara pilihan personal, norma sosial, dan infrastruktur teknologi.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa konsep identitas dalam masyarakat digital tidak lagi cukup dipahami melalui kategori-kategori sosial yang bersifat tetap. Identitas berkembang sebagai proses yang terus bergerak mengikuti perubahan relasi sosial, perkembangan teknologi, serta dinamika komunikasi digital. Batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi semakin kabur karena setiap tindakan komunikasi berpotensi menjangkau audiens yang jauh lebih luas dan bertahan lebih lama dibandingkan interaksi tatap muka. Oleh karena itu, pengalaman LGBTQA+ di era digital semakin ditentukan oleh kemampuan individu dalam mengelola representasi diri, membangun jejaring sosial, serta menegosiasikan identitasnya dalam berbagai konteks komunikasi digital (Talbot et al., 2022; Chan, 2023).

Atas dasar itu, buku ini memandang media digital bukan sekadar saluran komunikasi baru, melainkan ruang sosial yang secara aktif mengubah mekanisme pembentukan identitas. Identitas LGBTQA+ tidak lagi dibangun hanya melalui pengalaman hidup dalam keluarga, sekolah, atau komunitas lokal, tetapi juga melalui interaksi dengan algoritma, platform, komunitas virtual, serta berbagai bentuk komunikasi digital yang berlangsung secara simultan. Perspektif tersebut menjadi landasan bagi pembahasan pada bab berikutnya yang menjelaskan bagaimana ruang digital berkembang menjadi arena utama negosiasi identitas sosial di masyarakat kontemporer.

1.3 Beyond the Closet, coming out, dan identitas sosial

Konsep *closet* merupakan salah satu gagasan paling berpengaruh dalam perkembangan kajian queer dan sosiologi seksualitas. Dalam pengertian yang paling umum, *closet* merujuk pada situasi ketika individu menyembunyikan orientasi seksual atau identitas gendernya dari lingkungan sosial karena adanya risiko penolakan, diskriminasi, maupun kekerasan simbolik dan sosial. Namun, dalam perspektif sosiologi, *closet* tidak dipahami semata-mata sebagai pilihan individual untuk merahasiakan identitas. *Closet* merupakan konstruksi sosial yang lahir dari norma

heteronormatif, relasi kuasa, dan mekanisme pengendalian sosial yang menentukan identitas mana yang dapat diterima serta identitas mana yang diposisikan sebagai menyimpang (Weeks, 2018; Foucault, 1978).

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa *closet* merupakan produk hubungan sosial, bukan sekadar kondisi psikologis seseorang. Individu tidak memasuki *closet* karena identitasnya sendiri, melainkan karena lingkungan sosial menciptakan batas-batas yang membatasi kemungkinan individu mengekspresikan identitasnya secara terbuka. Norma keluarga, ajaran agama, budaya lokal, sistem pendidikan, media, hingga regulasi negara membentuk ekspektasi mengenai seksualitas yang dianggap sah. Dalam konteks demikian, penyembunyian identitas menjadi salah satu strategi sosial untuk mengurangi risiko stigma, pelabelan, maupun eksklusi sosial (Berger & Luckmann, 1966; Goffman, 1963).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, berkembang konsep *coming out* yang secara historis dipahami sebagai proses mengungkapkan identitas seksual atau identitas gender kepada orang lain. Dalam literatur awal mengenai homoseksualitas, *coming out* sering dipandang sebagai tahapan penting menuju penerimaan diri dan pembentukan identitas yang lebih autentik. Namun, perkembangan kajian sosiologi dan queer studies menunjukkan bahwa *coming out* bukanlah satu peristiwa tunggal,

melainkan proses sosial yang berlangsung berulang kali sepanjang kehidupan seseorang. Individu dapat membuka identitasnya kepada teman, tetapi tidak kepada keluarga, terbuka di lingkungan komunitas, tetapi tetap menyembunyikannya di tempat kerja, atau menampilkan identitas tertentu di ruang digital tanpa mengungkapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, *coming out* merupakan praktik sosial yang selalu bergantung pada konteks relasi sosial yang dihadapi individu (Weeks, 2018; Butler, 1990).

Pandangan tersebut kemudian melahirkan kritik terhadap pemahaman *coming out* yang terlalu linear. Dalam berbagai masyarakat, termasuk Indonesia, keterbukaan identitas tidak selalu menjadi tujuan yang dapat dicapai oleh setiap individu. Harapan bahwa seluruh individu LGBTQA+ seharusnya melakukan *coming out* mengabaikan kenyataan bahwa setiap masyarakat memiliki konfigurasi budaya, agama, politik, dan keluarga yang berbeda. Dalam situasi tertentu, mempertahankan sebagian identitas dalam ruang privat justru menjadi bentuk rasional dalam menghadapi risiko sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, pengalaman identitas LGBTQA+ tidak dapat direduksi menjadi dikotomi sederhana antara "berada di dalam closet" atau "telah keluar dari closet".

Perspektif inilah yang menjadi dasar penggunaan konsep *Beyond the Closet* dalam buku ini. Frasa *Beyond the Closet* tidak digunakan untuk menggambarkan

keadaan setelah seseorang melakukan *coming out*, melainkan untuk menjelaskan bahwa identitas selalu berada dalam proses negosiasi yang berkelanjutan. Setelah identitas diungkapkan sekalipun, individu tetap harus berhadapan dengan proses penerimaan, penolakan, penyesuaian diri, pengelolaan kesan, serta perubahan strategi representasi sesuai dengan lingkungan sosial yang dihadapi. Dengan demikian, pengalaman identitas tidak berhenti pada tindakan mengungkapkan identitas, tetapi terus berkembang melalui interaksi sosial yang dinamis.

Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Goffman (1959) mengenai presentasi diri sebagai proses pengelolaan kesan dalam berbagai situasi sosial. Individu secara aktif mempertimbangkan siapa audiensnya, informasi apa yang ingin ditampilkan, dan identitas mana yang perlu disembunyikan atau diperlihatkan. Butler (1990) juga menegaskan bahwa identitas tidak pernah selesai dibentuk karena selalu diproduksi melalui praktik sosial yang terus diulang. Kedua perspektif tersebut memperlihatkan bahwa identitas LGBTQA+ bukanlah kategori yang statis, melainkan hasil dari proses sosial yang terus berlangsung dalam hubungan dengan norma, kekuasaan, dan interaksi sehari-hari.

Perkembangan media digital semakin memperluas dinamika tersebut. Ruang digital memungkinkan individu mengelola identitas dengan tingkat fleksibilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan ruang sosial konvensional. Media sosial menyediakan

berbagai pilihan untuk mengatur visibilitas identitas melalui penggunaan akun anonim, pengelompokan audiens, simbol visual, bahasa, maupun bentuk representasi lainnya. Penelitian Talbot dkk. (2022) menunjukkan bahwa individu LGBTQ+ secara aktif mengembangkan strategi pengelolaan identitas di media sosial dengan mempertimbangkan keamanan, penerimaan sosial, dan kebutuhan untuk membangun komunitas. Chan (2023) juga menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang penting bagi individu minoritas seksual untuk memperoleh dukungan sosial sekaligus menghadapi berbagai bentuk risiko digital.

Dalam konteks tersebut, *Beyond the Closet* memperoleh makna yang lebih luas dibandingkan sekadar *coming out*. Individu tidak hanya menentukan apakah identitasnya akan diungkapkan, tetapi juga bagaimana identitas tersebut direpresentasikan, kepada siapa identitas ditampilkan, kapan identitas dinegosiasikan, dan dalam kondisi sosial seperti apa strategi tersebut digunakan. Negosiasi tersebut berlangsung secara simultan dalam keluarga, komunitas, institusi pendidikan, dunia kerja, maupun ruang digital. Oleh karena itu, *Beyond the Closet* dipahami sebagai proses sosial yang terus bergerak, bukan sebagai tahapan akhir dalam perjalanan identitas.

Dalam konteks Indonesia, pemahaman ini menjadi semakin penting karena proses pembentukan identitas berlangsung dalam masyarakat yang

ditandai oleh kuatnya pengaruh agama, budaya, nilai kekeluargaan, serta norma heteronormatif. Kondisi tersebut menghasilkan pengalaman identitas yang lebih kompleks daripada sekadar pilihan untuk membuka atau menyembunyikan identitas. Banyak individu mengembangkan berbagai strategi negosiasi yang berbeda sesuai dengan ruang sosial yang mereka hadapi. Ada yang memilih membangun komunitas secara terbatas, ada yang menampilkan identitas tertentu hanya di ruang digital, dan ada pula yang mengubah bentuk representasi dirinya sesuai dengan audiens yang berinteraksi dengannya. Dengan demikian, negosiasi identitas menjadi proses yang terus berlangsung sepanjang kehidupan sosial.

Atas dasar itu, buku ini menggunakan konsep *Beyond the Closet* sebagai kerangka analitis untuk memahami pembentukan identitas digital LGBTQA+ di Indonesia. Fokus pembahasan tidak diarahkan pada pertanyaan apakah seseorang telah melakukan *coming out*, melainkan pada bagaimana identitas dibentuk, dipresentasikan, dinegosiasikan, dipertahankan, maupun diubah melalui interaksi antara individu, struktur sosial, dan media digital. Perspektif tersebut menjadi landasan bagi pembahasan mengenai ruang digital sebagai arena baru negosiasi identitas pada subbab berikutnya.

1.4 Ruang digital sebagai ruang sosial baru

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, membangun relasi, serta memproduksi berbagai bentuk kehidupan sosial. Internet dan media sosial tidak lagi dipahami hanya sebagai perangkat komunikasi, melainkan sebagai ruang sosial yang memiliki norma, struktur, pola interaksi, serta relasi kuasa yang khas. Dalam perspektif sosiologi digital, ruang digital merupakan arena tempat individu membangun identitas, membentuk komunitas, memproduksi pengetahuan, serta menegosiasikan berbagai nilai yang berkembang dalam masyarakat (Castells, 2010; Lupton, 2015).

Manuel Castells menjelaskan bahwa masyarakat kontemporer berkembang menuju *network society*, yaitu masyarakat yang hubungan-hubungan sosialnya semakin dibangun melalui jaringan informasi digital. Dalam masyarakat jaringan, ruang sosial tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kedekatan geografis, tetapi dibentuk melalui keterhubungan antarpengguna yang melampaui batas wilayah, negara, maupun budaya (Castells, 2010). Perubahan tersebut memungkinkan individu membangun komunitas berdasarkan kesamaan pengalaman, nilai, maupun identitas tanpa harus berada dalam ruang fisik yang sama.

Perubahan tersebut juga menggeser cara memahami konsep ruang sosial. Jika sebelumnya ruang sosial identik dengan lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun komunitas lokal, kini media digital menghadirkan ruang interaksi yang bersifat hibrida. Interaksi sosial berlangsung secara simultan antara ruang luring dan ruang daring sehingga batas keduanya menjadi semakin kabur. Nancy Baym (2015) menunjukkan bahwa hubungan sosial di era digital tidak menggantikan hubungan tatap muka, tetapi saling melengkapi dan membentuk pola komunikasi baru yang lebih fleksibel, berkelanjutan, dan lintas ruang.

Ruang digital juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan ruang sosial konvensional. danah boyd (2014) menjelaskan bahwa media sosial memiliki empat karakter utama, yaitu persistensi, replikabilitas, skalabilitas, dan kemudahan pencarian (*searchability*). Karakteristik tersebut menyebabkan setiap bentuk komunikasi digital berpotensi bertahan dalam waktu yang lama, mudah disebarluaskan, serta dapat diakses oleh audiens yang jauh lebih luas daripada yang dibayangkan oleh pembuat konten. Kondisi tersebut mengubah cara individu mempertimbangkan representasi diri, privasi, maupun strategi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Selain menjadi ruang interaksi, platform digital juga merupakan infrastruktur sosial yang memiliki logika dan mekanisme tersendiri. Van Dijck, Poell, dan de Waal (2018) menjelaskan bahwa platform digital tidak bersifat netral karena bekerja melalui algoritma, pengumpulan data, serta sistem kurasi yang menentukan visibilitas suatu konten. Dengan demikian, interaksi sosial di media digital tidak hanya dipengaruhi oleh tindakan pengguna, tetapi juga oleh desain teknologi dan tata kelola platform yang membentuk peluang maupun keterbatasan dalam berkomunikasi.

Perkembangan kajian digital menunjukkan bahwa algoritma semakin berperan dalam membentuk pengalaman sosial pengguna. Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa algoritma memengaruhi distribusi informasi, pembentukan jejaring sosial, hingga peluang individu memperoleh pengakuan publik. Akibatnya, ruang digital menjadi arena tempat berbagai identitas memperoleh visibilitas sekaligus menghadapi bentuk-bentuk eksklusif baru yang dihasilkan melalui mekanisme platform digital (Bucher, 2018; Gillespie, 2020).

Dalam konteks identitas, media sosial menyediakan ruang yang memungkinkan individu mengembangkan berbagai bentuk representasi diri yang tidak selalu

dapat dilakukan dalam kehidupan luring. Profil digital, foto, video, narasi personal, simbol visual, serta interaksi antarpengguna menjadi sumber pembentukan identitas yang terus berkembang melalui komunikasi sehari-hari. Penelitian Talbot dkk. (2022) menunjukkan bahwa individu LGBTQ+ memanfaatkan media sosial untuk mengelola visibilitas identitas sesuai dengan tingkat keamanan, dukungan sosial, dan karakteristik audiens yang mereka hadapi. Temuan serupa disampaikan oleh Chan (2023), yang menunjukkan bahwa ruang digital menjadi sarana penting bagi kelompok minoritas seksual dalam membangun rasa memiliki, memperoleh dukungan komunitas, serta mengembangkan strategi menghadapi stigma sosial.

Meskipun demikian, ruang digital tidak dapat dipandang sebagai ruang yang sepenuhnya bebas. Platform digital juga menjadi lokasi berlangsungnya pengawasan, ujaran kebencian, diskriminasi, pelabelan, dan praktik eksklusi yang memengaruhi pengalaman pengguna. Penelitian Fisher, Tao, dan Ford (2024) memperlihatkan bahwa media sosial memiliki karakter ganda (*double-edged space*), yaitu mampu memperluas kesempatan bagi kelompok LGBTQ+ untuk membangun komunitas sekaligus meningkatkan risiko paparan terhadap kekerasan verbal, pelecehan digital, dan tekanan psikososial.

Dengan demikian, ruang digital merupakan arena yang selalu mempertemukan peluang pemberdayaan dengan mekanisme kontrol sosial yang terus berkembang.

Dalam perspektif sosiologi, perubahan tersebut menunjukkan bahwa ruang digital bukan sekadar lokasi baru berlangsungnya interaksi, melainkan ruang sosial yang memiliki struktur, norma, relasi kuasa, dan mekanisme pengakuannya sendiri. Identitas tidak lagi dinegosiasikan hanya melalui hubungan tatap muka, tetapi juga melalui algoritma, platform, komunitas virtual, serta berbagai bentuk komunikasi digital yang berlangsung secara terus-menerus. Pemahaman inilah yang menjadi landasan untuk menjelaskan bagaimana media sosial kemudian berkembang menjadi arena utama negosiasi identitas digital LGBTQA+ pada pembahasan berikutnya.

1.5 Media sosial dan transformasi pembentukan identitas

Media sosial telah mengubah secara fundamental cara individu membangun, menampilkan, dan menegosiasikan identitas dalam kehidupan sosial. Berbeda dengan media massa konvensional yang menempatkan masyarakat sebagai penerima informasi, media sosial memungkinkan setiap

pengguna menjadi produsen sekaligus penyebar konten. Perubahan tersebut menggeser proses pembentukan identitas dari sesuatu yang sebelumnya lebih banyak dipengaruhi oleh institusi sosial menuju proses yang berlangsung secara interaktif melalui komunikasi digital, partisipasi pengguna, dan jaringan sosial daring (Van Dijck, Poell, & de Waal, 2018; Couldry & Hepp, 2017).

Dalam masyarakat digital, identitas tidak lagi dipahami sebagai karakteristik yang bersifat tetap, melainkan sebagai praktik sosial yang terus diproduksi melalui berbagai bentuk komunikasi digital. Setiap unggahan, komentar, foto, video, simbol visual, maupun interaksi antarpengguna menjadi bagian dari proses pembentukan identitas yang berlangsung secara berkelanjutan. Lupton (2015) menjelaskan bahwa media digital menghasilkan bentuk *digital self* yang memperlihatkan bagaimana identitas berkembang melalui hubungan antara pengalaman personal, teknologi, data, dan jaringan sosial. Dengan demikian, identitas digital merupakan hasil interaksi antara individu dan infrastruktur digital yang memfasilitasi sekaligus membatasi berbagai bentuk ekspresi diri.

Transformasi tersebut juga mengubah mekanisme pengakuan sosial. Pada masyarakat sebelumnya, pengakuan identitas lebih banyak diperoleh melalui keluarga, komunitas lokal, institusi pendidikan, maupun lingkungan kerja. Kini media sosial memungkinkan individu memperoleh pengakuan dari

komunitas yang jauh lebih luas melalui mekanisme *likes*, komentar, *sharing*, pengikut (*followers*), serta berbagai bentuk interaksi digital lainnya. Pengakuan tersebut tidak hanya membentuk rasa memiliki terhadap suatu komunitas, tetapi juga memengaruhi bagaimana individu membangun citra diri dan mengembangkan identitas sosialnya (Papacharissi, 2015; Baym, 2015).

Namun, transformasi tersebut tidak berlangsung secara netral. Platform media sosial bekerja melalui algoritma yang menentukan konten mana yang lebih mudah terlihat, dibagikan, atau direkomendasikan kepada pengguna lain. Van Dijck, Poell, dan de Waal (2018) menunjukkan bahwa platform digital membentuk logika sosial baru melalui mekanisme kurasi algoritmik, komersialisasi data, dan tata kelola platform. Akibatnya, visibilitas identitas tidak hanya dipengaruhi oleh pilihan individu, tetapi juga oleh sistem teknologi yang menentukan peluang suatu representasi memperoleh perhatian publik. Oleh karena itu, pembentukan identitas digital selalu berlangsung dalam hubungan antara tindakan pengguna dan logika platform digital.

Bagi kelompok LGBTQA+, media sosial menghadirkan ruang yang secara bersamaan membuka peluang sekaligus menghasilkan tantangan baru. Talbot dkk. (2022) menunjukkan bahwa media sosial memungkinkan individu LGBTQ+ mengembangkan strategi yang beragam dalam mengelola identitas, mulai dari penggunaan akun anonim, pembatasan

audiens, pengungkapan identitas secara bertahap, hingga pembentukan komunitas digital yang memberikan rasa aman. Strategi tersebut menunjukkan bahwa identitas digital bukan sekadar representasi diri, tetapi merupakan hasil pertimbangan terhadap keamanan, penerimaan sosial, dan risiko yang dihadapi dalam setiap konteks komunikasi.

Berbagai penelitian mutakhir juga menunjukkan bahwa media sosial memiliki kontribusi penting terhadap pembentukan identitas kolektif kelompok LGBTQ+. Berger dkk. (2022) menemukan bahwa platform digital memperluas akses terhadap dukungan sosial, informasi kesehatan, serta komunitas sebaya yang berkontribusi terhadap penguatan identitas dan kesejahteraan psikososial. Chan (2023) menambahkan bahwa media sosial meningkatkan *sense of belonging* sekaligus memperkuat kemampuan individu menghadapi stigma sosial melalui dukungan komunitas digital. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi ruang komunikasi, tetapi juga ruang produksi modal sosial dan identitas kolektif.

Meskipun demikian, ruang digital juga menjadi arena berlangsungnya berbagai bentuk eksklusi sosial baru. Fisher, Tao, dan Ford (2024) menunjukkan bahwa media sosial merupakan *double-edged space* karena memperluas peluang memperoleh pengakuan sosial sekaligus meningkatkan paparan terhadap ujaran kebencian, *cyberbullying*, diskriminasi digital, dan

tekanan psikososial. Identitas yang memperoleh visibilitas lebih tinggi juga menghadapi risiko pengawasan, pelaporan akun, penyalahgunaan data pribadi, hingga kekerasan berbasis identitas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa transformasi identitas digital selalu berlangsung dalam hubungan yang dinamis antara peluang pemberdayaan dan mekanisme kontrol sosial.

Dalam konteks Indonesia, media sosial juga menjadi arena tempat berbagai wacana mengenai seksualitas, agama, moralitas, dan kewargaan dipertemukan secara terbuka. Individu LGBTQA+ tidak hanya menggunakan media sosial untuk membangun komunitas, tetapi juga untuk merundingkan posisi sosialnya di tengah masyarakat yang memiliki konfigurasi budaya dan keagamaan yang beragam. Akibatnya, identitas digital berkembang melalui proses komunikasi yang melibatkan individu, komunitas, audiens, algoritma platform, media, serta berbagai institusi sosial yang memberikan makna terhadap representasi identitas tersebut.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah mentransformasi mekanisme pembentukan identitas dari proses yang sebelumnya lebih bersifat lokal menjadi proses yang berlangsung secara jaringan (*networked*), partisipatif, dan terus-menerus. Identitas tidak lagi dipahami sebagai atribut yang dimiliki seseorang, tetapi sebagai hasil negosiasi sosial yang berkembang melalui interaksi digital. Perspektif inilah yang menjadi dasar pembahasan pada bab

berikutnya mengenai ruang digital sebagai arena utama negosiasi identitas LGBTQA+ di Indonesia.

Dengan demikian, istilah negosiasi identitas digital dalam buku ini tidak dipahami sebagai perubahan identitas yang terjadi secara bebas ataupun sebagai proses individu memilih identitas tertentu sesuai dengan preferensinya. Negosiasi identitas digital dipahami sebagai proses sosial yang berlangsung ketika individu secara terus-menerus menyesuaikan, mempertahankan, menyembunyikan, mengungkapkan, maupun merepresentasikan identitasnya sebagai respons terhadap norma sosial, relasi kuasa, karakteristik audiens, budaya platform, serta berbagai peluang dan risiko yang muncul dalam ruang digital. Dengan kata lain, identitas digital bukan merupakan keadaan yang telah selesai terbentuk, melainkan hasil interaksi yang dinamis antara pengalaman personal, struktur sosial, teknologi digital, dan praktik komunikasi yang berlangsung secara berkelanjutan.

Berdasarkan perspektif tersebut, buku ini memandang negosiasi identitas digital sebagai proses yang melibatkan sedikitnya tujuh dimensi yang saling berhubungan, yaitu stigma sosial, identitas yang disembunyikan, representasi digital, resistensi kolektif, negosiasi identitas, pengakuan sosial, dan

transformasi norma sosial. Ketujuh dimensi tersebut tidak membentuk tahapan yang bersifat linear, tetapi saling memengaruhi melalui hubungan timbal balik yang terus berubah sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan teknologi. Kerangka konseptual inilah yang menjadi landasan analitis bagi seluruh pembahasan dalam buku ini sekaligus mengarahkan pembaca menuju analisis mengenai ruang digital sebagai arena utama negosiasi identitas LGBTQA+ pada bab-bab berikutnya.

BAB II MEMBACA NEGOSIASI IDENTITAS DIGITAL: Perspektif Sosiologi, Gender, dan Queer Studies

2.1 Michel Foucault. Kuasa, seksualitas, dan disiplin sosial

Kajian mengenai negosiasi identitas digital LGBTQA+ tidak dapat dilepaskan dari cara masyarakat membentuk pengetahuan tentang seksualitas, menentukan batas-batas normalitas, serta mengatur identitas yang dianggap dapat diterima dalam ruang sosial. Seksualitas tidak pernah sekadar berkaitan dengan orientasi seksual atau pengalaman personal, tetapi selalu berhubungan dengan relasi kuasa yang menghasilkan berbagai kategori mengenai identitas, moralitas, dan penyimpangan. Perspektif Michel Foucault memberikan landasan penting untuk memahami bahwa identitas seksual berkembang melalui proses historis dan sosial yang terus diproduksi, dipertahankan, serta diperdebatkan dalam kehidupan masyarakat.

Kontribusi utama Foucault terletak pada perubahan cara memahami kekuasaan. Berbeda dengan

pandangan yang menempatkan kekuasaan sebagai sesuatu yang dimiliki negara, lembaga, atau individu tertentu, Foucault menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja melalui jaringan relasi sosial yang tersebar dalam berbagai institusi, praktik, dan wacana. Kuasa menghasilkan pengetahuan, membentuk cara individu memahami dirinya sendiri, serta menentukan kategori mengenai identitas yang dianggap normal maupun menyimpang (Foucault, 1978). Dengan perspektif tersebut, seksualitas dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang terus diproduksi melalui mekanisme pengaturan, klasifikasi, dan normalisasi.

Pendekatan ini menjadi sangat relevan untuk menjelaskan dinamika identitas LGBTQA+ di era media sosial. Ruang digital memang membuka peluang yang lebih luas bagi individu untuk menampilkan identitas dan membangun komunitas, tetapi pada saat yang sama menghadirkan bentuk-bentuk pengawasan, pengendalian, dan evaluasi sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Negosiasi identitas digital karena itu tidak berlangsung dalam ruang yang netral, melainkan di tengah relasi kuasa yang bekerja melalui norma sosial, tata kelola platform, algoritma, serta interaksi antarpengguna. Atas dasar pemikiran tersebut, pembahasan diawali dengan menjelaskan pergeseran konsep kekuasaan menurut Michel Foucault sebagai fondasi untuk memahami

hubungan antara kuasa, seksualitas, dan disiplin sosial dalam masyarakat digital.

2.1.1 Pergeseran Konsep Kekuasaan

Selama bertahun-tahun, kekuasaan dipahami sebagai kemampuan seseorang, kelompok, atau negara untuk mengendalikan tindakan orang lain melalui otoritas formal, hukum, maupun penggunaan sanksi. Pandangan ini menempatkan kekuasaan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh aktor tertentu dan dijalankan secara vertikal dari pihak yang berkuasa kepada pihak yang dikuasai. Perspektif tersebut mendominasi berbagai teori politik klasik yang memandang negara sebagai pusat utama pengendalian kehidupan sosial. Namun, Michel Foucault menawarkan pembacaan yang berbeda dengan menunjukkan bahwa kekuasaan tidak pernah hanya berada di tangan institusi formal, melainkan tersebar dalam berbagai relasi sosial yang membentuk kehidupan sehari-hari. Kekuasaan bukan sekadar instrumen represi, tetapi juga mekanisme produktif yang menghasilkan pengetahuan, norma, kategori sosial, bahkan identitas individu.

Menurut Foucault, kekuasaan tidak bekerja terutama melalui larangan atau kekerasan, melainkan melalui praktik-praktik yang membimbing individu untuk

mengatur dirinya sendiri sesuai dengan norma yang dianggap benar. Dengan demikian, individu tidak hanya menjadi objek kekuasaan, tetapi sekaligus menjadi pelaku yang mereproduksi norma tersebut melalui tindakan, pilihan, dan cara memahami dirinya. Relasi kuasa selalu hadir dalam berbagai institusi sosial, termasuk keluarga, sekolah, agama, layanan kesehatan, media massa, hingga ruang digital. Oleh karena itu, kekuasaan tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang dimiliki oleh satu aktor, tetapi sebagai jaringan relasi yang terus bergerak dan diproduksi melalui interaksi sosial.

Perubahan cara memahami kekuasaan tersebut memiliki implikasi besar terhadap studi mengenai seksualitas dan identitas. Foucault menolak anggapan bahwa seksualitas hanya ditekan atau dibungkam oleh masyarakat modern. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa masyarakat justru terus menghasilkan berbagai diskursus mengenai seksualitas melalui ilmu pengetahuan, hukum, agama, pendidikan, psikologi, dan praktik-praktik pengakuan diri. Melalui proses tersebut, masyarakat membangun kategori-kategori mengenai identitas seksual yang kemudian dianggap sebagai kebenaran sosial. Dengan kata lain, identitas seksual tidak lahir secara alamiah sebagai fakta biologis semata, tetapi diproduksi melalui relasi antara pengetahuan, norma, dan kekuasaan.

Perkembangan masyarakat digital memperluas cara kerja relasi kuasa yang dijelaskan Foucault. Media sosial tidak sekadar menyediakan ruang komunikasi, tetapi menjadi arena tempat norma sosial diproduksi, disebarluaskan, dipertahankan, sekaligus diperdebatkan melalui algoritma platform, moderasi konten, interaksi antarpengguna, serta praktik representasi diri. Dalam konteks ini, identitas digital terbentuk melalui proses negosiasi yang berlangsung terus-menerus antara ekspresi individual, ekspektasi sosial, dan mekanisme pengaturan platform digital. Berbagai kajian kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan Foucauldian tetap relevan untuk menjelaskan bagaimana relasi kuasa bekerja dalam masyarakat digital melalui pengawasan, visibilitas, produksi pengetahuan, dan pembentukan identitas di ruang daring.

Negosiasi identitas digital LGBTQA+ tidak berlangsung dalam ruang yang netral ataupun bebas dari relasi kuasa. Setiap bentuk representasi selalu berhadapan dengan norma heteronormatif, tata kelola platform digital, pengawasan publik, serta beragam respons yang berkisar dari penerimaan hingga penolakan. Dalam kondisi tersebut, identitas digital tidak pernah menjadi produk ekspresi individual semata, melainkan terbentuk melalui proses produksi makna,

pengaturan, resistensi, dan negosiasi yang berlangsung secara simultan di dalam ruang digital.

2.1.2 Seksualitas sebagai Produksi Sosial

Pemikiran Michel Foucault mengubah cara memahami seksualitas dalam ilmu sosial. Jika pendekatan esensialis memandang seksualitas sebagai fakta biologis yang bersifat alamiah dan melekat pada individu, Foucault justru menunjukkan bahwa seksualitas merupakan hasil konstruksi historis yang diproduksi melalui hubungan antara pengetahuan, kekuasaan, dan praktik-praktik sosial. Dengan demikian, seksualitas bukan sekadar ekspresi hasrat personal, melainkan objek yang terus dibentuk, diklasifikasikan, diatur, dan diberi makna melalui berbagai diskursus yang berkembang dalam masyarakat (Foucault, 1978; Taylor, 2018).

Menurut Foucault (1978), masyarakat modern tidak membungkam pembicaraan mengenai seksualitas sebagaimana diasumsikan oleh hipotesis represif (*repressive hypothesis*). Sebaliknya, sejak abad kedelapan belas justru terjadi ledakan produksi diskursus mengenai seksualitas melalui institusi kedokteran, pendidikan, psikologi, hukum, agama, dan administrasi negara. Berbagai institusi tersebut secara terus-menerus menghasilkan definisi mengenai perilaku seksual yang dianggap normal, menyimpang,

sehat, berisiko, maupun bermoral. Dalam perspektif ini, seksualitas dipahami sebagai hasil produksi sosial yang muncul melalui praktik-praktik klasifikasi, observasi, pengakuan, dan normalisasi, bukan sebagai realitas biologis yang berdiri sendiri.

Produksi seksualitas tersebut berlangsung melalui relasi kuasa yang bekerja secara produktif. Kekuasaan tidak hanya membatasi perilaku seksual, tetapi sekaligus menghasilkan kategori-kategori identitas yang kemudian diterima sebagai kebenaran sosial. Foucault (1978) menunjukkan bahwa istilah homoseksual, heteroseksual, penyimpangan seksual, maupun identitas seksual lainnya bukan sekadar penamaan terhadap kondisi biologis tertentu, melainkan bagian dari proses pembentukan subjek melalui diskursus ilmiah dan moral. Dengan demikian, identitas seksual lahir melalui proses historis ketika individu mulai memahami dirinya berdasarkan kategori-kategori yang diproduksi oleh masyarakat. Proses tersebut memperlihatkan bahwa pengetahuan mengenai seksualitas selalu beroperasi bersamaan dengan mekanisme kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial.

Pandangan tersebut kemudian berkembang dalam karya-karya Foucault selanjutnya melalui konsep pembentukan subjek (*subjectivation*). Dalam *The Use*

of Pleasure dan *The Care of the Self*, Foucault (1985, 1986) menjelaskan bahwa individu tidak sepenuhnya menjadi objek pasif dari relasi kuasa. Individu juga secara aktif membentuk dirinya melalui praktik refleksi, pengendalian diri, dan pengelolaan identitas dalam konteks norma sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, identitas seksual selalu berada dalam proses yang dinamis antara regulasi sosial dan agensi individu. Perspektif ini memberikan dasar penting untuk memahami bahwa identitas bukanlah kondisi yang tetap, tetapi proses yang terus diproduksi melalui interaksi sosial.

Perkembangan masyarakat digital memperluas ruang tempat berlangsungnya produksi seksualitas tersebut. Jika pada masa Foucault institusi seperti sekolah, rumah sakit, keluarga, dan negara menjadi arena utama pembentukan norma seksual, maka dalam masyarakat platform fungsi tersebut semakin dijalankan oleh media sosial melalui mekanisme algoritma, moderasi konten, tata kelola platform, dan sistem rekomendasi digital. Berbagai penelitian kontemporer menunjukkan bahwa platform digital tidak sekadar memfasilitasi komunikasi, tetapi turut menentukan bentuk representasi yang memperoleh visibilitas, legitimasi, maupun pembatasan dalam ruang publik digital (Gorwa, Binns, & Katzenbach, 2020; Duguay, 2024). Dalam konteks ini, algoritma

dapat dipahami sebagai bentuk baru relasi kuasa yang mengorganisasi distribusi informasi, perhatian publik, dan pengakuan sosial tanpa selalu bekerja melalui larangan yang bersifat eksplisit.

Kajian mengenai identitas digital queer semakin memperlihatkan bahwa media sosial menjadi arena baru bagi produksi sekaligus negosiasi seksualitas. Platform digital membuka peluang bagi individu LGBTQA+ untuk membangun komunitas, mengartikulasikan identitas, dan memperoleh pengakuan sosial. Namun, visibilitas tersebut juga disertai berbagai bentuk pengawasan digital, moderasi algoritmik, praktik pelaporan akun, hingga bias teknologi yang memengaruhi bagaimana identitas queer dapat ditampilkan di ruang publik digital (Myles, Duguay, & Echaiz, 2023; Chartrand & Duguay, 2024; Fosch-Villaronga et al., 2025). Dengan demikian, identitas digital tidak berkembang dalam ruang yang sepenuhnya bebas, tetapi selalu berada dalam jaringan relasi antara agensi individu, logika platform, dan regulasi teknologi.

Dalam konteks Indonesia, dinamika tersebut menjadi semakin kompleks karena produksi seksualitas berlangsung bersamaan dengan nilai agama, norma heteronormatif, budaya lokal, serta perkembangan teknologi digital. Penelitian Wijaya (2022)

menunjukkan bahwa ruang digital tidak menghapus praktik eksklusi terhadap kelompok LGBTQA+, tetapi justru menjadi arena baru tempat berbagai diskursus mengenai moralitas, kewargaan, identitas nasional, dan seksualitas diproduksi, diperdebatkan, serta dinegosiasikan. Oleh karena itu, media sosial tidak dapat dipahami semata-mata sebagai saluran komunikasi, melainkan sebagai ruang sosial tempat relasi kuasa bekerja melalui produksi pengetahuan, regulasi platform, interaksi antarpengguna, dan pengawasan digital.

Berdasarkan perspektif tersebut, buku ini memandang seksualitas sebagai hasil produksi sosial yang terus berlangsung melalui hubungan antara pengetahuan, kekuasaan, norma, teknologi, dan praktik komunikasi digital. Oleh karena itu, negosiasi identitas digital LGBTQA+ dipahami sebagai proses sosial yang tidak hanya melibatkan ekspresi individual, tetapi juga pembentukan subjektivitas melalui interaksi dengan norma masyarakat, tata kelola platform, algoritma digital, dan berbagai bentuk pengakuan maupun penolakan yang berkembang dalam ruang publik digital.

2.1.3 Disiplin, Normalisasi, dan Tubuh

Salah satu kontribusi terpenting Michel Foucault dalam ilmu sosial adalah pergeseran cara memahami

hubungan antara kekuasaan dan tubuh. Dalam *Discipline and Punish*, Foucault menunjukkan bahwa masyarakat modern tidak lagi mengandalkan kekerasan terbuka sebagai mekanisme utama pengendalian sosial. Sebaliknya, kekuasaan bekerja melalui praktik-praktik disipliner yang membentuk individu agar secara sukarela menyesuaikan perilakunya dengan norma yang berlaku. Perubahan tersebut menandai pergeseran dari kekuasaan yang bersifat represif menuju kekuasaan yang produktif, yaitu kekuasaan yang menghasilkan tubuh-tubuh yang patuh (*docile bodies*), produktif, dan dapat diatur sesuai kebutuhan masyarakat modern (Foucault, 1977). Konsep ini tetap menjadi salah satu fondasi utama dalam sosiologi kontemporer untuk menjelaskan bagaimana relasi kuasa bekerja melalui pengawasan, pengaturan ruang, dan pembentukan kebiasaan sosial.

Dalam perspektif Foucault, disiplin tidak bekerja terutama melalui hukuman fisik, melainkan melalui teknik-teknik yang mengatur aktivitas sehari-hari secara rinci. Sekolah mengatur jadwal belajar, rumah sakit mengatur tubuh pasien, militer melatih gerak tubuh prajurit, sementara penjara mengendalikan perilaku narapidana melalui sistem pengawasan yang berkelanjutan. Melalui berbagai institusi tersebut, tubuh diperlakukan sebagai objek yang dapat diamati,

diukur, dilatih, dan dievaluasi secara terus-menerus. Proses tersebut menghasilkan individu yang tidak hanya mematuhi aturan karena adanya paksaan, tetapi juga karena norma telah terinternalisasi dalam cara berpikir dan bertindak mereka (Foucault, 1977). Dengan demikian, disiplin merupakan teknologi sosial yang membentuk subjektivitas melalui praktik-praktik keseharian.

Konsep disiplin tidak dapat dipisahkan dari mekanisme normalisasi. Foucault menjelaskan bahwa masyarakat modern membangun berbagai standar mengenai perilaku yang dianggap normal, sehat, produktif, bermoral, maupun menyimpang. Standar tersebut kemudian digunakan untuk membandingkan, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi individu melalui ujian, penilaian, diagnosis, maupun pengawasan administratif. Normalisasi tidak hanya menentukan batas antara perilaku yang dapat diterima dan yang harus dikoreksi, tetapi juga mendorong individu untuk secara aktif menyesuaikan dirinya dengan ekspektasi sosial. Oleh karena itu, kekuasaan modern bekerja bukan terutama dengan melarang, melainkan dengan membentuk ukuran-ukuran mengenai bagaimana seseorang seharusnya berpikir, bertindak, dan menampilkan dirinya dalam kehidupan sosial. Penelitian mutakhir mengenai warisan sosiologis Foucault menunjukkan bahwa

konsep *gaze* dan *norm* tetap menjadi perangkat analitis utama untuk memahami munculnya masyarakat yang semakin bergantung pada praktik pengawasan dan normalisasi.

Tubuh menempati posisi sentral dalam mekanisme disipliner tersebut. Bagi Foucault, tubuh bukan sekadar entitas biologis, melainkan ruang tempat relasi kuasa diwujudkan melalui latihan, pengawasan, klasifikasi, dan pembentukan kebiasaan. Kekuasaan bekerja pada tingkat yang sangat rinci, mulai dari cara seseorang bergerak, berpakaian, berbicara, hingga mengekspresikan identitasnya di ruang publik. Akibatnya, tubuh menjadi medium utama tempat norma sosial diproduksi sekaligus direproduksi. Melalui proses inilah masyarakat membangun kategori mengenai tubuh yang dianggap ideal, bermoral, sehat, maupun menyimpang. Perspektif tersebut menjelaskan bahwa tubuh selalu memiliki dimensi sosial karena maknanya dibentuk melalui relasi kuasa yang berlangsung secara historis.

Perkembangan teknologi digital memperluas mekanisme disiplin dan normalisasi yang dijelaskan Foucault. Jika sebelumnya pengawasan terutama dilakukan melalui institusi formal, kini berbagai platform digital menjalankan fungsi serupa melalui algoritma, moderasi konten, sistem rekomendasi,

serta pengumpulan data pengguna. Bentuk pengawasan tersebut tidak selalu tampak sebagai kontrol langsung, tetapi bekerja melalui proses yang mendorong pengguna menyesuaikan perilaku, ekspresi diri, dan interaksi sosial dengan logika platform. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa pengawasan digital semakin terinternalisasi dalam praktik sehari-hari sehingga individu secara sukarela berpartisipasi dalam mekanisme evaluasi, pelacakan, dan pengelolaan data dirinya sendiri. Dengan demikian, disiplin tidak lagi hanya berlangsung melalui institusi fisik, tetapi juga melalui infrastruktur digital yang membentuk perilaku pengguna secara berkelanjutan.

Bagi kelompok LGBTQA+, mekanisme disiplin dan normalisasi tersebut memiliki implikasi yang sangat signifikan. Media sosial menyediakan ruang yang memungkinkan individu menampilkan identitas seksual dan gender secara lebih terbuka, tetapi pada saat yang sama memperkuat berbagai bentuk pengawasan sosial melalui komentar pengguna, pelaporan akun, moderasi platform, serta algoritma yang menentukan tingkat visibilitas suatu konten. Akibatnya, negosiasi identitas digital tidak berlangsung dalam ruang yang sepenuhnya bebas, melainkan di tengah berbagai mekanisme normalisasi yang terus mendefinisikan ekspresi mana yang

dianggap dapat diterima dan mana yang diposisikan sebagai penyimpangan. Dalam konteks ini, konsep disiplin, normalisasi, dan tubuh yang dikembangkan Foucault tetap memiliki relevansi yang kuat untuk menjelaskan bagaimana identitas digital LGBTQA+ dibentuk melalui hubungan yang dinamis antara agensi individu, norma sosial, dan tata kelola platform digital.

2.1.4 Kuasa, Pengetahuan, dan Produksi Identitas

Salah satu kontribusi paling berpengaruh dari Michel Foucault dalam teori sosial adalah konsep *power/knowledge* yang menjelaskan bahwa kuasa dan pengetahuan tidak pernah berdiri sebagai dua entitas yang terpisah. Foucault menolak pandangan bahwa pengetahuan merupakan refleksi objektif atas realitas yang bebas dari kepentingan sosial. Sebaliknya, setiap pengetahuan selalu lahir di dalam relasi kuasa tertentu, sekaligus menjadi mekanisme yang memungkinkan kuasa bekerja secara efektif dalam masyarakat. Dengan demikian, kuasa tidak hanya menggunakan pengetahuan sebagai instrumen legitimasi, tetapi juga memproduksi bentuk-bentuk pengetahuan yang kemudian menentukan apa yang dianggap benar, normal, ilmiah, dan sah dalam kehidupan sosial (Foucault, 1972, 1977, 1978, 1980). Interpretasi kontemporer menunjukkan bahwa

konsep *power/knowledge* merupakan inti dari keseluruhan proyek intelektual Foucault karena menjelaskan hubungan timbal balik antara produksi kebenaran, pembentukan institusi, dan konstruksi subjektivitas.

Dalam perspektif tersebut, pengetahuan tidak hanya berfungsi menjelaskan realitas, tetapi juga membentuk objek yang diketahuinya. Melalui praktik klasifikasi, observasi, diagnosis, pencatatan, dan evaluasi, berbagai institusi sosial menghasilkan kategori-kategori yang kemudian diterima sebagai kebenaran sosial. Rumah sakit membedakan tubuh sehat dan sakit, sistem pendidikan mengidentifikasi siswa normal dan bermasalah, sedangkan ilmu seksologi membangun kategori mengenai orientasi seksual dan identitas gender. Kategori-kategori tersebut tidak sekadar bersifat deskriptif, tetapi juga menentukan bagaimana individu dipahami, diperlakukan, dan mengembangkan pemahaman mengenai dirinya sendiri. Oleh karena itu, identitas bukanlah fakta alamiah yang telah ada sebelumnya, melainkan hasil dari proses diskursif yang berlangsung melalui hubungan antara kuasa dan pengetahuan (Foucault, 1978; Dreyfus & Rabinow, 1983).

Hubungan antara kuasa dan pengetahuan bekerja melalui pembentukan apa yang disebut Foucault sebagai *regime of truth*, yaitu seperangkat mekanisme yang menentukan pengetahuan mana yang diakui sebagai benar, siapa yang memiliki otoritas untuk memproduksinya, dan bagaimana pengetahuan tersebut memperoleh legitimasi dalam masyarakat. Kebenaran, dalam pengertian ini, bukanlah sesuatu yang berada di luar sejarah atau relasi sosial, tetapi merupakan hasil dari praktik-praktik institusional yang melibatkan negara, hukum, ilmu pengetahuan, agama, media, dan berbagai bentuk otoritas lainnya. Melalui proses tersebut, individu mengenali dirinya melalui kategori-kategori yang telah tersedia dalam masyarakat sehingga pembentukan subjek (*subjectivation*) selalu berlangsung di dalam jaringan relasi kuasa. Perspektif ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam pembahasan Foucault mengenai subjektivitas dan teknologi diri (*technologies of the self*) yang menjelaskan bahwa individu tidak hanya menjadi objek kuasa, tetapi juga berpartisipasi dalam pembentukan dirinya sendiri (Foucault, 1982, 1988; Taylor, 2016).

Perkembangan masyarakat digital memperluas cara kerja relasi kuasa dan pengetahuan yang dijelaskan Foucault. Jika pada masa modern produksi pengetahuan terutama berlangsung melalui institusi

seperti sekolah, rumah sakit, media massa, dan negara, maka masyarakat platform menghadirkan aktor baru yang berperan dalam membentuk pengetahuan sosial, yaitu algoritma, sistem rekomendasi, moderasi konten, analitik data, dan kecerdasan buatan. Infrastruktur digital tersebut tidak hanya mengelola arus informasi, tetapi juga menentukan bentuk pengetahuan yang memperoleh visibilitas, kategori identitas yang dikenali sistem, serta pola interaksi yang memperoleh legitimasi di ruang publik digital. Dengan demikian, produksi pengetahuan pada era digital semakin terkait dengan tata kelola platform (*platform governance*) yang bekerja melalui proses klasifikasi, kurasi, dan pengaturan informasi secara otomatis. Berbagai kajian mengenai moderasi konten dan tata kelola platform menunjukkan bahwa algoritma bukan sekadar teknologi netral, melainkan bagian dari mekanisme sosial yang membentuk distribusi pengetahuan dan relasi kuasa dalam masyarakat digital.

Bagi kelompok LGBTQA+, relasi antara kuasa dan pengetahuan memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap proses pembentukan identitas digital. Media sosial membuka peluang bagi individu untuk membangun narasi alternatif mengenai seksualitas dan gender di luar institusi formal. Namun, ruang tersebut juga diatur oleh kebijakan platform, logika algoritma, standar komunitas, serta praktik

moderasi yang menentukan bentuk representasi yang memperoleh pengakuan maupun pembatasan. Akibatnya, identitas digital tidak hanya dibentuk melalui pilihan personal, tetapi juga melalui proses klasifikasi, pengawasan, dan evaluasi yang terus berlangsung dalam lingkungan digital. Dalam konteks ini, identitas merupakan hasil negosiasi yang berkembang melalui interaksi antara agensi individu, norma sosial, diskursus publik, dan tata kelola platform digital.

Perspektif Foucauldian menunjukkan bahwa produksi identitas tidak pernah dapat dipisahkan dari produksi pengetahuan. Setiap kategori mengenai seksualitas, gender, normalitas, maupun penyimpangan selalu lahir melalui proses historis yang melibatkan relasi kuasa. Oleh karena itu, buku ini memandang negosiasi identitas digital LGBTQA+ bukan sebagai ekspresi individual yang berdiri sendiri, tetapi sebagai proses pembentukan subjektivitas yang berlangsung melalui hubungan timbal balik antara kuasa, pengetahuan, dan teknologi digital. Media sosial dipahami sebagai arena tempat berbagai diskursus mengenai seksualitas diproduksi, diperdebatkan, dan dinegosiasikan secara terus-menerus sehingga identitas digital selalu bersifat dinamis, relasional, dan terbuka terhadap perubahan.

2.1.5 Resistensi sebagai Bagian dari Relasi Kuasa

Salah satu kontribusi paling mendasar dari pemikiran Michel Foucault adalah penolakannya terhadap pandangan bahwa relasi kuasa hanya menghasilkan dominasi sepihak. Menurut Foucault, kuasa tidak pernah bekerja secara absolut karena setiap relasi kuasa selalu membuka kemungkinan munculnya resistensi. Pernyataannya yang terkenal, *where there is power, there is resistance*, menunjukkan bahwa resistensi bukanlah kekuatan yang berada di luar sistem kekuasaan, melainkan bagian inheren dari mekanisme kuasa itu sendiri. Dengan demikian, kuasa tidak hanya menghasilkan kepatuhan, tetapi juga memunculkan berbagai bentuk respons, negosiasi, penolakan, dan strategi alternatif yang memungkinkan individu maupun kelompok membentuk kembali posisi sosialnya (Foucault, 1978). Interpretasi kontemporer terhadap pemikiran Foucault menegaskan bahwa resistensi tidak dipahami sebagai antitesis kuasa, tetapi sebagai dinamika yang membuat relasi kuasa selalu bersifat terbuka, tidak stabil, dan terus mengalami perubahan.

Berangkat dari perspektif tersebut, resistensi tidak selalu hadir dalam bentuk gerakan politik berskala besar atau konfrontasi langsung terhadap institusi dominan. Foucault justru menunjukkan bahwa

resistensi sering muncul melalui praktik-praktik keseharian yang tampak sederhana, seperti cara individu berbicara, menampilkan tubuh, menggunakan bahasa, membangun relasi sosial, maupun mendefinisikan identitasnya. Praktik-praktik tersebut memperlihatkan bahwa individu bukan sekadar objek yang dibentuk oleh kekuasaan, tetapi juga subjek yang secara aktif merundingkan norma, memodifikasi makna, dan menciptakan ruang bagi kemungkinan-kemungkinan baru. Oleh karena itu, resistensi harus dipahami sebagai proses yang berlangsung terus-menerus di dalam jaringan relasi kuasa, bukan sebagai kondisi yang sepenuhnya membebaskan individu dari pengaruh struktur sosial (Dreyfus & Rabinow, 1983; Oksala, 2005).

Perkembangan teknologi digital memperluas ruang tempat relasi kuasa dan resistensi berlangsung. Jika dalam analisis Foucault institusi seperti sekolah, rumah sakit, penjara, dan negara menjadi arena utama disiplin sosial, maka masyarakat digital menghadirkan platform media sosial sebagai infrastruktur baru yang mengatur sirkulasi informasi, visibilitas, dan interaksi sosial. Algoritma, moderasi konten, sistem rekomendasi, dan tata kelola platform membentuk kondisi yang memengaruhi apa yang dapat ditampilkan, siapa yang memperoleh perhatian publik, serta identitas mana yang memperoleh legitimasi atau

mengalami pembatasan. Berbagai kajian kontemporer menunjukkan bahwa mekanisme tersebut merupakan bentuk baru dari *algorithmic governance*, yaitu tata kelola sosial yang bekerja melalui sistem digital dan pengolahan data dalam skala besar.

Meskipun demikian, mekanisme digital tersebut tidak menghapus kemungkinan munculnya resistensi. Penelitian mengenai komunitas LGBTQ+ di ruang digital menunjukkan bahwa pengguna secara aktif mengembangkan berbagai strategi untuk menavigasi pembatasan platform, seperti membangun komunitas alternatif, menggunakan simbol atau bahasa yang hanya dipahami kelompok tertentu, mengelola tingkat visibilitas identitas, hingga memanfaatkan berbagai fitur platform untuk mempertahankan ruang ekspresi. Resistensi digital tersebut menunjukkan bahwa pengguna tidak hanya menjadi objek pengawasan algoritmik, tetapi juga aktor yang mampu membaca, menyesuaikan diri, bahkan mengganggu logika platform melalui praktik-praktik komunikasi yang kreatif.

Bagi kelompok LGBTQA+, resistensi memiliki makna yang lebih kompleks daripada sekadar menolak norma heteronormatif. Praktik resistensi berlangsung melalui proses negosiasi identitas yang mempertimbangkan berbagai bentuk risiko sosial,

seperti stigma, diskriminasi, pengawasan digital, pelaporan akun, maupun pembatasan algoritmik. Dalam situasi tersebut, individu sering kali tidak memilih antara "terbuka" atau "tertutup" secara mutlak, tetapi mengembangkan strategi yang bersifat situasional sesuai dengan konteks sosial, karakteristik platform, dan audiens yang dihadapi. Dengan demikian, identitas digital berkembang melalui proses yang dinamis antara keterbukaan, perlindungan diri, adaptasi, dan resistensi terhadap berbagai mekanisme pengaturan yang bekerja di ruang digital.

Perspektif Foucauldian membantu menjelaskan bahwa resistensi bukanlah akhir dari relasi kuasa, melainkan mekanisme yang terus membentuk ulang hubungan antara individu, masyarakat, dan teknologi. Dalam konteks media sosial, setiap upaya platform untuk mengatur perilaku pengguna akan selalu diikuti oleh munculnya strategi baru yang memungkinkan individu menegosiasikan kembali identitas, makna, dan bentuk partisipasinya di ruang digital. Oleh karena itu, negosiasi identitas digital LGBTQA+ dalam buku ini dipahami sebagai praktik resistensi yang berlangsung secara terus-menerus di dalam jaringan relasi kuasa. Identitas digital bukan hasil dari kebebasan tanpa batas maupun dominasi yang sepenuhnya menentukan, tetapi merupakan produk interaksi yang dinamis antara agensi individu, norma

sosial, tata kelola platform, dan perkembangan teknologi digital.

2.1.6 Relevansi Foucault bagi Negosiasi Identitas Digital LGBTQA+

Pemikiran Michel Foucault tetap memiliki relevansi yang kuat dalam menjelaskan dinamika pembentukan identitas pada masyarakat digital. Meskipun karya-karyanya lahir sebelum berkembangnya internet dan media sosial, konsep mengenai kuasa, pengetahuan, disiplin, normalisasi, pembentukan subjek, dan resistensi menyediakan perangkat analitis yang masih memadai untuk memahami bagaimana identitas diproduksi melalui teknologi digital. Bagi Foucault, identitas bukanlah atribut yang melekat secara alamiah pada individu, melainkan hasil dari relasi kuasa yang bekerja melalui praktik-praktik diskursif, institusi sosial, dan mekanisme produksi pengetahuan (Foucault, 1972, 1977, 1978, 1982, 1988). Oleh karena itu, perubahan medium komunikasi dari institusi konvensional menuju platform digital tidak mengubah prinsip dasar pembentukan identitas, tetapi memperluas ruang tempat relasi kuasa tersebut beroperasi.

Dalam masyarakat digital, relasi kuasa semakin dimediasi oleh infrastruktur platform yang mengatur produksi, distribusi, dan sirkulasi informasi. Berbagai

penelitian menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi berfungsi sekadar sebagai saluran komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi sistem tata kelola sosial (*platform governance*) yang mengatur visibilitas, partisipasi, dan interaksi pengguna melalui algoritma, moderasi konten, serta kebijakan platform (Gorwa, Binns, & Katzenbach, 2020; Gillespie, 2018). Mekanisme tersebut bekerja dengan cara mengurutkan informasi, merekomendasikan konten, membatasi distribusi unggahan tertentu, dan membentuk hierarki perhatian publik. Dengan demikian, algoritma tidak hanya menjalankan fungsi teknis, tetapi juga menjadi instrumen kuasa yang memengaruhi bagaimana identitas dipresentasikan, dikenali, dan memperoleh legitimasi dalam ruang digital.

Perkembangan tersebut memperluas konsep *power/knowledge* yang dikemukakan Foucault. Jika pada masyarakat modern produksi pengetahuan terutama berlangsung melalui institusi seperti sekolah, rumah sakit, keluarga, dan negara, maka pada masyarakat platform proses tersebut semakin dijalankan oleh sistem digital yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mengolah data pengguna secara berkelanjutan. Algoritma membangun kategori-kategori mengenai pengguna berdasarkan pola perilaku, preferensi, jaringan sosial, maupun

aktivitas digital yang kemudian digunakan untuk menentukan konten yang akan ditampilkan kepada setiap individu. Akibatnya, produksi pengetahuan mengenai identitas tidak lagi hanya dilakukan oleh institusi sosial, tetapi juga oleh sistem komputasional yang bekerja melalui proses klasifikasi dan prediksi otomatis. Dalam perspektif Foucauldian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital tidak berada di luar relasi kuasa, melainkan menjadi bagian dari mekanisme produksi pengetahuan yang membentuk subjektivitas pengguna (Bucher, 2018; Taylor, 2018).

Relevansi perspektif Foucault semakin tampak dalam berbagai kajian mengenai identitas digital queer. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa komunitas LGBTQ+ tidak hanya menghadapi diskriminasi sosial dalam kehidupan luring, tetapi juga berhadapan dengan berbagai bentuk *algorithmic governance* yang memengaruhi representasi identitas mereka di media sosial. Kajian terhadap kreator LGBTQ+ di Instagram menunjukkan bahwa persepsi terhadap bias algoritmik membentuk cara pengguna mengelola visibilitas identitasnya. Mereka mengembangkan berbagai strategi, seperti mendorong interaksi pengikut, menyesuaikan bentuk representasi diri, menggunakan bahasa atau simbol tertentu, serta menghindari kata-kata yang diperkirakan memicu

pembatasan algoritmik. Strategi tersebut memperlihatkan bahwa pengguna secara aktif menegosiasikan logika platform untuk mempertahankan ruang ekspresi identitasnya, bukan sekadar menjadi objek pengendalian teknologi.

Kajian lain mengenai implikasi algoritma terhadap komunitas LGBTQ+ juga menunjukkan bahwa relasi antara pengguna dan platform bersifat dinamis. Algoritma tidak hanya mengatur distribusi konten, tetapi turut membentuk pengalaman sosial melalui proses rekomendasi, moderasi, klasifikasi, dan pengelolaan visibilitas. Penelitian mengenai algoritma platform mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi komunitas LGBTQ+, antara lain bias algoritmik, penyaringan konten, pembatasan jangkauan (*shadow banning*), ketidaktransparanan sistem rekomendasi, serta reproduksi norma cisheteronormatif melalui desain platform. Namun demikian, pengguna tidak sepenuhnya tunduk terhadap mekanisme tersebut. Mereka membangun berbagai bentuk resistensi melalui praktik-praktik komunikasi yang kreatif, pembentukan komunitas digital, penggunaan fitur platform secara alternatif, maupun pengembangan apa yang disebut sebagai *algorithmic imaginaries*, yaitu pemahaman pengguna mengenai cara kerja algoritma yang kemudian

memengaruhi strategi mereka dalam menggunakan media sosial.

Bagi kelompok LGBTQA+, kondisi tersebut menunjukkan bahwa identitas digital selalu berkembang melalui proses negosiasi yang berlangsung secara terus-menerus. Identitas tidak hanya dibentuk oleh pilihan individu ataupun norma masyarakat, tetapi juga oleh mekanisme teknologi yang mengatur distribusi perhatian, pengakuan sosial, dan peluang partisipasi dalam ruang publik digital. Dengan demikian, media sosial tidak dapat dipahami sebagai ruang yang sepenuhnya membebaskan maupun sepenuhnya membatasi pengguna. Sebaliknya, platform digital merupakan arena sosial tempat relasi kuasa, produksi pengetahuan, normalisasi, dan resistensi berlangsung secara simultan sehingga identitas digital selalu berada dalam proses pembentukan yang dinamis.

Berdasarkan sintesis tersebut, buku ini menggunakan perspektif Foucauldian sebagai landasan konseptual untuk menjelaskan negosiasi identitas digital LGBTQA+. Konsep *power/knowledge* digunakan untuk menjelaskan bagaimana identitas diproduksi melalui diskursus dan teknologi digital. Konsep disiplin dan normalisasi menjelaskan mekanisme pengaturan perilaku melalui tata kelola platform dan algoritma.

Konsep pembentukan subjek menjelaskan bagaimana individu membangun pemahaman mengenai dirinya melalui interaksi digital, sedangkan konsep resistensi menjelaskan mengapa pengguna terus mengembangkan strategi untuk mempertahankan ruang ekspresi identitas di tengah berbagai mekanisme pengawasan dan pengendalian platform. Oleh karena itu, negosiasi identitas digital LGBTQA+ dalam buku ini dipahami sebagai proses sosial yang berlangsung melalui interaksi yang terus-menerus antara agensi individu, norma sosial, pengetahuan, dan infrastruktur teknologi digital.

2.2 Erving Goffman: Dramaturgi dan presentasi diri

2.2.1 Kehidupan Sosial sebagai Pertunjukan

Salah satu kontribusi paling berpengaruh dari Erving Goffman dalam sosiologi adalah pandangannya bahwa kehidupan sosial berlangsung layaknya sebuah pertunjukan (*dramaturgy*). Dalam perspektif ini, individu dipahami sebagai aktor yang secara terus-menerus menampilkan dirinya di hadapan orang lain melalui berbagai bentuk interaksi sosial. Setiap tindakan, bahasa, ekspresi, penampilan, maupun simbol yang digunakan individu merupakan bagian dari upaya membangun kesan tertentu agar

memperoleh penerimaan sosial. Dengan demikian, identitas bukan sekadar karakteristik yang melekat pada individu, melainkan hasil dari proses interaksi yang berlangsung secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari (Goffman, 1959).

Berbeda dengan pendekatan psikologis yang menempatkan identitas sebagai atribut internal individu, Goffman memandang identitas sebagai pencapaian sosial (*social accomplishment*). Individu tidak menampilkan "diri yang sesungguhnya", tetapi membangun representasi diri yang disesuaikan dengan situasi, norma, audiens, dan tujuan interaksi. Oleh karena itu, identitas selalu bersifat kontekstual, situasional, dan relasional karena diproduksi melalui proses komunikasi yang melibatkan interpretasi timbal balik antara aktor dan audiens (Goffman, 1959; Goffman, 1967).

Perspektif dramaturgi menunjukkan bahwa setiap interaksi sosial selalu melibatkan proses pengelolaan kesan (*impression management*). Individu berusaha mengendalikan informasi mengenai dirinya agar menghasilkan citra yang diharapkan oleh audiens. Proses tersebut mencakup pemilihan bahasa, cara berpakaian, ekspresi tubuh, simbol-simbol identitas, hingga pengaturan informasi yang akan ditampilkan maupun disembunyikan. Dengan demikian, presentasi

diri merupakan strategi sosial yang memungkinkan individu memperoleh legitimasi, membangun hubungan sosial, dan mempertahankan identitas yang diinginkan (Goffman, 1959).

2.2.2 Front Stage, Back Stage, dan Pengelolaan Identitas

Konsep dramaturgi Goffman membedakan dua ruang utama dalam kehidupan sosial, yaitu *front stage* dan *back stage*. *Front stage* merupakan ruang tempat individu menampilkan identitas yang diharapkan sesuai dengan norma dan ekspektasi audiens. Sebaliknya, *back stage* menjadi ruang yang memungkinkan individu melepaskan tuntutan performa sosial, mengekspresikan dirinya secara lebih bebas, serta mempersiapkan presentasi diri sebelum kembali memasuki ruang publik (Goffman, 1959).

Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa identitas tidak pernah bersifat tunggal maupun tetap. Individu dapat menampilkan identitas yang berbeda ketika berinteraksi dengan keluarga, teman, institusi pendidikan, tempat kerja, maupun komunitas tertentu. Variasi tersebut bukan berarti individu bersikap tidak autentik, tetapi mencerminkan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan situasi sosial yang berbeda. Oleh karena itu, identitas berkembang melalui proses negosiasi antara kebutuhan personal

dan ekspektasi sosial yang terus berubah (Goffman, 1959; Jenkins, 2014).

Dalam masyarakat digital, batas antara *front stage* dan *back stage* menjadi semakin kabur. Media sosial memungkinkan individu mengelola berbagai bentuk presentasi diri secara simultan kepada audiens yang jauh lebih luas dibandingkan interaksi tatap muka. Profil pengguna, unggahan, foto, video, komentar, serta aktivitas digital lainnya menjadi bagian dari proses representasi diri yang dapat diamati, dievaluasi, dan direspons oleh berbagai kelompok audiens secara bersamaan. Kondisi ini memperluas kompleksitas pengelolaan identitas karena individu harus mempertimbangkan ekspektasi dari berbagai komunitas yang hadir dalam satu ruang digital (Papacharissi, 2011; Cover, 2016).

2.2.3 Dramaturgi dalam Masyarakat Platform

Perkembangan media sosial mengubah mekanisme presentasi diri yang sebelumnya dijelaskan Goffman dalam interaksi tatap muka. Pada masyarakat platform, presentasi diri tidak hanya dipengaruhi oleh audiens manusia, tetapi juga oleh sistem algoritma yang menentukan tingkat visibilitas suatu konten. Platform digital mengurutkan informasi melalui sistem rekomendasi, moderasi konten, serta berbagai

mekanisme kurasi yang memengaruhi bagaimana identitas dipersepsikan oleh pengguna lain. Dengan demikian, proses *impression management* tidak lagi hanya diarahkan kepada audiens sosial, tetapi juga kepada logika algoritmik yang bekerja di balik platform digital (Bucher, 2018; Gillespie, 2018).

Kajian mengenai identitas digital menunjukkan bahwa pengguna media sosial secara aktif menyesuaikan strategi presentasi dirinya berdasarkan persepsi terhadap cara kerja algoritma. Pengguna mempertimbangkan waktu unggahan, bentuk visual, pilihan kata, penggunaan tagar, maupun pola interaksi yang diperkirakan meningkatkan visibilitas konten mereka. Praktik tersebut menunjukkan bahwa presentasi diri pada masyarakat digital merupakan hasil interaksi antara agensi pengguna dan tata kelola platform (*platform governance*), bukan semata-mata hubungan antara aktor dan audiens sebagaimana dijelaskan dalam dramaturgi klasik (Chartrand & Duguay, 2024; Duguay, 2024).

2.2.4 Dramaturgi dan Negosiasi Identitas Digital LGBTQA+

Perspektif dramaturgi memberikan landasan penting untuk memahami bagaimana kelompok LGBTQA+ membangun identitasnya di media sosial. Presentasi identitas seksual dan gender tidak berlangsung

sebagai ekspresi yang sepenuhnya spontan, tetapi melalui proses pengelolaan informasi yang mempertimbangkan risiko stigma, diskriminasi, penerimaan sosial, serta karakteristik audiens yang beragam. Individu dapat memilih untuk menampilkan identitas tertentu secara terbuka pada satu platform, tetapi membatasi representasi tersebut pada platform lain sesuai dengan konteks interaksi yang dihadapi.

Berbagai penelitian mengenai komunitas LGBTQ+ menunjukkan bahwa pengguna media sosial mengembangkan strategi presentasi diri melalui pengaturan tingkat visibilitas akun, penggunaan simbol-simbol tertentu, pemisahan audiens, serta pengelolaan narasi identitas yang berbeda pada berbagai platform digital. Praktik tersebut menunjukkan bahwa identitas digital tidak hanya merupakan representasi diri, tetapi juga hasil dari proses negosiasi yang berlangsung di antara norma sosial, logika algoritma, karakteristik platform, dan tujuan komunikasi pengguna (Duguay, 2024; Chartrand & Duguay, 2024; Myles, Duguay, & Echaiz, 2023).

Dalam konteks Indonesia, dinamika tersebut berlangsung di tengah norma agama, budaya, dan heteronormativitas yang masih kuat. Oleh karena itu, presentasi diri kelompok LGBTQA+ di media sosial

tidak dapat dipahami sekadar sebagai praktik komunikasi individual, tetapi sebagai strategi sosial untuk menyeimbangkan kebutuhan akan pengakuan identitas dengan berbagai risiko sosial yang menyertainya. Perspektif dramaturgi membantu menjelaskan bahwa identitas digital merupakan hasil dari proses pengelolaan kesan yang berlangsung secara terus-menerus melalui interaksi antara individu, audiens, dan infrastruktur digital.

Berdasarkan perspektif tersebut, buku ini menggunakan teori dramaturgi Goffman untuk menjelaskan bahwa negosiasi identitas digital LGBTQA+ merupakan proses presentasi diri yang terus berubah sesuai dengan konteks sosial, karakteristik platform, serta relasi yang dibangun dengan berbagai audiens. Identitas digital dipahami sebagai hasil dari praktik pengelolaan kesan (*impression management*) yang berlangsung melalui interaksi antara agensi individu, ekspektasi sosial, dan mekanisme platform digital. Kerangka ini melengkapi perspektif Foucauldian dengan menempatkan interaksi mikro sebagai arena tempat identitas dipertunjukkan, dinegosiasikan, dan memperoleh pengakuan sosial.

2.3 Roland Barthes: Representasi, tanda, dan mitos

2.3.1 Semiotika Roland Barthes

Roland Barthes mengembangkan semiotika sebagai pendekatan untuk memahami bagaimana makna diproduksi melalui berbagai sistem tanda dalam kehidupan sosial. Berangkat dari linguistik struktural Ferdinand de Saussure, Barthes memperluas kajian tanda tidak hanya pada bahasa verbal, tetapi juga pada gambar, pakaian, fotografi, iklan, film, media massa, dan berbagai bentuk budaya populer. Dalam perspektif Barthes, masyarakat modern dipenuhi oleh sistem tanda yang terus memproduksi makna mengenai dunia sosial. Oleh karena itu, realitas sosial tidak hadir secara langsung kepada individu, tetapi selalu dimediasi oleh tanda-tanda yang membentuk cara manusia memahami dirinya, orang lain, dan masyarakat (Barthes, 1967, 1972).

Bagi Barthes, tanda (*sign*) merupakan kesatuan antara penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*). Penanda merujuk pada bentuk fisik suatu tanda, seperti kata, gambar, warna, suara, atau simbol visual, sedangkan petanda merupakan konsep atau makna yang diasosiasikan dengan tanda tersebut. Hubungan antara penanda dan petanda tidak bersifat alamiah, tetapi dibentuk melalui konvensi budaya yang

berkembang dalam masyarakat. Akibatnya, makna selalu bersifat sosial, historis, dan dapat berubah sesuai dengan konteks budaya yang melingkupinya (Barthes, 1967; Chandler, 2017).

Pendekatan semiotika Barthes memberikan kontribusi penting bagi sosiologi karena menunjukkan bahwa berbagai praktik sosial selalu melibatkan proses produksi makna. Identitas, gender, seksualitas, maupun relasi sosial tidak hanya dibentuk melalui tindakan sosial sebagaimana dijelaskan Goffman atau melalui relasi kuasa sebagaimana dijelaskan Foucault, tetapi juga melalui sistem representasi yang menghasilkan makna mengenai siapa seseorang dan bagaimana ia dipersepsikan oleh masyarakat (Hall, 1997; Chandler, 2017).

2.3.2 Denotasi dan Konotasi

Kontribusi utama Barthes terletak pada perbedaan antara makna denotatif dan makna konotatif. Denotasi merupakan makna pertama yang bersifat langsung, eksplisit, dan relatif deskriptif. Sebaliknya, konotasi merupakan makna kedua yang terbentuk melalui pengalaman budaya, nilai sosial, ideologi, dan emosi yang melekat pada suatu tanda. Oleh karena itu, satu gambar atau simbol dapat memiliki makna yang berbeda ketika ditempatkan dalam konteks sosial yang berbeda (Barthes, 1977).

Dalam media digital, perbedaan tersebut menjadi semakin penting karena pengguna tidak hanya mengonsumsi informasi secara literal, tetapi juga menafsirkan berbagai simbol visual, warna, gaya berpakaian, ekspresi wajah, emoji, tagar, maupun elemen visual lainnya berdasarkan pengalaman budaya mereka. Dengan demikian, makna media sosial tidak pernah sepenuhnya berada pada konten itu sendiri, tetapi selalu dihasilkan melalui proses interpretasi yang melibatkan konteks sosial dan budaya (Hall, 1997).

Kajian media digital menunjukkan bahwa representasi visual di platform seperti Instagram, TikTok, dan X semakin bergantung pada kombinasi antara teks, gambar, video, musik, dan simbol digital yang memungkinkan terbentuknya berbagai lapisan makna. Karena itu, analisis semiotik tetap menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk memahami bagaimana identitas diproduksi dan dimaknai dalam komunikasi digital (Highfield, 2016; Leaver, Highfield, & Abidin, 2023).

2.3.3 Mitos sebagai Ideologi

Konsep yang paling berpengaruh dalam pemikiran Barthes adalah mitos (*myth*). Barthes menjelaskan bahwa mitos bukan sekadar cerita tradisional, tetapi merupakan sistem penandaan tingkat kedua yang

mengubah konstruksi sosial menjadi sesuatu yang tampak alamiah. Melalui mitos, berbagai nilai budaya, ideologi, dan relasi kekuasaan disajikan seolah-olah merupakan kenyataan yang wajar dan tidak dapat dipersoalkan (Barthes, 1972).

Dalam kehidupan sosial, mitos bekerja melalui berbagai representasi yang terus diulang oleh media, pendidikan, institusi, maupun praktik budaya sehari-hari. Pengulangan tersebut membuat kategori mengenai maskulinitas, feminitas, keluarga, seksualitas, moralitas, maupun identitas sosial tampak sebagai fakta alamiah, padahal semuanya merupakan hasil konstruksi budaya. Oleh karena itu, analisis mitos memungkinkan peneliti mengungkap bagaimana ideologi bekerja secara halus melalui sistem representasi (Hall, 1997).

Kajian media kontemporer menunjukkan bahwa platform digital turut menjadi ruang produksi mitos baru. Algoritma, budaya influencer, tren visual, dan budaya viral berkontribusi membentuk narasi dominan mengenai tubuh ideal, identitas gender, hubungan sosial, maupun ekspresi seksual yang kemudian dipersepsikan sebagai sesuatu yang normal oleh pengguna media sosial (Leaver, Highfield, & Abidin, 2023).

2.3.4 Representasi dalam Media Digital

Media sosial memperluas proses representasi yang sebelumnya didominasi media massa konvensional. Pada platform digital, setiap pengguna memiliki kesempatan untuk memproduksi, mengedit, dan mendistribusikan representasi mengenai dirinya sendiri. Namun, representasi tersebut tidak berlangsung dalam ruang yang netral karena dipengaruhi oleh budaya platform, algoritma, serta respons audiens yang terus membentuk makna suatu konten.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa representasi digital merupakan hasil interaksi antara pengguna, teknologi, dan budaya platform. Identitas tidak hanya direpresentasikan melalui unggahan visual, tetapi juga melalui caption, emoji, tagar, musik, filter, dan pola interaksi yang membentuk narasi tertentu mengenai individu maupun kelompok sosial (Leaver, Highfield, & Abidin, 2023; Duguay, 2024; Chartrand & Duguay, 2024).

Perspektif Barthes membantu menjelaskan bahwa setiap representasi digital selalu mengandung lapisan makna yang melampaui isi visualnya. Oleh karena itu, analisis semiotik tidak hanya bertujuan mengidentifikasi apa yang ditampilkan dalam media sosial, tetapi juga mengungkap nilai, ideologi, dan

relasi kuasa yang bekerja melalui berbagai sistem tanda digital.

2.3.5 Barthes dan Representasi Identitas Digital LGBTQA+

Dalam konteks penelitian mengenai LGBTQA+, perspektif Barthes memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana identitas seksual dan gender direpresentasikan melalui berbagai simbol visual, bahasa, dan praktik komunikasi digital. Identitas LGBTQA+ tidak hadir sebagai fakta sosial yang netral, tetapi diproduksi melalui sistem tanda yang terus diperdebatkan dalam ruang digital. Foto profil, warna pelangi, bendera identitas, pilihan pakaian, ekspresi tubuh, tagar, maupun narasi personal berfungsi sebagai penanda yang menghasilkan berbagai makna sosial mengenai identitas seksual dan gender.

Makna tersebut tidak bersifat tunggal karena dipengaruhi oleh latar belakang budaya, norma agama, pengalaman pengguna, serta dinamika interaksi dalam media sosial. Akibatnya, satu representasi yang dimaksudkan sebagai simbol keberagaman dapat dimaknai sebagai bentuk resistensi, ekspresi identitas, atau bahkan penyimpangan oleh kelompok sosial yang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial merupakan arena tempat berbagai makna

mengenai identitas terus dinegosiasikan melalui proses representasi.

Buku ini menggunakan perspektif semiotika Barthes untuk menjelaskan bahwa negosiasi identitas digital LGBTQA+ tidak hanya berlangsung melalui interaksi sosial maupun relasi kuasa, tetapi juga melalui produksi makna yang bekerja dalam sistem tanda digital. Perspektif ini melengkapi teori Foucault dan Goffman dengan menunjukkan bahwa identitas digital dibentuk bukan hanya oleh praktik sosial, tetapi juga oleh representasi simbolik yang terus menghasilkan makna, ideologi, dan pengakuan sosial.

2.4 Judith Butler: Performativitas gender

2.4.1 Kritik Butler terhadap Esensialisme Gender

Salah satu kontribusi paling berpengaruh Judith Butler dalam kajian gender adalah kritiknya terhadap pandangan esensialis yang menganggap gender sebagai identitas yang bersifat tetap, alamiah, dan berasal langsung dari jenis kelamin biologis. Dalam pandangan esensialisme, perempuan dan laki-laki dipahami memiliki karakter, perilaku, dan peran sosial tertentu karena faktor biologis yang dianggap universal. Perspektif tersebut memandang hubungan

antara jenis kelamin (*sex*), gender (*gender*), dan seksualitas sebagai sesuatu yang linier sehingga identitas gender diposisikan sebagai konsekuensi alami dari tubuh biologis. Butler menolak asumsi tersebut karena menurutnya baik jenis kelamin maupun gender merupakan hasil konstruksi sosial dan diskursif yang dibentuk melalui praktik budaya, bahasa, institusi, dan relasi kuasa yang berlangsung secara historis (Butler, 1990, 1993).

Kritik Butler berkembang dari dialog kritis dengan berbagai tradisi pemikiran, terutama feminisme, poststrukturalisme, dan pemikiran Michel Foucault mengenai kuasa dan diskursus. Butler berpendapat bahwa tubuh tidak pernah hadir sebagai fakta biologis yang sepenuhnya bebas dari makna sosial. Sebaliknya, tubuh selalu dipahami melalui berbagai kategori, bahasa, norma, dan praktik budaya yang menentukan bagaimana seseorang dikenali sebagai perempuan, laki-laki, ataupun identitas gender lainnya. Dengan demikian, kategori biologis tidak dapat dipisahkan dari proses sosial yang membentuk cara masyarakat memberi makna terhadap tubuh dan seksualitas (Foucault, 1978; Butler, 1993).

Menurut Butler, asumsi mengenai adanya identitas perempuan yang bersifat universal juga menimbulkan persoalan epistemologis dalam teori feminis.

Pengalaman perempuan tidak pernah bersifat homogen karena dipengaruhi oleh kelas sosial, ras, etnisitas, agama, budaya, orientasi seksual, usia, maupun konteks politik yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan kategori "perempuan" sebagai identitas yang tunggal berpotensi mengabaikan keragaman pengalaman hidup yang dimiliki berbagai kelompok perempuan maupun individu dengan identitas gender yang tidak sesuai dengan kategori biner. Kritik tersebut kemudian menjadi salah satu dasar berkembangnya perspektif queer yang menolak pemahaman identitas sebagai kategori yang tetap dan tertutup (Butler, 1990; Salih, 2002).

Penolakan Butler terhadap esensialisme tidak berarti mengingkari keberadaan tubuh biologis, tetapi menegaskan bahwa makna sosial mengenai tubuh selalu diproduksi melalui praktik-praktik diskursif. Jenis kelamin (*sex*) bukan sekadar fakta biologis yang mendahului budaya, melainkan juga dipahami melalui sistem klasifikasi sosial yang menentukan bagaimana tubuh diberi nama, dikategorikan, dan diperlakukan. Dengan demikian, pemisahan yang tegas antara *sex* sebagai sesuatu yang biologis dan *gender* sebagai sesuatu yang sosial menjadi semakin sulit dipertahankan karena keduanya sama-sama dibentuk melalui proses sosial yang saling berkaitan (Butler, 1993; Lloyd, 2007).

Perspektif tersebut memberikan perubahan mendasar dalam cara memahami identitas gender. Jika pendekatan esensialis memandang identitas sebagai sesuatu yang dimiliki individu sejak lahir, Butler justru melihat identitas sebagai proses yang terus diproduksi melalui pengulangan norma sosial. Individu tidak mengekspresikan identitas gender yang telah ada sebelumnya, tetapi membentuk identitas tersebut melalui praktik-praktik sosial yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, identitas gender selalu bersifat dinamis, terbuka terhadap perubahan, dan bergantung pada konteks sosial tempat individu berinteraksi (Butler, 1990, 2004).

Perkembangan masyarakat digital semakin memperlihatkan relevansi kritik Butler terhadap esensialisme gender. Media sosial memungkinkan individu membangun, menampilkan, mengubah, dan merundingkan identitas gender melalui berbagai bentuk representasi digital yang tidak selalu mengikuti kategori biner perempuan dan laki-laki. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa platform digital menyediakan ruang bagi munculnya ekspresi gender yang lebih beragam sekaligus memperlihatkan bagaimana identitas terus dibentuk melalui interaksi, representasi visual, algoritma, dan respons pengguna lainnya. Dengan demikian, ruang digital memperkuat

argumentasi Butler bahwa gender bukanlah identitas yang bersifat tetap, tetapi merupakan konstruksi sosial yang selalu dinegosiasikan dalam praktik komunikasi sehari-hari (Duguay, 2024; Chartrand & Duguay, 2024; Myles, Duguay, & Echaiz, 2023).

Berdasarkan perspektif tersebut, buku ini memandang identitas gender LGBTQA+ bukan sebagai kategori yang bersifat tetap ataupun sepenuhnya ditentukan oleh tubuh biologis. Identitas dipahami sebagai hasil proses sosial yang berlangsung melalui interaksi antara norma budaya, relasi kuasa, praktik representasi, dan pengalaman individual yang terus berubah. Kritik Butler terhadap esensialisme menjadi landasan penting untuk memahami bahwa negosiasi identitas digital LGBTQA+ merupakan proses yang selalu terbuka terhadap pembentukan, perubahan, dan penafsiran ulang dalam ruang digital.

2.4.2 Performativitas Gender

Konsep yang paling berpengaruh dalam pemikiran Judith Butler adalah *gender performativity*. Melalui konsep ini, Butler menolak pandangan bahwa gender merupakan identitas yang telah dimiliki individu sebelum melakukan tindakan sosial. Sebaliknya, Butler berpendapat bahwa gender dibentuk melalui serangkaian tindakan, praktik, bahasa, ekspresi tubuh, dan interaksi sosial yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian,

gender bukan sesuatu yang dimiliki (*to be*), melainkan sesuatu yang terus dilakukan (*to do*) melalui pengulangan berbagai norma sosial yang telah berkembang dalam masyarakat (Butler, 1990).

Istilah *performativity* tidak dapat disamakan dengan *performance*. Dalam perspektif Goffman, *performance* merujuk pada bagaimana individu mengelola kesan melalui pertunjukan sosial di hadapan audiens. Butler mengembangkan konsep yang berbeda. Menurutnya, *performativity* menjelaskan bagaimana identitas gender justru dihasilkan melalui pengulangan tindakan yang mengikuti norma budaya. Individu tidak terlebih dahulu memiliki identitas gender yang kemudian dipertunjukkan, tetapi identitas tersebut muncul karena praktik-praktik sosial yang terus diulang sehingga tampak sebagai sesuatu yang alamiah. Oleh karena itu, performativitas merupakan mekanisme yang memproduksi identitas, bukan sekadar menampilkan identitas yang telah ada sebelumnya (Butler, 1990; Salih, 2002).

Dalam kerangka tersebut, gender dipahami sebagai hasil dari proses *citation* atau pengulangan berbagai norma yang telah memperoleh legitimasi sosial. Cara berpakaian, gaya berbicara, ekspresi tubuh, pilihan bahasa, pembagian peran, hingga bentuk relasi interpersonal merupakan praktik-praktik yang secara terus-menerus mengutip norma gender yang berlaku dalam masyarakat. Karena pengulangan tersebut berlangsung secara terus-menerus sejak masa kanak-kanak, identitas gender kemudian dipersepsikan

sebagai sesuatu yang bersifat alami. Butler justru menunjukkan bahwa kesan mengenai kealamiahannya tersebut merupakan hasil dari repetisi sosial yang berlangsung secara historis dan kultural (Butler, 1993; Lloyd, 2007).

Performatifitas gender juga menjelaskan bahwa norma tidak bekerja melalui paksaan yang selalu bersifat langsung, tetapi melalui proses internalisasi yang membuat individu secara sukarela mereproduksi aturan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Individu belajar bagaimana menjadi "laki-laki" atau "perempuan" melalui berbagai praktik sosial yang memperoleh pengakuan dalam keluarga, pendidikan, agama, media, dan lingkungan budaya. Dengan demikian, identitas gender tidak pernah berdiri di luar relasi sosial, tetapi selalu dibentuk melalui proses yang melibatkan norma, bahasa, dan institusi yang terus mengarahkan tindakan individu (Butler, 1990, 2004; Foucault, 1978).

Meskipun norma memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk identitas, Butler menegaskan bahwa pengulangan tidak pernah berlangsung secara sempurna. Setiap tindakan performatif selalu membuka kemungkinan munculnya variasi, penyimpangan, maupun interpretasi baru terhadap norma yang telah ada. Karena itu, performativitas tidak hanya mereproduksi keteraturan sosial, tetapi juga menyediakan peluang bagi munculnya perubahan. Ketika individu mengulang norma dengan cara yang berbeda, identitas gender dapat

dinegosiasikan, dimodifikasi, bahkan dipersoalkan kembali. Dalam titik inilah Butler memperlihatkan bahwa identitas selalu bersifat terbuka terhadap transformasi dan tidak pernah mencapai bentuk yang sepenuhnya final (Butler, 1990; Butler, 2004).

Pandangan tersebut memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perkembangan *queer theory*. Jika pendekatan esensialis menempatkan identitas seksual dan gender sebagai kategori yang stabil, maka Butler menunjukkan bahwa seluruh identitas dibentuk melalui praktik sosial yang terus berlangsung. Oleh karena itu, identitas lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, aseksual, maupun berbagai identitas gender lainnya tidak dapat dipahami sebagai kategori yang tetap, tetapi sebagai proses sosial yang berkembang melalui pengalaman hidup, interaksi, dan hubungan dengan berbagai norma yang terus berubah. Perspektif ini memungkinkan kajian gender bergerak dari pencarian identitas yang autentik menuju analisis mengenai bagaimana identitas diproduksi, dinegosiasikan, dan dipertahankan dalam kehidupan sosial (Butler, 1990; Salih, 2002).

Perkembangan media digital semakin memperlihatkan relevansi konsep performativitas. Platform media sosial memungkinkan individu menampilkan berbagai bentuk ekspresi gender melalui foto, video, bahasa, simbol visual, maupun praktik komunikasi yang dapat diubah sesuai dengan konteks interaksi. Identitas digital tidak hadir sebagai representasi yang bersifat tetap, tetapi berkembang

melalui proses pembaruan yang terus berlangsung melalui unggahan, komentar, respons audiens, dan berbagai bentuk interaksi daring. Penelitian mengenai identitas digital menunjukkan bahwa pengguna secara aktif membangun, memodifikasi, dan merundingkan representasi gender mereka sesuai dengan karakteristik platform, komunitas, serta dinamika algoritma yang memengaruhi visibilitas konten (Duguay, 2024; Chartrand & Duguay, 2024; Myles, Duguay, & Echaiz, 2023).

Dalam konteks buku ini, konsep performativitas menjadi landasan utama untuk memahami negosiasi identitas digital LGBTQA+. Identitas seksual dan gender dipahami bukan sebagai atribut yang telah dimiliki individu sebelum memasuki ruang digital, tetapi sebagai hasil dari praktik-praktik sosial yang terus diproduksi melalui komunikasi, representasi, interaksi, dan pengulangan norma dalam media sosial. Dengan demikian, identitas digital LGBTQA+ merupakan proses yang selalu berada dalam pembentukan, penyesuaian, dan penafsiran ulang sesuai dengan perubahan relasi sosial, budaya, dan teknologi digital.

2.4.3 Repetisi, Norma, dan Subjektivitas

Judith Butler menjelaskan bahwa performativitas gender tidak berlangsung melalui tindakan yang dilakukan satu kali, melainkan melalui repetisi atau pengulangan berbagai norma sosial yang terus berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.

Pengulangan tersebut membuat praktik-praktik sosial tertentu tampak sebagai sesuatu yang wajar, alamiah, dan tidak lagi dipertanyakan. Oleh karena itu, identitas gender tidak terbentuk karena individu memiliki sifat bawaan tertentu, tetapi karena individu secara terus-menerus mengulangi tindakan, bahasa, ekspresi tubuh, serta berbagai praktik budaya yang telah memperoleh legitimasi dalam masyarakat. Melalui repetisi tersebut, norma sosial secara bertahap membentuk cara individu memahami dirinya maupun dipahami oleh orang lain (Butler, 1990, 1993).

Bagi Butler, norma bukan sekadar seperangkat aturan yang mengatur perilaku individu dari luar. Norma bekerja secara produktif dengan membentuk kondisi yang memungkinkan seseorang dikenali sebagai subjek sosial. Sejak awal kehidupan, individu belajar mengenali kategori perempuan, laki-laki, maskulin, feminin, maupun berbagai bentuk ekspresi gender lainnya melalui keluarga, pendidikan, agama, media, bahasa, dan interaksi sosial. Proses tersebut membuat norma tidak hanya mengarahkan tindakan, tetapi juga menghasilkan kategori-kategori identitas yang menjadi dasar pengakuan sosial. Dengan demikian, subjektivitas tidak lahir sebelum norma bekerja, melainkan berkembang melalui proses internalisasi dan pengulangan norma tersebut (Butler, 2004; Foucault, 1982).

Konsep subjektivitas Butler memiliki hubungan yang erat dengan pemikiran Michel Foucault mengenai *subjectivation*. Foucault menjelaskan bahwa individu menjadi subjek melalui relasi kuasa yang bekerja melalui berbagai praktik diskursif dan institusi sosial (Foucault, 1982). Butler mengembangkan argumentasi tersebut dengan menunjukkan bahwa proses menjadi subjek juga berlangsung melalui performativitas gender. Individu memperoleh pengakuan sosial sejauh ia mampu mengulangi norma-norma yang dapat dikenali oleh masyarakat. Oleh karena itu, subjektivitas merupakan hasil hubungan timbal balik antara relasi kuasa, norma budaya, dan praktik performatif yang terus berlangsung dalam kehidupan sosial (Butler, 1993; Salih, 2002).

Meskipun norma memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk subjektivitas, Butler menegaskan bahwa pengulangan tidak pernah berlangsung secara identik. Setiap repetisi selalu mengandung kemungkinan terjadinya variasi, penyesuaian, maupun penyimpangan terhadap norma yang telah ada. Karena itu, norma tidak hanya mereproduksi keteraturan sosial, tetapi juga membuka ruang bagi perubahan. Ketika individu mengulangi praktik-praktik gender dengan cara yang berbeda, mereka secara bersamaan memperlihatkan bahwa identitas gender bukan

sesuatu yang bersifat tetap, melainkan hasil dari proses sosial yang selalu dapat dinegosiasikan. Dalam pengertian tersebut, subjektivitas merupakan proses yang dinamis dan terus berkembang, bukan kondisi yang selesai atau final (Butler, 1990; Lloyd, 2007).

Perkembangan media digital memperlihatkan bahwa proses repetisi norma berlangsung melalui mekanisme yang semakin kompleks. Media sosial menjadi ruang tempat berbagai representasi gender diproduksi, diulang, disirkulasikan, dan memperoleh pengakuan melalui interaksi antarpengguna. Praktik mengunggah foto, membuat video, menggunakan simbol visual, memilih bahasa, maupun mengikuti tren tertentu merupakan bentuk-bentuk repetisi yang berkontribusi terhadap pembentukan identitas digital. Pengulangan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh norma budaya, tetapi juga oleh karakteristik platform, logika algoritma, dan respons audiens yang menentukan bentuk representasi mana yang memperoleh visibilitas lebih besar (Duguay, 2024; Chartrand & Duguay, 2024).

Kajian mengenai identitas digital menunjukkan bahwa subjektivitas pada masyarakat platform berkembang melalui hubungan yang saling memengaruhi antara pengguna dan teknologi. Algoritma tidak hanya mengelola distribusi informasi, tetapi juga

memengaruhi pola interaksi, rekomendasi konten, dan peluang bagi berbagai ekspresi identitas untuk memperoleh perhatian publik. Pada saat yang sama, pengguna secara aktif menyesuaikan praktik presentasi dirinya melalui berbagai strategi komunikasi yang memungkinkan mereka memperoleh pengakuan sosial sekaligus mempertahankan identitas yang diinginkan. Dengan demikian, subjektivitas digital merupakan hasil dari proses repetisi yang berlangsung melalui interaksi antara norma sosial, praktik performatif, tata kelola platform, dan pengalaman pengguna (Myles, Duguay, & Echaiz, 2023; Duguay, 2024).

Bagi kelompok LGBTQA+, repetisi norma menjadi arena utama tempat identitas terus dinegosiasikan. Individu tidak hanya berhadapan dengan norma heteronormatif yang berkembang dalam masyarakat, tetapi juga dengan mekanisme digital yang mengatur representasi identitas melalui algoritma, moderasi konten, dan budaya platform. Dalam kondisi tersebut, pembentukan subjektivitas tidak berlangsung sebagai proses menerima atau menolak norma secara sederhana, melainkan sebagai praktik sosial yang melibatkan penyesuaian, reinterpretasi, dan penciptaan makna baru mengenai seksualitas maupun gender. Oleh karena itu, negosiasi identitas digital LGBTQA+ dapat dipahami sebagai proses

pembentukan subjektivitas yang berlangsung melalui pengulangan berbagai praktik sosial sekaligus membuka kemungkinan bagi munculnya bentuk-bentuk identitas yang lebih beragam.

Buku ini menggunakan konsep repetisi, norma, dan subjektivitas untuk menjelaskan bahwa identitas digital LGBTQA+ bukan merupakan ekspresi yang sepenuhnya bebas maupun hasil determinasi struktur sosial semata. Identitas diproduksi melalui pengulangan praktik-praktik sosial yang berlangsung dalam relasi antara norma budaya, kuasa, representasi media, interaksi digital, dan tata kelola platform. Dengan demikian, subjektivitas digital dipahami sebagai proses sosial yang terus berkembang melalui negosiasi antara keteraturan norma dan kemungkinan perubahan yang selalu muncul dalam setiap praktik performatif.

2.4.4 Performativitas dalam Media Digital

Perkembangan media digital memperluas ruang tempat performativitas gender berlangsung. Jika Judith Butler menjelaskan bahwa gender diproduksi melalui pengulangan berbagai praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari, maka media sosial menghadirkan lingkungan baru yang memungkinkan proses tersebut berlangsung secara lebih intensif, terdokumentasi, dan dapat diamati oleh audiens yang

jauh lebih luas. Identitas gender tidak lagi dibangun hanya melalui interaksi tatap muka, tetapi juga melalui unggahan foto, video, narasi pribadi, komentar, simbol visual, tagar, serta berbagai bentuk komunikasi digital yang diproduksi dan direproduksi secara terus-menerus. Dengan demikian, ruang digital menjadi arena tempat praktik performatif berlangsung secara berkelanjutan melalui kombinasi antara representasi diri, interaksi sosial, dan teknologi platform (Butler, 1990, 2004).

Dalam perspektif Butler, performativitas bukan sekadar tindakan individual, tetapi proses sosial yang menghasilkan identitas melalui repetisi norma. Pada masyarakat digital, repetisi tersebut berlangsung melalui mekanisme yang semakin kompleks karena dipengaruhi oleh karakteristik platform digital. Setiap unggahan, komentar, penggunaan emoji, pilihan bahasa, gaya berpakaian, maupun ekspresi visual menjadi bagian dari praktik performatif yang terus diulang dan memperoleh respons dari pengguna lain. Pengulangan tersebut memperkuat maupun mengubah makna identitas karena setiap interaksi digital menghasilkan proses evaluasi, pengakuan, serta reproduksi norma yang berlangsung secara terus-menerus (Butler, 1993; Duguay, 2024).

Berbeda dengan interaksi luring, performativitas dalam media digital tidak hanya melibatkan hubungan antara individu dan audiens, tetapi juga melibatkan algoritma sebagai aktor nonmanusia yang memengaruhi distribusi visibilitas suatu identitas. Algoritma menentukan konten yang direkomendasikan, diperluas jangkauannya, dibatasi distribusinya, atau bahkan tidak ditampilkan kepada pengguna lain. Dengan demikian, performativitas digital berkembang melalui interaksi antara pengguna, audiens, dan tata kelola platform (*platform governance*) yang secara aktif membentuk kondisi bagi munculnya berbagai bentuk ekspresi identitas. Kajian mengenai moderasi algoritmik menunjukkan bahwa platform digital tidak sekadar menjadi medium komunikasi, tetapi juga menjalankan fungsi regulatif yang memengaruhi bagaimana identitas dibentuk dan dikenali dalam ruang publik digital (Gorwa, Binns, & Katzenbach, 2020; Gillespie, 2018).

Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa komunitas LGBTQ+ secara aktif menyesuaikan praktik performatif mereka terhadap karakteristik platform digital. Pengguna memodifikasi pilihan kata, simbol visual, tagar, maupun bentuk representasi diri berdasarkan persepsi mengenai cara kerja algoritma dan kebijakan moderasi platform. Duguay (2024) menunjukkan bahwa praktik *identity modulation* di

TikTok memperlihatkan bagaimana pengguna tidak hanya menampilkan identitas, tetapi juga secara reflektif menyesuaikan bentuk ekspresinya agar tetap memperoleh visibilitas tanpa kehilangan makna identitas yang ingin disampaikan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa performativitas digital merupakan proses adaptasi yang terus berlangsung antara agensi individu dan mekanisme teknologi platform.

Penelitian Chartrand dan Duguay (2024) memperkuat argumentasi tersebut melalui konsep *algorithmic imaginaries*. Pengguna LGBTQ+ membangun pemahaman mengenai cara kerja algoritma berdasarkan pengalaman sehari-hari, kemudian menggunakan pemahaman tersebut untuk menentukan strategi presentasi diri di media sosial. Persepsi terhadap kemungkinan *shadow banning*, penurunan jangkauan konten, maupun pembatasan algoritmik memengaruhi bagaimana identitas seksual dan gender direpresentasikan. Dengan demikian, performativitas digital tidak hanya dipengaruhi oleh norma sosial, tetapi juga oleh interpretasi pengguna terhadap mekanisme teknologi yang bekerja di balik platform.

Kajian mengenai implikasi algoritma terhadap komunitas LGBTQ+ juga menunjukkan bahwa

performativitas identitas berlangsung melalui hubungan yang dinamis antara keterbukaan dan perlindungan diri. Myles, Duguay, dan Echaiz (2023) menunjukkan bahwa algoritma platform dapat memperluas ruang representasi bagi komunitas LGBTQ+, tetapi pada saat yang sama juga mereproduksi berbagai bentuk bias, klasifikasi, serta pembatasan terhadap identitas yang dianggap tidak sesuai dengan norma dominan. Kondisi tersebut mendorong pengguna untuk mengembangkan berbagai strategi komunikasi, seperti penggunaan bahasa alternatif, simbol tertentu, pengelolaan tingkat visibilitas akun, maupun pemisahan audiens sebagai bentuk negosiasi terhadap tata kelola platform.

Perspektif Butler membantu menjelaskan bahwa berbagai strategi tersebut bukan sekadar upaya teknis untuk menggunakan media sosial, melainkan bagian dari praktik performatif yang membentuk subjektivitas digital. Setiap keputusan mengenai bagaimana seseorang menampilkan identitasnya, memilih bahasa, mengelola citra visual, maupun menentukan tingkat keterbukaan merupakan tindakan performatif yang terus memproduksi identitas melalui repetisi praktik sosial. Oleh karena itu, identitas digital tidak dapat dipahami sebagai representasi yang statis, tetapi sebagai proses yang selalu berada dalam pembentukan melalui hubungan

antara norma budaya, interaksi sosial, dan teknologi digital (Butler, 1990, 2004).

Bagi kelompok LGBTQA+, media sosial menghadirkan ruang yang memungkinkan identitas dinegosiasikan secara lebih fleksibel dibandingkan ruang sosial konvensional. Namun, fleksibilitas tersebut tidak menghilangkan berbagai bentuk pengawasan, bias algoritmik, maupun tekanan norma heteronormatif yang tetap bekerja melalui infrastruktur digital. Dengan demikian, performativitas dalam media digital merupakan proses yang memperlihatkan bagaimana identitas seksual dan gender diproduksi melalui pengulangan praktik sosial sekaligus dinegosiasikan melalui relasi antara pengguna, audiens, dan tata kelola platform digital.

Dalam buku ini, konsep performativitas digital digunakan untuk menjelaskan bahwa negosiasi identitas digital LGBTQA+ merupakan proses sosial yang berlangsung melalui repetisi berbagai praktik representasi diri di media sosial. Identitas diproduksi melalui tindakan performatif yang dipengaruhi oleh norma budaya, relasi kuasa, representasi simbolik, serta mekanisme algoritmik yang mengatur visibilitas dan pengakuan sosial. Oleh karena itu, media sosial dipahami bukan sekadar sebagai ruang komunikasi, tetapi sebagai arena tempat identitas seksual dan

gender terus diproduksi, dipertahankan, dipersoalkan, dan dinegosiasikan melalui interaksi antara manusia dan teknologi.

2.4.5 Butler dan Negosiasi Identitas Digital LGBTQA+

Pemikiran Judith Butler memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami negosiasi identitas digital LGBTQA+ sebagai proses sosial yang terus berlangsung melalui praktik performatif. Berbeda dengan pendekatan esensialis yang memandang identitas seksual dan gender sebagai kategori yang tetap, Butler menunjukkan bahwa identitas selalu diproduksi melalui pengulangan berbagai norma sosial yang memperoleh legitimasi dalam masyarakat. Dengan demikian, identitas digital LGBTQA+ tidak dapat dipahami sebagai representasi dari identitas yang telah selesai terbentuk, tetapi sebagai hasil dari praktik-praktik sosial yang terus diproduksi, diulang, dimodifikasi, dan dinegosiasikan dalam ruang digital (Butler, 1990, 1993, 2004).

Dalam perspektif Butler, media sosial memperluas ruang tempat performativitas berlangsung. Platform digital memungkinkan individu membangun identitas melalui kombinasi teks, gambar, video, simbol visual, bahasa, suara, maupun berbagai bentuk komunikasi multimodal yang terus diperbarui dalam interaksi

sehari-hari. Setiap unggahan, komentar, pilihan foto profil, penggunaan tagar, maupun narasi personal merupakan tindakan performatif yang berkontribusi terhadap pembentukan identitas. Oleh karena itu, identitas digital berkembang bukan sebagai ekspresi yang bersifat spontan, tetapi melalui proses pengulangan yang secara bertahap menghasilkan pengakuan sosial terhadap suatu identitas (Butler, 1990; Duguay, 2024).

Proses tersebut menunjukkan bahwa negosiasi identitas tidak hanya berlangsung antara individu dan masyarakat, tetapi juga melibatkan teknologi platform sebagai bagian dari mekanisme pembentukan identitas. Tata kelola platform (*platform governance*), algoritma rekomendasi, moderasi konten, serta sistem klasifikasi digital memengaruhi bentuk-bentuk ekspresi yang memperoleh visibilitas maupun pembatasan dalam ruang digital. Dengan demikian, performativitas digital berkembang melalui hubungan yang saling memengaruhi antara agensi pengguna, norma sosial, dan infrastruktur teknologi. Kajian mengenai *algorithmic content moderation* menunjukkan bahwa algoritma berfungsi sebagai mekanisme regulatif yang secara aktif menentukan kondisi bagi munculnya berbagai praktik representasi identitas di media sosial (Gorwa, Binns, & Katzenbach, 2020; Gillespie, 2018).

Bagi komunitas LGBTQA+, relasi tersebut menghadirkan situasi yang paradoks. Di satu sisi, media sosial memperluas kesempatan untuk membangun komunitas, memperoleh dukungan sosial, serta menampilkan identitas seksual dan gender yang sebelumnya sulit memperoleh ruang dalam kehidupan luring. Di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan berbagai bentuk pengawasan melalui algoritma, moderasi konten, pelaporan akun, dan bias cisheteronormatif yang memengaruhi distribusi representasi identitas. Penelitian mengenai *identity modulation* menunjukkan bahwa pengguna LGBTQ+ secara aktif menyesuaikan bentuk representasi dirinya sesuai dengan karakteristik platform, audiens, dan persepsi terhadap mekanisme algoritma. Identitas digital dengan demikian berkembang melalui praktik adaptasi yang terus berlangsung antara kebutuhan akan visibilitas dan upaya mengurangi risiko pembatasan maupun stigma (Duguay, 2024).

Penelitian Chartrand dan Duguay (2024) memperlihatkan bahwa pengguna LGBTQ+ mengembangkan *algorithmic imaginaries*, yaitu pemahaman mengenai bagaimana algoritma bekerja berdasarkan pengalaman sehari-hari dalam menggunakan media sosial. Pemahaman tersebut kemudian memengaruhi keputusan mengenai bentuk representasi diri, penggunaan bahasa, simbol visual,

maupun strategi komunikasi yang dianggap mampu mempertahankan visibilitas identitas. Dengan demikian, performativitas digital tidak hanya dipengaruhi oleh norma budaya sebagaimana dijelaskan Butler, tetapi juga oleh interpretasi pengguna terhadap logika teknologi yang mengatur distribusi informasi dalam platform digital (Chartrand & Duguay, 2024).

Temuan tersebut diperkuat oleh kajian Myles, Duguay, dan Echaiz (2023) yang menunjukkan bahwa algoritma platform tidak hanya mengelola distribusi konten, tetapi juga membentuk pengalaman sosial komunitas LGBTQ+ melalui proses klasifikasi, rekomendasi, penyaringan konten, dan reproduksi norma dominan. Namun demikian, pengguna tidak sepenuhnya menjadi objek pengaturan teknologi. Mereka mengembangkan berbagai bentuk resistensi melalui pengelolaan tingkat visibilitas akun, penggunaan istilah alternatif, simbol tertentu, pemisahan audiens, maupun pembentukan komunitas digital yang lebih aman. Praktik-praktik tersebut memperlihatkan bahwa identitas digital selalu berkembang melalui proses negosiasi antara struktur teknologi dan agensi pengguna.

Dalam konteks Indonesia, proses negosiasi identitas digital LGBTQA+ berlangsung di tengah pertemuan

antara norma agama, budaya, hukum, opini publik, dan perkembangan media sosial. Oleh karena itu, praktik performatif yang dilakukan pengguna tidak hanya diarahkan untuk memperoleh pengakuan dari komunitas digital, tetapi juga mempertimbangkan berbagai konsekuensi sosial yang mungkin muncul di luar ruang digital. Identitas seksual dan gender diproduksi melalui proses yang terus berubah sesuai dengan karakteristik audiens, konteks budaya, serta dinamika platform yang membentuk ruang komunikasi digital. Perspektif Butler memungkinkan proses tersebut dipahami sebagai praktik performatif yang selalu terbuka terhadap perubahan karena setiap pengulangan norma selalu mengandung kemungkinan reinterpretasi dan transformasi identitas (Butler, 2004; Wijaya, 2022; Triastuti, 2021).

Berdasarkan sintesis tersebut, buku ini menggunakan teori performativitas Butler untuk menjelaskan bahwa negosiasi identitas digital LGBTQA+ merupakan proses pembentukan identitas yang berlangsung melalui pengulangan praktik representasi, interaksi sosial, dan komunikasi digital yang terus dimediasi oleh norma budaya serta tata kelola platform. Identitas digital dipahami bukan sebagai kondisi yang stabil maupun sebagai ekspresi individual yang sepenuhnya bebas, tetapi sebagai hasil dari hubungan yang dinamis antara performativitas, relasi kuasa,

sistem representasi, dan teknologi digital. Dengan demikian, media sosial menjadi arena tempat identitas seksual dan gender terus diproduksi, dinegosiasikan, memperoleh pengakuan, sekaligus dipersoalkan melalui interaksi yang berlangsung secara berkelanjutan.

2.5 Social Identity Theory dan politik pengakuan

2.5.1 Social Identity Theory: Identitas sebagai Produk Keanggotaan Sosial

Social Identity Theory (SIT) yang dikembangkan oleh Henri Tajfel dan John Turner menjelaskan bahwa identitas individu tidak hanya dibentuk oleh karakteristik personal, tetapi juga oleh keanggotaan dalam berbagai kelompok sosial. Individu memahami dirinya melalui proses kategorisasi sosial yang membedakan antara kelompok "kami" (*ingroup*) dan kelompok "mereka" (*outgroup*). Melalui proses tersebut, identitas sosial berkembang sebagai bagian dari upaya memperoleh rasa memiliki, harga diri, dan posisi sosial yang diakui dalam masyarakat (Tajfel, 1978; Tajfel & Turner, 1979; Turner et al., 1987).

Menurut Social Identity Theory, proses pembentukan identitas berlangsung melalui tiga tahapan utama, yaitu kategorisasi sosial (*social categorization*),

identifikasi sosial (*social identification*), dan perbandingan sosial (*social comparison*). Individu terlebih dahulu mengelompokkan dirinya ke dalam kategori sosial tertentu, kemudian menginternalisasi nilai dan norma kelompok tersebut sebagai bagian dari identitas dirinya. Selanjutnya, individu membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain untuk membangun identitas kolektif yang bernilai positif. Oleh karena itu, identitas sosial tidak berkembang secara individual, tetapi melalui hubungan sosial yang melibatkan pengakuan, perbedaan, dan interaksi antarkelompok (Tajfel, 1978; Turner et al., 1987).

Perkembangan kajian identitas menunjukkan bahwa identitas sosial bersifat dinamis dan kontekstual. Keanggotaan kelompok dapat berubah sesuai dengan situasi sosial, pengalaman hidup, maupun konteks interaksi yang dihadapi individu. Karena itu, identitas sosial tidak dipahami sebagai kategori yang tetap, tetapi sebagai proses yang terus dibentuk melalui komunikasi, pengalaman kolektif, dan perubahan lingkungan sosial (Jenkins, 2014; Hogg, 2016).

2.5.2 Identitas Kolektif dan Pembentukan Komunitas

Social Identity Theory menjelaskan bahwa identitas kolektif berkembang ketika individu merasakan

kesamaan pengalaman, nilai, maupun tujuan dengan anggota kelompok lainnya. Identitas kolektif memperkuat solidaritas sosial karena individu tidak lagi bertindak semata-mata sebagai pribadi, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang memiliki kepentingan bersama. Dalam konteks tersebut, pengakuan dari sesama anggota kelompok menjadi faktor penting yang memperkuat rasa memiliki dan legitimasi identitas sosial (Turner et al., 1987; Hogg, 2016).

Bagi kelompok minoritas, identitas kolektif juga berfungsi sebagai sumber dukungan sosial dalam menghadapi stigma, diskriminasi, dan eksklusi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembentukan komunitas memperkuat resiliensi, meningkatkan rasa aman, dan mendorong berkembangnya strategi kolektif untuk mempertahankan identitas di tengah tekanan sosial. Dengan demikian, identitas kolektif tidak hanya memiliki fungsi psikologis, tetapi juga menjadi sumber tindakan sosial dan mobilisasi komunitas (Jenkins, 2014; Fraser, 2000).

2.5.3 Politik Pengakuan dalam Perspektif Kontemporer

Perdebatan mengenai identitas sosial berkembang lebih jauh melalui konsep politik pengakuan (*politics*

of recognition). Charles Taylor berpendapat bahwa pengakuan merupakan kebutuhan fundamental manusia karena identitas individu berkembang melalui hubungan timbal balik dengan orang lain. Ketika suatu identitas tidak diakui atau direpresentasikan secara keliru, individu maupun kelompok berpotensi mengalami marginalisasi dan ketidakadilan sosial (Taylor, 1994).

Nancy Fraser memperluas argumentasi tersebut dengan menegaskan bahwa pengakuan tidak dapat dipisahkan dari persoalan distribusi sumber daya dan partisipasi sosial. Menurut Fraser, ketidakadilan terhadap kelompok minoritas tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengakuan simbolik, tetapi juga oleh ketimpangan ekonomi, politik, dan kelembagaan yang membatasi kesempatan mereka untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan publik. Oleh karena itu, perjuangan identitas selalu berkaitan dengan perjuangan memperoleh representasi, hak, dan partisipasi yang setara (Fraser, 2000; Fraser, 2003).

Axel Honneth menambahkan bahwa pengakuan berkembang melalui hubungan sosial yang memungkinkan individu memperoleh rasa hormat, penghargaan, dan kepercayaan diri. Pengakuan bukan sekadar penerimaan formal terhadap keberadaan seseorang, tetapi proses sosial yang memungkinkan

individu mengembangkan identitasnya secara bermakna dalam masyarakat. Sebaliknya, penolakan dan stigmatisasi menghambat pembentukan identitas serta membatasi partisipasi sosial kelompok yang dimarginalkan (Honneth, 1995).

2.5.4 Identitas Sosial dan Politik Pengakuan di Ruang Digital

Perkembangan media sosial memperluas ruang pembentukan identitas sosial sekaligus menciptakan arena baru bagi politik pengakuan. Platform digital memungkinkan individu membangun komunitas lintas wilayah, berbagi pengalaman, serta mengembangkan solidaritas berdasarkan identitas yang sama. Dalam konteks ini, identitas kolektif tidak lagi bergantung pada kedekatan geografis, tetapi berkembang melalui jaringan komunikasi digital yang mempertemukan individu dengan pengalaman sosial yang serupa (Papacharissi, 2011; Leaver, Highfield, & Abidin, 2023).

Namun, pengakuan dalam ruang digital tidak berlangsung secara netral. Visibilitas identitas dipengaruhi oleh tata kelola platform, algoritma rekomendasi, moderasi konten, dan pola interaksi antarpengguna. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mekanisme platform dapat memperluas peluang pengakuan bagi kelompok marginal, tetapi

juga dapat mereproduksi bias, eksklusi, dan ketidaksetaraan melalui pengaturan distribusi informasi serta representasi identitas (Gorwa, Binns, & Katzenbach, 2020; Duguay, 2024; Chartrand & Duguay, 2024).

2.5.5 Social Identity Theory, Politik Pengakuan, dan Negosiasi Identitas Digital LGBTQA+

Dalam konteks LGBTQA+, Social Identity Theory membantu menjelaskan bagaimana identitas seksual dan gender berkembang melalui keterlibatan individu dalam komunitas yang memberikan rasa memiliki, solidaritas, dan dukungan sosial. Identitas digital tidak hanya dibangun melalui ekspresi individual, tetapi juga melalui interaksi dengan komunitas yang menyediakan pengakuan terhadap pengalaman, nilai, dan simbol-simbol identitas yang sama. Dengan demikian, media sosial menjadi ruang penting bagi pembentukan identitas kolektif LGBTQA+.

Di sisi lain, politik pengakuan menjelaskan bahwa negosiasi identitas digital tidak berhenti pada pembentukan komunitas, tetapi juga menyangkut perjuangan memperoleh legitimasi dan pengakuan di ruang publik digital. Komunitas LGBTQA+ terus berhadapan dengan berbagai bentuk stigma, diskriminasi, dan heteronormativitas yang memengaruhi peluang mereka untuk memperoleh

visibilitas dan partisipasi yang setara. Dalam situasi tersebut, media sosial menjadi arena tempat pengakuan, penolakan, dukungan, maupun kontestasi berlangsung secara bersamaan.

Buku ini memadukan Social Identity Theory dengan perspektif politik pengakuan untuk menjelaskan bahwa negosiasi identitas digital LGBTQA+ merupakan proses sosial yang berlangsung melalui hubungan antara identitas kolektif, pengakuan sosial, relasi kuasa, representasi digital, dan tata kelola platform. Identitas digital dipahami bukan hanya sebagai ekspresi diri, tetapi juga sebagai proses memperoleh legitimasi dan posisi sosial melalui interaksi yang terus berlangsung dalam ruang digital.

Kelima perspektif yang telah dibahas pada bab ini tidak dimaksudkan sebagai teori-teori yang saling menggantikan, tetapi sebagai kerangka yang saling melengkapi untuk menjelaskan negosiasi identitas digital LGBTQA+. Foucault menjelaskan bagaimana identitas dibentuk melalui relasi kuasa dan produksi pengetahuan. Goffman menerangkan bagaimana identitas tersebut dipresentasikan dalam interaksi sosial. Barthes menunjukkan bagaimana identitas memperoleh makna melalui sistem representasi dan mitos budaya. Butler menjelaskan bagaimana identitas terus diproduksi melalui performativitas dan

pengulangan norma sosial. Selanjutnya, Social Identity Theory dan politik pengakuan memperlihatkan bagaimana identitas memperoleh legitimasi melalui keanggotaan kelompok, solidaritas kolektif, dan proses pengakuan sosial. Sintesis kelima perspektif tersebut memberikan dasar konseptual yang lebih komprehensif dibandingkan apabila negosiasi identitas digital hanya dijelaskan melalui satu pendekatan teoretis. Oleh karena itu, bagian berikutnya menyusun seluruh perspektif tersebut ke dalam satu kerangka konseptual yang digunakan sebagai landasan analisis dalam buku ini.

2.6 Kerangka konseptual negosiasi identitas digital

2.6.1 Sintesis Teoretis

Pembahasan pada bab ini menunjukkan bahwa negosiasi identitas digital LGBTQA+ merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui satu perspektif teoretis. Setiap teori memberikan penjelasan terhadap dimensi yang berbeda dari proses pembentukan identitas sehingga diperlukan sintesis yang menghubungkan seluruh perspektif tersebut ke dalam satu kerangka analisis yang utuh. Pendekatan multidimensional ini sejalan

dengan perkembangan kajian identitas kontemporer yang memandang identitas sebagai hasil interaksi antara relasi kuasa, praktik sosial, representasi budaya, performativitas, keanggotaan kelompok, dan dinamika media digital (Jenkins, 2014; Papacharissi, 2011; Cover, 2016).

Perspektif Michel Foucault menjelaskan bahwa identitas berkembang melalui relasi kuasa yang menghasilkan berbagai kategori pengetahuan mengenai seksualitas, normalitas, dan penyimpangan (Foucault, 1972, 1978, 1982). Erving Goffman melengkapi perspektif tersebut dengan menunjukkan bahwa identitas yang telah dibentuk melalui relasi sosial kemudian dipresentasikan dan dinegosiasikan melalui interaksi sehari-hari (Goffman, 1959, 1967). Roland Barthes memperluas analisis dengan menjelaskan bahwa identitas tidak hanya dipertunjukkan, tetapi juga memperoleh makna melalui sistem tanda, representasi simbolik, dan mitos budaya yang beredar dalam masyarakat (Barthes, 1972; Hall, 1997). Judith Butler selanjutnya menunjukkan bahwa identitas seksual dan gender tidak bersifat tetap, melainkan terus diproduksi melalui performativitas dan pengulangan norma sosial (Butler, 1990, 1993, 2004). Sementara itu, Social Identity Theory dan politik pengakuan menjelaskan bahwa identitas memperoleh legitimasi melalui

keanggotaan kelompok, solidaritas kolektif, serta proses pengakuan yang berlangsung dalam ruang sosial (Tajfel & Turner, 1979; Taylor, 1994; Fraser, 2000; Honneth, 1995).

Dalam masyarakat digital, seluruh proses tersebut tidak berlangsung secara terpisah. Relasi kuasa bekerja melalui tata kelola platform dan algoritma (Gorwa, Binns, & Katzenbach, 2020; Gillespie, 2018). Presentasi diri berlangsung melalui berbagai praktik komunikasi digital yang terus menyesuaikan diri dengan karakteristik audiens maupun logika platform (Papacharissi, 2011; Duguay, 2024). Representasi identitas dibangun melalui teks, gambar, video, simbol visual, serta berbagai sistem tanda digital yang menghasilkan makna sosial (Leaver, Highfield, & Abidin, 2023; Hall, 1997). Performativitas gender berkembang melalui pengulangan praktik komunikasi yang dimediasi oleh teknologi digital dan dipengaruhi oleh mekanisme algoritmik (Butler, 1990; Chartrand & Duguay, 2024). Identitas kolektif dibentuk melalui komunitas daring, sedangkan pengakuan sosial berkembang melalui interaksi antarpengguna, visibilitas algoritmik, dan respons publik terhadap berbagai bentuk representasi identitas (Myles, Duguay, & Echaiz, 2023; Duguay, 2024). Dengan demikian, negosiasi identitas digital merupakan hasil interaksi yang dinamis antara struktur sosial, praktik

komunikasi, sistem representasi, performativitas, identitas kolektif, serta tata kelola platform digital.

Sintesis tersebut menjadi dasar konseptual buku ini dalam menganalisis bagaimana identitas digital LGBTQA+ diproduksi, dipresentasikan, dimaknai, dinegosiasikan, memperoleh pengakuan, sekaligus menghadapi berbagai bentuk regulasi, normalisasi, dan resistensi dalam masyarakat digital kontemporer. Kerangka konseptual ini menjadi landasan analitis bagi pembahasan pada bab-bab berikutnya untuk menjelaskan dinamika negosiasi identitas LGBTQA+ dalam ruang digital melalui keterkaitan antara relasi kuasa, presentasi diri, representasi simbolik, performativitas gender, identitas kolektif, politik pengakuan, dan tata kelola platform digital (Foucault, 1978; Butler, 2004; Gorwa et al., 2020; Duguay, 2024).

2.6.2 Dimensi Negosiasi Identitas Digital

Berdasarkan sintesis teori tersebut, buku ini mengidentifikasi enam dimensi utama yang membentuk proses negosiasi identitas digital.

Dimensi pertama adalah relasi kuasa, yaitu berbagai mekanisme yang membentuk kemungkinan munculnya identitas melalui norma sosial, diskursus, institusi, dan tata kelola platform digital (Foucault, 1978; Gorwa, Binns, & Katzenbach, 2020).

Dimensi kedua adalah presentasi diri, yaitu strategi individu dalam mengelola kesan, memilih bentuk representasi, serta menyesuaikan identitas dengan karakteristik audiens yang berbeda dalam ruang digital (Goffman, 1959; Duguay, 2024).

Dimensi ketiga adalah representasi simbolik, yaitu proses pembentukan makna melalui penggunaan bahasa, gambar, warna, simbol visual, narasi, dan berbagai sistem tanda yang menghasilkan pemahaman sosial mengenai identitas (Barthes, 1972; Hall, 1997).

Dimensi keempat adalah performativitas gender, yaitu proses pembentukan identitas melalui pengulangan norma sosial yang terus berlangsung dalam praktik komunikasi digital. Dalam konteks media sosial, performativitas berkembang melalui representasi visual, interaksi daring, serta pengaruh algoritma terhadap visibilitas identitas (Butler, 1990; Chartrand & Duguay, 2024).

Dimensi kelima adalah identitas kolektif, yaitu pembentukan rasa memiliki, solidaritas, dan dukungan sosial melalui komunitas digital yang memiliki pengalaman serta nilai bersama (Tajfel & Turner, 1979; Jenkins, 2014).

Dimensi keenam adalah politik pengakuan, yaitu proses memperoleh legitimasi, penerimaan, dan partisipasi sosial dalam ruang publik digital. Pengakuan tidak hanya bergantung pada hubungan antarpengguna, tetapi juga dipengaruhi oleh tata kelola platform, algoritma, dan distribusi visibilitas yang membentuk peluang kelompok minoritas untuk memperoleh ruang publik digital (Fraser, 2000; Honneth, 1995; Duguay, 2024).

Keenam dimensi tersebut saling berkaitan dan tidak bekerja secara terpisah. Setiap perubahan dalam satu dimensi akan memengaruhi proses negosiasi identitas secara keseluruhan sehingga identitas digital selalu berkembang melalui hubungan yang dinamis antara individu, masyarakat, dan teknologi.

2.6.3 Model Konseptual Negosiasi Identitas Digital LGBTQA+

Berdasarkan keseluruhan pembahasan pada Bab II, buku ini mendefinisikan negosiasi identitas digital LGBTQA+ sebagai proses sosial yang berlangsung melalui interaksi berkelanjutan antara relasi kuasa, praktik presentasi diri, representasi simbolik, performativitas gender, identitas kolektif, dan politik pengakuan dalam lingkungan media digital. Proses tersebut tidak berlangsung secara linear, tetapi berkembang melalui hubungan timbal balik yang terus

berubah sesuai dengan pengalaman pengguna, karakteristik komunitas, dinamika algoritma, serta perubahan norma sosial.

Dalam kerangka ini, media sosial dipahami sebagai arena tempat identitas diproduksi, dipresentasikan, dimaknai, dinegosiasikan, memperoleh pengakuan, maupun dipersoalkan secara terus-menerus. Pengguna tidak hanya menjadi objek dari berbagai mekanisme sosial dan teknologi, tetapi juga bertindak sebagai aktor yang secara aktif membangun strategi komunikasi, memilih bentuk representasi, membentuk komunitas, serta mengembangkan praktik-praktik resistensi terhadap berbagai norma yang membatasi ekspresi identitas.

Tabel 2.1. Kontribusi Perspektif Sosiologi terhadap Analisis Negosiasi Identitas Digital LGBTQA+

Perspektif Teoretis	Fokus Analisis	Konsep Kunci	Kontribusi terhadap Negosiasi Identitas Digital
Michel Foucault	Relasi kuasa dan produksi seksualitas	Power, discourse,	Menjelaskan bagaimana norma

Perspektif Teoretis	Fokus Analisis	Konsep Kunci	Kontribusi terhadap Negosiasi Identitas Digital
		normalization, surveillance	heteronormatif diproduksi serta bagaimana platform digital menjadi ruang disiplin dan pengawasan identitas. Menjelaskan strategi pengguna dalam mengatur visibilitas identitas kepada audiens yang berbeda di media sosial.
Erving Goffman	Presentasi diri dalam interaksi sosial	Impression management, front stage, backstage	
Judith Butler	Performativitas gender	Gender performativity, heteronormativity	Menunjukkan bahwa identitas seksual dan

Perspektif Teoretis	Fokus Analisis	Konsep Kunci	Kontribusi terhadap Negosiasi Identitas Digital
Roland Barthes	Produksi makna melalui tanda	Denotasi, konotasi, mitos	gender diproduksi melalui praktik sosial yang terus diulang, termasuk melalui praktik digital. Menjelaskan bagaimana simbol, visual, dan narasi digital membentuk makna sosial mengenai identitas LGBTQA+.
Social Identity Theory	Identitas kelompok	Categorization, identification, comparison	Menjelaskan pembentukan identitas kolektif, solidaritas komunitas,

Perspektif Teoretis	Fokus Analisis	Konsep Kunci	Kontribusi terhadap Negosiasi Identitas Digital
Politics of Recognition	Pengakuan sosial	Recognition, misrecognition	dan rasa memiliki dalam ruang digital. Menjelaskan mengapa visibilitas digital tidak hanya berkaitan dengan ekspresi diri tetapi juga perjuangan memperoleh legitimasi sosial. Menjelaskan bahwa identitas dibentuk melalui interaksi simultan antara <u>pengguna,</u>
Digital Sociology	Relasi manusia dan teknologi	Platform, algorithm, digital interaction	

Perspektif Teoretis	Fokus Analisis	Konsep Kunci	Kontribusi terhadap Negosiasi Identitas Digital
			algoritma, dan tata kelola platform.

Uraian berbagai perspektif sosiologi di atas menunjukkan bahwa negosiasi identitas digital tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui satu kerangka teoretis. Setiap perspektif memberikan penjelasan terhadap dimensi yang berbeda dari proses pembentukan identitas. Foucault menjelaskan bagaimana relasi kuasa dan normalisasi membentuk batas-batas identitas yang dianggap sah. Goffman memperlihatkan bagaimana individu mengelola presentasi dirinya dalam situasi sosial yang berbeda. Barthes menjelaskan produksi makna melalui sistem tanda dan representasi visual. Butler menempatkan identitas sebagai praktik performatif yang terus diproduksi melalui pengulangan norma. Social Identity Theory menjelaskan pembentukan identitas kolektif dan rasa memiliki, sedangkan perspektif pengakuan sosial menegaskan pentingnya legitimasi dalam

memperoleh penerimaan masyarakat. Sintesis tersebut menunjukkan bahwa negosiasi identitas digital merupakan proses multidimensional yang berlangsung melalui interaksi antara individu, komunitas, struktur sosial, dan infrastruktur digital. Atas dasar itulah buku ini mengintegrasikan berbagai perspektif tersebut ke dalam Beyond the Closet Model sebagai kerangka analitis yang menjelaskan hubungan dinamis antara kekuasaan, representasi, resistensi, pengakuan sosial, dan transformasi norma dalam masyarakat digital.

BAB III RUANG DIGITAL SEBAGAI ARENA NEGOSIASI IDENTITAS

3.1 Evolusi ruang publik menuju ruang digital

Konsep ruang publik merupakan salah satu fondasi utama dalam sosiologi komunikasi karena menjelaskan bagaimana masyarakat membangun makna bersama melalui interaksi sosial. Dalam pemikiran Jürgen Habermas (1989), ruang publik (public sphere) dipahami sebagai arena komunikasi yang berada di antara negara dan masyarakat sipil, tempat warga negara bertukar gagasan, membentuk opini publik, serta mendiskusikan berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan bersama. Melalui proses deliberasi tersebut, ruang publik diharapkan menghasilkan keputusan yang rasional karena setiap individu memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi secara setara tanpa dominasi kekuasaan politik maupun ekonomi. Dengan demikian, ruang publik tidak sekadar menunjuk pada lokasi fisik, melainkan merupakan institusi sosial yang memungkinkan berlangsungnya komunikasi demokratis (Habermas, 1989). Hingga saat ini, konsep

tersebut masih menjadi titik awal berbagai kajian mengenai komunikasi publik dan demokrasi digital.

Meskipun demikian, asumsi mengenai kesetaraan dalam ruang publik kemudian memperoleh berbagai kritik. Nancy Fraser (1990) menunjukkan bahwa model ruang publik Habermas cenderung mengabaikan ketimpangan sosial yang menyebabkan tidak semua kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam diskursus publik. Kelompok perempuan, minoritas seksual, kelompok etnis, maupun komunitas marjinal sering kali tidak memperoleh akses yang setara terhadap produksi pengetahuan dan pembentukan opini publik. Oleh karena itu, Fraser mengemukakan konsep subaltern counterpublics, yaitu ruang-ruang komunikasi alternatif yang dibangun oleh kelompok marjinal untuk menghasilkan narasi, pengalaman, dan kepentingannya sendiri. Perspektif ini memperluas pemahaman mengenai ruang publik sebagai arena yang selalu dipenuhi relasi kuasa, negosiasi, dan kontestasi sosial, bukan sekadar ruang deliberasi yang netral.

Perkembangan teori ruang publik berikutnya semakin menegaskan bahwa komunikasi publik selalu dipengaruhi oleh struktur media yang digunakan masyarakat. Pada era media massa, surat kabar, radio,

dan televisi menjadi institusi utama yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai isu publik. Namun, struktur komunikasi tersebut bersifat hierarkis karena proses produksi, distribusi, dan seleksi informasi dikendalikan oleh organisasi media profesional. Dalam kondisi demikian, media berfungsi sebagai gatekeeper yang menentukan isu apa yang layak memperoleh perhatian publik serta aktor sosial mana yang memperoleh legitimasi untuk berbicara. Akibatnya, kelompok-kelompok marjinal, termasuk komunitas LGBTQA+, lebih sering direpresentasikan melalui sudut pandang institusi dominan dibandingkan melalui pengalaman mereka sendiri.

Transformasi digital mengubah struktur tersebut secara mendasar. Internet memperluas ruang komunikasi sehingga masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai produsen, distributor, sekaligus evaluator informasi. Manuel Castells (2010) menjelaskan perubahan ini melalui konsep *network society*, yaitu masyarakat yang aktivitas ekonomi, politik, dan budayanya semakin diorganisasikan melalui jaringan komunikasi digital. Dalam masyarakat jaringan, komunikasi berlangsung secara horizontal antarpengguna sehingga proses produksi makna tidak lagi dimonopoli oleh institusi media konvensional. Identitas, pengetahuan, dan gerakan sosial

berkembang melalui konektivitas jaringan yang melintasi batas geografis maupun institusional.

Perubahan tersebut mendorong lahirnya konsep digital public sphere sebagai bentuk baru ruang publik dalam masyarakat digital. Digital public sphere merujuk pada ruang komunikasi yang terbentuk melalui jaringan internet dan platform digital, tempat individu, komunitas, organisasi, maupun institusi berinteraksi secara simultan untuk membangun, memperdebatkan, dan menyebarkan berbagai makna sosial. Christian Nuernbergk menjelaskan bahwa digital public sphere tidak menghapus fungsi ruang publik klasik, tetapi mentransformasikan struktur, mekanisme, serta aktor yang terlibat di dalamnya. Ruang publik digital memungkinkan partisipasi yang jauh lebih luas, tetapi sekaligus mengubah cara perhatian publik diproduksi, didistribusikan, dan diperebutkan melalui infrastruktur digital. Dengan demikian, ruang publik kontemporer tidak lagi dapat dipahami hanya melalui institusi media massa, melainkan harus dianalisis melalui hubungan antara masyarakat, teknologi, platform digital, dan sistem komunikasi yang saling berinteraksi.

Perubahan tersebut tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga bersifat struktural. Ming Xie (2024) menjelaskan bahwa transformasi menuju digital

public sphere berlangsung melalui proses platformation, yaitu perubahan berbagai aktivitas komunikasi masyarakat ke dalam ekosistem platform digital yang memiliki aturan, logika, dan infrastruktur tersendiri. Dalam kondisi ini, media sosial tidak lagi berfungsi sekadar sebagai saluran komunikasi, melainkan menjadi ruang sosial tempat interaksi publik dimediasi oleh perusahaan platform melalui desain antarmuka, algoritma, kebijakan moderasi, perlindungan data, serta model bisnis berbasis perhatian pengguna. Oleh karena itu, perubahan ruang publik menuju ruang digital harus dipahami sebagai perubahan struktur komunikasi masyarakat secara menyeluruh, bukan sekadar adopsi teknologi komunikasi baru.

Perkembangan tersebut juga mengubah makna partisipasi publik. Pada ruang publik konvensional, partisipasi umumnya berlangsung melalui organisasi sosial, media massa, ataupun institusi politik. Sebaliknya, dalam ruang publik digital setiap individu dapat memproduksi konten, membangun komunitas, mengomentari isu publik, mengorganisasi aksi kolektif, serta membentuk jaringan komunikasi lintas wilayah secara relatif cepat. Media sosial memperluas peluang partisipasi warga karena hambatan geografis dan institusional semakin berkurang. Akan tetapi, perluasan partisipasi tersebut tidak selalu

menghasilkan komunikasi yang lebih demokratis. Infrastruktur digital tetap bekerja melalui mekanisme seleksi, amplifikasi, dan distribusi informasi yang ditentukan oleh logika platform, sehingga visibilitas suatu isu tidak hanya bergantung pada kualitas argumen, tetapi juga pada dinamika algoritma dan perhatian pengguna.

Dengan demikian, evolusi ruang publik menunjukkan adanya pergeseran dari ruang komunikasi yang didominasi institusi media menuju ruang komunikasi berbasis jaringan digital yang semakin dipengaruhi oleh platform teknologi. Pergeseran ini memperluas kesempatan bagi berbagai kelompok sosial untuk menyampaikan pengalaman dan membangun representasi diri, tetapi pada saat yang sama menciptakan bentuk-bentuk baru distribusi perhatian, pengawasan, dan relasi kuasa. Oleh karena itu, digital public sphere perlu dipahami sebagai hasil transformasi historis ruang publik yang menghubungkan komunikasi, teknologi, ekonomi politik platform, dan praktik sosial masyarakat secara simultan. Pemahaman mengenai perubahan struktural inilah yang menjadi landasan untuk menjelaskan bagaimana identitas, termasuk identitas LGBTQA+, diproduksi, dipertontonkan, diperdebatkan, dan dinegosiasikan dalam media sosial pada bagian-bagian selanjutnya.

Transformasi ruang publik menuju ruang digital tidak hanya mengubah media komunikasi, tetapi juga mengubah struktur sosial yang mengatur bagaimana informasi diproduksi, disebar, dan memperoleh legitimasi. Jika ruang publik pada era media massa didominasi oleh institusi jurnalistik sebagai penentu agenda publik, maka pada era digital fungsi tersebut bergeser kepada platform digital yang mengendalikan arsitektur komunikasi melalui algoritma, infrastruktur data, dan mekanisme moderasi konten (van Dijck, Poell, & de Waal, 2018; Gillespie, 2018). Pergeseran ini dikenal sebagai platformization, yaitu proses ketika berbagai aktivitas sosial, budaya, ekonomi, dan politik semakin bergantung pada logika operasional platform digital sebagai infrastruktur utama kehidupan masyarakat. Platformisasi tidak hanya mengubah cara masyarakat berkomunikasi, tetapi juga membentuk aturan mengenai siapa yang dapat terlihat, didengar, direkomendasikan, dan memperoleh perhatian publik (van Dijck et al., 2018). Kajian mutakhir menunjukkan bahwa platformisasi telah menjadi karakter utama ruang publik digital kontemporer karena hampir seluruh interaksi publik berlangsung melalui ekosistem platform yang dimiliki perusahaan teknologi global.

Berbeda dengan media massa konvensional yang menggunakan editor sebagai penyaring informasi,

platform digital mengandalkan sistem algoritmik untuk mengelola miliaran konten yang diproduksi setiap hari. Gillespie (2018) menjelaskan bahwa algoritma tidak sekadar bekerja sebagai perangkat teknis yang netral, tetapi merupakan mekanisme tata kelola (governance) yang menentukan distribusi informasi, keterlihatan pengguna, serta batas-batas ekspresi publik. Melalui proses ranking, recommendation, personalization, filtering, dan content moderation, algoritma secara terus-menerus menentukan informasi mana yang memperoleh jangkauan luas dan informasi mana yang menjadi kurang terlihat. Oleh karena itu, algoritma tidak hanya mengelola data, tetapi juga mengatur hubungan sosial dan distribusi kekuasaan dalam ruang digital. Penelitian terkini mengenai tata kelola platform menunjukkan bahwa regulasi platform semakin menjadi bentuk baru pengelolaan ruang publik yang menggabungkan kepentingan komersial, kebijakan publik, dan perlindungan terhadap pengguna, meskipun prioritas ekonomi platform sering kali tetap mendominasi pengambilan keputusan.

Perubahan tersebut melahirkan konsep algorithmic governance, yaitu bentuk tata kelola sosial yang dijalankan melalui sistem komputasional berbasis data, kecerdasan buatan, dan algoritma otomatis. Dalam sistem ini, keputusan mengenai distribusi

perhatian, rekomendasi konten, deteksi pelanggaran, hingga pembatasan akun semakin bergantung pada proses komputasi yang tidak sepenuhnya transparan bagi pengguna (Gillespie, 2018). Governance tidak lagi dijalankan hanya melalui regulasi negara atau norma sosial, melainkan juga melalui kode, perangkat lunak, dan desain platform. Mansell (2024) menjelaskan bahwa perkembangan governance digital menunjukkan pergeseran dari regulasi media menuju regulasi infrastruktur digital yang mengintegrasikan kepentingan perusahaan platform, pemerintah, serta sistem kecerdasan buatan dalam satu ekosistem pengendalian komunikasi. Dengan demikian, platform digital berfungsi sebagai aktor institusional yang ikut menentukan batas-batas kebebasan berekspresi dalam ruang publik digital.

Konsekuensi paling penting dari platformization adalah berubahnya makna visibilitas sosial. Dalam masyarakat digital, visibilitas tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kehadiran seseorang di ruang publik, tetapi oleh kemampuan konten untuk dikenali, direkomendasikan, dan disebarluaskan oleh sistem algoritmik. Papacharissi (2015) menjelaskan bahwa afektifitas, konektivitas, dan jaringan digital membentuk proses baru dalam produksi perhatian publik. Sementara itu, van Dijck et al. (2018) menunjukkan bahwa perhatian (attention) telah

menjadi sumber daya ekonomi sekaligus sumber daya simbolik yang diperebutkan oleh pengguna maupun platform. Dengan demikian, visibilitas digital merupakan hasil interaksi antara praktik pengguna, respons audiens, serta logika algoritma yang bekerja di balik platform. Identitas yang memperoleh eksposur tinggi bukan semata-mata identitas yang paling representatif, melainkan identitas yang sesuai dengan mekanisme distribusi perhatian digital.

Kondisi tersebut memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan identitas digital. Identitas tidak lagi dipahami sebagai atribut personal yang stabil, tetapi sebagai proses sosial yang terus diproduksi melalui interaksi antara pengguna, audiens, dan infrastruktur digital. Penelitian terbaru mengenai *identity development in digital contexts* menunjukkan bahwa media sosial memungkinkan individu bereksperimen dengan berbagai bentuk ekspresi diri, memperoleh umpan balik secara langsung, dan merevisi identitasnya berdasarkan interaksi yang berlangsung secara berulang. Identitas digital dengan demikian bersifat relasional karena dibentuk melalui jaringan komunikasi, sistem rekomendasi, serta respons sosial yang dimediasi teknologi. Proses ini memperkuat pandangan bahwa identitas merupakan hasil negosiasi sosial yang berlangsung secara terus-

menerus, bukan karakteristik yang melekat secara tetap.

Bagi kelompok LGBTQA+, transformasi tersebut menghadirkan paradoks yang sangat khas. Di satu sisi, platform digital menyediakan ruang yang sebelumnya tidak tersedia dalam kehidupan offline untuk membangun komunitas, memperoleh dukungan sosial, mengeksplorasi identitas seksual maupun gender, serta membangun solidaritas lintas wilayah. Internet sejak awal memang menjadi ruang penting bagi komunitas queer untuk membangun jaringan alternatif di luar institusi sosial yang sering kali bersifat eksklusif. Namun, perkembangan algoritma dan tata kelola platform juga menciptakan bentuk-bentuk baru pengawasan digital yang sebelumnya tidak ada. Algoritma mampu mengidentifikasi pola perilaku, memprediksi karakteristik pengguna, serta mengelompokkan identitas berdasarkan jejak digital yang ditinggalkan selama menggunakan platform. Kajian Duguay, Myles, dan Echaiz menunjukkan bahwa algoritma platform dapat memperkuat bias cisheteronormatif melalui proses kategorisasi, rekomendasi, moderasi otomatis, serta distribusi visibilitas yang tidak setara bagi komunitas LGBTQ+.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa visibilitas digital memiliki karakter yang ambivalen. Keterlihatan

memang membuka peluang memperoleh pengakuan sosial, membangun jejaring, dan memperluas representasi kelompok minoritas. Akan tetapi, keterlihatan yang sama juga meningkatkan risiko pengawasan, ujaran kebencian, pelaporan massal, shadow banning, hingga pembatasan distribusi konten oleh sistem moderasi otomatis. Dengan kata lain, visibilitas digital selalu berada dalam hubungan dialektis antara pengakuan dan kerentanan. Penelitian mengenai platform governance di komunitas marginal menunjukkan bahwa pengguna LGBTQA+ mengembangkan berbagai strategi adaptif, seperti penggunaan simbol tertentu, bahasa terselubung, pengaturan privasi akun, migrasi lintas platform, hingga pembentukan komunitas semi-tertutup untuk mengurangi risiko pengawasan sekaligus mempertahankan keberlanjutan ekspresi identitas mereka.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak dapat dipahami hanya sebagai ruang ekspresi individual. Platform digital merupakan arena sosial yang mempertemukan relasi kuasa antara pengguna, komunitas, algoritma, perusahaan platform, negara, dan norma budaya secara bersamaan. Identitas digital tidak berkembang secara bebas, melainkan dibentuk melalui proses negosiasi yang berlangsung di bawah peluang sekaligus batasan yang diciptakan oleh

infrastruktur digital. Oleh karena itu, negosiasi identitas LGBTQA+ perlu dipahami sebagai hasil interaksi dinamis antara praktik representasi diri, pengakuan komunitas, tata kelola algoritmik, dan struktur sosial yang terus berubah. Kerangka inilah yang menjadi dasar analisis pada bagian-bagian berikutnya ketika membahas bagaimana pengguna TikTok membangun, mempertahankan, dan menegosiasikan identitasnya dalam ruang digital.

3.2 Algoritma, visibilitas, dan kekuasaan platform

Perkembangan media sosial tidak hanya mengubah cara individu berkomunikasi, tetapi juga mengubah mekanisme produksi kekuasaan dalam ruang publik digital. Jika pada era media massa distribusi informasi terutama dikendalikan oleh editor, redaksi, dan institusi penyiaran, maka pada era platform digital proses tersebut semakin ditentukan oleh sistem algoritmik yang bekerja secara otomatis melalui pengumpulan data, pemeringkatan konten, personalisasi informasi, dan rekomendasi berbasis perilaku pengguna (van Dijck, Poell, & de Waal, 2018; Gillespie, 2018). Perubahan ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam ruang digital tidak lagi semata-mata berada pada aktor manusia, tetapi juga tertanam dalam desain teknologi, infrastruktur data, dan logika komputasional yang mengatur interaksi sosial.

Fenomena tersebut dipahami sebagai platformization, yaitu proses ketika platform digital berkembang menjadi infrastruktur utama bagi aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat (van Dijck et al., 2018). Platform tidak lagi sekadar menyediakan ruang komunikasi, tetapi juga mengatur hubungan antara pengguna, menentukan mekanisme distribusi informasi, serta membentuk aturan yang mengendalikan aktivitas digital sehari-hari. van Dijck et al. (2018) menjelaskan bahwa kekuasaan platform bersifat relasional karena muncul melalui hubungan saling bergantung antara perusahaan platform, pengguna, pengiklan, pemerintah, dan berbagai institusi sosial lainnya. Oleh karena itu, platform digital perlu dipahami sebagai institusi sosial yang memiliki kapasitas untuk membentuk struktur komunikasi publik, bukan hanya sebagai penyedia layanan teknologi.

Transformasi tersebut menyebabkan algoritma menjadi mekanisme utama dalam mengelola ruang publik digital. Berbeda dengan proses editorial konvensional yang relatif dapat diamati, algoritma bekerja melalui proses komputasional yang sebagian besar tidak terlihat oleh pengguna. Gillespie (2018) menjelaskan bahwa algoritma menjalankan fungsi kurasi, klasifikasi, prioritas, dan moderasi konten secara simultan sehingga menentukan informasi apa

yang muncul, kepada siapa informasi tersebut disampaikan, dan seberapa luas jangkauan yang diperoleh. Dengan demikian, algoritma tidak sekadar menjalankan fungsi teknis, tetapi juga menjalankan fungsi sosial karena menentukan distribusi perhatian, pembentukan opini publik, dan peluang seseorang untuk memperoleh pengakuan sosial.

Kondisi tersebut kemudian melahirkan konsep *algorithmic governance*. Konsep ini menjelaskan bahwa tata kelola ruang digital semakin dijalankan melalui kombinasi algoritma, kecerdasan buatan, analisis data, dan kebijakan platform yang bekerja secara otomatis dalam mengatur perilaku pengguna. *Governance* tidak lagi hanya dilakukan melalui regulasi negara atau norma sosial, tetapi juga melalui perangkat lunak yang menetapkan aturan mengenai distribusi konten, rekomendasi, moderasi, hingga pembatasan akun. Mansell (2024) menjelaskan bahwa *governance platform* merupakan bentuk baru tata kelola komunikasi yang menggabungkan regulasi formal, kepentingan ekonomi perusahaan digital, serta otomatisasi berbasis kecerdasan buatan. Robert Gorwa (2024) menambahkan bahwa platform menjalankan kekuasaan melalui tiga mekanisme utama, yaitu desain sistem, penyusunan aturan komunitas, dan fungsi *gatekeeping* terhadap arus informasi.

Kekuasaan algoritmik tersebut menghasilkan perubahan mendasar terhadap konsep visibilitas. Dalam ruang publik konvensional, keterlihatan terutama ditentukan oleh akses terhadap media atau institusi publik. Sebaliknya, dalam media sosial, visibilitas merupakan hasil interaksi antara aktivitas pengguna, respons audiens, dan sistem rekomendasi algoritmik. Konten yang memperoleh eksposur luas bukan semata-mata ditentukan oleh kualitas substansi, tetapi juga oleh berbagai sinyal digital seperti tingkat interaksi, durasi menonton, frekuensi berbagi, pola klik, kedekatan jaringan, dan histori perilaku pengguna. Dengan demikian, visibilitas berubah menjadi hasil seleksi algoritmik yang berlangsung secara terus-menerus dan dinamis (Papacharissi, 2015; van Dijck et al., 2018).

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa algoritma tidak hanya meningkatkan visibilitas sebagian konten, tetapi juga dapat membatasi keterlihatan konten lainnya melalui berbagai bentuk intervensi yang tidak selalu disadari pengguna. Leerssen (2024) menjelaskan bahwa meningkatnya kompleksitas sistem rekomendasi menjadikan transparansi algoritmik semakin sulit dicapai sehingga berbagai negara mulai mengembangkan pendekatan platform observability sebagai bentuk pengawasan terhadap mekanisme kerja platform digital. Sementara itu,

penelitian mengenai platform power menegaskan bahwa distribusi perhatian digital tidak pernah sepenuhnya netral karena selalu dipengaruhi oleh kepentingan bisnis, kebijakan moderasi, serta desain teknis platform.

Perubahan tersebut juga berkaitan erat dengan berkembangnya attention economy. Dalam ekonomi digital, perhatian pengguna menjadi sumber daya utama yang diperebutkan oleh platform karena berkaitan langsung dengan pendapatan iklan, monetisasi data, dan durasi penggunaan aplikasi. Akibatnya, algoritma dirancang untuk mempertahankan keterlibatan pengguna selama mungkin melalui rekomendasi konten yang dipersonalisasi. Rahman, Karunakaran, dan Cameron (2024) menunjukkan bahwa akumulasi kekuasaan platform tidak hanya berasal dari kepemilikan teknologi, tetapi juga dari kemampuan mengendalikan distribusi perhatian serta menetapkan aturan yang mengikat seluruh aktor di dalam ekosistem digital. Platform pada akhirnya memiliki kapasitas untuk menentukan siapa yang memperoleh manfaat ekonomi, siapa yang memperoleh pengaruh sosial, dan siapa yang kehilangan visibilitas.

Dalam konteks identitas digital, mekanisme tersebut memiliki implikasi yang sangat signifikan. Identitas

tidak lagi hanya dibentuk melalui interaksi antarmanusia, tetapi juga melalui interaksi antara pengguna dengan sistem algoritmik. Pengguna terus menyesuaikan bentuk representasi dirinya berdasarkan respons audiens maupun perubahan logika platform. Identitas digital menjadi semakin bersifat performatif karena ekspresi diri dipengaruhi oleh prediksi mengenai bagaimana algoritma akan mendistribusikan suatu konten. Dengan kata lain, proses pembentukan identitas berlangsung melalui negosiasi yang melibatkan individu, komunitas, dan sistem komputasional secara bersamaan.

Bagi komunitas LGBTQA+, hubungan tersebut menjadi semakin kompleks. Platform digital membuka peluang yang jauh lebih besar untuk membangun komunitas, memperoleh dukungan sosial, dan menampilkan identitas yang sebelumnya sulit diekspresikan dalam ruang offline. Namun, peluang tersebut berjalan berdampingan dengan meningkatnya risiko sensor algoritmik, shadow banning, pelaporan massal, ujaran kebencian, serta pembatasan distribusi konten yang berkaitan dengan seksualitas dan keberagaman gender. Carolina Are (2024) menunjukkan bahwa platform governance sering kali menghasilkan bentuk pengawasan digital yang secara tidak proporsional memengaruhi kelompok-kelompok marjinal sehingga keterlihatan digital selalu disertai dengan

meningkatnya kerentanan terhadap pengendalian platform.

Berdasarkan uraian tersebut, algoritma tidak dapat dipahami sebagai perangkat teknis yang netral. Algoritma merupakan mekanisme sosial yang mengatur distribusi perhatian, menentukan visibilitas, membentuk hubungan kekuasaan, dan memengaruhi peluang individu untuk memperoleh pengakuan dalam ruang digital. Oleh karena itu, negosiasi identitas LGBTQA+ di media sosial tidak berlangsung dalam ruang komunikasi yang bebas, tetapi di dalam ekosistem platform yang secara simultan membuka peluang ekspresi sekaligus menciptakan berbagai bentuk pengawasan, seleksi, dan kontrol. Pemahaman mengenai kekuasaan algoritmik inilah yang menjadi landasan untuk menjelaskan bagaimana tubuh, simbol, bahasa visual, dan praktik performatif identitas akan dibahas pada subbab berikutnya.

3.3 Tubuh digital dan politik representasi

Pembahasan mengenai identitas digital tidak dapat dipisahkan dari konsep tubuh sebagai konstruksi sosial. Dalam perspektif sosiologi, tubuh bukan sekadar entitas biologis, melainkan ruang tempat berbagai norma, relasi kuasa, dan identitas diproduksi

serta dipertentangkan. Michel Foucault (1978) menjelaskan bahwa tubuh merupakan objek sekaligus instrumen kekuasaan karena berbagai institusi sosial membentuk cara individu memahami, mendisiplinkan, dan menampilkan dirinya melalui mekanisme pengetahuan, normalisasi, dan pengawasan. Oleh karena itu, tubuh selalu memiliki dimensi politik karena menjadi arena tempat berbagai definisi mengenai normalitas, moralitas, seksualitas, dan identitas diproduksi serta dinegosiasikan.

Perkembangan teknologi digital memperluas konsep tersebut melalui hadirnya tubuh digital (digital body atau digital embodiment). Dalam lingkungan digital, tubuh tidak lagi hadir hanya sebagai keberadaan biologis, tetapi sebagai representasi yang dibangun melalui foto, video, avatar, filter, ekspresi visual, metadata, serta jejak digital yang terus diproduksi selama individu berinteraksi dengan platform. Braga (2024) menjelaskan bahwa digital embodiment menunjukkan bagaimana pengalaman tubuh semakin dimediasi oleh teknologi sehingga identitas seseorang dipahami melalui kombinasi antara tubuh fisik, representasi visual, dan data digital yang dihasilkan dalam aktivitas daring. Dengan demikian, tubuh digital merupakan hasil hubungan yang terus berlangsung antara pengalaman personal, teknologi digital, dan sistem platform yang mengelola representasi tersebut.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya memediasi komunikasi, tetapi juga membentuk cara tubuh dipersepsikan dan memperoleh makna sosial. Jose' van Dijck (2013) menyebut proses ini sebagai *datafication of everyday life*, yaitu perubahan pengalaman sehari-hari menjadi data digital yang dapat dikumpulkan, dianalisis, dan dimonetisasi oleh platform. Dalam perkembangan selanjutnya, platformisasi masyarakat memperluas proses tersebut sehingga tubuh digital tidak hanya direpresentasikan melalui gambar atau video, tetapi juga melalui pola interaksi, histori pencarian, preferensi konten, lokasi, jaringan pertemanan, dan berbagai bentuk data perilaku pengguna (van Dijck, Poell, & de Waal, 2018). Oleh karena itu, tubuh digital tidak hanya bersifat visual, tetapi juga bersifat informasional karena keberadaannya terus diproduksi melalui data yang dikumpulkan platform.

Perubahan tersebut menggeser cara memahami representasi. Stuart Hall menjelaskan bahwa representasi bukan proses mencerminkan realitas secara pasif, melainkan proses aktif yang menghasilkan makna melalui bahasa, simbol, citra, dan praktik budaya (Hall, Evans, & Nixon, 2024). Makna tidak melekat secara alamiah pada tubuh, tetapi dibentuk melalui sistem representasi yang berkembang dalam masyarakat. Tubuh memperoleh

arti karena dikaitkan dengan kategori-kategori sosial tertentu, seperti maskulinitas, feminitas, heteroseksualitas, homoseksualitas, kesalehan, moralitas, atau penyimpangan. Dengan demikian, tubuh selalu menjadi lokasi produksi makna sekaligus arena pertarungan berbagai kepentingan budaya.

Dalam ruang digital, proses representasi tersebut berlangsung semakin kompleks karena tidak hanya melibatkan individu dan masyarakat, tetapi juga platform digital sebagai aktor yang ikut menentukan distribusi makna. Foto, video pendek, siaran langsung, filter visual, musik, hashtag, maupun fitur rekomendasi menjadi perangkat representasional yang membentuk bagaimana tubuh dipahami oleh pengguna lain. *The Oxford Handbook of Digital Media Sociology* menegaskan bahwa media digital telah mengubah tubuh menjadi objek komunikasi yang terus diproduksi, dipertukarkan, dan dievaluasi melalui jaringan platform digital. Representasi tubuh dengan demikian tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendali individu, tetapi dipengaruhi oleh affordances platform, algoritma rekomendasi, dan pola interaksi pengguna yang menentukan tingkat visibilitas suatu representasi (*The Oxford Handbook of Digital Media Sociology*, 2024).

Politik representasi muncul karena tidak semua tubuh memperoleh peluang yang sama untuk terlihat dan diakui. Hall menegaskan bahwa representasi selalu berkaitan dengan relasi kuasa karena menentukan siapa yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan realitas sosial dan siapa yang menjadi objek pendefinisian (Hall et al., 2024). Dalam konteks media digital, politik representasi tidak hanya berkaitan dengan isi konten, tetapi juga dengan mekanisme platform yang menentukan konten mana yang direkomendasikan, diperluas jangkauannya, dibatasi, atau bahkan dihapus. Dengan demikian, representasi tubuh dalam media sosial selalu merupakan hasil negosiasi antara praktik pengguna, norma budaya, dan tata kelola platform digital.

Bagi komunitas LGBTQA+, politik representasi memiliki arti yang sangat penting karena tubuh sering menjadi penanda utama identitas seksual dan identitas gender. Berbagai ekspresi mengenai cara berpakaian, gestur tubuh, ekspresi wajah, gaya berbicara, hingga pilihan estetika visual menjadi medium untuk mengkomunikasikan identitas sekaligus membangun rasa memiliki terhadap komunitas tertentu. Akan tetapi, representasi tersebut juga berhadapan dengan norma heteronormatif yang masih mendominasi banyak masyarakat. The Oxford Handbook of Media and Social Justice (2024)

menunjukkan bahwa representasi queer di media digital merupakan arena kontestasi antara upaya memperoleh pengakuan sosial dan berbagai mekanisme eksklusi yang bekerja melalui stigma budaya, regulasi platform, maupun praktik diskriminasi digital. Tubuh digital komunitas LGBTQA+ karena itu tidak dapat dipahami sebagai representasi individual semata, tetapi sebagai praktik sosial yang selalu berada dalam hubungan dengan struktur kekuasaan yang lebih luas.

Literatur terbaru mengenai queer digital media juga menunjukkan bahwa media sosial telah membuka ruang baru bagi komunitas LGBTQA+ untuk membangun representasi yang sebelumnya sulit memperoleh tempat dalam media arus utama. Platform digital memungkinkan individu memproduksi narasi mengenai tubuh, identitas, pengalaman diskriminasi, maupun kehidupan sehari-hari tanpa harus bergantung pada institusi media konvensional. Namun, peluang tersebut berjalan berdampingan dengan meningkatnya risiko pengawasan algoritmik, ujaran kebencian, pelaporan massal, shadow banning, dan pembatasan distribusi konten yang berkaitan dengan seksualitas maupun keberagaman gender. Penelitian mengenai LGBTQ+ digital communities menunjukkan bahwa tubuh digital komunitas queer selalu berada dalam posisi

paradoks, yaitu semakin terlihat sekaligus semakin rentan terhadap berbagai bentuk kontrol digital (Oxford Handbook of Digital Media Sociology, 2024; Bodies on the Line vs. Bodies Online, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, tubuh digital merupakan konstruksi sosial yang terbentuk melalui hubungan antara tubuh biologis, teknologi digital, representasi simbolik, serta infrastruktur platform. Politik representasi menjelaskan bahwa proses tersebut tidak pernah berlangsung secara netral karena selalu dipengaruhi oleh relasi kuasa yang menentukan siapa yang memperoleh visibilitas, siapa yang diakui, dan siapa yang dimarginalkan. Dalam konteks penelitian ini, tubuh digital menjadi medium utama tempat identitas LGBTQA+ dipresentasikan, dipersepsikan, dan dinegosiasikan melalui interaksi yang berlangsung secara terus-menerus di media sosial. Pemahaman mengenai tubuh digital ini menjadi landasan konseptual untuk menjelaskan bagaimana bahasa visual, simbol, dan praktik performatif membentuk negosiasi identitas pada platform TikTok yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

3.4 Bahasa visual, simbol, dan performativitas identitas

Media sosial mengubah cara identitas diproduksi melalui pergeseran dari komunikasi yang didominasi bahasa verbal menuju komunikasi yang semakin mengandalkan representasi visual. Foto, video pendek, ekspresi wajah, gerak tubuh, pilihan musik, filter, warna, teks singkat, emoji, hingga tata letak visual menjadi perangkat komunikasi yang secara bersama-sama menghasilkan makna sosial. Dalam konteks ini, identitas tidak lagi terutama dikonstruksi melalui narasi panjang, tetapi melalui kombinasi berbagai tanda visual yang bekerja secara simultan. Literatur mengenai visual culture menunjukkan bahwa perkembangan media digital telah menjadikan komunikasi visual sebagai bentuk utama produksi makna dalam kehidupan sosial kontemporer sehingga gambar tidak lagi berfungsi sebagai pelengkap teks, melainkan sebagai bahasa sosial yang memiliki sistem makna tersendiri (Rose, 2023; Hand, 2024).

Bahasa visual bekerja melalui sistem tanda yang memungkinkan individu mengkomunikasikan identitas kepada orang lain. Roland Barthes menjelaskan bahwa setiap representasi visual selalu terdiri atas hubungan antara penanda (signifier) dan petanda (signified) yang bersama-sama menghasilkan

makna sosial (Barthes, 1977). Akan tetapi, makna tersebut tidak pernah bersifat tetap. Tanda visual selalu dipengaruhi oleh pengalaman budaya, nilai sosial, serta konteks historis tempat tanda tersebut digunakan. Oleh karena itu, gambar, pakaian, warna, gaya rambut, ekspresi tubuh, maupun berbagai elemen visual lainnya tidak hanya berfungsi sebagai objek estetis, tetapi juga sebagai perangkat komunikasi yang menghasilkan identitas sosial.

Barthes selanjutnya menjelaskan bahwa representasi visual berkembang menjadi mitos ketika makna budaya tertentu diterima sebagai sesuatu yang tampak alamiah (Barthes, 1972). Dalam media sosial, berbagai simbol visual mengenai maskulinitas, femininitas, kesalehan, kecantikan, maupun seksualitas terus direproduksi melalui konten digital sehingga membentuk kategori-kategori sosial yang dianggap wajar oleh pengguna. Akibatnya, media sosial tidak hanya menyebarkan gambar, tetapi juga mereproduksi norma budaya yang memengaruhi bagaimana identitas dipahami dan dievaluasi. Visual digital dengan demikian menjadi mekanisme penting dalam reproduksi sekaligus perubahan makna sosial.

Kajian visual culture memperluas perspektif tersebut dengan menunjukkan bahwa makna visual tidak hanya berasal dari isi gambar, tetapi juga dari praktik

produksi, distribusi, konsumsi, dan interpretasi yang berlangsung di dalam lingkungan sosial. Gillian Rose (2023) menjelaskan bahwa visual culture mempelajari bagaimana gambar memperoleh makna melalui hubungan antara teknologi, institusi, audiens, dan praktik budaya. Dalam ruang digital, proses tersebut berlangsung jauh lebih dinamis karena setiap pengguna dapat menjadi produsen sekaligus konsumen representasi visual. Gambar tidak lagi bergerak secara satu arah sebagaimana media massa, tetapi diproduksi, dimodifikasi, dibagikan, dikomentari, dan direproduksi secara terus-menerus oleh jaringan pengguna.

Transformasi tersebut semakin dipengaruhi oleh affordances media sosial. Affordances merupakan karakteristik teknis platform yang memungkinkan sekaligus membatasi tindakan pengguna dalam memproduksi komunikasi digital (boyd, 2014; Hutchby, 2001). Pada TikTok, berbagai fitur seperti video vertikal berdurasi pendek, algoritma For You Page (FYP), duet, stitch, remix, filter, efek visual, musik, hashtag, live streaming, serta sistem rekomendasi membentuk cara pengguna memproduksi representasi dirinya. Dengan kata lain, identitas visual di TikTok bukan hanya hasil kreativitas individu, tetapi juga merupakan hasil interaksi dengan berbagai kemungkinan yang disediakan oleh platform. Literatur

terbaru menunjukkan bahwa affordances TikTok mendorong pengguna menghasilkan konten yang lebih ekspresif, berulang, dan mudah direplikasi sehingga mempercepat penyebaran simbol maupun gaya representasi tertentu (Bhandari & Bimo, 2024; Zulli & Zulli, 2022).

Karena representasi visual diproduksi melalui affordances platform, identitas digital tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang bersifat tetap. Judith Butler menjelaskan bahwa identitas, khususnya identitas gender, merupakan hasil performativitas, yaitu proses pengulangan tindakan, bahasa, simbol, dan praktik sosial yang secara terus-menerus menghasilkan kesan mengenai identitas yang stabil (Butler, 1990). Dengan demikian, identitas bukanlah sesuatu yang dimiliki seseorang sejak awal, melainkan sesuatu yang terus diproduksi melalui praktik sosial yang diulang dalam kehidupan sehari-hari. Perspektif ini menjadi sangat relevan dalam media sosial karena hampir seluruh bentuk representasi identitas berlangsung melalui pengulangan konten visual yang dipublikasikan secara berkelanjutan.

Dalam lingkungan TikTok, performativitas memperoleh dimensi baru karena proses pengulangan tersebut dimediasi oleh algoritma. Video yang memperoleh perhatian tinggi cenderung

direkomendasikan kembali kepada pengguna lain sehingga praktik representasi tertentu semakin sering direproduksi. Pengulangan ini menghasilkan pola visual yang kemudian dikenali sebagai identitas tertentu, baik melalui gaya berpakaian, ekspresi tubuh, pilihan musik, penggunaan filter, maupun bentuk narasi visual lainnya. Penelitian mengenai identity development in digital contexts menunjukkan bahwa media sosial mempercepat proses performativitas karena pengguna memperoleh umpan balik secara instan melalui jumlah penonton, komentar, likes, shares, dan rekomendasi algoritmik yang terus memengaruhi bentuk representasi berikutnya (Soh, Talaifar, & Harari, 2024).

Dalam konteks komunitas LGBTQA+, performativitas identitas tidak hanya berkaitan dengan ekspresi diri, tetapi juga dengan proses negosiasi terhadap norma heteronormatif yang masih mendominasi masyarakat. Simbol pelangi, pilihan gaya berpakaian, ekspresi gender, bahasa tubuh, penggunaan lagu tertentu, hingga berbagai bentuk humor visual sering kali berfungsi sebagai penanda identitas yang hanya sepenuhnya dipahami oleh komunitas tertentu. Simbol-simbol tersebut bukan sekadar elemen estetis, melainkan bagian dari praktik komunikasi yang membangun solidaritas, rasa memiliki, sekaligus strategi untuk memperoleh pengakuan sosial. Pada

saat yang sama, berbagai simbol tersebut dapat ditafsirkan secara berbeda oleh audiens lain sehingga memunculkan dukungan, resistensi, maupun kontroversi. Oleh karena itu, makna visual selalu bersifat terbuka dan terus dinegosiasikan melalui interaksi antarpengguna.

Berbagai penelitian mutakhir mengenai queer digital media menunjukkan bahwa media sosial memungkinkan komunitas LGBTQA+ membangun bentuk representasi yang lebih beragam dibandingkan media arus utama. Namun, representasi tersebut tetap dipengaruhi oleh logika platform yang menentukan tingkat visibilitas setiap konten. Dengan demikian, performativitas identitas berlangsung melalui hubungan yang kompleks antara kreativitas pengguna, simbol budaya, affordances platform, respons audiens, dan mekanisme algoritmik yang bekerja secara simultan (The Oxford Handbook of Media and Social Justice, 2024; The Oxford Handbook of Digital Media Sociology, 2024).

Bahasa visual tidak sekadar menjadi medium penyampaian identitas, melainkan mekanisme sosial yang menghasilkan identitas itu sendiri. Melalui sistem tanda, simbol budaya, fitur platform, dan praktik performatif yang terus diulang, media sosial membentuk cara individu mendefinisikan diri

sekaligus dipahami oleh orang lain. Identitas digital LGBTQA+ karena itu selalu bersifat dinamis, sebab maknanya terus berubah mengikuti interaksi antara pengguna, komunitas, algoritma, dan norma sosial yang bekerja secara bersamaan. Perspektif ini menunjukkan bahwa negosiasi identitas bukan terjadi setelah representasi dipublikasikan, tetapi berlangsung sejak proses produksi representasi itu sendiri.

3.5 TikTok sebagai arena digital negosiasi identitas LGBTQA

TikTok berkembang dari aplikasi berbagi video pendek menjadi salah satu ruang sosial digital yang paling berpengaruh dalam membentuk praktik komunikasi, produksi budaya, dan pembentukan identitas. Berbeda dengan platform media sosial generasi sebelumnya yang menekankan jejaring pertemanan, TikTok membangun interaksi melalui sistem rekomendasi berbasis algoritma yang memungkinkan suatu konten menjangkau audiens jauh melampaui jaringan sosial pembuatnya (Zulli & Zulli, 2022). Karakteristik tersebut menjadikan TikTok bukan sekadar media berbagi video, melainkan arena sosial tempat berbagai identitas diproduksi, dipertontonkan, diperdebatkan, dan memperoleh

pengakuan melalui mekanisme platform. Kajian dalam *The Routledge Handbook of TikTok and Society* (2024) menempatkan TikTok sebagai ruang budaya (cultural platform) yang membentuk praktik sosial baru melalui hubungan antara kreativitas pengguna, algoritma, dan ekonomi perhatian.

Keunikan TikTok terletak pada kemampuannya menghubungkan produksi konten dengan distribusi algoritmik secara hampir bersamaan. Sistem *For You Page* (FYP), penggunaan suara, filter, efek visual, *duet*, *stitch*, dan berbagai fitur partisipatif lainnya memungkinkan setiap pengguna memproduksi konten yang segera memasuki ruang publik digital. Affordances tersebut mempercepat proses sirkulasi simbol, imitasi praktik budaya, dan pembentukan komunitas berbasis minat maupun identitas (Bhandari & Bimo, 2024; Zulli & Zulli, 2022). Identitas digital dengan demikian berkembang melalui interaksi yang berlangsung secara berulang antara pengguna, audiens, dan mekanisme rekomendasi platform.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa TikTok menghasilkan bentuk komunikasi yang berbeda dibandingkan platform media sosial lainnya. Interaksi tidak lagi terutama dibangun melalui hubungan antarteman, tetapi melalui keterlihatan algoritmik (*algorithmic visibility*). Konten memperoleh perhatian

karena direkomendasikan oleh sistem platform, bukan semata-mata karena jumlah pengikut yang dimiliki pembuat konten. Kaye, Chen, dan Zeng (2022) menunjukkan bahwa mekanisme tersebut memperluas peluang bagi kelompok yang sebelumnya kurang memperoleh representasi dalam media arus utama untuk membangun komunitas, memperoleh audiens baru, dan memperluas sirkulasi narasi alternatif. Pada saat yang sama, keterlihatan tersebut tetap berada dalam kendali algoritma yang menentukan distribusi perhatian digital.

Bagi komunitas LGBTQA+, TikTok menyediakan ruang yang relatif terbuka untuk mengartikulasikan identitas seksual dan identitas gender melalui berbagai bentuk komunikasi visual. Pengalaman *coming out*, kehidupan sehari-hari, ekspresi gender, hubungan interpersonal, kesehatan mental, advokasi hak asasi, hingga humor komunitas dapat dipresentasikan dalam format video singkat yang mudah diproduksi dan disebarluaskan. Penelitian mengenai *queer TikTok* menunjukkan bahwa platform ini berfungsi sebagai ruang pembelajaran sosial, dukungan emosional, dan pembentukan solidaritas antarpengguna yang sebelumnya sulit ditemukan dalam ruang sosial offline (Duguay, 2023).

Namun, TikTok tidak dapat dipahami hanya sebagai ruang ekspresi. Platform ini juga merupakan arena tempat berbagai norma sosial diproduksi dan dipertentangkan. Setiap representasi identitas selalu berhadapan dengan beragam respons berupa dukungan, kritik, penolakan, pelaporan, maupun reinterpretasi oleh pengguna lain. Interaksi melalui komentar, *duet*, *stitch*, *reaction video*, dan reproduksi ulang konten menunjukkan bahwa makna identitas tidak pernah ditentukan secara sepihak oleh pembuat konten. Identitas memperoleh makna melalui proses negosiasi yang berlangsung secara terus-menerus di antara berbagai aktor dalam ekosistem platform (Literat & Kligler-Vilenchik, 2023). Dalam perspektif sosiologi, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa identitas merupakan hasil interaksi sosial yang selalu terbuka terhadap interpretasi baru.

Proses negosiasi tersebut semakin kompleks karena berlangsung di bawah pengaruh algoritma. Berbagai penelitian mengenai *platform governance* menunjukkan bahwa sistem rekomendasi TikTok tidak hanya mengatur distribusi konten, tetapi juga membentuk peluang suatu identitas untuk memperoleh visibilitas publik (Bucher, 2018; Gillespie, 2018). Konten yang dianggap sesuai dengan parameter algoritma memiliki kemungkinan lebih besar untuk direkomendasikan, sedangkan konten

tertentu dapat mengalami pembatasan distribusi melalui praktik yang sering disebut sebagai *shadow banning*, penurunan jangkauan, atau moderasi otomatis. Kajian terbaru mengenai tata kelola TikTok menunjukkan bahwa mekanisme tersebut sering kali sulit diamati secara langsung oleh pengguna karena bekerja melalui proses komputasional yang tidak sepenuhnya transparan (Cervi, Tejedor, & Marí'n-Llado', 2024).

Implikasi dari mekanisme tersebut sangat penting bagi komunitas LGBTQA+. Di satu sisi, algoritma memungkinkan konten mengenai keberagaman gender dan seksualitas menjangkau komunitas yang lebih luas sehingga memperkuat proses pembentukan identitas kolektif. Di sisi lain, berbagai penelitian juga menemukan bahwa konten yang berkaitan dengan identitas queer dapat mengalami pembatasan distribusi akibat kebijakan moderasi, pelaporan massal, atau bias algoritmik yang masih mereproduksi norma heteronormatif (Are, 2024; Duguay, Myles, & Echaiz, 2024). Dengan demikian, keterlihatan digital selalu berada dalam hubungan yang paradoks antara peluang memperoleh pengakuan sosial dan risiko mengalami pengawasan maupun pembatasan platform.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa negosiasi identitas LGBTQA+ di TikTok berlangsung melalui berbagai strategi komunikasi yang terus berkembang. Pengguna tidak hanya memilih bagaimana menampilkan identitasnya, tetapi juga menyesuaikan bentuk representasi tersebut terhadap norma komunitas, ekspektasi audiens, dan logika algoritma. Penggunaan simbol tertentu, pilihan musik, gaya visual, bahasa yang bersifat implisit, humor komunitas, maupun berbagai bentuk kode budaya menjadi strategi untuk mempertahankan visibilitas sekaligus mengurangi risiko sensor atau stigmatisasi. Penelitian dalam *The Routledge Handbook of TikTok and Society* (2024) menunjukkan bahwa praktik-praktik tersebut merupakan bentuk adaptasi kreatif pengguna terhadap tata kelola platform yang terus berubah.

TikTok akhirnya memperlihatkan bahwa identitas digital tidak pernah hadir sebagai ekspresi individual yang sepenuhnya bebas. Identitas diproduksi melalui hubungan yang kompleks antara representasi visual, praktik performatif, algoritma, budaya platform, dan respons komunitas. Setiap video menjadi ruang tempat pengguna mengartikulasikan dirinya, sementara setiap interaksi memperlihatkan bagaimana makna identitas terus diproduksi kembali melalui proses pengakuan, penolakan, reinterpretasi, maupun resistensi. Arena digital ini memperlihatkan

bahwa negosiasi identitas LGBTQA+ merupakan proses sosial yang berlangsung secara berkesinambungan, bukan peristiwa tunggal yang selesai ketika suatu konten dipublikasikan.

3.6 Platform digital antara kebebasan, pengawasan, dan sensor

Platform digital sering dipandang sebagai ruang yang memperluas kebebasan berekspresi karena memungkinkan setiap individu memproduksi, mendistribusikan, dan mengakses informasi tanpa harus bergantung pada institusi media konvensional. Berbagai kelompok sosial yang sebelumnya memiliki akses terbatas terhadap ruang publik memperoleh kesempatan untuk membangun komunitas, menyampaikan pengalaman, serta mengembangkan identitas secara lebih terbuka melalui media sosial (Castells, 2010; Papacharissi, 2015). Perkembangan ini mendorong optimisme bahwa teknologi digital mampu memperluas partisipasi demokratis dan menghadirkan ruang komunikasi yang lebih inklusif dibandingkan media massa tradisional.

Optimisme tersebut kemudian menghadapi berbagai tantangan ketika platform digital berkembang menjadi institusi yang memiliki kewenangan besar

dalam mengatur arus komunikasi publik. Perusahaan platform tidak hanya menyediakan infrastruktur teknologi, tetapi juga menetapkan aturan mengenai konten yang diperbolehkan, perilaku pengguna, mekanisme moderasi, serta distribusi informasi melalui algoritma. Robert Gorwa (2024) menjelaskan bahwa platform governance merupakan bentuk tata kelola komunikasi yang dijalankan oleh aktor privat melalui kebijakan moderasi, standar komunitas, dan sistem *trust and safety* yang menentukan batas-batas ekspresi dalam ruang digital. Dengan demikian, kebebasan berekspresi dalam media sosial selalu berlangsung di bawah seperangkat aturan yang disusun dan diterapkan oleh platform.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ruang digital tidak dapat dipahami sebagai ruang yang sepenuhnya bebas maupun sepenuhnya dikendalikan. Damian Tambini (2024) menjelaskan bahwa platform digital telah berkembang menjadi institusi yang menjalankan fungsi-fungsi konstitusional karena memiliki kemampuan untuk menentukan bagaimana komunikasi publik berlangsung, siapa yang memperoleh visibilitas, serta bagaimana hak-hak digital dinegosiasikan dalam masyarakat demokratis. Dalam perspektif digital constitutionalism, kebijakan platform bukan lagi sekadar aturan internal perusahaan, melainkan bagian dari tata kelola ruang

publik yang memiliki konsekuensi terhadap kebebasan berekspresi, partisipasi politik, dan hak-hak sipil pengguna.

Hubungan antara kebebasan dan pengawasan menjadi semakin kompleks karena sebagian besar aktivitas pengguna direkam, dianalisis, dan diproses menjadi data digital. Setiap pencarian, komentar, lokasi, preferensi konten, durasi menonton, hingga pola interaksi menjadi sumber informasi yang memungkinkan platform memahami perilaku pengguna secara sangat rinci. Shoshana Zuboff (2019; 2022) menyebut kondisi ini sebagai *surveillance capitalism*, yaitu model ekonomi digital yang menjadikan pengalaman manusia sebagai sumber data untuk prediksi perilaku dan keuntungan komersial. Pengawasan dalam konteks ini tidak selalu dilakukan melalui pembatasan langsung, tetapi melalui pengumpulan data yang memungkinkan platform memprediksi sekaligus memengaruhi tindakan pengguna. Mansell (2024) menunjukkan bahwa tata kelola media digital semakin bergantung pada kombinasi analisis data, kecerdasan buatan, dan otomatisasi dalam mengelola komunikasi publik.

Pengawasan digital tersebut berjalan berdampingan dengan praktik sensor yang mengalami perubahan bentuk. Sensor tidak lagi hanya dilakukan oleh negara

melalui pelarangan informasi, tetapi juga berlangsung melalui moderasi konten, penghapusan unggahan, pembatasan jangkauan, demonetisasi, hingga penurunan visibilitas oleh sistem algoritmik. Gorwa (2024) menunjukkan bahwa praktik *content moderation* telah menjadi instrumen utama platform dalam mengelola berbagai bentuk ujaran kebencian, misinformasi, kekerasan, maupun konten yang dianggap melanggar standar komunitas. Akan tetapi, proses tersebut sering kali menghadapi persoalan transparansi karena pengguna tidak selalu mengetahui alasan suatu konten dibatasi atau dihapus.

Kajian terbaru mengenai TikTok memperlihatkan bahwa persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika kebijakan moderasi diterapkan pada berbagai konteks sosial dan politik yang berbeda. Penelitian Diyi Liu (2024) mengenai kontroversi moderasi TikTok di Asia Selatan dan Asia Tenggara menunjukkan bahwa batas antara konten yang dapat diterima dan yang dianggap bermasalah sering kali ditentukan melalui pertimbangan pragmatis, tekanan politik, serta interpretasi lokal terhadap moralitas dan keamanan. Akibatnya, proses moderasi tidak selalu menghasilkan kepastian hukum maupun keadilan prosedural, tetapi justru membuka ruang bagi negosiasi yang terus berubah mengenai batas-batas kebebasan berekspresi.

Bagi komunitas LGBTQA+, dinamika tersebut memiliki implikasi yang sangat signifikan. Media sosial menyediakan ruang yang memungkinkan ekspresi identitas berkembang lebih luas dibandingkan ruang sosial offline. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa konten yang berkaitan dengan keberagaman gender dan seksualitas lebih rentan mengalami pelaporan massal, pembatasan distribusi, atau interpretasi yang berbeda-beda dalam proses moderasi otomatis. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa sensor digital tidak selalu muncul dalam bentuk penghapusan konten secara langsung, tetapi juga melalui berkurangnya jangkauan, hilangnya rekomendasi algoritmik, atau menurunnya visibilitas publik. Dengan demikian, pengguna sering kali harus menyesuaikan strategi komunikasinya agar tetap dapat mempertahankan keberadaan di ruang digital.

Paradoks tersebut menunjukkan bahwa kebebasan digital tidak pernah berdiri sendiri. Kebebasan selalu berada dalam hubungan yang saling berkaitan dengan pengawasan, regulasi, dan mekanisme sensor yang dijalankan oleh negara maupun perusahaan platform. Marcus Michaelson dan Kris Ruijgrok (2024) menjelaskan bahwa teknologi digital memungkinkan berkembangnya bentuk-bentuk pengawasan yang lebih halus melalui kombinasi sensor daring,

manipulasi informasi, analisis data, dan otomatisasi sistem komunikasi. Perspektif ini memperlihatkan bahwa kekuasaan digital bekerja tidak hanya melalui larangan, tetapi juga melalui pengaturan terhadap arus informasi, distribusi perhatian, dan pembentukan norma komunikasi.

Paradoks antara kebebasan, pengawasan, dan sensor memperlihatkan bahwa platform digital merupakan arena yang terus memproduksi sekaligus membatasi kemungkinan-kemungkinan sosial. Media sosial membuka ruang baru bagi kelompok LGBTQA+ untuk membangun identitas, membentuk solidaritas, dan memperoleh pengakuan yang sebelumnya sulit dicapai melalui media konvensional. Pada saat yang sama, ruang yang sama juga mempertemukan mereka dengan mekanisme pengawasan, moderasi, dan kontrol yang terus berkembang seiring perubahan teknologi serta regulasi platform. Negosiasi identitas digital karena itu berlangsung di dalam medan sosial yang selalu bergerak, ketika ekspresi diri, kekuasaan algoritmik, kebijakan platform, dan norma budaya saling membentuk makna identitas secara berkelanjutan.

BAB IV NEGOSIASI IDENTITAS DIGITAL: Representasi, Resistensi, dan Pengakuan Sosial

4.1 Representasi identitas LGBTQA+ di ruang digital

Representasi merupakan proses sosial yang menghasilkan makna mengenai individu maupun kelompok melalui bahasa, simbol, citra visual, dan praktik komunikasi. Dalam perspektif sosiologi budaya, identitas tidak hadir sebagai realitas yang bersifat alamiah, tetapi diproduksi melalui sistem representasi yang membentuk cara individu memahami dirinya sendiri sekaligus dipahami oleh masyarakat (Hall, 1997). Oleh karena itu, identitas LGBTQA+ tidak dapat dipahami sebagai karakteristik yang tetap, melainkan sebagai konstruksi sosial yang terus mengalami proses pemaknaan ulang sesuai perubahan konteks sosial, budaya, politik, dan teknologi.

Perkembangan media sosial telah mengubah secara mendasar mekanisme representasi tersebut. Jika pada era media arus utama representasi kelompok LGBTQA+ lebih banyak dikendalikan oleh institusi

media yang sering menghadirkan stereotip, invisibilitas, maupun stigmatisasi terhadap keragaman seksual dan gender, maka platform digital memberikan ruang bagi individu untuk membangun dan mengelola representasi dirinya sendiri melalui berbagai bentuk konten yang diproduksi secara langsung. Perubahan ini menggeser posisi kelompok LGBTQA+ dari objek representasi menjadi subjek yang secara aktif memproduksi makna, membangun narasi identitas, dan menegosiasikan keberadaannya di ruang publik digital (Pain, 2022). Representasi kemudian berkembang menjadi praktik sosial yang berlangsung secara partisipatif melalui interaksi antara kreator konten, pengguna lain, algoritma, dan karakteristik platform digital.

Dalam ruang digital, representasi identitas tidak lagi bergantung pada narasi verbal semata. Foto, video pendek, musik, ekspresi wajah, pilihan pakaian, gaya berbicara, penggunaan emoji, hashtag, hingga pola interaksi dalam kolom komentar membentuk sistem tanda yang secara bersama-sama menghasilkan makna sosial mengenai identitas. Berbagai elemen tersebut tidak hanya menyampaikan informasi mengenai diri, tetapi juga menjadi sumber interpretasi, negosiasi, dan kontestasi makna oleh pengguna lain. Dengan demikian, identitas digital berkembang melalui kombinasi berbagai modalitas komunikasi

yang menjadikan media sosial sebagai ruang representasi yang bersifat multimodal, interaktif, dan terus berubah (Hall, 1997; Pain, 2022).

Karakteristik utama representasi digital terletak pada sifatnya yang fleksibel dan kontekstual. Individu tidak selalu menampilkan seluruh aspek identitasnya secara bersamaan, tetapi melakukan seleksi mengenai informasi yang akan ditampilkan, kepada siapa representasi tersebut diarahkan, serta dalam situasi sosial seperti apa identitas tertentu dimunculkan. Duguay (2022) menjelaskan praktik ini melalui konsep *identity modulation*, yaitu kemampuan individu mengelola ekspresi identitas dengan mempertimbangkan karakteristik platform, algoritma, audiens, serta berbagai risiko sosial yang mungkin dihadapi. Representasi digital, karena itu, tidak hanya menjadi bentuk ekspresi diri, tetapi juga merupakan strategi sosial untuk mengatur tingkat visibilitas, menjaga keamanan personal, serta mengurangi potensi diskriminasi.

Bagi komunitas LGBTQA+, representasi digital juga berfungsi sebagai ruang pembentukan identitas kolektif. Berbagai pengalaman mengenai coming out, relasi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan mental, kehidupan romantis, maupun pengalaman menghadapi diskriminasi dibagikan sebagai bagian

dari narasi yang memperlihatkan keragaman pengalaman hidup kelompok minoritas seksual dan gender. Produksi narasi tersebut memperluas kemungkinan identifikasi antarsesama anggota komunitas, menghadirkan figur rujukan, memperkuat solidaritas, serta mendorong terbentuknya ruang publik digital yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, representasi digital tidak hanya membangun identitas individual, tetapi juga memperkuat pembentukan komunitas dan rasa memiliki secara kolektif (Are, Talbot, & Briggs, 2025; Duguay, 2023).

Representasi identitas di ruang digital, bagaimanapun, tidak pernah berlangsung dalam ruang yang sepenuhnya bebas. Setiap bentuk representasi selalu berinteraksi dengan mekanisme algoritmik, kebijakan moderasi konten, norma sosial, serta relasi kuasa yang bekerja di dalam platform digital. Visibilitas yang semakin tinggi memang membuka peluang memperoleh dukungan sosial yang lebih luas, tetapi pada saat yang sama meningkatkan kemungkinan munculnya ujaran kebencian, cyberbullying, moral policing, serta berbagai bentuk pengawasan terhadap ekspresi identitas seksual dan gender. Zhang dan Billard (2024) menunjukkan bahwa media digital merupakan arena tempat identitas queer dan transgender terus dinegosiasikan melalui relasi antara visibilitas, regulasi platform, dan tuntutan keadilan

sosial. Dengan demikian, setiap tindakan merepresentasikan identitas sekaligus mengandung konsekuensi sosial dan politik yang harus terus dikelola oleh individu maupun komunitas.

Dalam perspektif sosiologi, representasi identitas merupakan arena tempat berbagai aktor sosial memperebutkan definisi mengenai identitas yang dianggap sah, normal, atau menyimpang. Identitas LGBTQA+ berkembang melalui interaksi yang terus berlangsung antara pengalaman personal, respons masyarakat, tata kelola platform digital, serta norma budaya yang saling berkompetisi dalam menentukan batas-batas penerimaan sosial. Oleh karena itu, representasi digital tidak dapat dipahami sebagai tahap akhir pembentukan identitas, melainkan sebagai titik awal dari proses negosiasi identitas yang kemudian berkembang menjadi praktik disiplin sosial, strategi resistensi, dan perjuangan memperoleh pengakuan sosial (Hall, 1997; Duguay, 2022; Zhang & Billard, 2024).

4.2 Disiplin sosial dan diskriminasi digital

Representasi identitas di ruang digital tidak berhenti pada proses menampilkan diri sebagaimana telah dibahas pada subbab sebelumnya. Setiap representasi yang memperoleh visibilitas akan memasuki arena evaluasi publik, tempat berbagai norma sosial, nilai budaya, kepentingan politik, serta tata kelola platform bekerja secara bersamaan dalam menentukan identitas mana yang dianggap dapat diterima dan identitas mana yang diposisikan sebagai penyimpangan. Dengan demikian, ruang digital tidak hanya menyediakan peluang bagi ekspresi identitas LGBTQA+, tetapi juga membentuk mekanisme disiplin sosial yang terus mengawasi, mengoreksi, dan mengendalikan ekspresi tersebut. Duguay (2023) menunjukkan bahwa TikTok secara simultan membuka ruang bagi pembentukan komunitas queer sekaligus memperkuat berbagai bentuk regulasi algoritmik dan pengawasan sosial terhadap ekspresi identitas seksual. Sejalan dengan itu, Are, Talbot, dan Briggs (2025) menjelaskan bahwa affordances media sosial selalu beroperasi secara ambivalen, yaitu memfasilitasi pembentukan komunitas sekaligus menciptakan peluang bagi diskriminasi, pelecehan, dan eksklusi digital. Oleh karena itu, negosiasi identitas digital tidak hanya berlangsung melalui produksi representasi, tetapi juga melalui upaya

menghadapi berbagai mekanisme disiplin sosial yang membatasi visibilitas dan legitimasi identitas LGBTQA+ di ruang digital.

4.2.1 Heteronormativitas sebagai norma dominan ruang digital

Heteronormativitas merupakan seperangkat norma sosial yang menempatkan heteroseksualitas dan identitas gender biner sebagai standar yang dianggap alamiah, normal, dan paling dapat diterima dalam kehidupan sosial. Melalui norma tersebut, hubungan heteroseksual, pembagian peran laki-laki dan perempuan, serta ekspresi gender yang sesuai dengan jenis kelamin biologis diposisikan sebagai ukuran legitimasi sosial, sedangkan identitas dan ekspresi seksual di luar kerangka tersebut cenderung dipandang sebagai penyimpangan atau penyimpangan moral (Butler, 2004). Dalam perspektif sosiologi, heteronormativitas bukan sekadar sistem nilai, tetapi merupakan mekanisme sosial yang membentuk cara masyarakat mengklasifikasikan, mengevaluasi, dan mengendalikan identitas seksual dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan media sosial tidak menghilangkan dominasi heteronormativitas, tetapi justru memindahkan mekanisme tersebut ke dalam ruang digital. Platform seperti TikTok memang menyediakan

kesempatan yang lebih luas bagi kelompok LGBTQA+ untuk menampilkan identitas, membangun komunitas, dan memperluas visibilitas publik. Namun, peluang tersebut selalu berjalan berdampingan dengan berbagai bentuk regulasi sosial yang terus mereproduksi norma heteroseksual sebagai standar utama dalam interaksi digital. Duguay (2023) menunjukkan bahwa TikTok memiliki potensi sebagai ruang pembentukan komunitas queer, tetapi pada saat yang sama karakteristik platform, algoritma, serta budaya pengguna juga dapat memperkuat cisnormativitas dan heteronormativitas yang membatasi ekspresi identitas seksual dan gender.

Dominasi heteronormativitas di ruang digital bekerja melalui proses yang sering kali tidak tampak sebagai bentuk diskriminasi yang eksplisit. Norma tersebut hadir melalui komentar yang mempertanyakan identitas seksual seseorang, ekspektasi agar pengguna menampilkan ekspresi gender yang dianggap sesuai, hingga penilaian mengenai bagaimana tubuh, pakaian, perilaku, dan relasi romantis seharusnya diperlihatkan di ruang publik. Akibatnya, identitas heteroseksual diperlakukan sebagai identitas yang tidak perlu dijelaskan atau dipertahankan, sedangkan identitas LGBTQA+ terus-menerus diminta memberikan pembenaran atas keberadaannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa heteronormativitas

bekerja bukan hanya melalui larangan, tetapi juga melalui proses normalisasi yang menjadikan satu bentuk identitas sebagai standar sosial yang tidak dipersoalkan.

Dalam ekosistem TikTok, reproduksi heteronormativitas juga dipengaruhi oleh logika platform. Algoritma tidak bekerja secara netral, tetapi beroperasi melalui sistem klasifikasi, moderasi konten, serta pola distribusi informasi yang dapat memengaruhi tingkat visibilitas kelompok tertentu. Kajian mengenai implikasi algoritma terhadap komunitas LGBTQA+ menunjukkan bahwa sistem rekomendasi platform dapat memperkuat ketimpangan representasi melalui proses penyaringan, pelabelan, maupun pembatasan distribusi konten yang dianggap sensitif atau kontroversial. Akibatnya, pengalaman pengguna LGBTQA+ tidak hanya dibentuk oleh interaksi dengan pengguna lain, tetapi juga oleh tata kelola algoritmik yang menentukan konten mana yang lebih mudah memperoleh eksposur dan mana yang cenderung mengalami pembatasan visibilitas (Myles et al., 2023).

Dominasi heteronormativitas akhirnya membentuk kondisi ketika setiap representasi identitas LGBTQA+ selalu berada dalam posisi untuk dinilai, dikoreksi, atau dipersoalkan. Semakin tinggi tingkat visibilitas

yang diperoleh seseorang di ruang digital, semakin besar pula kemungkinan identitas tersebut berhadapan dengan berbagai bentuk evaluasi sosial. Oleh karena itu, negosiasi identitas digital tidak hanya berlangsung melalui upaya membangun representasi yang positif, tetapi juga melalui proses menghadapi norma dominan yang terus mendefinisikan batas-batas identitas yang dianggap dapat diterima di ruang publik digital. Dalam konteks inilah heteronormativitas menjadi landasan bagi munculnya berbagai mekanisme disiplin sosial yang lebih konkret, seperti moral policing, cyberbullying, dan stigmatisasi agama, yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

4.2.2 Moral policing sebagai mekanisme disiplin sosial

Dominasi heteronormativitas di ruang digital tidak bekerja secara otomatis, tetapi diwujudkan melalui berbagai praktik sosial yang mengawasi serta mengoreksi perilaku pengguna. Salah satu mekanisme yang paling menonjol adalah moral policing, yaitu praktik pengawasan sosial yang dilakukan individu maupun kelompok untuk menilai, menghakimi, dan mengarahkan perilaku orang lain berdasarkan norma moral yang dianggap benar. Dalam ruang digital, moral policing tidak dijalankan oleh institusi formal, melainkan berlangsung secara horizontal melalui

interaksi antarpengguna yang secara kolektif membentuk batas mengenai identitas, perilaku, dan ekspresi yang dinilai layak ditampilkan di ruang publik (Foucault, 1977).

Media sosial, khususnya TikTok, memperluas praktik moral policing karena karakteristik platform memungkinkan setiap pengguna menjadi pengawas sekaligus pemberi sanksi sosial terhadap pengguna lain. Fitur komentar, duet, stitch, pelaporan akun, hingga penyebaran ulang video menciptakan ruang bagi publik untuk melakukan evaluasi moral secara terbuka terhadap identitas seksual maupun ekspresi gender seseorang. Dalam kondisi tersebut, pengawasan tidak lagi bergantung pada otoritas negara atau lembaga tertentu, tetapi berkembang sebagai bentuk disiplin sosial yang diproduksi secara kolektif melalui partisipasi pengguna platform (Duguay, 2023).

Praktik moral policing umumnya diwujudkan melalui komentar yang mempertanyakan legitimasi identitas seksual, menuntut individu agar menyesuaikan diri dengan norma heteroseksual, atau memberikan penilaian mengenai cara berpakaian, gestur tubuh, pilihan pasangan, serta bentuk ekspresi gender yang dianggap pantas. Berbeda dengan cyberbullying yang lebih menonjolkan unsur penghinaan dan kekerasan

verbal, moral policing bekerja melalui klaim bahwa tindakan pengawasan dilakukan demi menjaga nilai moral, kesopanan, budaya, atau ketertiban sosial. Dengan demikian, kontrol terhadap identitas LGBTQA+ sering kali dibingkai sebagai kewajiban moral masyarakat, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

Dalam konteks ini, moral policing berfungsi sebagai mekanisme normalisasi. Pengguna yang dianggap menampilkan identitas di luar norma dominan diarahkan untuk mengubah perilaku, menyembunyikan identitas, menghapus konten, atau menarik diri dari ruang publik digital. Foucault (1977) menjelaskan bahwa mekanisme disiplin modern bekerja bukan terutama melalui hukuman fisik, melainkan melalui pengawasan yang mendorong individu menginternalisasi norma sehingga melakukan pengendalian diri. Logika serupa terlihat dalam ruang digital ketika tekanan sosial yang terus-menerus membuat sebagian pengguna LGBTQA+ memilih membatasi visibilitas identitasnya, mengubah bentuk representasi, atau melakukan penyensoran diri sebelum memperoleh tekanan yang lebih luas.

Studi mengenai komunitas LGBTQ+ di media sosial menunjukkan bahwa praktik moral policing juga diperkuat oleh tata kelola platform. Algoritma, sistem

moderasi konten, serta mekanisme pelaporan pengguna sering kali berinteraksi dengan norma sosial yang berkembang di masyarakat sehingga memperbesar kemungkinan konten kelompok minoritas seksual memperoleh pengawasan yang lebih intensif dibandingkan kelompok mayoritas. Akibatnya, pengalaman diskriminasi tidak hanya berasal dari interaksi antarpengguna, tetapi juga dipengaruhi oleh infrastruktur digital yang menentukan distribusi, visibilitas, dan keberlangsungan suatu konten di dalam platform (Myles, Duguay, & Flores Echaiz, 2023; Ungless, Markl, & Ross, 2024).

Dalam konteks Indonesia, moral policing memperoleh legitimasi yang lebih kuat karena sering dikaitkan dengan wacana perlindungan nilai budaya, moralitas publik, dan identitas nasional. Wijaya (2022) menunjukkan bahwa homofobia digital berkembang melalui pertautan antara sentimen anti-LGBT, pengawasan masyarakat, infrastruktur teknologi, serta tuntutan untuk menegakkan norma sosial terhadap kelompok minoritas seksual. Melalui proses tersebut, media sosial tidak hanya menjadi ruang komunikasi, tetapi juga menjadi arena tempat berbagai aktor memproduksi kepatuhan terhadap norma dominan melalui pengawasan, rasa malu, dan

tekanan sosial yang berlangsung secara terus-menerus.

Moral policing akhirnya menjadi salah satu mekanisme utama yang membentuk negosiasi identitas digital LGBTQA+. Semakin tinggi visibilitas yang diperoleh individu atau komunitas, semakin besar pula kemungkinan mereka menghadapi pengawasan moral dari pengguna lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa negosiasi identitas di ruang digital tidak hanya berkaitan dengan bagaimana identitas direpresentasikan, tetapi juga dengan bagaimana identitas tersebut terus dipertahankan di tengah berbagai upaya disiplin sosial yang berusaha mengembalikan ekspresi seksual dan gender ke dalam batas-batas heteronormativitas. Dari mekanisme disiplin inilah kemudian berkembang bentuk diskriminasi yang lebih agresif berupa cyberbullying, yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

4.2.3 Cyberbullying sebagai bentuk kekerasan digital

Praktik moral policing yang berlangsung melalui pengawasan dan penilaian terhadap identitas seksual tidak berhenti pada upaya menegakkan norma sosial. Dalam banyak situasi, mekanisme tersebut berkembang menjadi berbagai bentuk kekerasan digital yang secara langsung menyerang individu

maupun komunitas berdasarkan identitas seksual dan gender mereka. Kekerasan tersebut tidak lagi bertujuan sekadar mengoreksi perilaku yang dianggap menyimpang, tetapi berupaya mempermalukan, mengintimidasi, membungkam, bahkan mengeluarkan kelompok tertentu dari ruang publik digital. Dengan demikian, kekerasan digital merupakan kelanjutan dari proses disiplin sosial yang bekerja melalui relasi kuasa untuk mempertahankan norma dominan dalam masyarakat (Foucault, 1977). Perkembangan teknologi komunikasi memperluas mekanisme tersebut melalui berbagai bentuk pelecehan daring, mulai dari ujaran kebencian, ancaman, penyebaran informasi pribadi, hingga pelecehan seksual berbasis teknologi yang menjadikan identitas sebagai sasaran utama kekerasan (Henry, Flynn, & Powell, 2020).

Berbeda dengan cyberbullying yang sering dipahami sebagai konflik antarpengguna, kekerasan digital terhadap kelompok LGBTQA+ lebih tepat dipahami sebagai *identity-based violence*. Sasaran utama serangan bukan sekadar individu, melainkan identitas seksual dan gender yang mereka representasikan. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut meliputi penggunaan bahasa yang merendahkan, penyebaran stereotip, ancaman, penghinaan kolektif, hingga kampanye ujaran kebencian yang berupaya

mendeligitimasi keberadaan kelompok minoritas seksual. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang penyebaran ujaran kebencian terhadap kelompok LGBTQA+, tetapi juga mempercepat reproduksi stigma melalui mekanisme berbagi konten, komentar, dan interaksi antarpengguna yang berlangsung secara masif. Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa pelecehan berbasis identitas telah berkembang menjadi salah satu bentuk utama kekerasan digital terhadap kelompok minoritas seksual dan gender.

Karakteristik TikTok semakin memperkuat dinamika tersebut. Algoritma *For You Page*, kemudahan reproduksi konten melalui fitur *duet* dan *stitch*, serta tingginya partisipasi pengguna memungkinkan satu unggahan memperoleh perhatian jutaan pengguna dalam waktu yang sangat singkat. Kondisi ini membuka peluang yang lebih luas bagi komunitas LGBTQA+ untuk membangun visibilitas dan komunitas digital, tetapi sekaligus meningkatkan risiko menjadi sasaran pelecehan berbasis identitas. Duguay (2023) menunjukkan bahwa TikTok memiliki potensi besar dalam membentuk *queer publics* melalui berbagai praktik kreatif pengguna, namun pada saat yang sama platform tersebut juga menghadirkan hambatan berupa dugaan *shadow banning*, sensor algoritmik, dan meningkatnya paparan terhadap

ujaran kebencian ketika identitas queer memperoleh visibilitas yang lebih tinggi. Pengalaman pengguna LGBTQ+ juga menunjukkan bahwa rekomendasi algoritmik dan sistem personalisasi tidak selalu bekerja secara netral, melainkan dapat memperbesar eksposur terhadap bentuk-bentuk pengawasan dan diskriminasi digital.

Kekerasan digital tidak hanya diproduksi oleh perilaku pengguna, tetapi juga dipengaruhi oleh tata kelola platform. Sistem moderasi konten, mekanisme pelaporan, algoritma rekomendasi, serta desain arsitektur platform menentukan bagaimana suatu konten didistribusikan, dibatasi, atau bahkan disembunyikan. Penelitian mengenai *platform governance* menunjukkan bahwa kebijakan formal mengenai perlindungan pengguna sering kali tidak mampu mengatasi budaya penggunaan (*platform technocultures*) yang mempertahankan diskriminasi terhadap kelompok queer. Akibatnya, pengguna LGBTQA+ kerap melakukan penyensoran diri, membatasi aktivitas, atau meninggalkan platform untuk menghindari pelecehan dan sensor yang terus berulang. Dengan demikian, pengalaman kekerasan digital tidak hanya merupakan konsekuensi interaksi antarpengguna, tetapi juga berkaitan dengan cara platform mengelola visibilitas, keamanan, dan partisipasi kelompok minoritas seksual.

Dampak utama dari kekerasan digital tidak berhenti pada munculnya tekanan psikologis, tetapi turut membentuk proses negosiasi identitas. Individu yang berulang kali mengalami pelecehan berbasis identitas cenderung melakukan *identity modulation*, yaitu menyesuaikan cara menampilkan identitasnya dengan mempertimbangkan risiko sosial yang dihadapi. Sebagian pengguna mengurangi penggunaan simbol-simbol identitas seksual, membatasi interaksi dengan komunitas tertentu, mengubah strategi komunikasi, atau hanya menampilkan identitasnya kepada kelompok yang dianggap aman. Strategi tersebut menunjukkan bahwa negosiasi identitas digital bukan semata-mata merupakan pilihan personal, melainkan respons terhadap struktur sosial dan teknologi yang membentuk tingkat keamanan, visibilitas, dan pengakuan di ruang digital. Konsep ini memperlihatkan bahwa representasi identitas selalu berkaitan dengan upaya mengelola risiko, bukan sekadar mengelola citra diri (Duguay, 2022).

Kekerasan digital dan pelecehan berbasis identitas pada akhirnya memperlihatkan bahwa ruang digital merupakan arena kontestasi yang terus mempertemukan ekspresi identitas dengan berbagai bentuk penolakan sosial. Meskipun demikian, praktik-praktik tersebut tidak sepenuhnya berhasil menghilangkan visibilitas komunitas LGBTQA+.

Sebaliknya, berbagai bentuk pelecehan sering kali mendorong terbentuknya solidaritas, jaringan dukungan, dan produksi narasi tandingan sebagai strategi mempertahankan keberadaan di ruang digital. Akan tetapi, dalam banyak konteks, pelecehan terhadap kelompok LGBTQA+ tidak hanya memperoleh pembenaran melalui norma heteronormatif, tetapi juga melalui wacana keagamaan yang digunakan untuk memberikan legitimasi moral terhadap praktik diskriminasi. Dinamika inilah yang menjadi dasar pembahasan pada subbab berikutnya mengenai stigmatisasi agama sebagai mekanisme legitimasi diskriminasi terhadap identitas LGBTQA+ di ruang digital.

4.2.4 Stigmatisasi agama dan legitimasi diskriminasi

Menurut Evolvi (2022), ruang digital telah mengubah secara mendasar cara agama diproduksi, dikomunikasikan, dan diperdebatkan dalam kehidupan publik. Perubahan tersebut turut memengaruhi bagaimana identitas seksual dipahami dan dinilai oleh masyarakat. Kekerasan digital terhadap kelompok LGBTQA+ tidak hanya berlangsung melalui penghinaan, ancaman, maupun ujaran kebencian yang bersifat personal, tetapi juga memperoleh pembenaran melalui berbagai narasi

moral yang dibangun menggunakan bahasa dan simbol keagamaan. Dalam konteks ini, agama tidak dipahami sebagai penyebab langsung diskriminasi, melainkan sebagai sumber makna yang dimobilisasi oleh berbagai aktor sosial untuk membangun legitimasi moral terhadap praktik pengawasan, penolakan, maupun eksklusi terhadap kelompok minoritas seksual dan gender (Tsuria, 2022).

Campbell dan Tsuria (2022) menjelaskan bahwa digitalisasi agama telah menggeser otoritas keagamaan dari pola yang semula lebih terpusat menuju ruang komunikasi yang bersifat partisipatif. TikTok, Instagram, YouTube, maupun platform digital lainnya memungkinkan ulama, pendakwah, organisasi keagamaan, kreator konten, hingga pengguna biasa memproduksi dan mendistribusikan tafsir keagamaan kepada audiens yang jauh lebih luas. Kondisi tersebut memperluas arena kontestasi mengenai seksualitas, moralitas, dan identitas karena legitimasi keagamaan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada institusi formal, tetapi juga dibentuk melalui tingkat visibilitas, interaksi pengguna, serta penerimaan publik terhadap suatu narasi keagamaan (Evolvi, 2022). Akibatnya, ruang digital berkembang menjadi arena tempat berbagai aktor saling memperebutkan otoritas untuk mendefinisikan identitas yang dianggap sesuai maupun bertentangan dengan norma keagamaan.

Stigmatisasi agama kemudian bekerja melalui proses pelabelan sosial yang menghubungkan identitas LGBTQA+ dengan kategori-kategori moral seperti dosa, penyimpangan, ancaman terhadap keluarga, atau ancaman terhadap ketertiban sosial. Tsuria (2022) menunjukkan bahwa identitas keagamaan dan identitas seksual di ruang digital terus dinegosiasikan melalui relasi antara visibilitas, validasi, dan delegitimasi oleh komunitas daring. Ketika pelabelan tersebut diproduksi secara berulang melalui video, komentar, siaran langsung, maupun unggahan yang memperoleh jangkauan luas, stigma berkembang menjadi pengetahuan sosial yang tampak wajar dan memperoleh legitimasi moral dari rujukan keagamaan. Diskriminasi terhadap kelompok LGBTQA+ akhirnya tidak lagi dipersepsikan sebagai tindakan eksklusif, tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai agama dan moralitas publik.

Karakteristik TikTok semakin memperkuat dinamika tersebut melalui logika algoritmik yang mengutamakan konten dengan tingkat keterlibatan pengguna yang tinggi. Duguay (2023) menunjukkan bahwa meningkatnya visibilitas identitas queer di TikTok selalu berjalan berdampingan dengan meningkatnya risiko pengawasan, pelecehan, dan kontestasi moral. Pada saat yang sama, penelitian Myles, Duguay, dan Flores Echaiz (2023)

memperlihatkan bahwa algoritma dan tata kelola platform tidak pernah sepenuhnya netral karena turut membentuk distribusi visibilitas, peluang partisipasi, serta pengalaman diskriminasi yang dialami komunitas LGBTQ+. Perdebatan mengenai agama, seksualitas, dan moralitas yang memicu komentar, *duet*, *stitch*, maupun penyebaran ulang akhirnya memperoleh eksposur yang lebih besar sehingga memperkuat reproduksi stigma melalui mekanisme platform itu sendiri.

Meskipun demikian, ruang digital tidak hanya menjadi medium reproduksi stigma, tetapi juga membuka peluang bagi berkembangnya interpretasi keagamaan yang lebih inklusif. Garcí'a Rodríguez (2022), melalui kajiannya mengenai Muslim queer di Indonesia dan Malaysia, menunjukkan bahwa komunitas religius yang inklusif memanfaatkan media digital untuk membangun ruang dialog, berbagi pengalaman spiritual, serta menawarkan pembacaan alternatif terhadap hubungan antara agama dan keragaman seksual. Kehadiran berbagai narasi tersebut memperlihatkan bahwa agama bukanlah entitas yang memiliki satu makna tunggal. Sebaliknya, makna agama terus diproduksi dan dinegosiasikan melalui interaksi antara otoritas keagamaan, komunitas digital, pengalaman hidup individu, serta karakteristik platform yang memediasi seluruh proses tersebut.

Dengan demikian, stigmatisasi agama lebih tepat dipahami sebagai bagian dari kontestasi sosial mengenai siapa yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan identitas yang dianggap sah dalam ruang publik digital. Sebagian aktor memanfaatkan legitimasi keagamaan untuk mempertahankan norma heteronormatif dan membenarkan praktik diskriminasi terhadap kelompok LGBTQA+, sementara aktor lain mengembangkan narasi keagamaan yang lebih inklusif sebagai bentuk perlawanan terhadap eksklusi sosial (Campbell & Tsuria, 2022; Garcí'a Rodrí'guez, 2022). Negosiasi identitas digital akhirnya berlangsung melalui pertarungan berbagai klaim moral, otoritas keagamaan, tata kelola platform, dan pengalaman hidup yang secara bersama-sama menentukan peluang kelompok LGBTQA+ memperoleh legitimasi, visibilitas, dan pengakuan sosial. Dinamika tersebut menjadi landasan untuk memahami pembahasan pada subbab berikutnya mengenai proses negosiasi menuju pengakuan sosial.

4.3 Strategi resistensi digital

Berbagai bentuk heteronormativitas, moral policing, kekerasan digital, dan stigmatisasi agama yang telah dibahas pada subbab sebelumnya menunjukkan bahwa ruang digital merupakan arena yang terus memproduksi berbagai mekanisme pengawasan

terhadap identitas LGBTQA+. Namun, relasi kuasa tersebut tidak pernah sepenuhnya menempatkan kelompok LGBTQA+ sebagai objek yang pasif. Sebagaimana ditegaskan Foucault (1978), setiap relasi kuasa selalu membuka kemungkinan munculnya resistensi. Dalam konteks media digital, resistensi berkembang melalui praktik komunikasi, produksi representasi, dan pembentukan jejaring sosial yang memungkinkan individu maupun komunitas menegosiasikan kembali identitasnya di tengah berbagai bentuk pengawasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, resistensi digital tidak dipahami sebagai tindakan yang semata-mata menolak kekuasaan, tetapi sebagai proses sosial untuk membangun ruang, makna, dan posisi yang lebih setara dalam kehidupan digital.

Perkembangan platform digital memperluas peluang bagi munculnya berbagai bentuk resistensi tersebut. TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya memungkinkan pengguna tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga memproduksi narasi, membangun komunitas, serta membentuk ruang publik alternatif yang sebelumnya sulit diperoleh melalui media arus utama. Duguay (2023) menunjukkan bahwa platform digital menyediakan peluang bagi terbentuknya *queer publics*, yaitu ruang tempat komunitas queer saling berbagi pengalaman,

membangun identitas, dan mengembangkan praktik-praktik komunikasi yang menantang norma dominan. Pada saat yang sama, karakteristik partisipatif media sosial memungkinkan berbagai bentuk resistensi berkembang secara lebih cair melalui praktik budaya digital sehari-hari daripada melalui gerakan politik yang bersifat formal (Abidin, 2022; Myles, Duguay, & Flores Echaiz, 2023).

Dalam perspektif sosiologi, strategi resistensi digital berkembang melalui tahapan yang saling berkaitan. Humor dan satire menjadi bentuk resistensi simbolik yang memungkinkan individu mengurangi dampak stigma sekaligus mengkritik norma heteronormatif. Counter-narrative kemudian berfungsi menghasilkan makna alternatif yang menantang representasi dominan mengenai identitas LGBTQA+. Proses tersebut selanjutnya memperkuat solidaritas digital yang membangun identitas kolektif, memperluas rasa memiliki terhadap komunitas, dan menciptakan ruang yang lebih aman bagi anggotanya. Dengan demikian, resistensi digital tidak berhenti pada kemampuan individu menghadapi diskriminasi, tetapi berkembang menjadi proses kolektif yang membuka peluang bagi terbentuknya pengakuan sosial. Pembahasan berikut menguraikan tahapan-tahapan resistensi tersebut secara lebih rinci.

4.3.1 Resistensi Simbolik melalui Humor dan Satire

Resistensi terhadap norma dominan tidak selalu diwujudkan melalui konfrontasi yang bersifat langsung. Scott (1990) menjelaskan bahwa kelompok subordinat sering mengembangkan bentuk-bentuk *everyday resistance* yang bekerja secara simbolik melalui bahasa, humor, ironi, maupun praktik budaya sehari-hari. Dalam ruang digital, strategi tersebut berkembang menjadi sarana untuk mengurangi tekanan sosial sekaligus mengkritik relasi kuasa tanpa harus berhadapan secara frontal dengan kelompok dominan.

Humor menjadi salah satu bentuk komunikasi yang paling banyak digunakan komunitas LGBTQA+ untuk menghadapi stigma dan diskriminasi. Melalui meme, video pendek, parodi, maupun pengalaman keseharian yang dikemas secara ringan, pengguna mampu mengubah pengalaman diskriminasi menjadi narasi yang lebih mudah diterima oleh komunitas maupun publik yang lebih luas. Humor tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme psikologis untuk menghadapi tekanan sosial, tetapi juga sebagai praktik komunikasi yang memperkuat rasa kebersamaan dan memperluas visibilitas identitas queer di ruang digital (Abidin, 2022; Duguay, 2023).

Satire melengkapi fungsi tersebut dengan menghadirkan kritik terhadap norma heteronormatif dan berbagai bentuk ketimpangan sosial. Berbeda dengan humor yang berorientasi pada penciptaan kedekatan emosional, satire secara eksplisit membalik posisi kuasa dengan menjadikan stereotip, prasangka, dan moral policing sebagai objek kritik. Melalui strategi ini, komunitas LGBTQA+ tidak hanya mempertahankan identitasnya, tetapi juga mendekonstruksi asumsi-asumsi yang selama ini dianggap sebagai kebenaran sosial. Resistensi simbolik akhirnya memungkinkan kelompok minoritas menggeser posisi dari objek stigma menjadi subjek yang aktif membentuk makna mengenai dirinya sendiri (Butler, 2004; Milner, 2021).

4.3.2 Counter-Narrative sebagai Produksi Makna Alternatif

Resistensi digital tidak berhenti pada kritik terhadap narasi dominan, tetapi berkembang menjadi upaya memproduksi makna alternatif mengenai identitas LGBTQA+. Hall (1997) menegaskan bahwa representasi selalu menjadi arena perebutan makna sehingga kelompok yang selama ini dimarjinalkan memiliki peluang untuk menghasilkan definisi baru mengenai identitasnya. Dalam konteks media digital proses tersebut berlangsung melalui *counter-narrative*,

yaitu produksi cerita, pengalaman, simbol, dan representasi yang secara langsung menantang stereotip yang berkembang di masyarakat.

Counter-narrative memungkinkan komunitas LGBTQA+ menampilkan identitasnya melalui pengalaman hidup, relasi keluarga, pekerjaan, pendidikan, aktivitas keagamaan, maupun kehidupan sehari-hari yang selama ini jarang memperoleh ruang dalam media arus utama. Narasi tersebut menggeser fokus dari identitas yang semata-mata dipandang sebagai penyimpangan menuju identitas yang dipahami sebagai bagian dari keberagaman pengalaman manusia. Pain (2022) menunjukkan bahwa media digital memperluas kemampuan komunitas LGBTQ+ untuk membangun representasi yang lebih beragam dan dikendalikan oleh komunitas itu sendiri, sedangkan Duguay (2022) menjelaskan bahwa praktik *identity modulation* memungkinkan pengguna mengelola cara identitas ditampilkan sesuai konteks sosial dan karakteristik platform.

Melalui counter-narrative, komunitas LGBTQA+ tidak hanya membantah stigma, tetapi juga memproduksi pengetahuan baru mengenai seksualitas, gender, dan kehidupan sosial. Dengan demikian, resistensi berkembang dari praktik komunikasi individual menjadi proses produksi makna yang secara bertahap

mengubah cara publik memahami identitas seksual dan gender.

4.3.3 Solidaritas Digital dan Pembentukan Identitas Kolektif

Produksi makna alternatif pada akhirnya mendorong terbentuknya solidaritas digital yang memperkuat identitas kolektif komunitas LGBTQA+. Menurut Social Identity Theory, identitas sosial berkembang melalui rasa memiliki terhadap kelompok yang memberikan dukungan, pengakuan, dan makna bersama (Tajfel & Turner, 1979). Media digital memperluas proses tersebut dengan memungkinkan individu yang tersebar secara geografis membangun hubungan sosial melalui pengalaman, nilai, dan tujuan yang sama.

Solidaritas digital berkembang melalui berbagai bentuk interaksi, seperti berbagi pengalaman, memberikan dukungan emosional, menyebarkan informasi, hingga membangun ruang aman (*safe spaces*) yang memungkinkan anggota komunitas berpartisipasi tanpa takut mengalami diskriminasi. Penelitian Duguay (2023) menunjukkan bahwa TikTok berperan penting dalam pembentukan komunitas queer melalui praktik kreatif yang memperkuat rasa memiliki terhadap kelompok. Pada saat yang sama, Garcí'a Rodríguez (2022) memperlihatkan bahwa komunitas digital juga

menjadi ruang bagi berkembangnya solidaritas antara identitas seksual dan identitas keagamaan yang selama ini sering diposisikan sebagai saling bertentangan.

Dalam perspektif pengakuan sosial, solidaritas digital memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar membangun jaringan pertemanan. Fraser (2003) dan Honneth (1995) menjelaskan bahwa solidaritas merupakan prasyarat penting bagi kelompok yang mengalami marginalisasi untuk memperoleh pengakuan sebagai bagian yang setara dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, solidaritas digital menjadi tahap penting dalam negosiasi identitas karena memungkinkan pengalaman individual berkembang menjadi identitas kolektif yang memiliki kapasitas lebih besar untuk memengaruhi wacana publik, memperluas visibilitas, serta menuntut legitimasi sosial.

Strategi resistensi digital dengan demikian membentuk suatu proses yang bergerak dari resistensi simbolik menuju pembentukan identitas kolektif. Humor dan satire membuka ruang kritik terhadap norma dominan, counter-narrative menghasilkan makna alternatif mengenai identitas LGBTQA+, sedangkan solidaritas digital memperkuat kapasitas komunitas untuk memperoleh pengakuan

yang lebih luas. Proses inilah yang menjadi landasan bagi pembahasan berikutnya mengenai bagaimana negosiasi identitas berkembang menuju legitimasi, visibilitas, normalisasi, dan dukungan publik sebagai bentuk pengakuan sosial.

4.4 Negosiasi menuju pengakuan sosial

Resistensi digital yang berkembang melalui humor, satire, *counter-narrative*, dan solidaritas komunitas tidak berhenti pada kemampuan kelompok LGBTQA+ mempertahankan keberadaannya di ruang digital. Berbagai praktik tersebut secara bertahap mengubah posisi komunitas dari objek pengawasan menjadi aktor yang aktif membangun makna mengenai identitasnya sendiri. Dalam perspektif sosiologi, perubahan tersebut merupakan bagian dari proses negosiasi menuju pengakuan sosial, yaitu proses ketika suatu identitas memperoleh ruang untuk hadir, diperdebatkan, dan secara bertahap diterima sebagai bagian dari kehidupan sosial. Fraser (2003) dan Honneth (1995) menjelaskan bahwa pengakuan tidak muncul secara otomatis, tetapi merupakan hasil dari perjuangan sosial yang melibatkan perebutan legitimasi, visibilitas, dan penghargaan terhadap identitas yang selama ini dimarjinalkan.

4.4.1 Legitimasi

Legitimasi merupakan tahap awal dalam proses pengakuan sosial karena berkaitan dengan diterima atau tidaknya suatu identitas sebagai bagian yang sah dalam ruang publik. Berger dan Luckmann (1966) menjelaskan bahwa legitimasi berkembang melalui proses sosial yang memberikan pembenaran terhadap pengetahuan, nilai, dan praktik yang hidup dalam masyarakat. Dalam ruang digital, legitimasi tidak lagi hanya dibentuk oleh negara, institusi keagamaan, maupun media arus utama, tetapi juga melalui interaksi antarpengguna, algoritma platform, kreator konten, serta komunitas digital yang terus memproduksi dan mengevaluasi berbagai representasi identitas (Duguay, 2023; Myles, Duguay, & Flores Echaiz, 2023).

Bagi komunitas LGBTQA+, legitimasi tidak selalu berarti tercapainya kesepakatan sosial mengenai identitas seksual dan gender. Legitimasi lebih tepat dipahami sebagai terbukanya ruang bagi identitas tersebut untuk tampil, didiskusikan, serta memperoleh hak untuk menyampaikan pengalaman hidupnya di ruang publik digital. Oleh karena itu, negosiasi legitimasi berlangsung melalui proses yang terus-menerus mempertemukan narasi dominan

dengan narasi alternatif yang dibangun komunitas LGBTQA+.

4.4.2 Visibilitas

Legitimasi yang mulai terbentuk kemudian memperluas visibilitas identitas di ruang digital. Visibilitas tidak hanya berarti semakin seringnya identitas LGBTQA+ muncul dalam media sosial, tetapi juga meningkatnya kesempatan untuk merepresentasikan pengalaman hidup secara lebih beragam dan tidak lagi didominasi oleh stereotip. Hall (1997) menegaskan bahwa representasi menentukan siapa yang dapat terlihat, bagaimana mereka dipahami, dan makna apa yang dilekatkan pada identitas tersebut. Oleh karena itu, visibilitas selalu berkaitan dengan relasi kuasa yang menentukan siapa yang memperoleh ruang untuk berbicara dan siapa yang tetap berada di pinggiran.

Dalam ekosistem TikTok, visibilitas dibentuk melalui hubungan antara kreativitas pengguna, interaksi komunitas, dan tata kelola algoritmik. Duguay (2023) menunjukkan bahwa platform ini memperluas peluang terbentuknya *queer publics* melalui praktik kreatif yang meningkatkan keterhubungan antarpengguna. Namun, Myles, Duguay, dan Flores Echaiz (2023) mengingatkan bahwa visibilitas juga dipengaruhi oleh algoritma, moderasi konten, dan

kebijakan platform yang dapat memperbesar ataupun membatasi jangkauan suatu identitas. Visibilitas karena itu selalu bersifat ambivalen. Ia membuka peluang memperoleh pengakuan, tetapi sekaligus meningkatkan kemungkinan menghadapi pengawasan, pelecehan, maupun diskriminasi.

4.4.3 Normalisasi

Meningkatnya legitimasi dan visibilitas secara bertahap mendorong proses normalisasi identitas dalam ruang digital. Normalisasi tidak dimaknai sebagai hilangnya seluruh bentuk penolakan terhadap kelompok LGBTQA+, melainkan sebagai perubahan cara masyarakat memandang keberadaan identitas seksual dan gender yang beragam dalam kehidupan sehari-hari. Butler (2004) menunjukkan bahwa norma sosial terus diproduksi melalui praktik yang berulang. Sebaliknya, pengulangan representasi alternatif juga memiliki potensi untuk menggeser batas mengenai apa yang dianggap wajar dalam masyarakat.

Media sosial mempercepat proses tersebut melalui reproduksi berbagai pengalaman keseharian yang memperlihatkan komunitas LGBTQA+ sebagai bagian dari kehidupan sosial, bukan semata-mata sebagai objek kontroversi. Konten mengenai keluarga, pekerjaan, pendidikan, aktivitas keagamaan, persahabatan, maupun pengalaman hidup sehari-hari

memperluas pemahaman publik bahwa identitas seksual tidak hanya berkaitan dengan orientasi seksual, tetapi juga dengan pengalaman sebagai warga masyarakat. Pain (2022) menunjukkan bahwa representasi yang dikendalikan oleh komunitas sendiri berperan penting dalam mengurangi dominasi stereotip dan membuka ruang bagi pembentukan makna yang lebih beragam mengenai identitas LGBTQ+.

4.4.4 Dukungan Publik

Normalisasi kemudian membuka peluang berkembangnya dukungan publik sebagai bentuk pengakuan sosial yang lebih luas. Dukungan tersebut tidak selalu diwujudkan melalui persetujuan terhadap seluruh aspek identitas LGBTQA+, tetapi dapat muncul dalam bentuk penolakan terhadap diskriminasi, pembelaan terhadap hak-hak sipil, penyediaan ruang aman, maupun solidaritas dari individu dan kelompok yang berada di luar komunitas LGBTQA+. Dalam perspektif Honneth (1995), dukungan sosial merupakan bentuk pengakuan yang memungkinkan individu memperoleh rasa percaya diri, harga diri, dan penghargaan sebagai anggota masyarakat yang setara.

Ruang digital memainkan peran penting dalam memperluas dukungan tersebut karena memungkinkan terbentuknya jejaring solidaritas

lintas identitas, profesi, agama, maupun kebangsaan. Berbagai kampanye digital, kolaborasi antarkomunitas, serta penyebaran narasi yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia memperlihatkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi arena reproduksi diskriminasi, tetapi juga ruang bagi berkembangnya empati dan pengakuan sosial. Garcí'a Rodríguez (2022) menunjukkan bahwa bahkan dalam konteks masyarakat yang religius, ruang digital dapat memfasilitasi dialog dan solidaritas antara komunitas queer dan kelompok keagamaan yang mengembangkan tafsir yang lebih inklusif.

Negosiasi menuju pengakuan sosial pada akhirnya tidak berlangsung secara linier maupun menghasilkan penerimaan yang bersifat final. Legitimasi, visibilitas, normalisasi, dan dukungan publik terus berkembang melalui proses dialog, konflik, resistensi, dan perubahan makna yang berlangsung secara simultan di ruang digital. Pengakuan sosial karena itu lebih tepat dipahami sebagai proses yang terus dinegosiasikan daripada sebagai kondisi yang telah sepenuhnya tercapai. Dinamika tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perubahan makna mengenai identitas LGBTQA+ selalu berkaitan dengan perubahan sistem tanda, simbol, dan representasi yang berkembang dalam budaya digital. Atas dasar

itulah pembahasan selanjutnya diarahkan pada transformasi makna melalui perspektif semiotika untuk memahami bagaimana identitas memperoleh makna baru dalam ruang digital.

4.5 Transformasi makna melalui semiotika

Seluruh proses negosiasi identitas yang berlangsung melalui representasi, disiplin sosial, resistensi, dan perjuangan memperoleh pengakuan sosial pada akhirnya menghasilkan perubahan terhadap makna yang dilekatkan pada identitas LGBTQA+ di ruang digital. Perubahan tersebut tidak hanya tampak pada meningkatnya visibilitas komunitas LGBTQA+, tetapi juga pada bergesernya cara masyarakat memahami simbol, narasi, dan pengalaman hidup yang berkaitan dengan keragaman seksual dan gender. Dalam perspektif semiotika, perubahan tersebut menunjukkan bahwa makna tidak pernah bersifat tetap, melainkan terus diproduksi dan dinegosiasikan melalui berbagai praktik representasi yang berlangsung dalam kehidupan sosial (Barthes, 1977). Dengan demikian, ruang digital tidak hanya menjadi arena komunikasi, tetapi juga menjadi ruang transformasi makna yang terus membentuk pemahaman masyarakat mengenai identitas seksual.

Pada tingkat pertama, transformasi tersebut berlangsung melalui perubahan makna denotatif. Barthes (1977) menjelaskan bahwa denotasi merujuk pada makna yang paling langsung atau literal dari suatu tanda. Dalam ruang digital, berbagai konten yang diproduksi komunitas LGBTQA+, seperti video keseharian, pengalaman keluarga, aktivitas profesional, praktik keagamaan, maupun interaksi sosial, menghadirkan identitas seksual sebagai bagian dari realitas kehidupan sehari-hari. Representasi tersebut menggeser fokus dari identitas yang sebelumnya lebih sering diasosiasikan dengan kontroversi menuju identitas yang dipahami sebagai pengalaman sosial yang beragam. Pain (2022) menunjukkan bahwa media digital memperluas kesempatan kelompok LGBTQ+ untuk membangun representasi yang lebih autentik karena proses produksi makna semakin dikendalikan oleh komunitas itu sendiri.

Transformasi makna kemudian berkembang pada tingkat konotatif ketika berbagai representasi tersebut mulai menghasilkan asosiasi sosial yang baru. Hall (1997) menegaskan bahwa makna selalu terbentuk melalui proses interpretasi yang dipengaruhi oleh budaya, pengalaman, dan relasi kuasa. Oleh karena itu, video, simbol, bahasa, maupun praktik komunikasi yang diproduksi komunitas LGBTQA+ tidak hanya

menyampaikan informasi mengenai identitas, tetapi juga membentuk berbagai pemaknaan baru mengenai keberagaman, kesetaraan, keluarga, spiritualitas, maupun kewargaan. Counter-narrative yang berkembang melalui media sosial berperan penting dalam menggeser asosiasi negatif yang selama ini melekat pada identitas LGBTQA+ menuju pemahaman yang lebih kompleks dan beragam (Duguay, 2023; Zhang & Billard, 2024).

Perubahan makna tersebut pada akhirnya memengaruhi pembentukan mitos sosial. Bagi Barthes (1977), mitos merupakan sistem makna tingkat kedua yang membuat suatu nilai budaya tampak alamiah dan tidak lagi dipertanyakan. Dalam konteks identitas LGBTQA+, ruang digital menjadi arena tempat berbagai mitos lama mengenai penyimpangan, ancaman moral, atau ketidaknormalan dipertemukan dengan narasi-narasi baru yang menekankan keberagaman, hak asasi manusia, serta penghormatan terhadap martabat individu. Pertemuan antara kedua narasi tersebut menghasilkan kontestasi makna yang terus berlangsung sehingga tidak ada satu mitos yang sepenuhnya mendominasi ruang digital. Sebaliknya, media sosial menjadi arena tempat berbagai aktor saling memperebutkan definisi mengenai identitas seksual yang dianggap sah dalam masyarakat (Myles, Duguay, & Flores Echaiz, 2023).

Karakteristik TikTok mempercepat proses transformasi tersebut karena algoritma, budaya partisipatif, dan reproduksi konten memungkinkan makna beredar, dimodifikasi, dan dinegosiasikan dalam skala yang jauh lebih luas dibandingkan media konvensional. Setiap video, komentar, *duet*, *stitch*, maupun unggahan ulang tidak hanya memperluas penyebaran informasi, tetapi juga menciptakan peluang bagi pengguna untuk terus menafsirkan kembali simbol dan representasi mengenai identitas LGBTQA+. Dengan demikian, makna berkembang sebagai hasil interaksi antara kreator, komunitas, audiens, dan tata kelola platform digital, bukan sebagai sesuatu yang ditentukan secara sepihak oleh institusi sosial tertentu (Duguay, 2023; Myles, Duguay, & Flores Echaiz, 2023).

Transformasi makna melalui semiotika memperlihatkan bahwa negosiasi identitas digital pada akhirnya merupakan proses sosial yang terus mengubah cara masyarakat memahami keberadaan kelompok LGBTQA+. Representasi menghasilkan visibilitas, disiplin sosial memunculkan resistensi, resistensi memperkuat identitas kolektif, sedangkan pengakuan sosial membuka peluang bagi terbentuknya makna-makna baru mengenai identitas seksual dalam budaya digital. Dengan demikian, perubahan yang berlangsung di ruang digital tidak

hanya berkaitan dengan meningkatnya kehadiran komunitas LGBTQA+, tetapi juga menyangkut perubahan sistem tanda, simbol, dan mitos yang membentuk cara masyarakat memaknai seksualitas, gender, dan keberagaman dalam kehidupan kontemporer.

BAB V TRANSFORMASI NORMA SOSIAL: Implikasi Sosiologis Negosiasi Identitas Digital

5.1 Identitas digital sebagai praktik sosial

Perkembangan media digital telah mengubah cara identitas dipahami dalam kajian sosiologi. Identitas tidak lagi dipandang sebagai atribut individual yang melekat secara tetap pada seseorang, melainkan sebagai praktik sosial yang terus diproduksi melalui interaksi, komunikasi, dan relasi dengan lingkungan sosial. Dalam ruang digital, individu secara aktif membangun, menampilkan, menegosiasikan, serta merevisi identitasnya melalui rangkaian tindakan yang berulang. Identitas dengan demikian merupakan hasil dari proses sosial yang berlangsung secara terus-menerus, bukan sekadar refleksi dari karakter personal atau kategori sosial yang telah ada sebelumnya (Couldry & Hepp, 2017; Duguay, 2022; Southerton et al., 2021).

Pendekatan praktik sosial memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan pandangan esensialis mengenai identitas. Teori praktik memandang kehidupan sosial sebagai kumpulan aktivitas yang

terus direproduksi melalui hubungan antara aktor, norma, pengetahuan, teknologi, dan lingkungan material. Praktik tidak hanya mencerminkan tindakan individu, tetapi juga membentuk struktur sosial yang lebih luas. Dalam konteks digital, platform media sosial menjadi bagian dari unsur material yang tidak dapat dipisahkan dari praktik sosial karena desain antarmuka, algoritma, fitur interaksi, serta mekanisme distribusi konten ikut menentukan bagaimana individu bertindak, berkomunikasi, dan membangun relasi dengan pengguna lain (Schatzki, 2002; Reckwitz, 2002; Southerton et al., 2021).

Konsekuensinya, identitas digital tidak dapat dipahami sebagai profil daring atau kumpulan informasi pribadi semata. Identitas digital merupakan hasil dari praktik sosial yang berlangsung secara berulang melalui produksi konten, penggunaan simbol visual, narasi personal, partisipasi dalam percakapan, pemanfaatan tagar, hingga keterlibatan dalam jaringan komunitas. Seluruh aktivitas tersebut menghasilkan jejak digital yang secara kolektif membentuk bagaimana seseorang dikenali, dipersepsikan, dan memperoleh posisi sosial dalam ruang digital. Dengan kata lain, identitas berkembang melalui praktik yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari sehingga selalu bersifat dinamis dan

terbuka terhadap perubahan (Dyer, 2020; Duguay, 2022; Kasianenko, 2026).

Bagi kelompok LGBTQA+, praktik identitas digital memiliki arti yang jauh lebih kompleks dibandingkan kelompok sosial yang tidak mengalami marginalisasi. Di banyak masyarakat, identitas seksual dan identitas gender masih menghadapi stigma, diskriminasi, serta pengawasan sosial yang membatasi ruang ekspresi di kehidupan sehari-hari. Media digital kemudian menyediakan arena alternatif yang memungkinkan individu mengeksplorasi identitas, membangun narasi diri, menemukan komunitas, serta memperoleh dukungan sosial tanpa harus selalu bergantung pada ruang fisik. Praktik tersebut tidak sekadar memperluas kesempatan berekspresi, tetapi juga memungkinkan terbentuknya rasa memiliki terhadap komunitas yang sebelumnya sulit diperoleh dalam kehidupan luring (Robards et al., 2021; Duguay, 2022; Szabo, 2025).

Namun demikian, ruang digital tidak sepenuhnya menghadirkan kebebasan. Praktik identitas selalu berlangsung dalam relasi kuasa yang dibentuk oleh aturan platform, algoritma, norma komunitas, serta pengawasan publik. Individu harus terus menyesuaikan cara menampilkan identitasnya dengan mempertimbangkan kemungkinan memperoleh

penerimaan, penolakan, pelaporan akun, ujaran kebencian, maupun serangan digital. Duguay (2022) menyebut proses ini sebagai identity modulation, yaitu penyesuaian identitas secara terus-menerus sesuai karakteristik platform, audiens, dan konteks interaksi. Dengan demikian, praktik identitas digital merupakan proses negosiasi yang berlangsung tanpa henti antara keinginan untuk terlihat dan kebutuhan untuk tetap aman.

Relasi antara identitas dan teknologi semakin memperlihatkan bahwa platform digital bukan sekadar media komunikasi yang bersifat netral. Algoritma menentukan visibilitas suatu konten, merekomendasikan jejaring sosial tertentu, mengelompokkan pengguna berdasarkan preferensi digital, bahkan membentuk peluang munculnya identitas tertentu di ruang publik. Praktik identitas akhirnya berkembang bersama logika platform sehingga visibilitas sosial tidak hanya ditentukan oleh tindakan individu, tetapi juga oleh mekanisme teknologis yang mengatur sirkulasi informasi. Oleh karena itu, identitas digital merupakan hasil interaksi antara praktik manusia dan infrastruktur digital yang saling membentuk secara simultan (Couldry & Hepp, 2017; Southerton et al., 2021; Weinger, 2025).

Dalam perspektif sosiologi gender, praktik identitas digital juga menunjukkan bahwa seksualitas dan gender terus diproduksi melalui tindakan yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai bentuk unggahan, penggunaan bahasa, ekspresi visual, simbol budaya, maupun partisipasi dalam diskusi publik merupakan bagian dari praktik performatif yang membangun identitas sosial. Praktik tersebut tidak hanya merepresentasikan siapa seseorang, tetapi juga secara simultan membentuk makna mengenai maskulinitas, femininitas, keberagaman gender, dan seksualitas dalam masyarakat digital. Identitas karenanya berkembang sebagai proses sosial yang selalu dinegosiasikan melalui hubungan antara individu, komunitas, dan struktur sosial yang lebih luas (Butler, 1990; Duguay, 2022; Gedro & Rocco, 2024).

Praktik identitas digital juga menghasilkan konsekuensi kolektif. Aktivitas yang pada awalnya bersifat individual, seperti membagikan pengalaman hidup, menggunakan simbol pelangi, menyampaikan narasi coming out, atau memberikan dukungan terhadap sesama anggota komunitas, secara bertahap membentuk pola tindakan bersama yang menghasilkan norma baru dalam komunitas digital. Praktik-praktik tersebut kemudian berkembang menjadi budaya digital yang memiliki aturan, nilai,

bahasa, simbol, dan mekanisme pengakuannya sendiri. Melalui proses inilah identitas individual bertransformasi menjadi identitas kolektif yang memperkuat solidaritas sosial sekaligus memperluas kapasitas kelompok untuk memperoleh pengakuan di ruang publik (Kasianenko, 2026; Zottola, 2024).

Dari sudut pandang sosiologi, identitas digital pada akhirnya harus dipahami sebagai praktik sosial yang menghubungkan tindakan individual dengan perubahan struktur masyarakat. Setiap unggahan, komentar, simbol visual, maupun interaksi digital bukan sekadar aktivitas komunikasi, melainkan bagian dari proses reproduksi dan transformasi kehidupan sosial. Praktik tersebut membentuk cara individu memahami dirinya, menghubungkan diri dengan komunitas, menegosiasikan relasi kuasa, sekaligus menghasilkan perubahan norma yang melampaui ruang digital. Dalam konteks inilah identitas digital menjadi salah satu mekanisme penting yang menjelaskan bagaimana transformasi sosial berlangsung pada masyarakat yang semakin terdigitalisasi.

5.2 Pergeseran norma heteronormatif

Pembahasan pada subbab sebelumnya menunjukkan bahwa identitas digital berkembang sebagai praktik sosial yang diproduksi melalui interaksi, representasi, dan partisipasi yang berlangsung secara berulang dalam ruang digital (Couldry & Hepp, 2017). Praktik tersebut tidak berhenti pada pembentukan identitas individual, tetapi secara bertahap menghasilkan perubahan dalam hubungan sosial yang lebih luas. Ketika semakin banyak individu dan komunitas secara kolektif merepresentasikan identitasnya melalui media digital, mereka turut memengaruhi cara masyarakat memahami seksualitas, gender, dan batas-batas mengenai apa yang dianggap normal dalam kehidupan sosial (Duguay, 2022). Dalam konteks ini, negosiasi identitas digital menjadi salah satu mekanisme yang mendorong transformasi norma heteronormatif menuju konfigurasi sosial yang lebih beragam (Zhang & Billard, 2024).

Dalam perspektif sosiologi, heteronormativitas merupakan tatanan sosial yang mengasumsikan heteroseksualitas sebagai orientasi seksual yang alamiah, dominan, dan paling sah (Warner, 1991). Asumsi tersebut kemudian membentuk berbagai institusi sosial, mulai dari keluarga, pendidikan, agama, hingga kebijakan publik, sehingga identitas seksual dan identitas gender di luar kategori heteroseksual sering ditempatkan sebagai penyimpangan dari

norma sosial (Butler, 1990). Oleh karena itu, heteronormativitas tidak sekadar menggambarkan preferensi seksual mayoritas, melainkan menjadi mekanisme kekuasaan yang terus mereproduksi batas antara identitas yang diakui dan identitas yang dimarginalkan (Salamon, 2020).

Media digital menghadirkan dinamika yang berbeda. Platform digital memungkinkan kelompok LGBTQA+ memproduksi representasi mereka sendiri tanpa sepenuhnya bergantung pada media arus utama yang selama beberapa dekade lebih banyak membentuk citra mereka dari perspektif dominan (Duguay, 2022). Individu tidak lagi hanya menjadi objek representasi, tetapi juga bertindak sebagai produsen pengetahuan mengenai pengalaman hidup, identitas, relasi sosial, dan ekspresi seksualnya sendiri (Robards et al., 2021). Pergeseran posisi tersebut memperluas keberagaman narasi mengenai gender dan seksualitas sehingga masyarakat semakin sering berhadapan dengan pengalaman sosial yang sebelumnya tidak memperoleh ruang dalam diskursus publik (Bayramog̃lu et al., 2024).

Perubahan norma tidak terjadi melalui satu peristiwa besar, melainkan berkembang secara bertahap melalui akumulasi praktik komunikasi yang berlangsung setiap hari. Unggahan mengenai pengalaman hidup,

narasi coming out, edukasi tentang keberagaman gender, diskusi publik, maupun interaksi antarpengguna memperluas paparan masyarakat terhadap identitas yang sebelumnya kurang terlihat (Berger & Luckmann, 1966). Dalam kerangka mediatization, komunikasi digital yang berlangsung secara terus-menerus ikut membentuk cara masyarakat mengonstruksi realitas sosial (Couldry & Hepp, 2017). Semakin sering keberagaman identitas hadir dalam kehidupan digital sehari-hari, semakin besar peluang masyarakat merevisi pemahamannya mengenai seksualitas dan gender (Zhang & Billard, 2024).

Pergeseran tersebut juga tercermin dalam berkembangnya bahasa, simbol, dan kategori identitas yang digunakan dalam ruang publik digital. Berbagai istilah mengenai identitas seksual, identitas gender, maupun ekspresi gender yang sebelumnya hanya dikenal dalam komunitas tertentu kini menjadi bagian dari percakapan publik melalui media sosial, platform video, dan budaya digital populer (Oxford Handbook of Media and Social Justice, 2024). Bersamaan dengan itu, berbagai simbol seperti bendera pelangi, penggunaan pronomina pilihan, maupun narasi mengenai keberagaman identitas semakin memperoleh pengakuan sebagai bagian dari praktik komunikasi sehari-hari (Duguay, 2022). Penelitian

lintas negara juga menunjukkan bahwa media digital memperkuat terbentuknya budaya queer transnasional melalui pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan solidaritas yang melampaui batas geografis (LGBTQ Digital Cultures: A Global Perspective, 2022).

Namun, meningkatnya visibilitas identitas LGBTQA+ tidak serta-merta menghasilkan penerimaan sosial yang lebih luas. Justru, semakin terbukanya ruang representasi sering diikuti oleh munculnya resistensi dari kelompok yang berupaya mempertahankan norma heteronormatif sebagai landasan moral masyarakat (Bayramog̃ lu et al., 2024). Penolakan tersebut muncul dalam bentuk ujaran kebencian, stigmatisasi, pelaporan konten, kampanye moral, hingga tuntutan pembatasan ekspresi gender dan seksualitas di media digital (Duguay, 2022). Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa transformasi norma selalu berlangsung melalui kontestasi berbagai kepentingan sosial, bukan melalui proses yang linier ataupun tanpa konflik.

Selain dipengaruhi oleh interaksi antarpengguna, perubahan norma juga dibentuk oleh infrastruktur digital itu sendiri. Algoritma, sistem moderasi konten, serta kebijakan platform menentukan sejauh mana suatu representasi memperoleh visibilitas dalam

ruang publik digital (Southerton et al., 2021). Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa sistem algoritmik masih mereproduksi bias terhadap kelompok seksual minoritas sehingga banyak kreator LGBTQA+ mengembangkan strategi adaptasi untuk mempertahankan visibilitas tanpa melanggar kebijakan platform (Weinger, 2025). Dengan demikian, negosiasi identitas berlangsung secara simultan antara individu, masyarakat, dan teknologi digital yang mengatur sirkulasi informasi.

Perubahan norma heteronormatif pada akhirnya tidak menunjukkan hilangnya norma lama secara keseluruhan. Yang berkembang justru adalah meningkatnya pluralitas norma dalam masyarakat digital. Heteronormativitas tetap menjadi struktur sosial yang berpengaruh dalam berbagai institusi, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya kerangka yang menentukan bagaimana seksualitas dan gender dipahami dalam ruang publik (Butler, 1990). Berbagai identitas alternatif memperoleh ruang untuk hadir, diperdebatkan, diterima, maupun ditolak secara terbuka melalui interaksi digital (Zhang & Billard, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat digital semakin ditandai oleh keberadaan berbagai sistem nilai yang hidup secara berdampingan, meskipun hubungan di antaranya tetap diwarnai oleh relasi kuasa dan konflik sosial.

Dari perspektif sosiologi gender, perubahan tersebut menegaskan bahwa norma sosial bukanlah struktur yang tetap, melainkan hasil dari praktik sosial yang terus diproduksi dan dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari (Berger & Luckmann, 1966). Media digital mempercepat proses tersebut dengan memperluas kesempatan berbagai kelompok sosial untuk memproduksi representasi alternatif, membangun solidaritas kolektif, serta menantang definisi mengenai normalitas yang telah lama dilembagakan (Duguay, 2022). Pergeseran norma heteronormatif karena itu lebih tepat dipahami sebagai proses transformasi sosial yang membuka ruang semakin luas bagi keberagaman identitas untuk memperoleh pengakuan dalam masyarakat digital (Robards et al., 2021).

5.3 Politik pengakuan dalam masyarakat digital

Pembahasan pada subbab sebelumnya menunjukkan bahwa media digital tidak hanya memperluas ruang representasi identitas, tetapi juga mendorong terjadinya pergeseran norma sosial mengenai seksualitas dan gender. Pergeseran tersebut, bagaimanapun, tidak secara otomatis menghilangkan ketimpangan sosial maupun relasi kuasa yang telah lama melembaga. Meningkatnya visibilitas kelompok

LGBTQA+ justru melahirkan tuntutan yang lebih mendasar, yaitu memperoleh pengakuan sebagai bagian yang sah dari kehidupan sosial. Dalam konteks masyarakat digital, negosiasi identitas berkembang dari sekadar praktik representasi menuju perjuangan untuk mendapatkan pengakuan, legitimasi, dan partisipasi yang setara dalam ruang publik (Carpenter, 2024; Duguay, 2022). Pengakuan dengan demikian menjadi dimensi penting yang menghubungkan ekspresi identitas dengan transformasi sosial yang lebih luas.

Dalam tradisi teori kritis, pengakuan dipahami sebagai kebutuhan fundamental yang memungkinkan individu mengembangkan identitas, harga diri, dan relasi sosial secara bermakna. Taylor (1994) menegaskan bahwa identitas seseorang terbentuk melalui proses dialogis dengan orang lain sehingga pengakuan bukan sekadar bentuk penerimaan, melainkan syarat bagi pembentukan diri. Pandangan tersebut diperluas oleh Honneth (1995), yang menjelaskan bahwa pengalaman tidak diakui (*misrecognition*) menghasilkan luka moral karena individu kehilangan kesempatan untuk diperlakukan sebagai subjek yang memiliki martabat dan nilai sosial. Fraser dan Honneth (2003) kemudian menunjukkan bahwa perjuangan memperoleh pengakuan tidak dapat dipisahkan dari persoalan keadilan sosial karena

pengakuan yang tidak setara sering berjalan bersamaan dengan eksklusi politik, ekonomi, maupun budaya.

Berdasarkan perspektif tersebut, perjuangan kelompok LGBTQA+ tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya memperoleh kebebasan mengekspresikan identitas seksual atau identitas gender. Tuntutan yang berkembang jauh lebih luas, yaitu memperoleh pengakuan sebagai warga masyarakat yang memiliki hak, martabat, dan kesempatan berpartisipasi secara setara. Politik pengakuan karena itu bergeser dari persoalan identitas individual menuju persoalan keadilan sosial yang menyangkut siapa yang diakui sebagai anggota masyarakat yang sah dan siapa yang terus ditempatkan pada posisi marjinal (Fraser & Honneth, 2003; Carpenter, 2024).

Media digital menghadirkan konfigurasi baru dalam proses memperoleh pengakuan tersebut. Jika sebelumnya pengakuan banyak ditentukan oleh institusi sosial seperti negara, keluarga, media arus utama, maupun otoritas budaya, kini platform digital menyediakan ruang alternatif bagi kelompok marginal untuk membangun representasi mereka sendiri, menjalin hubungan dengan sesama pengguna, serta memperoleh validasi dari komunitas yang lebih luas.

Kajian dalam *The Oxford Handbook of Digital Media Sociology* menunjukkan bahwa komunitas LGBTQA+ memanfaatkan media digital tidak hanya untuk membangun jaringan sosial, tetapi juga untuk melakukan *identity work*, membentuk rasa memiliki, dan memperoleh pengakuan kolektif melalui interaksi sehari-hari (Robards et al., 2021). Dengan demikian, pengakuan dalam masyarakat digital tidak lagi sepenuhnya dimediasi oleh institusi formal, melainkan juga diproduksi melalui praktik komunikasi yang berlangsung dalam jejaring digital.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa visibilitas menjadi salah satu prasyarat penting bagi lahirnya pengakuan sosial. Individu maupun komunitas tidak mungkin memperoleh pengakuan apabila keberadaannya terus disembunyikan atau dihapus dari ruang publik. Akan tetapi, visibilitas tidak identik dengan kebebasan tanpa batas. Duguay (2022) menunjukkan bahwa pengguna queer secara terus-menerus melakukan *identity modulation*, yaitu menyesuaikan cara mereka menampilkan identitas sesuai karakteristik platform, audiens, serta potensi risiko yang dihadapi. Carpenter (2024) juga menegaskan bahwa ruang digital membentuk kondisi mengenai siapa yang dapat "tampil" di hadapan publik dan bagaimana identitas tersebut dimaknai. Dengan demikian, pengakuan dalam masyarakat digital selalu

bergantung pada hubungan yang dinamis antara visibilitas, keamanan, dan penerimaan sosial.

Politik pengakuan di ruang digital tidak pernah berlangsung tanpa kontestasi. Semakin besar visibilitas kelompok LGBTQA+, semakin besar pula kemungkinan munculnya penolakan, ujaran kebencian, stigmatisasi, maupun upaya membatasi ekspresi identitas melalui tekanan sosial atau mekanisme platform. Fraser dan Honneth (2003) telah mengingatkan bahwa pengakuan selalu menjadi arena konflik karena berbagai kelompok memiliki definisi yang berbeda mengenai identitas yang layak memperoleh legitimasi. Dalam konteks digital, konflik tersebut semakin kompleks karena dipengaruhi oleh logika platform, moderasi konten, dan algoritma yang menentukan distribusi visibilitas. Kajian mutakhir mengenai media dan keadilan sosial juga menunjukkan bahwa teknologi digital dapat sekaligus memperluas ruang bagi kelompok marginal maupun mereproduksi bentuk-bentuk eksklusi baru apabila tata kelola platform masih mencerminkan relasi kuasa yang tidak setara.

Keberhasilan memperoleh pengakuan memiliki implikasi yang melampaui perubahan citra atau peningkatan visibilitas. Pengakuan memperluas kesempatan individu untuk berpartisipasi dalam

kehidupan sosial, membangun solidaritas kolektif, serta mengembangkan kapasitas politik sebagai bagian dari masyarakat. Berbagai penelitian mengenai komunitas LGBTQA+ di media digital menunjukkan bahwa dukungan sebaya, validasi sosial, dan interaksi dalam komunitas daring memperkuat rasa memiliki (*sense of belonging*) sekaligus meningkatkan partisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan sosial dan advokasi (Robards et al., 2021). Dalam perspektif sosiologi, pengakuan bukan sekadar hasil akhir dari negosiasi identitas, melainkan mekanisme yang memungkinkan terbentuknya hubungan sosial yang lebih inklusif.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat digital sedang mengalami perubahan dalam mekanisme pembentukan legitimasi sosial. Pengakuan tidak lagi hanya diberikan oleh institusi formal, tetapi juga diproduksi melalui interaksi antarpengguna, komunitas digital, dan berbagai praktik komunikasi yang berlangsung setiap hari. Walaupun proses tersebut masih diwarnai oleh resistensi, ketimpangan, dan kontestasi, media digital telah membuka peluang bagi munculnya bentuk-bentuk pengakuan yang sebelumnya sulit dicapai oleh kelompok seksual minoritas. Politik pengakuan karena itu menjadi salah satu mekanisme penting yang menjelaskan bagaimana negosiasi identitas digital

berkembang menjadi transformasi relasi sosial dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi (Carpenter, 2024; *The Oxford Handbook of Media and Social Justice*, 2024).

Perubahan mekanisme pengakuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa komunitas digital tidak hanya berfungsi sebagai ruang memperoleh dukungan sosial, tetapi juga sebagai arena pembentukan kapasitas kolektif. Ketika individu memperoleh pengakuan dari komunitasnya, mereka memiliki sumber daya sosial yang lebih besar untuk membangun solidaritas, menyusun narasi bersama, dan melakukan tindakan kolektif di ruang publik. Oleh karena itu, politik pengakuan menjadi jembatan yang menghubungkan negosiasi identitas dengan berkembangnya aktivisme digital, yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

5.4 Aktivisme digital dan pembentukan komunitas

Politik pengakuan yang dibahas pada subbab sebelumnya tidak berhenti pada penerimaan simbolik. Pengakuan memberi dasar sosial bagi individu LGBTQA+ untuk membangun rasa memiliki, memperkuat solidaritas, dan mengembangkan tindakan kolektif dalam ruang digital (Carpenter, 2024; Robards et al., 2021). Dalam masyarakat digital, identitas yang sebelumnya dinegosiasikan secara personal dapat berkembang menjadi basis komunitas

ketika pengalaman individual bertemu dengan pengalaman serupa dari pengguna lain (Duguay, 2022; Robards et al., 2021). Proses ini menjelaskan mengapa representasi digital tidak hanya menghasilkan visibilitas, tetapi juga membentuk energi sosial bagi aktivisme dan pembentukan komunitas.

Aktivisme digital perlu dipahami sebagai praktik sosial kolektif, bukan sekadar aktivitas mengunggah konten, membagikan tagar, atau menyampaikan opini di media sosial. Bennett dan Segerberg (2012) menjelaskan bahwa media digital memungkinkan bentuk connective action, yaitu tindakan kolektif yang tidak selalu bergantung pada organisasi formal, tetapi bergerak melalui jejaring personal, narasi emosional, dan konten yang mudah dibagikan. Tufekci (2017) juga menunjukkan bahwa media sosial memperluas kapasitas gerakan sosial untuk membangun perhatian publik, mengorganisasi dukungan, dan mempercepat mobilisasi, meskipun gerakan digital tetap memiliki kerentanan struktural.

Dalam konteks LGBTQA+, aktivisme digital muncul ketika ekspresi identitas berubah menjadi tindakan kolektif untuk menantang stigma, memperluas pengetahuan publik, dan membangun dukungan sosial. Robards, Byron, dan D'Souza (2021) menunjukkan bahwa media digital menyediakan ruang bagi

komunitas LGBTQ+ untuk membangun koneksi, persahabatan, dukungan, serta sumber belajar mengenai gender dan seksualitas. Temuan ini penting karena komunitas digital tidak hanya berfungsi sebagai ruang komunikasi, tetapi juga sebagai ruang produksi pengetahuan sosial yang membantu individu memahami posisi dirinya dalam struktur masyarakat yang heteronormatif.

Peralihan dari identitas individual menuju identitas kolektif terjadi melalui pengulangan pengalaman, simbol, dan narasi yang dibagikan secara terus-menerus. Pengguna yang semula hanya menyampaikan pengalaman personal dapat menemukan bahwa pengalaman tersebut juga dialami oleh banyak orang lain. Dari titik ini, pengalaman individual berubah menjadi kesadaran kolektif. Duguay (2022) menjelaskan bahwa pengguna queer tidak menampilkan identitas secara bebas tanpa batas, melainkan memodulasi identitas sesuai audiens, platform, dan risiko sosial. Proses modulasi tersebut justru memperlihatkan bahwa pembentukan komunitas digital selalu melibatkan strategi, kehati-hatian, dan pembacaan atas relasi kuasa.

Komunitas digital kemudian bekerja sebagai ruang aman relatif bagi kelompok yang menghadapi stigma dalam kehidupan luring. Istilah “relatif” penting

karena ruang digital tidak pernah sepenuhnya aman. Namun, bagi banyak individu LGBTQA+, media sosial tetap menyediakan akses pada dukungan sebaya, informasi, validasi, dan rasa tidak sendiri. Fisher et al. (2024) menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sumber koneksi dan perlindungan bagi remaja LGBTQ+, meskipun pada saat yang sama juga dapat menjadi ruang penolakan dan diskriminasi. Artinya, komunitas digital memiliki fungsi ambivalen: ia dapat melindungi, tetapi juga tetap rentan terhadap kekerasan simbolik.

Aktivisme digital juga bekerja melalui bahasa, simbol, visual, cerita personal, dan tagar. Bonilla dan Rosa (2015) menunjukkan bahwa hashtag activism dapat membentuk temporalitas politik bersama, mendokumentasikan ketidakadilan, dan menantang representasi dominan di media arus utama. Dalam konteks LGBTQA+, tagar dan simbol digital berfungsi sebagai alat penghubung antarindividu, penanda solidaritas, serta mekanisme untuk memperluas visibilitas isu. Simbol pelangi, narasi coming out, kampanye edukasi, dan cerita pengalaman diskriminasi menjadi perangkat semiotik yang mengubah pengalaman pribadi menjadi isu publik.

Aktivisme digital LGBTQA+ juga dapat dibaca sebagai perlawanan terhadap heteronormativitas. Jika

heteronormativitas bekerja dengan menetapkan batas antara identitas yang dianggap normal dan menyimpang, maka aktivisme digital bekerja dengan menampilkan narasi alternatif mengenai tubuh, relasi, seksualitas, keluarga, dan kewargaan sosial. Brändle (2024) menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi alat penting bagi aktivisme kelompok LGBTQ+ karena memungkinkan repertoar aksi yang lebih beragam bagi kelompok marginal. Dengan demikian, aktivisme digital tidak hanya menyampaikan tuntutan, tetapi juga mendidik publik melalui produksi narasi tandingan.

Namun aktivisme digital tidak boleh dipahami secara romantik. Platform digital juga membatasi aktivisme melalui moderasi konten, pengaturan visibilitas, pelaporan massal, ujaran kebencian, doxing, dan tekanan moral. Zeng, Kaye, dan Schäfer (2022) menunjukkan bahwa tata kelola platform dapat bergeser dari content moderation menuju visibility moderation, yaitu pengaturan tentang konten mana yang tampak, tersebar, atau tenggelam dalam ekosistem platform. Badouard (2025) juga menegaskan bahwa moderasi platform mencakup pemantauan, penyaringan, pengurutan, penguatan, monetisasi, dan penghapusan konten. Karena itu, aktivisme LGBTQA+ selalu bergerak dalam ruang yang dikondisikan oleh infrastruktur platform.

Risiko tersebut semakin besar dalam masyarakat yang masih kuat memegang norma heteronormatif. Aktivisme digital LGBTQA+ sering menghadapi resistensi dalam bentuk komentar kebencian, delegitimasi moral, tuduhan penyimpangan, dan tuntutan sensor. Studi Strand (2024) tentang aktivisme LGBT+ di Uganda menunjukkan bahwa organisasi LGBT+ menggunakan ruang digital yang mereka kendalikan sendiri sekaligus platform seperti Twitter dan Facebook untuk mempertahankan kehadiran publik di tengah konteks sosial-politik yang restriktif. Temuan ini memperlihatkan bahwa komunitas digital sering menjadi strategi bertahan, bukan sekadar pilihan komunikasi.

Dalam konteks Indonesia, dimensi komunitas digital menjadi semakin penting karena ruang ekspresi LGBTQA+ sering dibatasi oleh tekanan sosial, moral, dan politik. Studi mengenai representasi identitas LGBTQ di Instagram menunjukkan bahwa akun komunitas seperti Yayasan Gaya Nusantara menggunakan Instagram untuk membentuk representasi yang lebih autentik dan menantang stereotip dominan (Andika, 2023). Studi lain mengenai akun LGBTQ di Indonesia juga menunjukkan penggunaan afirmasi visual, lokalisasi budaya, dan narasi afektif untuk membangun ruang publik tandingan yang lebih inklusif (Haryono, 2025).

Sumber ini perlu dipakai secara hati-hati sebagai pendukung konteks lokal, bukan sebagai fondasi teori utama.

Pembentukan komunitas digital memiliki dampak yang lebih luas daripada dukungan emosional. Komunitas menyediakan infrastruktur sosial bagi gerakan. Di dalamnya, individu dapat bertukar informasi, membangun kepercayaan, mengembangkan bahasa bersama, menyusun strategi komunikasi, dan memperluas jaringan solidaritas. Tufekci (2017) menegaskan bahwa kekuatan protes berjejaring terletak pada kapasitasnya membangun perhatian dan mobilisasi secara cepat, tetapi kelemahannya muncul ketika jaringan tidak memiliki struktur sosial yang cukup kuat untuk mempertahankan gerakan jangka panjang. Karena itu, komunitas digital menjadi penting karena ia menghubungkan ekspresi identitas dengan keberlanjutan gerakan.

Pada titik ini, aktivisme digital dan pembentukan komunitas saling memperkuat. Aktivisme membutuhkan komunitas agar tidak berhenti sebagai ekspresi individual yang terfragmentasi. Sebaliknya, komunitas membutuhkan aktivisme agar tidak hanya menjadi ruang dukungan internal, tetapi juga mampu mengubah relasi sosial yang lebih luas. Dalam konteks

LGBTQA+, hubungan keduanya membentuk proses sosiologis yang penting: identitas melahirkan solidaritas, solidaritas membentuk komunitas, komunitas menghasilkan tindakan kolektif, dan tindakan kolektif membuka ruang bagi klaim pengakuan yang lebih luas.

Dengan demikian, aktivisme digital tidak hanya menjadi strategi komunikasi kelompok LGBTQA+, tetapi juga mekanisme pembentukan komunitas dan produksi kewargaan sosial. Melalui aktivisme digital, kelompok yang sebelumnya ditempatkan di pinggir ruang publik dapat membangun jaringan, mengartikulasikan pengalaman, menantang norma dominan, dan mengklaim hak untuk hadir sebagai bagian dari masyarakat. Argumen ini menjadi jembatan menuju subbab berikutnya, karena komunitas dan aktivisme digital pada akhirnya membuka pertanyaan yang lebih luas mengenai masa depan kewargaan sosial dalam masyarakat digital.

5.5 Identitas digital dan masa depan kewargaan sosial

Pembahasan mengenai aktivisme digital dan pembentukan komunitas menunjukkan bahwa negosiasi identitas LGBTQA+ tidak berhenti pada

pembentukan solidaritas maupun perluasan visibilitas di ruang digital. Aktivitas kolektif tersebut secara bertahap berkembang menjadi tuntutan yang lebih mendasar, yaitu memperoleh pengakuan sebagai anggota masyarakat yang memiliki hak, kesempatan berpartisipasi, serta posisi yang setara dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, identitas digital tidak lagi sekadar menjadi medium representasi diri, tetapi menjadi salah satu arena utama tempat kewargaan sosial diproduksi, diperdebatkan, dan dinegosiasikan (Carpenter, 2024; Isin & Ruppert, 2015). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital telah menggeser cara masyarakat memahami hubungan antara identitas, hak, dan keanggotaan sosial.

Konsep kewargaan sosial pada awalnya dikembangkan oleh Marshall (1950) sebagai status keanggotaan yang memberikan hak sipil, politik, dan sosial kepada seluruh anggota masyarakat. Perkembangan teori kewargaan kemudian menunjukkan bahwa status formal sebagai warga negara tidak selalu menjamin pengalaman kewargaan yang setara. Yuval-Davis (2011) menegaskan bahwa kewargaan juga berkaitan dengan politik *belonging*, yaitu proses sosial yang menentukan siapa yang diakui sebagai bagian dari komunitas politik dan siapa yang ditempatkan di luar batas keanggotaan. Dengan

demikian, kewargaan tidak hanya menyangkut kepemilikan hak secara hukum, tetapi juga pengakuan sosial, rasa memiliki, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bersama.

Dalam perspektif yang lebih mutakhir, kewargaan dipahami sebagai praktik sosial yang terus diproduksi melalui tindakan warga. Isin dan Nielsen (2008) menjelaskan bahwa kewargaan terbentuk melalui *acts of citizenship*, yaitu tindakan yang mengklaim hak, mengubah batas keanggotaan, dan menantang struktur eksklusi yang telah mapan. Isin dan Ruppert (2015) kemudian memperluas gagasan tersebut ke dalam masyarakat digital dengan menunjukkan bahwa individu tidak hanya menjadi warga melalui hubungan dengan negara, tetapi juga melalui interaksi dengan data, platform digital, algoritma, dan jejaring komunikasi. Kewargaan digital karena itu berkembang sebagai praktik partisipasi yang berlangsung di dalam infrastruktur digital yang membentuk kehidupan sosial kontemporer.

Perubahan tersebut memiliki implikasi yang penting bagi kelompok LGBTQA+. Selama beberapa dekade, pembahasan mengenai kewargaan seksual (*sexual citizenship*) menunjukkan bahwa kelompok minoritas seksual sering kali mengalami keterbatasan dalam memperoleh pengakuan, perlindungan, maupun akses

terhadap ruang publik akibat dominasi norma heteronormatif (Bell & Binnie, 2000; Richardson, 2017). Langdridge (2024) memperlihatkan bahwa kewargaan seksual pada masa kini tidak lagi hanya berkaitan dengan perluasan hak formal, tetapi juga dengan bagaimana identitas seksual memperoleh legitimasi dalam masyarakat yang terus mengalami perubahan budaya dan politik. Dengan demikian, perjuangan kelompok LGBTQA+ tidak hanya menyangkut kebebasan berekspresi, melainkan juga hak untuk diakui sebagai warga yang setara dalam kehidupan sosial.

Media digital memperluas kemungkinan tersebut dengan menyediakan ruang baru bagi praktik kewargaan. Platform digital memungkinkan individu membangun identitas, memperluas jejaring sosial, menyampaikan pengalaman hidup, mengorganisasi komunitas, dan berpartisipasi dalam berbagai diskursus publik tanpa sepenuhnya bergantung pada institusi konvensional. Kajian dalam *The Oxford Handbook of Digital Media Sociology* menunjukkan bahwa komunitas LGBTQ+ memanfaatkan media digital untuk membangun *identity work*, dukungan sosial, serta rasa memiliki yang memperkuat posisi mereka dalam ruang publik digital. Duguay (2022) menambahkan bahwa identitas digital queer selalu berkembang melalui proses *identity modulation*, yaitu

penyesuaian identitas terhadap karakteristik platform, audiens, dan risiko sosial. Identitas digital dengan demikian menjadi praktik kewargaan yang bersifat dinamis, strategis, dan terus dinegosiasikan.

Namun, kewargaan digital tidak dapat dipahami sebagai ruang yang sepenuhnya inklusif. Platform digital membentuk batas-batas baru mengenai siapa yang dapat terlihat, didengar, dan memperoleh legitimasi. Aggleton dkk. (2024) menunjukkan bahwa klasifikasi konten dan kebijakan platform memengaruhi praktik *sexual citizenship* kelompok LGBTQ+, karena sistem moderasi dan klasifikasi dapat mempersempit ruang ekspresi seksual minoritas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengalaman menjadi warga digital sangat dipengaruhi oleh desain teknologi, algoritma, dan tata kelola platform, bukan semata-mata oleh tindakan individu. Dengan demikian, perluasan ruang digital sekaligus menghasilkan bentuk-bentuk baru eksklusi yang memerlukan perhatian kritis.

Masa depan kewargaan sosial karena itu tidak hanya bergantung pada perubahan norma masyarakat, tetapi juga pada bagaimana infrastruktur digital dikembangkan secara lebih inklusif. Kajian terbaru mengenai teknologi digital yang ramah bagi komunitas LGBT+ menegaskan pentingnya desain

platform yang mampu melindungi keamanan pengguna, mendukung keberagaman identitas, serta mengurangi berbagai bentuk diskriminasi algoritmik. Bersamaan dengan itu, *The Oxford Handbook of Media and Social Justice* menempatkan keadilan media sebagai prasyarat bagi terbentuknya masyarakat digital yang lebih demokratis karena akses terhadap representasi, partisipasi, dan komunikasi merupakan bagian dari keadilan sosial itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks. Transformasi digital berkembang sangat cepat, sementara norma sosial mengenai seksualitas dan gender masih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai heteronormatif. Akibatnya, identitas digital LGBTQA+ sering berada dalam posisi yang paradoks. Di satu sisi, media digital membuka peluang untuk membangun komunitas, memperoleh dukungan, dan memperluas pengakuan sosial. Di sisi lain, ruang yang sama juga menghadirkan risiko berupa pengawasan sosial, ujaran kebencian, pelaporan konten, serta pembatasan ekspresi identitas. Situasi ini menunjukkan bahwa kewargaan sosial kelompok LGBTQA+ belum dapat dipahami hanya melalui kerangka hukum formal, tetapi harus dianalisis sebagai hasil interaksi antara norma sosial, teknologi digital, tata kelola platform, dan praktik komunikasi masyarakat.

Dari perspektif sosiologi, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa identitas digital semakin menjadi salah satu fondasi utama pembentukan kewargaan sosial pada masyarakat digital. Keanggotaan sosial tidak lagi hanya ditentukan oleh status kewarganegaraan, tetapi juga oleh kemampuan individu untuk memperoleh pengakuan, membangun relasi, berpartisipasi dalam ruang publik, dan mengakses infrastruktur komunikasi yang adil. Masa depan kewargaan sosial karena itu bergantung pada sejauh mana masyarakat mampu mengembangkan sistem sosial dan digital yang mengakui keberagaman identitas sebagai bagian yang sah dari kehidupan bersama. Dalam konteks inilah identitas digital tidak sekadar merepresentasikan perubahan teknologi, tetapi juga merefleksikan transformasi mendasar mengenai makna menjadi warga dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi.

5.6 Implikasi bagi kebijakan, pendidikan, dan kehidupan sosial

Pembahasan pada bab ini menunjukkan bahwa negosiasi identitas digital LGBTQA+ tidak hanya mengubah cara individu membangun dan merepresentasikan identitasnya, tetapi juga memengaruhi mekanisme pembentukan norma sosial,

pengakuan, solidaritas, serta praktik kewargaan dalam masyarakat digital. Transformasi tersebut memperlihatkan bahwa media digital telah berkembang menjadi institusi sosial yang membentuk relasi kuasa, distribusi visibilitas, dan peluang partisipasi warga dalam ruang publik (Couldry & Hepp, 2017; Rohlinger & Sobieraj, 2022). Oleh karena itu, implikasi negosiasi identitas digital tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan komunikasi digital, melainkan sebagai bagian dari perubahan struktur sosial yang memerlukan respons dari berbagai institusi masyarakat, termasuk kebijakan publik, pendidikan, dan kehidupan sosial (The Oxford Handbook of Media and Social Justice, 2024).

Dalam ranah kebijakan publik, transformasi masyarakat digital menunjukkan bahwa pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pengendalian konten atau keamanan siber tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas relasi sosial di ruang digital. Perkembangan platform digital telah mengubah cara warga memperoleh informasi, membangun komunitas, mengartikulasikan kepentingan, dan mengklaim pengakuan sosial. Karena itu, kebijakan digital perlu mempertimbangkan dimensi keadilan sosial, perlindungan hak digital, transparansi tata kelola platform, serta akuntabilitas algoritmik sebagai bagian dari penguatan ruang publik yang demokratis

(UNESCO, 2023; OECD, 2024). Perspektif tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu, melainkan memastikan bahwa seluruh warga memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan digital tanpa mengalami diskriminasi yang dihasilkan oleh mekanisme sosial maupun teknologi.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan tata kelola platform digital. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa algoritma, sistem moderasi konten, dan mekanisme distribusi informasi tidak pernah sepenuhnya bersifat netral karena seluruh proses tersebut dibangun melalui seperangkat keputusan teknis, ekonomi, dan politik yang memengaruhi visibilitas kelompok sosial tertentu (Duguay, 2022; Zeng et al., 2022). Dengan demikian, platform digital semakin berperan sebagai institusi sosial yang ikut menentukan siapa yang memperoleh ruang berbicara, siapa yang diakui sebagai bagian dari ruang publik, dan siapa yang mengalami pembatasan representasi. Implikasi ini menunjukkan pentingnya pengembangan tata kelola platform yang lebih transparan, akuntabel, dan sensitif terhadap keberagaman pengalaman sosial tanpa mengabaikan prinsip keamanan, perlindungan pengguna, serta kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab (Badouard, 2025; UNESCO, 2023).

Dalam bidang pendidikan, transformasi digital juga menuntut perubahan cara memahami literasi. Literasi digital tidak lagi cukup dimaknai sebagai kemampuan mengoperasikan teknologi atau mengevaluasi informasi, tetapi perlu dikembangkan sebagai kemampuan memahami relasi antara media, identitas, kekuasaan, representasi, dan kehidupan sosial. Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun kemampuan berpikir kritis terhadap berbagai bentuk representasi digital, memahami dinamika interaksi dalam masyarakat yang semakin beragam, serta mengembangkan etika komunikasi yang menghargai martabat setiap individu (UNESCO, 2023). Pendekatan tersebut memungkinkan peserta didik tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang kompeten, tetapi juga warga digital yang mampu berpartisipasi secara reflektif dan bertanggung jawab dalam ruang publik.

Penguatan pendidikan juga perlu diarahkan pada pengembangan literasi sosiologis mengenai keberagaman masyarakat. Transformasi digital memperlihatkan bahwa individu semakin sering berinteraksi dengan pengalaman, nilai, dan identitas yang berbeda dari lingkungan sosial terdekatnya. Situasi tersebut menuntut kemampuan memahami keberagaman sebagai realitas sosial yang perlu dibaca secara kritis melalui perspektif sosiologi, bukan

sekadar melalui penilaian moral yang bersifat simplistik. Pendidikan yang mendorong dialog, penghormatan terhadap perbedaan, serta kemampuan menganalisis proses pembentukan stigma dan diskriminasi akan memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial yang dipercepat oleh teknologi digital (The Oxford Handbook of Sociology for Social Justice, 2024).

Implikasi yang tidak kalah penting terlihat dalam kehidupan sosial sehari-hari. Media digital telah memperluas ruang interaksi sehingga hubungan sosial tidak lagi dibatasi oleh kedekatan geografis, melainkan semakin dibentuk oleh jejaring komunikasi, komunitas virtual, dan pertukaran simbolik yang berlangsung secara terus-menerus. Kondisi tersebut menghasilkan bentuk-bentuk baru solidaritas, rasa memiliki, dan partisipasi sosial, tetapi pada saat yang sama juga memperbesar peluang munculnya polarisasi, eksklusif, ujaran kebencian, dan konflik identitas (Robards et al., 2021; Carpenter, 2024). Oleh sebab itu, kohesi sosial pada masyarakat digital tidak lagi hanya ditentukan oleh kedekatan fisik atau kesamaan budaya, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat membangun relasi yang inklusif di ruang digital.

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan sosial semakin menjadi fondasi penting bagi kehidupan bersama. Honneth (1995) menjelaskan bahwa pengakuan memungkinkan individu mengembangkan harga diri dan membangun hubungan sosial yang bermakna, sedangkan Fraser dan Honneth (2003) menunjukkan bahwa pengakuan harus berjalan seiring dengan keadilan sosial agar tidak berhenti sebagai penerimaan simbolik semata. Dalam masyarakat digital, pengakuan berkembang melalui interaksi yang berlangsung setiap hari di berbagai platform sehingga kualitas hubungan sosial semakin dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat mengelola keberagaman, menyelesaikan perbedaan secara dialogis, dan membangun ruang komunikasi yang terbuka.

Dari perspektif sosiologi, transformasi tersebut juga membawa implikasi terhadap arah pengembangan ilmu pengetahuan. Kajian mengenai identitas digital tidak lagi dapat diposisikan sebagai bagian kecil dari studi media atau komunikasi, melainkan perlu dipahami sebagai bagian dari analisis mengenai transformasi masyarakat digital. Fokus penelitian tidak hanya diarahkan pada isi pesan atau perilaku pengguna, tetapi juga pada hubungan antara identitas, teknologi, institusi, algoritma, kewargaan, serta perubahan struktur sosial yang dihasilkan oleh

digitalisasi kehidupan sehari-hari (Couldry & Hepp, 2017; Rohlinger & Sobieraj, 2022). Pendekatan semacam ini membuka peluang bagi berkembangnya sosiologi digital yang semakin integratif dan mampu menjelaskan perubahan masyarakat secara lebih komprehensif.

Keseluruhan pembahasan dalam buku ini menunjukkan bahwa negosiasi identitas digital LGBTQA+ merupakan bagian dari proses transformasi sosial yang lebih luas daripada sekadar perubahan pola komunikasi di media sosial. Identitas digital berkembang sebagai praktik sosial yang memengaruhi pembentukan norma, politik pengakuan, aktivisme, komunitas, dan kewargaan sosial dalam masyarakat digital. Implikasi tersebut menegaskan bahwa masa depan kehidupan sosial akan semakin ditentukan oleh kemampuan berbagai institusi untuk mengelola hubungan antara teknologi, keberagaman identitas, dan keadilan sosial secara seimbang. Dalam konteks inilah media digital tidak hanya menjadi ruang komunikasi, tetapi juga menjadi arena tempat masyarakat terus membentuk kembali makna pengakuan, partisipasi, dan kehidupan bersama di era digital.

BAB VI BEYOND THE CLOSET: Menuju Model Negosiasi Identitas Digital LGBTQA+

6.1 Sintesis Konseptual Negosiasi Identitas Digital

Negosiasi identitas digital LGBTQA+ perlu dipahami sebagai proses sosial yang berlangsung melalui hubungan antara pengalaman individual, interaksi kolektif, struktur normatif, dan kekuasaan platform. Identitas tidak muncul sebagai esensi personal yang kemudian dipindahkan secara utuh ke ruang digital. Individu membentuk, menampilkan, menyembunyikan, dan menyesuaikan identitasnya melalui interaksi dengan keluarga, komunitas, institusi, audiens, serta sistem teknologi yang menentukan kondisi partisipasi digital. Perspektif ini menempatkan identitas sebagai hasil relasional yang terus diproduksi melalui praktik sosial, bukan sebagai atribut yang telah selesai sebelum seseorang memasuki media digital. Goffman (1959, 1963) menjelaskan bagaimana individu mengelola kesan dan informasi sosial dalam situasi yang ditandai oleh penilaian audiens, sedangkan Butler (1990) menunjukkan bahwa identitas gender memperoleh

bentuknya melalui tindakan yang diulang dalam batas norma sosial. Dalam masyarakat yang masih menempatkan heteroseksualitas dan kesesuaian gender sebagai standar dominan, kerja identitas tersebut selalu berhadapan dengan kemungkinan penolakan, pengawasan, dan sanksi sosial.

Stigma menjadi struktur awal yang membentuk kondisi negosiasi, tetapi pengaruhnya tidak berhenti ketika individu mulai merepresentasikan identitasnya secara digital. Stigma bekerja melalui pelabelan, stereotip, pengucilan, moral policing, diskriminasi, dan ancaman terhadap hubungan sosial. Ia menentukan identitas mana yang dianggap wajar, dapat diterima, atau harus disembunyikan. Dalam kerangka Goffman (1963), individu yang membawa atribut terstigmatisasi harus mengelola kemungkinan bahwa informasi tersebut diketahui oleh orang lain. Pada kelompok LGBTQA+, pengelolaan ini tidak semata-mata menyangkut keputusan personal untuk berkata jujur atau menutup diri. Ia berkaitan dengan penilaian terhadap keamanan, ketergantungan ekonomi, hubungan keluarga, lingkungan agama, posisi pekerjaan, dan konsekuensi institusional. Stigma kemudian menghasilkan kondisi sosial yang mendorong individu untuk membatasi keterbacaan identitasnya dalam konteks tertentu.

Hidden identity tidak dapat diperlakukan sebagai keadaan pasif atau bentuk kegagalan mencapai keterbukaan. Penyembunyian identitas merupakan kerja sosial yang melibatkan pengaturan informasi, pemisahan audiens, pengendalian ekspresi tubuh, pemilihan bahasa, dan pembentukan batas antara ruang yang dianggap aman dan berisiko. Seseorang dapat terbuka kepada teman atau komunitas tertentu, tetapi tetap menyembunyikan identitasnya dari keluarga, tempat kerja, institusi pendidikan, atau lingkungan keagamaan. Identitas tersembunyi karena itu bersifat multidimensional dan kontekstual. Individu tidak sekadar berada “di dalam” atau “di luar” closet. Mereka dapat menempati beberapa posisi keterbukaan secara bersamaan, sesuai dengan struktur hubungan sosial yang dihadapi. Cara pandang ini mengoreksi model coming out yang memandang perkembangan identitas sebagai perpindahan linear dari penyembunyian menuju keterbukaan permanen.

Media digital memperluas kemungkinan bagi individu untuk keluar dari ketidaktampakan sosial, tetapi tidak menghapus kebutuhan untuk mengelola identitas. Platform menyediakan ruang untuk menemukan istilah, membangun pengetahuan mengenai seksualitas dan gender, berhubungan dengan orang yang memiliki pengalaman serupa, serta menguji bentuk representasi yang sulit dilakukan dalam

kehidupan luring. Penelitian terhadap pengguna LGBTQIA+ menunjukkan bahwa affordances media sosial dapat mendukung eksplorasi identitas, pembentukan komunitas, pembelajaran antarpengguna, dan hubungan antara interaksi daring dengan kehidupan luring. Manfaat tersebut tetap disertai risiko pelecehan, kebocoran informasi, dan paparan kepada audiens yang tidak diinginkan (Are, 2025). Ruang digital karena itu tidak menggantikan closet dengan kebebasan tanpa batas. Ia mengubah bentuk, lokasi, dan mekanisme pengelolaan keterlihatan identitas.

Peralihan dari hidden identity menuju digital representation berlangsung melalui digital identity work. Konsep ini merujuk pada seluruh praktik yang dilakukan individu untuk membentuk dan mempertahankan representasi dirinya melalui profil, foto, video, narasi, nama akun, simbol, musik, komentar, dan hubungan dengan pengikut. Representasi digital tidak identik dengan pengungkapan seluruh identitas. Individu dapat memperlihatkan sebagian pengalaman, menggunakan tanda yang hanya dikenali komunitas tertentu, menciptakan akun terpisah, atau mengatur akses konten berdasarkan audiens. Setiap pilihan mengandung pertimbangan mengenai keamanan, kedekatan sosial, penerimaan, dan kemungkinan

sirkulasi konten. Identitas digital lahir dari pertemuan antara intensi pengguna dengan interpretasi audiens, bukan dari kontrol individual yang sepenuhnya utuh.

Konsep identity modulation memperjelas mekanisme yang bekerja di antara penyembunyian dan representasi. Duguay (2022) menggunakan konsep ini untuk menunjukkan bahwa pengguna queer mengatur personal identifiability, jangkauan, dan tingkat penonjolan identitas sesuai dengan tujuan, audiens, serta kondisi platform. Identitas dapat dibuat lebih eksplisit, dikurangi, dikodekan, dinetralkan, atau diarahkan kepada kelompok tertentu. Modulasi tersebut memungkinkan seseorang memperoleh keterhubungan sosial tanpa harus membuka seluruh informasi personal kepada setiap audiens. Ia juga menjelaskan mengapa orang yang sama dapat membentuk representasi berbeda di TikTok, Instagram, aplikasi kencan, atau akun privat. Setiap platform menghadirkan konfigurasi teknis, budaya pengguna, model bisnis, dan aturan tata kelola yang berbeda sehingga menuntut strategi identitas yang berbeda pula (Duguay, 2022).

Identity modulation menggeser pemahaman negosiasi identitas dari pilihan biner antara visible dan invisible menuju pengaturan tingkat keterbacaan identitas. Individu tidak selalu ingin sepenuhnya terlihat atau

sepenuhnya tersembunyi. Mereka menentukan bentuk representasi yang dapat dipahami oleh komunitas tertentu tanpa mudah terbaca oleh keluarga, institusi, atau kelompok yang berpotensi melakukan penolakan. Musik, humor, penggunaan istilah tertentu, gaya visual, tagar, dan referensi budaya dapat berfungsi sebagai kode pengenalan internal. Praktik ini menunjukkan bahwa ambiguitas tidak selalu mencerminkan ketidakpastian identitas. Ambiguitas dapat menjadi strategi sosial yang rasional ketika keterbukaan membawa risiko yang tidak terdistribusi secara setara.

Negosiasi identitas digital juga tidak berlangsung hanya antara individu dan audiens. Platform menjadi aktor institusional yang mengatur kemungkinan representasi melalui desain antarmuka, aturan komunitas, sistem rekomendasi, moderasi konten, monetisasi, dan mekanisme penangguhan akun. Kekuasaan tersebut menentukan bentuk ekspresi yang dapat dipublikasikan, ditemukan, direkomendasikan, atau dikategorikan sebagai pelanggaran. Duguay (2022) memperlihatkan bahwa modulasi identitas dihasilkan bersama oleh keputusan pengguna dan infrastruktur platform. Tata kelola platform dapat memperluas ruang bagi ekspresi seksualitas, tetapi juga dapat membatasi konten seksual dan queer melalui aturan yang tidak sensitif

terhadap konteks. Identitas digital karena itu dinegosiasikan dalam lingkungan yang dikelola oleh institusi privat dengan kepentingan komersial dan otoritas besar atas akses publik.

Mediasi algoritmik memperdalam kekuasaan tersebut. Sistem rekomendasi dan klasifikasi menentukan konten mana yang memperoleh jangkauan, kepada siapa konten diarahkan, dan representasi apa yang tetap sulit ditemukan. Algoritma dapat mempertemukan pengguna LGBTQA+ dengan komunitas, informasi, dan pengalaman yang relevan. Pada saat yang sama, algoritma dapat mengurangi jangkauan konten, menghubungkan ekspresi queer dengan kategori sensitif, atau menyebarkannya kepada audiens yang bermusuhan. Zhao (2024) menunjukkan bahwa shadow banning terhadap konten laki-laki gay di platform Tiongkok dapat beroperasi melalui pembatasan pencarian dan hambatan distribusi yang tampak permisif, tetapi secara substantif membatasi keterlihatan. Wang (2022) juga memperlihatkan bahwa visibilitas gay yang dihasilkan algoritma dapat melayani kepentingan ekonomi platform tanpa menghasilkan perubahan yang setara dalam penerimaan sosial.

Pengguna tidak selalu menerima logika algoritmik secara pasif. Kreator LGBTQA+ mengembangkan

pengetahuan praktis mengenai cara algoritma bekerja berdasarkan perubahan jangkauan, pola rekomendasi, penghapusan konten, dan respons audiens. Mereka menyesuaikan istilah, simbol, tagar, format video, serta waktu publikasi agar representasi tetap dapat beredar. Shi (2025) menunjukkan bahwa kreator LGBTQ+ di Tiongkok tidak sekadar tunduk pada normativitas digital. Mereka memainkan batas yang ditetapkan platform untuk membagikan konten nonheteroseksual dan memelihara queer sociality. Persepsi mengenai bias algoritmik juga dipengaruhi oleh konteks geografis dan budaya. Pengguna membangun algorithmic imaginaries berdasarkan pengalaman diskriminasi, pengetahuan kolektif, dan dugaan mengenai cara platform mengklasifikasikan identitas mereka. Praktik tersebut menjadikan negosiasi identitas sekaligus sebagai negosiasi teknologis dengan sistem yang tidak transparan.

Relasi antara representasi dan algoritma menghasilkan politik visibilitas yang ambivalen. Visibilitas memungkinkan kelompok LGBTQ+ memasuki ruang publik, menantang stereotip, membangun koneksi, dan menyediakan referensi identitas bagi pengguna lain. Namun, kondisi terlihat tidak identik dengan kebebasan atau kemajuan. Keterlihatan juga meningkatkan kemungkinan pengawasan, pelecehan, pengambilan konten di luar

konteks, komodifikasi, dan intervensi institusional. Ellis (2025) menyebut perkembangan ini sebagai *contradictory connectivity*, yaitu situasi ketika teknologi memperluas visibilitas queer pada saat yang sama ketika kecaman, kriminalisasi, dan politik anti-LGBTQA+ kembali menguat. Visibilitas digital harus dipahami sebagai arena perebutan makna dan kekuasaan, bukan sebagai hasil akhir yang dengan sendirinya memperbaiki posisi kelompok marginal.

Ambivalensi tersebut terlihat lebih kuat dalam masyarakat yang memberikan perlindungan terbatas terhadap keragaman seksual dan gender. Pengguna tidak hanya diawasi oleh negara atau perusahaan teknologi, tetapi juga oleh keluarga, tetangga, rekan kerja, dan hubungan sosial terdekat. Media sosial dapat membentuk *lateral surveillance* karena aktivitas, jaringan pertemanan, dan ekspresi pengguna dapat diamati oleh orang-orang dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menciptakan situasi ketika pengguna memperoleh ruang untuk berekspresi, tetapi harus terus menghitung kemungkinan bahwa representasi digitalnya melintasi batas audiens. Cowdell (2025) memperlihatkan bahwa media sosial bagi aktivis dan kreator LGBTQA+ di Lebanon menjadi *contested territory* yang dibentuk oleh interaksi antara praktik pengguna, norma masyarakat, serta struktur politik. Visibilitas dalam konteks tersebut selalu bersifat

spasial dan relasional karena keamanan suatu ekspresi bergantung pada tempat, audiens, dan jaringan sosial tempat konten beredar.

Keterbatasan ruang publik dominan mendorong kelompok LGBTQA+ membentuk counterpublics digital. Fraser (1990) menjelaskan counterpublics sebagai ruang diskursif yang dibangun kelompok subordinat untuk menyusun interpretasi, kebutuhan, dan identitas yang tidak memperoleh tempat setara dalam ruang publik utama. Dalam konteks digital, counterpublics berkembang melalui akun komunitas, jaringan pertemanan, kelompok percakapan, tagar, dan sirkulasi konten yang menghubungkan pengalaman individual. Ruang tersebut memungkinkan anggota komunitas membangun bahasa bersama, memvalidasi pengalaman, mendiskusikan stigma, serta mengembangkan pengetahuan yang berbeda dari narasi dominan. Duguay (2022) menunjukkan bahwa keterlihatan identitas queer dalam publics dan counterpublics bergantung pada pengaturan salience, jangkauan, serta respons terhadap pelecehan dan sensor.

Counterpublics mengubah persoalan personal menjadi interpretasi kolektif. Pengalaman penolakan keluarga, cyberbullying, diskriminasi pekerjaan, atau pembatasan platform tidak lagi dipahami sebagai

kegagalan individu. Komunitas dapat menghubungkan pengalaman tersebut dengan heteronormativitas, patriarki, moral regulation, dan ketidakadilan teknologis. Proses ini penting karena resistensi kolektif memerlukan bahasa yang mengidentifikasi sumber struktural dari pengalaman yang sebelumnya dianggap privat. Media digital menyediakan infrastruktur untuk menghubungkan cerita, membandingkan pengalaman, menyusun narasi tandingan, dan membangun solidaritas melampaui kedekatan geografis. Koneksi tersebut juga dapat menjembatani komunitas daring dan kehidupan luring melalui dukungan emosional, pembelajaran bersama, serta pembentukan jaringan sosial (Are, 2025; Craig et al., 2021).

Collective resistance muncul ketika representasi individual memperoleh hubungan dengan pengalaman dan kepentingan kelompok. Resistensi tidak terbatas pada organisasi formal, demonstrasi, atau kampanye kebijakan. Praktik sehari-hari seperti menggunakan nama identitas, menampilkan tubuh yang tidak mengikuti norma gender, membagikan pengalaman relasi, menciptakan humor queer, atau mengoreksi informasi yang diskriminatif dapat mengganggu cara dominan dalam mendefinisikan seksualitas. Tindakan yang tampak personal memperoleh dimensi politik ketika dilakukan secara

berulang, dihubungkan melalui jaringan, dan dibaca sebagai penolakan terhadap stigma. Kerangka queer and transgender media studies menempatkan representasi, teknologi, surveilans, resistensi, dan ekonomi politik sebagai bagian dari relasi kuasa yang sama. Representasi tidak cukup dianalisis berdasarkan ada atau tidaknya kelompok LGBTQA+ di media. Analisis juga perlu menilai siapa yang mengendalikan produksi, distribusi, penerimaan, dan manfaat ekonomi dari visibilitas tersebut (Zhang, 2024).

Resistensi kolektif kemudian memperluas sumber daya yang tersedia bagi negosiasi identitas. Komunitas menyediakan istilah, simbol, pengetahuan, dukungan, dan contoh kehidupan yang membantu individu memahami dirinya di luar kategori stigma. Hubungan ini bersifat timbal balik. Representasi individual berkontribusi pada pembentukan komunitas, sedangkan komunitas menyediakan legitimasi sosial yang memungkinkan individu membentuk representasi lebih terbuka. Identitas kolektif tidak menghapus perbedaan internal di antara lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, interseks, aseksual, dan identitas lainnya. Ia menciptakan dasar solidaritas tanpa mensyaratkan pengalaman yang seragam. Analisis yang memadai tetap perlu memperhatikan persilangan seksualitas dengan kelas, ras, etnisitas,

agama, usia, disabilitas, dan lokasi geografis karena akses terhadap keamanan dan visibilitas tidak terdistribusi secara setara.

Perbedaan geografis memperlihatkan bahwa platform memiliki fungsi yang tidak seragam dalam kehidupan queer. Xu (2026), misalnya, menunjukkan bahwa perempuan lesbian di wilayah nonmetropolitan Tiongkok menggunakan beberapa platform secara strategis untuk memenuhi fungsi relasional dan praktis yang berbeda. Tekanan keluarga, perkawinan, terbatasnya referensi queer lokal, dan kepadatan jaringan sosial menjadikan media digital memiliki fungsi kompensatoris yang lebih kuat. Konsep polymedia resilience menjelaskan bagaimana individu menavigasi ekologi platform secara tidak merata untuk membuat kehidupan queer lebih dapat dipahami dan dikelola. Temuan ini memperkuat argumen bahwa negosiasi identitas tidak berlangsung di dalam satu platform yang terisolasi. Individu bergerak di antara platform, akun, dan jaringan sosial untuk menyesuaikan identitas dengan peluang serta risiko yang berubah.

Pergerakan antara representasi individual, counterpublics, dan resistensi kolektif membuka kemungkinan munculnya social recognition. Pengakuan berbeda dari keterlihatan. Identitas dapat

menjadi sangat terlihat tanpa diterima sebagai identitas yang sah. Konten queer dapat memperoleh perhatian tinggi karena dianggap kontroversial, eksotis, lucu, atau layak diserang. Pengakuan menuntut penerimaan terhadap martabat, pengalaman, suara, dan keanggotaan sosial kelompok LGBTQA+. Ia terbentuk ketika masyarakat mulai memandang individu LGBTQA+ sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendefinisikan dirinya, membangun hubungan, berpartisipasi dalam kehidupan publik, dan memperoleh perlindungan yang setara. Karena itu, jumlah tayangan, pengikut, atau tanda suka tidak dapat langsung digunakan sebagai ukuran pengakuan sosial.

Pengakuan juga tidak pernah bersifat tunggal. Ia dapat muncul pada tingkat interpersonal melalui dukungan teman dan keluarga, pada tingkat komunitas melalui rasa memiliki, pada tingkat kultural melalui perubahan representasi, serta pada tingkat institusional melalui perlindungan hak dan kebijakan. Kemajuan pada satu tingkat tidak menjamin perubahan pada tingkat lain. Masyarakat dapat menerima representasi LGBTQA+ dalam budaya populer, tetapi tetap menolak pengakuan hukum, hubungan keluarga, atau partisipasi politiknya. Sebagian identitas queer juga dapat memperoleh penerimaan karena dianggap sesuai dengan nilai kelas

menengah, monogami, maskulinitas atau feminitas normatif, sementara identitas lain tetap dimarginalkan. Pengakuan karena itu dapat bersifat selektif, bersyarat, dan terikat pada homonormativitas.

The Oxford Handbook of Media and Social Justice menempatkan persoalan representasi dalam hubungan dengan keadilan, akses, ekonomi politik, aktivisme, data, dan distribusi kekuasaan. Posisi tersebut memperjelas bahwa keadilan representasional tidak tercapai hanya dengan menambah jumlah figur LGBTQA+ dalam media. Pengakuan membutuhkan perubahan pada kondisi produksi, tata kelola, keamanan, serta kemampuan kelompok marginal untuk menentukan makna representasinya sendiri. Queer and transgender media studies juga mengingatkan bahwa analisis harus mempertimbangkan persilangan seksualitas dengan ras, kolonialitas, kelas, dan bentuk ketimpangan lain agar visibilitas kelompok yang lebih mudah diterima tidak dianggap mewakili seluruh pengalaman queer (Zhang, 2024).

Pengakuan sosial dapat memengaruhi perubahan norma ketika representasi LGBTQA+ tidak lagi terbatas pada peristiwa luar biasa, konflik moral, atau penderitaan. Paparan terhadap pengalaman sehari-hari, hubungan personal, pekerjaan, keluarga,

keaktivitas, humor, dan aspirasi hidup dapat mengurangi jarak simbolik antara kelompok LGBTQA+ dengan masyarakat yang lebih luas. Representasi semacam ini mengganggu mitos yang menghubungkan keragaman seksual dan gender dengan ancaman, penyimpangan, atau ketidaknormalan. Dalam perspektif Barthes (1972), mitos bekerja dengan membuat konstruksi historis tampak alamiah. Representasi tandingan membuka ruang untuk menunjukkan bahwa heteronormativitas juga merupakan hasil produksi budaya, bukan tatanan yang bebas dari sejarah dan kekuasaan.

Transformasi norma tetap merupakan proses yang diperebutkan. Peningkatan visibilitas dan pengakuan dapat memicu backlash dari aktor yang merasa batas moral, keagamaan, atau politiknya terancam. Platform digital mempercepat kedua proses tersebut. Ia menyebarkan narasi inklusif, tetapi juga menyediakan infrastruktur bagi ujaran kebencian, disinformasi, dan mobilisasi anti-LGBTQA+. Perubahan norma karena itu tidak bergerak menuju penerimaan melalui jalur yang stabil. Ia berlangsung melalui kompetisi diskursif, konflik, negosiasi, dan penataan ulang batas sosial. Konsep *contradictory connectivity* menunjukkan bahwa perluasan konektivitas dapat berjalan bersama penguatan kontrol, kriminalisasi, atau penolakan terhadap kelompok queer (Ellis, 2025).

Hubungan antara stigma, identitas tersembunyi, representasi, resistensi, negosiasi, pengakuan, dan perubahan norma tidak membentuk tahapan linear. Seseorang dapat memperoleh pengakuan dalam komunitas digital, tetapi tetap menyembunyikan identitasnya dari keluarga. Representasi yang sebelumnya aman dapat menjadi berisiko setelah perubahan kebijakan platform, pergantian pekerjaan, atau meningkatnya pengawasan politik. Resistensi kolektif dapat memperluas pengakuan, tetapi juga memicu serangan yang mendorong sebagian anggota kembali membatasi keterlihatan. Perubahan norma dapat mengurangi stigma pada satu kelompok, tetapi mempertahankan marginalisasi terhadap kelompok lain. Setiap dimensi memiliki kemungkinan untuk memperkuat, menghambat, atau mengaktifkan kembali dimensi lainnya.

Negosiasi identitas digital dengan demikian bekerja pada tiga tingkat yang saling berhubungan. Pada tingkat mikro, individu melakukan concealment, selective disclosure, audience management, digital identity work, dan identity modulation. Pada tingkat meso, komunitas, counterpublics, jaringan aktivisme, tata kelola platform, dan algoritma membentuk sumber daya serta batas partisipasi. Pada tingkat makro, heteronormativitas, stigma, pengakuan, hukum, dan perubahan norma menentukan legitimasi

sosial identitas LGBTQA+. Pemisahan ketiga tingkat tersebut hanya bersifat analitis. Dalam praktiknya, keputusan personal mengenai satu unggahan dapat dipengaruhi oleh norma keluarga, dukungan komunitas, kebijakan moderasi, perkiraan kerja algoritma, dan situasi politik secara bersamaan.

Sintesis ini menunjukkan bahwa konsep negosiasi perlu ditempatkan sebagai pusat analisis, bukan sebagai tahap yang baru muncul setelah representasi atau resistensi. Negosiasi telah berlangsung sejak individu menilai apakah identitas perlu disembunyikan, kepada siapa informasi dapat dibuka, simbol apa yang aman digunakan, dan platform mana yang memungkinkan keterhubungan. Negosiasi berlanjut ketika individu mengelola respons audiens, menghadapi algoritma, membangun komunitas, melakukan resistensi, serta mencari pengakuan. Ia juga tetap berlangsung setelah norma mulai berubah karena perubahan tersebut dapat bersifat parsial, temporer, dan dapat dibalik.

Literatur kontemporer telah menghasilkan penjelasan kuat mengenai stigma, concealment, identity modulation, affordances, platform governance, algoritma, counterpublics, visibilitas, dan aktivisme digital. Namun, konsep-konsep tersebut sering dikaji secara terpisah. Sebagian penelitian menekankan

pengalaman individual, sebagian berpusat pada komunitas, sedangkan penelitian lain mengutamakan infrastruktur teknologi. Fragmentasi ini menyulitkan penjelasan mengenai bagaimana kerja identitas individual terhubung dengan resistensi kolektif, bagaimana platform mengatur perpindahan tersebut, serta bagaimana visibilitas dapat berkembang menjadi pengakuan dan perubahan norma.

Sintesis konseptual yang dikembangkan dalam buku ini menghubungkan ketiga wilayah tersebut melalui tujuh dimensi: Social Stigma, Hidden Identity, Digital Representation, Collective Resistance, Identity Negotiation, Social Recognition, dan Social Norm Transformation. Platform governance dan algorithmic mediation bekerja sebagai struktur lintas dimensi yang menentukan kondisi teknis serta institusional negosiasi. Digital visibility berfungsi sebagai kondisi perantara antara representasi dan kemungkinan pengakuan, sedangkan counterpublics menyediakan infrastruktur sosial yang mengubah pengalaman individual menjadi kesadaran serta resistensi kolektif. Posisi setiap unsur tidak bersifat tetap karena perubahan pada satu dimensi dapat mengubah arah hubungan dengan dimensi lainnya.

Kerangka tersebut menghasilkan pemahaman bahwa perjalanan *beyond the closet* bukan perpindahan

tunggal dari identitas tersembunyi menuju keterbukaan publik. *Beyond the closet* menunjukkan proses ketika individu dan kelompok terus menegosiasikan tingkat keterlihatan, makna, keamanan, keanggotaan, dan legitimasi identitasnya dalam relasi dengan masyarakat serta platform. Closet tidak sepenuhnya ditinggalkan karena struktur yang mendorong concealment dapat muncul kembali dalam konteks baru. Visibilitas juga tidak selalu menghasilkan emansipasi karena ia dapat dikomodifikasi, diawasi, atau diarahkan kepada audiens yang bermusuhan. Pengakuan dan transformasi norma hanya mungkin dipahami melalui hubungan timbal balik antara agensi individu, solidaritas kolektif, struktur sosial, dan kekuasaan teknologi.

Sintesis tersebut menjadi dasar bagi *The Beyond the Closet Model of Digital Identity Negotiation*. Model ini tidak mengklaim bahwa seluruh individu LGBTQA+ menempuh pengalaman yang sama atau bergerak melalui urutan yang seragam. Model menjelaskan konfigurasi relasional yang membuat identitas dapat disembunyikan, direpresentasikan, dipertahankan, diperdebatkan, diakui, atau kembali distigmatisasi. Kontribusi utamanya terletak pada integrasi tingkat mikro, meso, dan makro ke dalam kerangka sosiologis yang melihat negosiasi identitas digital sebagai proses

rekursif, kontekstual, serta dimediasi oleh kekuasaan sosial dan teknologi.

6.2 The Beyond the Closet Model of Digital Identity Negotiation

6.2.1 Definisi dan Posisi The Beyond the Closet Model

The Beyond the Closet Model of Digital Identity Negotiation merupakan model konseptual yang dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana identitas LGBTQA+ dibentuk, dinegosiasikan, direpresentasikan, dipertahankan, serta memperoleh pengakuan dalam masyarakat digital yang semakin terplatformisasi. Model ini bertolak dari asumsi bahwa identitas digital tidak dapat dipahami sebagai refleksi langsung dari identitas personal yang telah selesai dibentuk sebelum individu memasuki ruang digital. Identitas justru terus diproduksi melalui interaksi antara individu, audiens, komunitas, norma sosial, serta infrastruktur teknologi yang mengatur produksi, sirkulasi, dan interpretasi representasi digital. Dengan demikian, identitas dipahami sebagai proses sosial yang selalu berada dalam keadaan becoming, bukan sebagai kategori yang bersifat tetap atau final (Butler, 1990; Duguay, 2022).

Model ini menggunakan istilah *beyond the closet* untuk menandai perubahan cara memahami pengalaman identitas LGBTQA+ pada era media digital. Dalam literatur klasik, closet umumnya diposisikan sebagai ruang penyembunyian identitas yang kemudian diikuti oleh proses *coming out* menuju keterbukaan sosial. Pendekatan tersebut memberikan kontribusi penting bagi pemahaman perkembangan identitas seksual, tetapi masih berangkat dari asumsi bahwa individu bergerak melalui tahapan yang relatif progresif menuju keterbukaan. Perkembangan platform digital memperlihatkan bahwa pengalaman tersebut jauh lebih kompleks. Individu dapat membuka identitasnya pada satu komunitas digital, tetap menyembunyikannya dari keluarga, mengubah bentuk representasi sesuai platform yang digunakan, atau kembali membatasi keterbukaan ketika kondisi sosial berubah. *Beyond the closet* karena itu tidak dimaknai sebagai keadaan setelah keluar dari closet, melainkan sebagai kondisi ketika batas antara penyembunyian, keterbukaan, dan representasi menjadi semakin cair dan terus dinegosiasikan.

Posisi tersebut sekaligus menggeser fokus analisis dari pertanyaan mengenai apakah seseorang telah melakukan *coming out* menuju pertanyaan mengenai bagaimana identitas dinegosiasikan dalam berbagai konteks sosial. Negosiasi identitas tidak hanya terjadi

ketika individu memutuskan untuk mengungkapkan orientasi seksual atau identitas gendernya. Negosiasi telah berlangsung ketika seseorang memilih informasi yang akan disampaikan, menentukan audiens yang dianggap aman, menggunakan simbol tertentu, membangun akun alternatif, atau mengatur tingkat keterbacaan identitasnya. Dengan kata lain, concealment, selective disclosure, audience management, dan representasi digital merupakan bagian dari proses negosiasi yang sama, bukan tahapan yang berdiri sendiri (Goffman, 1959, 1963; Duguay, 2022).

The Beyond the Closet Model juga berbeda dari pendekatan yang menempatkan media sosial sebagai ruang netral bagi ekspresi identitas. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa platform digital tidak sekadar menjadi saluran komunikasi, tetapi berfungsi sebagai aktor institusional yang membentuk kemungkinan representasi melalui desain antarmuka, aturan komunitas, sistem rekomendasi, moderasi konten, dan model bisnis platform. Duguay (2022) memperkenalkan konsep identity modulation untuk menjelaskan bahwa identitas digital dihasilkan melalui proses ketika pengguna dan platform bersama-sama memodifikasi bagaimana unsur-unsur personal suatu identitas diciptakan, diedarkan, dan diterima. Proses tersebut mencakup tiga dimensi

utama, yaitu personal identifiability, reach, dan salience, yang seluruhnya dipengaruhi oleh keputusan pengguna sekaligus oleh tata kelola platform.

Berangkat dari perspektif tersebut, model ini tidak hanya memusatkan perhatian pada agensi individu, tetapi juga pada relasi kuasa yang bekerja melalui teknologi digital. Platform memiliki kapasitas untuk menentukan bentuk identitas yang lebih mudah ditemukan, direkomendasikan, dibatasi, atau bahkan dihapus dari ruang publik digital. Dengan demikian, negosiasi identitas tidak berlangsung semata-mata antara individu dan masyarakat, tetapi juga antara individu dan sistem platform yang mengendalikan distribusi visibilitas. Posisi ini memperluas analisis sosiologis mengenai identitas dengan memasukkan platform governance dan algorithmic mediation sebagai bagian integral dari proses pembentukan identitas digital, bukan sebagai faktor eksternal yang bekerja setelah representasi terjadi (Duguay, 2022).

Secara teoretis, The Beyond the Closet Model dibangun melalui sintesis beberapa tradisi pemikiran yang selama ini berkembang secara relatif terpisah. Dari perspektif dramaturgis, model ini mengadopsi gagasan Goffman mengenai impression management, stigma, dan pengelolaan informasi dalam interaksi sosial. Dari perspektif poststruktural, model ini

memanfaatkan analisis Foucault mengenai hubungan antara seksualitas, diskursus, dan kekuasaan, serta konsep performativitas Butler yang menjelaskan bahwa identitas gender diproduksi melalui praktik sosial yang berulang. Perspektif politik pengakuan dari Honneth dan Fraser memberikan dasar bagi analisis mengenai bagaimana representasi digital dapat berkembang menjadi pengakuan sosial, sementara kajian digital media dan queer studies kontemporer memperluas seluruh kerangka tersebut dengan menunjukkan bahwa proses identitas kini berlangsung dalam lingkungan platform yang dimediasi algoritma (Foucault, 1978; Butler, 1990; Fraser, 1990; Honneth, 1995; Duguay, 2022).

Konsekuensi dari sintesis tersebut adalah perubahan unit analisis. Model ini tidak menjadikan individu sebagai satu-satunya pusat perhatian, tetapi memosisikan konfigurasi negosiasi identitas sebagai unit analisis utama. Konfigurasi tersebut mencakup subjek yang merepresentasikan identitas, audiens yang menafsirkan representasi, komunitas yang menyediakan bahasa dan legitimasi, norma sosial yang menentukan batas penerimaan, serta platform yang mengatur sirkulasi representasi digital. Setiap unsur bekerja secara simultan sehingga identitas digital tidak pernah dapat dijelaskan hanya melalui

karakteristik personal pengguna atau hanya melalui logika teknologi platform.

Atas dasar itu, *The Beyond the Closet Model* diposisikan sebagai integrative relational model, bukan developmental stage model. Model ini tidak berupaya mengklasifikasikan individu ke dalam tahap-tahap perkembangan identitas, tetapi memetakan hubungan timbal balik antara stigma sosial, penyembunyian identitas, representasi digital, resistensi kolektif, negosiasi identitas, pengakuan sosial, dan transformasi norma sosial. Hubungan tersebut bersifat rekursif sehingga perubahan pada satu dimensi dapat memperkuat, mengubah, atau bahkan mengaktifkan kembali dimensi lainnya. Dengan demikian, model ini lebih tepat dipahami sebagai kerangka analitis untuk menjelaskan dinamika identitas digital daripada sebagai model perkembangan identitas yang mengasumsikan arah perubahan yang tetap.

Posisi tersebut sekaligus menjadi kontribusi konseptual utama buku ini. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas stigma, concealment, identity management, queer visibility, counterpublics, atau platform governance sebagai tema-tema yang berdiri sendiri. *The Beyond the Closet Model* mengintegrasikan seluruh konsep tersebut ke dalam

satu kerangka sosiologis yang menjelaskan bagaimana identitas marginal terus dinegosiasikan melalui interaksi antara agensi individu, komunitas, struktur sosial, dan kekuasaan teknologi. Dengan demikian, model ini tidak hanya menawarkan sintesis teoretis, tetapi juga menyediakan perangkat analitis yang dapat digunakan untuk membaca berbagai bentuk negosiasi identitas digital pada kelompok marginal lain di luar konteks LGBTQA+, selama kelompok tersebut menghadapi persoalan stigma, keterlihatan, pengakuan, dan distribusi kekuasaan dalam ruang digital. Kontribusi tersebut sejalan dengan perkembangan mutakhir dalam queer and transgender media studies yang mendorong analisis identitas digital secara lebih relasional, interseksional, dan berorientasi pada keadilan sosial.

6.2.2 Asumsi Dasar Model dan Kritik terhadap Stage Model

The Beyond the Closet Model dibangun di atas asumsi bahwa identitas digital merupakan proses sosial yang bersifat relasional, kontekstual, dan dinamis. Identitas tidak dipahami sebagai atribut personal yang telah selesai dibentuk sebelum individu memasuki ruang digital, melainkan sebagai hasil interaksi yang terus berlangsung antara individu, komunitas, norma sosial, audiens, dan infrastruktur teknologi. Perspektif ini

menempatkan identitas sebagai praktik sosial yang selalu diproduksi kembali melalui komunikasi, representasi, dan negosiasi dalam berbagai konteks kehidupan. Pemahaman tersebut sejalan dengan pendekatan performativitas Butler yang melihat identitas sebagai hasil pengulangan praktik sosial, sekaligus memperluasnya ke dalam konteks masyarakat digital yang dimediasi platform (Butler, 1990; Duguay, 2022).

Asumsi pertama model ini menyatakan bahwa identitas digital selalu bersifat relasional. Identitas memperoleh makna melalui hubungan dengan pihak lain yang mengamati, menafsirkan, menerima, atau menolak representasi tersebut. Oleh karena itu, identitas tidak dapat dipahami hanya sebagai ekspresi diri, tetapi juga sebagai hasil interaksi dengan audiens, komunitas, institusi, dan sistem teknologi yang mengatur distribusi representasi. Goffman telah menunjukkan bahwa presentasi diri selalu bergantung pada situasi interaksi dan ekspektasi audiens (Goffman, 1959), sedangkan penelitian kontemporer memperlihatkan bahwa audiens dalam media digital jauh lebih kompleks karena terdiri atas jaringan sosial yang saling bertumpang tindih, algoritma rekomendasi, dan mekanisme platform yang memperluas kemungkinan context collapse (Talbot et al., 2022; Are, 2025).

Asumsi kedua menyatakan bahwa negosiasi identitas berlangsung sebelum, selama, dan setelah representasi digital diproduksi. Negosiasi tidak dimulai ketika seseorang melakukan coming out atau mempublikasikan identitasnya di media sosial. Negosiasi telah berlangsung ketika individu memperkirakan risiko sosial, memilih platform yang dianggap aman, membatasi audiens, menggunakan simbol tertentu, atau menyembunyikan sebagian informasi personal. Setelah representasi dipublikasikan, proses negosiasi berlanjut melalui interpretasi audiens, respons komunitas, perubahan algoritma, dan konsekuensi yang muncul dalam kehidupan luring. Dengan demikian, negosiasi merupakan mekanisme yang terus bekerja sepanjang siklus identitas digital, bukan tahapan yang muncul setelah representasi dilakukan (Duguay, 2022; Karizat et al., 2021).

Asumsi ketiga menegaskan bahwa concealment dan representation bukan dua kondisi yang saling meniadakan. Literatur klasik sering memandang penyembunyian identitas sebagai fase yang mendahului keterbukaan. Sebaliknya, penelitian mutakhir menunjukkan bahwa individu LGBTQA+ dapat mempertahankan beberapa bentuk concealment sekaligus merepresentasikan identitasnya pada ruang digital tertentu. Pengguna

dapat memiliki akun publik dengan representasi yang ambigu, akun privat untuk komunitas queer, dan akun lain yang sepenuhnya terpisah dari identitas seksualnya. Pola tersebut menunjukkan bahwa concealment merupakan strategi adaptif yang terus berubah sesuai dengan distribusi risiko sosial, bukan indikator bahwa proses pembentukan identitas belum selesai (Talbot et al., 2022; Geeng & Hiniker, 2021).

Asumsi keempat menyatakan bahwa platform digital merupakan aktor institusional yang ikut membentuk identitas. Identitas digital tidak hanya diproduksi melalui keputusan individu, tetapi juga melalui desain platform, kebijakan moderasi, sistem rekomendasi, mekanisme pencarian, dan model bisnis perusahaan teknologi. Duguay (2022) menunjukkan bahwa identity modulation merupakan hasil interaksi antara agensi pengguna dengan affordances dan tata kelola platform. Penelitian mengenai algorithmic folk theories di TikTok juga memperlihatkan bahwa pengguna secara aktif mengembangkan pengetahuan mengenai dugaan cara algoritma mengelola identitas tertentu dan kemudian menyesuaikan strategi representasinya berdasarkan pemahaman tersebut (Karizat et al., 2021).

Asumsi kelima memandang visibilitas sebagai kondisi yang bersifat ambivalen. Literatur awal mengenai

representasi kelompok marginal cenderung menempatkan keterlihatan sebagai tujuan utama perjuangan identitas. Kajian queer media kontemporer menunjukkan bahwa peningkatan visibilitas dapat menghasilkan dua konsekuensi yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, visibilitas memperluas peluang memperoleh komunitas, dukungan sosial, dan pengakuan. Di sisi lain, visibilitas meningkatkan kemungkinan pengawasan, ujaran kebencian, sensor, komodifikasi, dan penyalahgunaan data. Karena itu, keterlihatan tidak dapat diperlakukan sebagai indikator langsung dari emansipasi sosial. Analisis mengenai identitas digital harus selalu mempertimbangkan distribusi risiko yang menyertai peningkatan visibilitas tersebut (Haimson et al., 2022; The Oxford Handbook of Media and Social Justice, 2024).

Asumsi keenam menyatakan bahwa pengakuan sosial merupakan proses yang bertingkat dan tidak identik dengan popularitas digital. Jumlah pengikut, tayangan, atau interaksi tidak secara otomatis menunjukkan bahwa identitas telah memperoleh legitimasi sosial. Pengakuan harus dipahami sebagai hubungan normatif yang melibatkan penerimaan terhadap martabat, pengalaman, dan hak kelompok marginal. Dalam perspektif Honneth, pengakuan merupakan syarat bagi pembentukan relasi sosial yang setara,

sedangkan Fraser menekankan bahwa pengakuan harus dipahami bersama persoalan distribusi sumber daya dan keadilan institusional. Oleh sebab itu, model ini membedakan antara perhatian publik dan pengakuan sosial karena keduanya tidak selalu berkembang secara bersamaan (Honneth, 1995; Fraser & Honneth, 2003; *The Oxford Handbook of Media and Social Justice*, 2024).

Asumsi ketujuh menempatkan perubahan norma sosial sebagai proses yang bersifat rekursif. Perubahan norma tidak berlangsung melalui lintasan yang selalu progresif menuju penerimaan yang lebih besar. Representasi digital dapat memperluas dukungan terhadap kelompok LGBTQA+, tetapi juga dapat memunculkan backlash, mobilisasi politik, atau penguatan stigma. Dengan demikian, perubahan norma selalu membuka kemungkinan bagi proses kemajuan maupun kemunduran secara bersamaan. Pemahaman ini sejalan dengan kajian mengenai *contradictory connectivity* yang menunjukkan bahwa peningkatan konektivitas digital dapat berjalan berdampingan dengan meningkatnya kontrol, diskriminasi, dan resistensi terhadap kelompok queer dalam berbagai konteks sosial (Ellis, 2025).

Berangkat dari tujuh asumsi tersebut, *The Beyond the Closet Model* mengajukan kritik mendasar terhadap

stage model yang selama beberapa dekade menjadi salah satu pendekatan dominan dalam kajian perkembangan identitas seksual. Model-model seperti Cass (1979), Troiden (1989), dan D'Augelli (1994) memberikan kontribusi penting dengan menunjukkan bahwa identitas seksual berkembang melalui proses yang berlangsung sepanjang kehidupan. Namun, sebagian besar model tersebut masih mempertahankan logika perkembangan yang mengarah pada integrasi identitas melalui peningkatan keterbukaan. Dalam masyarakat digital, asumsi tersebut semakin sulit dipertahankan karena pengalaman identitas tidak lagi bergerak melalui satu jalur perkembangan yang sama bagi setiap individu.

Kritik pertama diarahkan pada asumsi linearitas. Stage model mengasumsikan bahwa individu bergerak dari kebingungan menuju penerimaan diri melalui tahapan yang relatif berurutan. Literatur mengenai identitas digital menunjukkan bahwa seseorang dapat berpindah secara dinamis antara concealment, representasi, dan pembatasan identitas sesuai dengan perubahan konteks sosial maupun teknologi. Proses tersebut lebih menyerupai konfigurasi yang terus berubah daripada urutan perkembangan yang tetap (Duguay, 2022; Talbot et al., 2022).

Kritik kedua diarahkan pada asumsi bahwa keterbukaan merupakan tujuan perkembangan identitas. Dalam banyak konteks sosial, mempertahankan concealment justru merupakan strategi yang rasional untuk melindungi keselamatan, pekerjaan, hubungan keluarga, atau posisi sosial. Penelitian mengenai praktik identitas LGBTQ+ di media sosial menunjukkan bahwa pengguna secara sadar mengembangkan strategi audience segregation, akun alternatif, dan selective disclosure agar tetap memperoleh manfaat komunitas digital tanpa meningkatkan risiko dalam kehidupan luring (Geeng & Hiniker, 2021; Are, 2025).

Kritik ketiga diarahkan pada kecenderungan stage model yang menempatkan identitas sebagai proses yang terutama berlangsung di dalam diri individu. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya memperhitungkan peran platform digital sebagai institusi yang mengatur kemungkinan representasi melalui algoritma, moderasi, serta distribusi konten. Dalam masyarakat platform, keputusan mengenai identitas tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan psikologis individu, tetapi juga oleh logika teknologis yang menentukan siapa dapat ditemukan, kepada siapa konten disebarkan, dan representasi mana yang memperoleh visibilitas lebih besar. Oleh karena itu, analisis identitas digital memerlukan integrasi antara

agensi individu dan struktur platform dalam satu kerangka analitis (Karizat et al., 2021; Duguay, 2022).

Kritik keempat berkaitan dengan pemisahan yang terlalu tegas antara kehidupan daring dan luring. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengalaman identitas digital selalu berhubungan dengan keluarga, pendidikan, pekerjaan, agama, dan komunitas lokal. Representasi yang diproduksi secara daring dapat menghasilkan konsekuensi langsung terhadap kehidupan luring, sementara pengalaman diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari membentuk strategi representasi digital yang digunakan individu. Dengan demikian, identitas digital berkembang dalam ekologi sosial yang bersifat hibrida, bukan melalui dua ruang yang terpisah (Craig et al., 2021; Duguay, 2022).

Atas dasar kritik tersebut, *The Beyond the Closet Model* memosisikan negosiasi identitas sebagai mekanisme sentral yang bekerja secara terus-menerus di seluruh proses pembentukan identitas digital. Model ini tidak menggantikan kontribusi stage model, tetapi memperluasnya dengan memasukkan relasi antara stigma sosial, kerja identitas, tata kelola platform, mediasi algoritmik, komunitas digital, politik pengakuan, dan transformasi norma ke dalam satu kerangka sosiologis yang terpadu. Pendekatan ini

memungkinkan identitas digital dipahami sebagai proses relasional yang bersifat simultan, rekursif, dan kontekstual, sehingga lebih sesuai untuk menjelaskan dinamika identitas LGBTQA+ dalam masyarakat digital kontemporer (Duguay, 2022; The Oxford Handbook of Media and Social Justice, 2024).

6.2.3 Arsitektur Model: Tingkat Mikro, Meso, dan Makro

The Beyond the Closet Model of Digital Identity Negotiation disusun sebagai model relasional bertingkat yang menghubungkan proses individual, interaksi kolektif, dan struktur sosial dalam satu kerangka analitis. Arsitektur ini dikembangkan berdasarkan sintesis literatur sosiologi, queer studies, digital sociology, dan media studies yang menunjukkan bahwa identitas digital tidak pernah dibentuk hanya oleh karakteristik personal maupun oleh teknologi semata. Identitas selalu lahir melalui hubungan antara agensi individu, jaringan sosial, norma budaya, institusi, serta platform digital yang memediasi komunikasi. Oleh karena itu, model ini mengorganisasikan proses negosiasi identitas ke dalam tiga tingkat analisis yang saling berhubungan, yaitu tingkat mikro, meso, dan makro (Foucault, 1978; Butler, 1990; Duguay, 2022; The Oxford Handbook of Media and Social Justice, 2024).

Pembagian tersebut tidak dimaksudkan untuk memisahkan ketiga tingkat sebagai ruang yang berdiri sendiri. Ketiganya bekerja secara simultan dan saling memengaruhi melalui hubungan timbal balik. Keputusan individual mengenai representasi identitas dipengaruhi oleh komunitas digital, tata kelola platform, norma sosial, serta pengalaman diskriminasi. Sebaliknya, praktik representasi individual yang dilakukan secara berulang dapat membentuk komunitas, mengubah diskursus publik, dan dalam jangka panjang berkontribusi terhadap perubahan norma sosial. Arsitektur bertingkat ini memungkinkan model menjelaskan bagaimana proses identitas bergerak dari pengalaman sehari-hari menuju konsekuensi sosial yang lebih luas tanpa mengabaikan peran struktur maupun agensi (Fraser, 1990; Honneth, 1995; Duguay, 2022).

Tingkat mikro merupakan ruang tempat identitas dinegosiasikan melalui tindakan sehari-hari individu. Pada tingkat ini, perhatian utama diarahkan pada bagaimana seseorang mengelola informasi mengenai dirinya, memilih bentuk representasi, menentukan batas keterbukaan, serta menyesuaikan identitas dengan audiens yang berbeda. Perspektif dramaturgis Goffman menjelaskan bahwa presentasi diri selalu melibatkan pengelolaan kesan, pengendalian informasi, dan penyesuaian terhadap ekspektasi

audiens (Goffman, 1959, 1963). Dalam masyarakat digital, mekanisme tersebut berkembang menjadi praktik yang lebih kompleks karena individu harus mempertimbangkan keberadaan algoritma, persistensi data, pencarian otomatis, serta kemungkinan context collapse yang mempertemukan berbagai audiens dalam satu ruang komunikasi (Talbot et al., 2022).

Pada tingkat mikro, identitas tidak dipandang sebagai sesuatu yang sekadar diungkapkan, melainkan sebagai hasil dari digital identity work. Individu memilih foto, nama akun, bahasa, simbol, video, musik, maupun bentuk interaksi yang dianggap sesuai dengan tujuan tertentu. Proses tersebut melibatkan concealment, selective disclosure, audience management, dan identity modulation. Duguay (2022) menunjukkan bahwa pengguna queer secara aktif mengatur personal identifiability, salience, dan reach agar representasi identitasnya dapat diterima oleh komunitas yang diinginkan tanpa meningkatkan risiko pada audiens lain. Dengan demikian, identitas digital merupakan hasil kerja sosial yang terus diperbarui melalui evaluasi terhadap perubahan konteks komunikasi.

Identity modulation menjadi mekanisme utama pada tingkat mikro karena menjelaskan bagaimana individu

mengubah tingkat keterbacaan identitas sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Modulasi tidak hanya dilakukan melalui keputusan untuk membuka atau menyembunyikan identitas, tetapi juga melalui penggunaan simbol, humor, referensi budaya, akun alternatif, pengaturan privasi, maupun strategi visual yang hanya dipahami oleh komunitas tertentu. Literatur mengenai LGBTQ+ identity management menunjukkan bahwa pengguna media sosial tidak membangun satu identitas yang berlaku untuk seluruh platform. Mereka mengembangkan beberapa bentuk representasi yang disesuaikan dengan karakteristik platform, hubungan sosial, dan tingkat risiko yang berbeda (Talbot et al., 2022; Geeng & Hiniker, 2021).

Arsitektur mikro juga mengakui bahwa keputusan individual selalu dipengaruhi oleh pengalaman emosional dan sosial. Ketakutan terhadap penolakan keluarga, kehilangan pekerjaan, diskriminasi pendidikan, atau kekerasan berbasis gender membentuk cara individu mengelola identitasnya. Concealment dalam konteks ini bukan sekadar pilihan personal, melainkan respons terhadap distribusi risiko yang tidak merata. Oleh sebab itu, model ini tidak menilai concealment sebagai kegagalan perkembangan identitas, tetapi sebagai strategi adaptif yang dapat berubah mengikuti perubahan kondisi sosial (Pachankis, 2007; Beagan et al., 2022).

Berbeda dengan tingkat mikro yang berfokus pada praktik individual, tingkat meso menjelaskan proses negosiasi identitas melalui hubungan dengan komunitas, jaringan sosial, serta infrastruktur platform. Tingkat ini menjadi penghubung antara tindakan individual dan struktur sosial yang lebih luas. Identitas digital memperoleh makna kolektif ketika pengalaman personal dipertukarkan, divalidasi, dan dihubungkan dengan pengalaman anggota komunitas lainnya. Dalam konteks ini, media digital tidak hanya menyediakan ruang komunikasi, tetapi juga memungkinkan terbentuknya jaringan solidaritas yang melampaui batas geografis maupun institusional (Fraser, 1990; Warner, 2002).

Counterpublics merupakan komponen utama pada tingkat meso. Fraser (1990) menjelaskan bahwa counterpublics muncul ketika kelompok subordinat membangun ruang diskursif alternatif untuk merumuskan pengalaman, kepentingan, dan identitas yang tidak memperoleh tempat dalam ruang publik dominan. Perkembangan media digital memperluas kemungkinan pembentukan counterpublics melalui media sosial, aplikasi percakapan, forum daring, serta jaringan komunitas yang memungkinkan pengalaman individual berubah menjadi kesadaran kolektif. Kajian mengenai queer digital communities menunjukkan bahwa ruang-ruang tersebut berfungsi sebagai tempat

berbagi pengalaman, membangun pengetahuan, memvalidasi identitas, dan mengembangkan strategi menghadapi stigma sosial (Craig et al., 2021; Duguay, 2022).

Selain komunitas, tingkat meso juga mencakup tata kelola platform sebagai institusi sosial yang mengatur kemungkinan representasi identitas. Platform digital tidak hanya menyediakan infrastruktur komunikasi, tetapi menetapkan aturan mengenai konten yang dapat dipublikasikan, direkomendasikan, dimonetisasi, atau dihapus. Kebijakan moderasi, sistem pelaporan, algoritma rekomendasi, dan desain antarmuka memengaruhi bagaimana identitas LGBTQA+ memperoleh atau kehilangan visibilitas. Duguay (2022) menunjukkan bahwa identitas digital selalu diproduksi melalui hubungan antara keputusan pengguna dan tata kelola platform. Dengan demikian, platform governance menjadi bagian integral dari proses negosiasi identitas, bukan sekadar konteks eksternal.

Mediasi algoritmik juga ditempatkan pada tingkat meso karena algoritma menentukan distribusi representasi dalam ruang digital. Penelitian mengenai algorithmic folk theories memperlihatkan bahwa pengguna TikTok membangun pemahaman mengenai dugaan cara algoritma mengelola identitas tertentu

dan kemudian menyesuaikan perilaku komunikasinya berdasarkan pemahaman tersebut. Pengguna tidak hanya menjadi objek algoritma, tetapi juga mengembangkan bentuk *algorithmic resistance* melalui perubahan bahasa, simbol, maupun pola unggahan untuk mempertahankan visibilitas kontennya (Karizat et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengguna dan algoritma bersifat timbal balik, meskipun tidak berada pada posisi kekuasaan yang setara.

Collective resistance berkembang melalui interaksi antara komunitas digital, *counterpublics*, dan pengalaman bersama mengenai ketidakadilan. Representasi individual memperoleh makna politik ketika dihubungkan dengan narasi kolektif mengenai diskriminasi, marginalisasi, dan perjuangan memperoleh pengakuan. Aktivisme digital, penggunaan tagar, produksi narasi tandingan, humor, satire, maupun praktik edukasi menjadi bagian dari mekanisme yang memungkinkan identitas personal berkembang menjadi identitas kolektif. Literatur mengenai *networked activism* menunjukkan bahwa media digital mempercepat pembentukan solidaritas, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada struktur sosial dan politik yang melingkupinya (Jackson, Bailey, & Foucault Welles, 2020).

Pada tingkat makro, negosiasi identitas ditempatkan dalam hubungan dengan struktur sosial yang menentukan legitimasi, pengakuan, dan batas normalitas. Tingkat ini mencakup heteronormativitas, norma gender, moral regulation, hukum, agama, kebijakan negara, ekonomi politik media, serta struktur budaya yang mengatur siapa yang dianggap memiliki hak untuk tampil dalam ruang publik. Perspektif Foucault menunjukkan bahwa seksualitas selalu diproduksi melalui hubungan kuasa dan diskursus yang menentukan kategori normal maupun menyimpang (Foucault, 1978). Butler (1990) kemudian memperlihatkan bahwa identitas gender memperoleh stabilitas melalui pengulangan norma yang terus direproduksi dalam kehidupan sosial.

Pada tingkat makro, pengakuan sosial menjadi konsep sentral. Pengakuan tidak dipahami sebagai sekadar perhatian publik, tetapi sebagai legitimasi sosial terhadap keberadaan identitas. Honneth (1995) menempatkan pengakuan sebagai syarat bagi pembentukan relasi sosial yang setara, sedangkan Fraser (2003) menegaskan bahwa pengakuan harus dipahami bersama persoalan distribusi kekuasaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, model ini membedakan antara popularitas digital dan social recognition. Tingginya jumlah tayangan atau pengikut

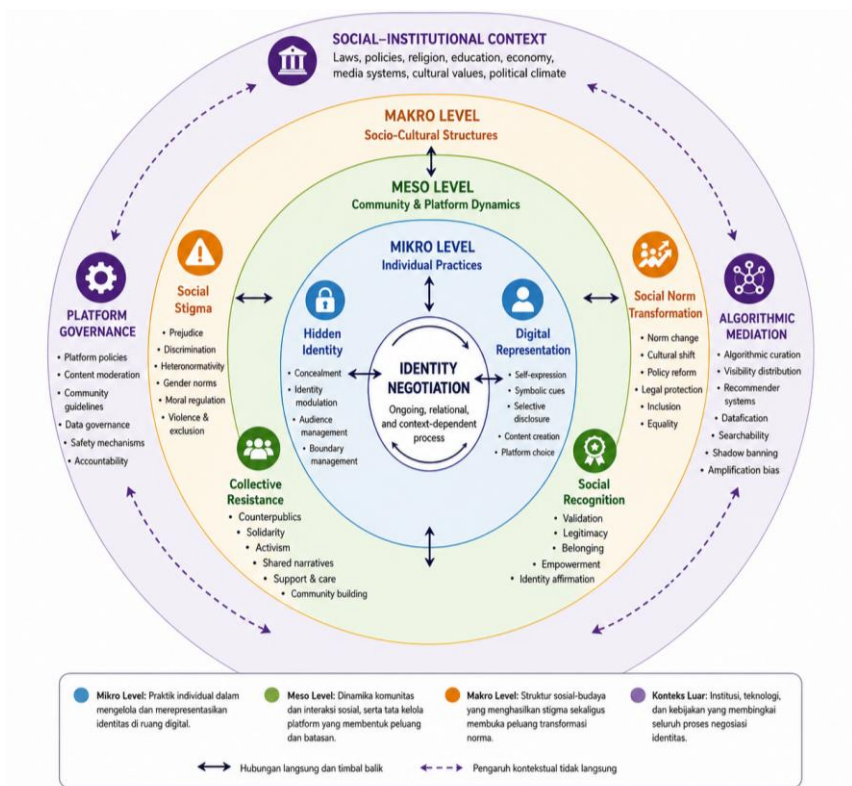
tidak selalu menunjukkan bahwa kelompok LGBTQA+ telah memperoleh posisi sosial yang lebih setara.

Transformasi norma sosial merupakan konsekuensi yang mungkin muncul pada tingkat makro ketika representasi digital, pembentukan komunitas, dan pengakuan sosial berlangsung secara berulang. Transformasi tersebut dapat terlihat melalui perubahan bahasa publik, meningkatnya penerimaan terhadap keberagaman seksual dan gender, berkembangnya perlindungan hukum, maupun bergesernya batas mengenai identitas yang dianggap sah. Namun, perubahan norma tidak pernah berlangsung secara linear. Peningkatan visibilitas dapat diikuti oleh peningkatan dukungan, tetapi juga dapat memicu backlash, politik anti-LGBTQA+, dan penguatan moral regulation. Literatur mutakhir mengenai queer media menekankan bahwa keterlihatan selalu mengandung peluang sekaligus risiko sehingga perubahan norma harus dipahami sebagai proses yang diperebutkan, bukan hasil yang pasti (The Oxford Handbook of Media and Social Justice, 2024).

Ketiga tingkat analisis tersebut membentuk satu konfigurasi yang tidak dapat dipisahkan. Tingkat mikro menjelaskan bagaimana individu mengelola identitasnya. Tingkat meso menerangkan bagaimana

komunitas dan platform membentuk peluang maupun batas representasi. Tingkat makro menunjukkan bagaimana norma sosial, institusi, dan struktur kekuasaan menentukan legitimasi identitas. Hubungan antara ketiganya bersifat rekursif. Perubahan pada satu tingkat dapat menghasilkan perubahan pada tingkat lain, kemudian kembali memengaruhi kondisi awal. Arsitektur inilah yang membedakan The Beyond the Closet Model dari model perkembangan identitas yang berpusat pada individu maupun dari pendekatan deterministik yang menempatkan teknologi sebagai penjelas utama.

Melalui arsitektur mikro, meso, dan makro, The Beyond the Closet Model menawarkan kerangka analitis yang mampu menjelaskan identitas digital sebagai proses sosial yang berlangsung secara simultan pada berbagai tingkat kehidupan. Identitas tidak hanya dibentuk oleh keputusan individu, tidak pula sepenuhnya ditentukan oleh algoritma atau norma sosial. Identitas muncul dari hubungan dinamis antara agensi, komunitas, struktur sosial, dan teknologi yang terus berubah mengikuti perkembangan masyarakat digital. Arsitektur bertingkat ini menjadi landasan konseptual bagi penjelasan mengenai hubungan antardimensi model yang dibahas pada bagian selanjutnya.



Gambar 6.1 The Beyond the Closet Model: A Multi-Level Ecological Framework of Digital Identity Negotiation

Bagian 6.2.4 Mekanisme Model

Model *Beyond the Closet* memandang negosiasi identitas digital sebagai proses sosial yang berlangsung melalui serangkaian mekanisme yang saling berinteraksi. Identitas tidak berubah secara linear dari kondisi tersembunyi menuju pengakuan sosial, melainkan dimodulasi secara terus-menerus oleh pilihan individu, struktur platform digital, respons algoritma, serta dinamika komunitas digital. Mekanisme tersebut menjelaskan bagaimana identitas diproduksi, dipertahankan, dipertanyakan, hingga memperoleh pengakuan dalam ruang publik digital. Perspektif ini mengintegrasikan teori performativitas, interaksionisme simbolik, platform governance, serta studi mengenai counterpublics digital sehingga negosiasi identitas dipahami sebagai proses yang bersifat dinamis, relasional, dan multidimensional (Butler, 2004; Bucher, 2018; Gillespie, 2018; Gray, 2009; Jackson et al., 2020).

1) Identity modulation

Mekanisme pertama adalah identity modulation, yaitu proses ketika individu secara aktif menyesuaikan representasi identitasnya berdasarkan situasi sosial, karakteristik audiens, serta peluang dan risiko yang tersedia dalam platform digital. Berbeda dengan konsep presentasi diri yang menekankan pengelolaan kesan dalam interaksi tatap muka, identity modulation menempatkan identitas sebagai hasil penyesuaian berkelanjutan terhadap perubahan lingkungan digital. Pengguna tidak sekadar memilih apakah akan menampilkan identitas LGBTQA+, tetapi juga menentukan tingkat keterbukaan, bahasa visual, simbol, narasi, hingga waktu publikasi yang dianggap paling aman maupun paling efektif untuk memperoleh pengakuan sosial (Butler, 2004; Goffman, 1959; Duguay, 2016; DeVito et al., 2018).

Pada TikTok maupun platform digital lain, proses tersebut tampak melalui penggunaan simbol pelangi, pilihan musik, gestur tubuh, humor, kode bahasa, maupun estetika visual yang hanya dipahami oleh komunitas tertentu. Representasi identitas kemudian menjadi fleksibel karena dapat diperkuat, dilemahkan, atau bahkan disembunyikan kembali sesuai konteks interaksi. Identitas digital tidak lagi dipahami sebagai kategori tetap, melainkan sebagai hasil negosiasi yang berlangsung secara terus-menerus antara individu

dan lingkungan sosial digital (Vivienne, 2016; McLean & Syed, 2015; Cover, 2019; Abidin, 2021).

Kemampuan melakukan identity modulation menjadi strategi penting bagi kelompok yang hidup dalam lingkungan dengan stigma tinggi. Individu dapat mempertahankan keberadaan sosial tanpa harus sepenuhnya mengungkapkan identitas personal. Dalam perspektif sosiologi digital, praktik tersebut merupakan bentuk adaptasi terhadap distribusi risiko yang dihasilkan oleh masyarakat, budaya, dan teknologi secara bersamaan (Marwick, 2015; Davis & Jurgenson, 2014; Lupton, 2015).

2) Platform governance

Mekanisme kedua adalah platform governance, yaitu seperangkat aturan, kebijakan, standar komunitas, sistem moderasi, serta desain teknis yang mengatur bagaimana suatu identitas dapat muncul, beredar, maupun dibatasi dalam ruang digital. Identitas digital tidak berkembang dalam ruang yang netral karena seluruh interaksi berlangsung di bawah infrastruktur yang dirancang oleh perusahaan platform. Dengan demikian, ruang publik digital sesungguhnya merupakan ruang yang telah diatur melalui berbagai bentuk tata kelola digital (Gillespie, 2018; Gorwa, 2019; Suzor, 2019; Helberger et al., 2023).

Platform governance memengaruhi negosiasi identitas melalui berbagai mekanisme seperti moderasi konten otomatis, pelaporan pengguna, kebijakan mengenai ujaran kebencian, klasifikasi konten sensitif, hingga prosedur penghapusan akun. Bagi komunitas LGBTQA+, kebijakan tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap kekerasan digital, tetapi pada saat yang sama juga berpotensi menghasilkan pembatasan representasi ketika sistem moderasi gagal membedakan ekspresi identitas dengan konten yang dianggap melanggar aturan. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa praktik moderasi sering kali mereproduksi bias sosial yang telah ada dalam masyarakat sehingga kelompok minoritas lebih rentan mengalami penghapusan konten, penurunan jangkauan, maupun pembatasan visibilitas (Roberts, 2019; Gillespie, 2020; Gorwa et al., 2020; Caplan, 2023).

Dalam konteks ini, negosiasi identitas tidak hanya berlangsung antara individu dan masyarakat, tetapi juga antara individu dan sistem tata kelola platform. Pengguna kemudian mengembangkan berbagai strategi adaptif, seperti mengubah istilah tertentu, menggunakan simbol alternatif, memanfaatkan bahasa kode, atau memindahkan diskusi ke ruang komunitas yang lebih aman. Adaptasi tersebut memperlihatkan bahwa governance platform bukan

sekadar struktur eksternal, tetapi menjadi bagian aktif dalam pembentukan identitas digital (Duguay et al., 2022; Abidin, 2021; van Dijck et al., 2018).

3) Algorithmic mediation

Mekanisme berikutnya adalah algorithmic mediation. Algoritma tidak hanya menentukan distribusi informasi, tetapi juga membentuk peluang suatu identitas untuk memperoleh visibilitas, pengakuan, maupun resistensi. Platform digital bekerja melalui sistem rekomendasi yang memilih konten berdasarkan prediksi perilaku pengguna sehingga visibilitas identitas tidak sepenuhnya ditentukan oleh kehendak individu, melainkan juga oleh proses komputasional yang berlangsung secara terus-menerus (Bucher, 2018; Kitchin, 2017; Seaver, 2022).

Pada TikTok, sistem rekomendasi dapat memperluas jangkauan representasi LGBTQA+ melalui halaman For You Page sehingga identitas yang sebelumnya berada dalam ruang privat memperoleh audiens yang jauh lebih luas. Namun mekanisme yang sama juga meningkatkan kemungkinan munculnya komentar kebencian, moral policing, maupun pengawasan publik karena algoritma mempertemukan berbagai kelompok sosial yang memiliki orientasi nilai berbeda. Algoritma dengan demikian memperbesar peluang

pengakuan sekaligus meningkatkan potensi konflik identitas (Cotter, 2019; Zulli & Zulli, 2022).

Literatur terbaru mengenai platform studies juga menunjukkan bahwa algoritma bukan sistem yang netral karena dibangun melalui seperangkat asumsi bisnis, logika komersial, dan parameter teknis tertentu. Akibatnya, representasi identitas yang memperoleh perhatian tinggi sering kali lebih mudah disebarluaskan dibandingkan representasi yang dianggap kurang menghasilkan keterlibatan pengguna. Kondisi tersebut menjadikan algoritma sebagai aktor nonmanusia yang ikut menentukan arah perkembangan negosiasi identitas digital (Beer, 2017; Bucher, 2018; Gillespie, 2020).

4) Counterpublic formation

Mekanisme terakhir adalah counterpublic formation. Negosiasi identitas pada akhirnya tidak berhenti pada tingkat individu, tetapi berkembang menjadi pembentukan ruang publik alternatif yang memungkinkan kelompok marginal membangun solidaritas, menghasilkan pengetahuan bersama, serta menantang dominasi norma heteronormatif. Counterpublic tidak dipahami sebagai ruang yang sepenuhnya terpisah dari publik dominan, melainkan sebagai arena komunikasi yang memproduksi narasi tandingan terhadap struktur sosial yang

mendiskriminasi kelompok tertentu (Fraser, 1990; Warner, 2002).

Melalui TikTok dan media sosial lain, pengguna LGBTQA+ membangun jaringan komunikasi yang memungkinkan pengalaman personal berubah menjadi pengalaman kolektif. Cerita mengenai coming out, diskriminasi, kesehatan mental, relasi keluarga, maupun pengalaman keberagaman gender kemudian menjadi sumber pembelajaran bersama yang memperkuat identitas komunitas. Proses tersebut menghasilkan apa yang disebut sebagai *affective publics*, yaitu komunitas yang terbentuk melalui pertukaran emosi, pengalaman, dan solidaritas digital (Papacharissi, 2015; Jackson et al., 2020; Gray, 2009).

Counterpublic formation juga berfungsi sebagai mekanisme transformasi norma sosial. Ketika narasi alternatif terus diproduksi dan memperoleh dukungan publik, batas-batas mengenai normalitas mulai bergeser. Pengakuan sosial yang sebelumnya terbatas dalam komunitas kecil dapat meluas ke ruang publik yang lebih besar melalui akumulasi representasi, diskusi, dan interaksi digital. Dengan demikian, counterpublic menjadi jembatan antara pengalaman individual dan perubahan sosial yang lebih luas karena memungkinkan identitas marginal memperoleh legitimasi simbolik sekaligus membuka ruang bagi

transformasi norma dalam masyarakat digital (Fraser, 1990; Warner, 2002; Papacharissi, 2015; Jackson et al., 2020).

Keempat mekanisme tersebut menunjukkan bahwa negosiasi identitas digital tidak dapat dijelaskan hanya melalui tindakan individu ataupun struktur sosial secara terpisah. Identity modulation menjelaskan bagaimana individu menyesuaikan representasi dirinya. Platform governance menentukan batas-batas institusional yang mengatur representasi tersebut. Algorithmic mediation mengendalikan distribusi serta visibilitas identitas dalam ekosistem digital. Counterpublic formation menghubungkan pengalaman individual dengan pembentukan solidaritas kolektif dan transformasi norma sosial. Interaksi seluruh mekanisme inilah yang menjadikan Beyond the Closet Model of Digital Identity Negotiation mampu menjelaskan bagaimana identitas LGBTQA+ bergerak dari pengalaman tersembunyi menuju pengakuan sosial dalam masyarakat digital kontemporer.

6.2.5 Dynamic Feedback Mechanisms and Theoretical Contribution

Beyond the Closet Model memandang negosiasi identitas digital sebagai proses sosial yang berlangsung secara non-linear, rekursif, dan terus

mengalami pembentukan ulang melalui interaksi antara individu, komunitas, platform digital, dan struktur sosial yang lebih luas. Tidak terdapat titik akhir yang menandai bahwa suatu identitas telah selesai dinegosiasikan. Setiap bentuk representasi digital menghasilkan respons sosial baru yang selanjutnya memengaruhi cara individu memahami, memodifikasi, dan menampilkan identitasnya pada interaksi berikutnya. Identitas digital karena itu berkembang sebagai proses yang selalu bergerak melalui siklus umpan balik (feedback loops), bukan sebagai tahapan yang berlangsung satu arah. Perspektif ini sejalan dengan perkembangan sosiologi digital yang memandang platform bukan sekadar ruang komunikasi, melainkan lingkungan sosio-teknis yang secara terus-menerus membentuk tindakan sosial melalui hubungan timbal balik antara pengguna, algoritma, dan tata kelola platform (Lupton, 2025; Couldry & Hepp, 2023).

Mekanisme umpan balik tersebut dimulai ketika representasi identitas memperoleh berbagai bentuk respons publik, mulai dari pengakuan, dukungan komunitas, penolakan, hingga stigmatisasi. Respons tersebut kemudian diproses kembali oleh algoritma platform melalui sistem rekomendasi, moderasi konten, serta pengukuran interaksi sehingga menentukan tingkat visibilitas suatu representasi

identitas. Visibilitas yang meningkat dapat memperluas legitimasi sosial sekaligus memperbesar peluang munculnya pengawasan, ujaran kebencian, atau pembatasan konten. Sebaliknya, pembatasan algoritmik tidak selalu menghilangkan ekspresi identitas, tetapi justru mendorong lahirnya strategi komunikasi baru seperti penggunaan simbol, humor, bahasa tersandi, atau migrasi menuju komunitas alternatif. Hubungan antara pengakuan sosial, representasi digital, stigma, dan algoritma karena itu membentuk siklus yang saling memperkuat maupun saling membatasi sehingga identitas digital senantiasa berada dalam proses negosiasi berkelanjutan. Penelitian mutakhir mengenai platform governance dan algoritma pada komunitas LGBTQIA+ menunjukkan bahwa mekanisme rekomendasi, moderasi, dan klasifikasi algoritmik secara aktif membentuk pola visibilitas, pengakuan, sekaligus marginalisasi identitas seksual dan gender di berbagai platform digital (Myles et al., 2023; Huang & Krafft, 2024).

Sifat rekursif tersebut menjelaskan bahwa perubahan pada satu tingkat analisis selalu menghasilkan konsekuensi pada tingkat lainnya. Pada tingkat mikro, individu menyesuaikan strategi presentasi diri sebagai respons terhadap pengalaman penerimaan maupun penolakan yang diperoleh melalui interaksi digital.

Akumulasi praktik tersebut kemudian menghasilkan solidaritas, pembentukan norma komunitas, serta berkembangnya counterpublics pada tingkat meso. Counterpublics selanjutnya dapat memengaruhi pergeseran diskursus publik, mendorong perubahan praktik moderasi platform, memperluas pengakuan sosial, maupun memunculkan bentuk resistensi baru pada tingkat makro. Sebaliknya, perubahan kebijakan platform atau regulasi negara juga akan kembali memengaruhi perilaku individu dan komunitas sehingga keseluruhan proses berlangsung sebagai sistem yang terus berputar. Hubungan lintas tingkat ini menunjukkan bahwa negosiasi identitas digital tidak dapat dipahami hanya melalui tindakan individu ataupun melalui struktur sosial secara terpisah, melainkan melalui dinamika hubungan yang terus berlangsung di antara keduanya. Literatur terbaru mengenai ruang publik digital, tata kelola platform, dan pembentukan komunitas daring semakin menekankan pentingnya pendekatan multilevel semacam ini dalam memahami transformasi kehidupan sosial di era platformisasi.

Karakter dinamis tersebut sekaligus menunjukkan keterbatasan teori-teori yang selama ini menjadi landasan utama kajian identitas. Perspektif Foucault menjelaskan bagaimana relasi kuasa menghasilkan kategori identitas melalui disiplin, normalisasi, dan

pengawasan, tetapi belum menjelaskan bagaimana algoritma platform menjadi aktor yang secara otomatis mereproduksi maupun memodifikasi mekanisme kuasa tersebut. Goffman menjelaskan pengelolaan impresi dalam interaksi sosial, namun belum mengakomodasi kenyataan bahwa audiens digital, sistem rekomendasi, dan metrik platform ikut menentukan keberhasilan suatu presentasi diri. Butler menjelaskan performativitas identitas melalui pengulangan norma sosial, tetapi belum secara eksplisit menguraikan bagaimana performativitas dipengaruhi oleh logika platform dan tata kelola algoritmik. Barthes menjelaskan produksi makna melalui sistem tanda, sementara Social Identity Theory dan politik pengakuan menerangkan proses identifikasi kelompok serta perjuangan memperoleh legitimasi sosial. Masing-masing teori berhasil menjelaskan dimensi tertentu dari negosiasi identitas, namun belum mampu menggambarkan hubungan timbal balik yang menghubungkan representasi, algoritma, komunitas, pengakuan sosial, dan transformasi norma ke dalam satu mekanisme konseptual yang utuh. Perkembangan kajian platform governance, algorithmic management, dan algorithmic governmentality semakin menunjukkan bahwa identitas digital dibentuk melalui relasi

dinamis antara aktor manusia dan infrastruktur digital yang bekerja secara simultan.

Beyond the Closet Model menawarkan kontribusi teoretis dengan mengintegrasikan dimensi mikro, meso, dan makro ke dalam satu kerangka analitis yang menjelaskan bagaimana identitas digital terus diproduksi melalui mekanisme umpan balik antara individu, komunitas, algoritma, dan tata kelola platform. Model ini memperluas kajian sosiologi digital dengan menempatkan platform sebagai aktor institusional yang berpartisipasi dalam pembentukan identitas sosial. Dalam gender studies, model ini menunjukkan bahwa negosiasi identitas seksual dan gender tidak hanya berlangsung melalui performativitas, tetapi juga melalui proses kurasi algoritmik, moderasi platform, dan pembentukan counterpublics digital. Pada saat yang sama, model ini memperkaya platform studies dengan menunjukkan bahwa tata kelola platform tidak hanya mengatur sirkulasi informasi, tetapi juga membentuk pengakuan sosial, legitimasi identitas, serta transformasi norma dalam masyarakat digital. Melalui perspektif tersebut, Beyond the Closet Model tidak hanya menjelaskan bagaimana identitas digital dinegosiasikan, tetapi juga bagaimana proses negosiasi tersebut secara bertahap mengubah hubungan antara kekuasaan, teknologi, dan tatanan sosial dalam ekosistem platform kontemporer.

6.3 Dimensions of the Beyond the Closet Model

6.3.1 Micro-Level Processes: Social Stigma, Hidden Identity, Digital Representation

Dimensi mikro merupakan titik awal dalam Beyond the Closet Model karena negosiasi identitas digital selalu berakar pada pengalaman sosial yang dialami individu sebelum identitas tersebut memasuki ruang publik digital. Model ini berangkat dari asumsi bahwa identitas seksual maupun gender tidak berkembang dalam ruang sosial yang netral, tetapi selalu dipengaruhi oleh relasi kuasa, norma heteronormatif, serta berbagai mekanisme kontrol sosial yang menentukan identitas mana yang dianggap sah dan identitas mana yang diposisikan sebagai penyimpangan. Oleh karena itu, proses negosiasi identitas tidak dimulai ketika seseorang mengunggah konten di media sosial, melainkan sejak individu mengalami tekanan sosial yang membentuk cara dirinya memahami, menyembunyikan, dan akhirnya merepresentasikan identitasnya di ruang digital. Posisi ini memperluas pemahaman mengenai negosiasi identitas dengan menempatkan pengalaman personal sebagai hasil interaksi antara struktur sosial dan lingkungan digital yang saling memengaruhi

(Foucault, 1978; Goffman, 1963; Lupton, 2025; Couldry & Hepp, 2023).

Dalam model ini, social stigma berfungsi sebagai kondisi struktural yang memicu seluruh rangkaian negosiasi identitas. Stigma tidak dipahami semata sebagai sikap negatif individu terhadap kelompok LGBTQA+, melainkan sebagai mekanisme sosial yang mengorganisasi batas-batas normalitas melalui institusi, norma budaya, wacana agama, kebijakan publik, dan praktik komunikasi sehari-hari. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa stigma terhadap identitas seksual minoritas tidak hanya diproduksi melalui interaksi tatap muka, tetapi juga direproduksi oleh ekosistem digital melalui ujaran kebencian, praktik pelaporan massal, moderasi konten, dan sistem algoritmik yang memengaruhi distribusi visibilitas. Dengan demikian, platform digital tidak selalu menghapus stigma yang telah ada dalam masyarakat, tetapi sering kali menjadi ruang baru tempat stigma tersebut diperkuat, dinegosiasikan, atau bahkan dilembagakan kembali melalui tata kelola platform (Hatzenbuehler & Pachankis, 2024; Myles, Duguay, & Flores Echaiz, 2023).

Pengalaman menghadapi stigma kemudian membentuk berkembangnya hidden identity sebagai strategi sosial yang memungkinkan individu

mengelola risiko dalam lingkungan yang belum sepenuhnya aman. Berbeda dengan pandangan klasik yang memosisikan concealment sebagai bentuk ketertutupan atau ketakutan, penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengelolaan keterbukaan identitas merupakan praktik reflektif yang terus berubah mengikuti konteks sosial, karakteristik audiens, serta desain platform digital. Individu secara aktif menentukan kapan identitas diungkapkan, kepada siapa identitas ditampilkan, dan sejauh mana informasi pribadi dibagikan. Stefanie Duguay menyebut proses ini sebagai identity modulation, yaitu kemampuan pengguna untuk secara dinamis mengatur tingkat visibilitas identitasnya sesuai dengan peluang, risiko, dan hubungan sosial yang dihadapi di berbagai platform digital. Hidden identity karena itu tidak lagi dipahami sebagai keadaan pasif, melainkan sebagai bentuk agensi yang memungkinkan individu mempertahankan keamanan sekaligus membangun hubungan sosial secara bertahap (Duguay, 2022; Chartrand & Duguay, 2025).

Strategi tersebut kemudian berkembang menjadi digital representation ketika identitas mulai diproduksi melalui berbagai bentuk ekspresi digital. Beyond the Closet Model memandang representasi digital bukan sebagai cerminan identitas yang telah selesai terbentuk, melainkan sebagai proses sosial

yang secara terus-menerus menghasilkan makna melalui kombinasi visual, teks, simbol, musik, hashtag, narasi, dan berbagai affordances yang disediakan platform. Perspektif ini memperluas pemikiran Stuart Hall mengenai representasi sebagai praktik produksi makna dengan memasukkan peran algoritma, antarmuka, dan logika platform sebagai bagian dari proses representasional. Identitas digital dibentuk tidak hanya oleh apa yang ingin ditampilkan pengguna, tetapi juga oleh bagaimana sistem platform memilih, mengurutkan, memperluas, atau justru membatasi penyebaran representasi tersebut kepada audiens yang lebih luas. Akibatnya, representasi identitas selalu merupakan hasil negosiasi antara agensi pengguna dan infrastruktur digital yang memediasi proses komunikasi (Hall, 1997; Abidin, 2024; Highfield, 2023; Myles et al., 2023).

Ketiga dimensi tersebut membentuk satu rangkaian proses yang saling berkaitan. Social stigma menciptakan tekanan struktural yang membatasi ekspresi identitas. Hidden identity menjadi respons adaptif yang memungkinkan individu mengelola risiko sosial melalui pengaturan visibilitas identitas. Digital representation kemudian menjadi ruang tempat identitas mulai dipublikasikan, dinegosiasikan, dan memperoleh berbagai bentuk respons dari komunitas maupun sistem platform. Hubungan ini menunjukkan

bahwa representasi digital bukanlah titik awal negosiasi identitas, melainkan hasil dari proses reflektif yang telah berlangsung sejak individu berhadapan dengan norma sosial yang mengatur batas-batas keberterimaan identitas seksual dan gender.

Rangkaian proses pada level mikro juga memperlihatkan bahwa negosiasi identitas belum berhenti pada pengalaman individual. Ketika praktik representasi mulai menemukan resonansi dengan individu lain yang memiliki pengalaman serupa, interaksi personal berkembang menjadi hubungan kolektif yang melampaui pengelolaan identitas diri. Perubahan inilah yang menjadi jembatan menuju level meso, ketika pengalaman individual bertransformasi menjadi solidaritas, pembentukan komunitas, dan praktik resistensi kolektif sebagai bagian dari dinamika negosiasi identitas digital yang lebih luas (Fraser, 1990; Warner, 2002; Couldry & Hepp, 2023).

6.3.2 Meso-Level Processes: Collective Resistance, Identity Negotiation

Jika proses pada level mikro menjelaskan bagaimana individu mengalami stigma, mengelola keterbukaan identitas, dan mulai membangun representasi digital, maka level meso menunjukkan bagaimana pengalaman tersebut berkembang

menjadi praktik sosial kolektif. Beyond the Closet Model memandang bahwa negosiasi identitas tidak berhenti pada pengelolaan identitas personal, tetapi memasuki ruang interaksi antarpengguna ketika individu mulai menemukan orang lain yang memiliki pengalaman serupa, membangun solidaritas, serta menghasilkan bentuk-bentuk resistensi terhadap norma dominan. Pada tahap inilah identitas digital berubah dari pengalaman individual menjadi praktik sosial yang dinegosiasikan secara kolektif melalui hubungan antarpengguna, komunitas digital, dan infrastruktur platform. Perubahan skala ini merupakan titik penting yang membedakan model ini dari pendekatan psikologis mengenai identity management, karena negosiasi identitas dipahami sebagai proses relasional yang berlangsung di dalam jaringan sosial dan ekosistem platform digital (Castells, 2012; Couldry & Hepp, 2023; Lupton, 2025).

Collective resistance merupakan dimensi pertama pada level meso yang menjelaskan bagaimana individu mengubah pengalaman marginalisasi menjadi tindakan kolektif. Literatur klasik mengenai counterpublics menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang mengalami eksklusi sosial cenderung membangun ruang komunikasi alternatif untuk menghasilkan narasi yang berbeda dari

wacana dominan (Fraser, 1990; Warner, 2002). Dalam konteks platform digital, ruang alternatif tersebut tidak lagi terbatas pada komunitas yang bersifat tertutup, tetapi berkembang melalui jaringan yang dibentuk oleh fitur platform seperti hashtag, rekomendasi algoritmik, live streaming, komentar, repost, dan praktik partisipatif lainnya. Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa komunitas LGBTQIA+ memanfaatkan media sosial untuk membangun solidaritas emosional, berbagi pengalaman diskriminasi, memproduksi pengetahuan alternatif mengenai identitas seksual dan gender, serta mengembangkan strategi kolektif dalam menghadapi ujaran kebencian dan pembatasan platform (Jackson et al., 2023; Clark-Parsons, 2024; Duguay & Chartrand, 2025).

Dalam *Beyond the Closet Model*, collective resistance tidak dipahami semata sebagai bentuk aktivisme politik yang terorganisasi. Resistensi juga muncul melalui praktik komunikasi sehari-hari yang secara perlahan menggeser batas-batas representasi identitas di ruang digital. Penggunaan humor, satire, ironi, meme, simbol visual, bahasa tersandi, maupun praktik saling mendukung antarpengguna merupakan bentuk resistensi yang memungkinkan kelompok marginal mempertahankan keberadaan mereka tanpa harus selalu melakukan konfrontasi secara langsung. Literatur mengenai digital activism

menunjukkan bahwa tindakan-tindakan mikro semacam ini memiliki kemampuan membangun identitas kolektif, memperkuat rasa memiliki terhadap komunitas, serta menghasilkan modal sosial yang penting bagi keberlangsungan gerakan digital (Literat & Kligler-Vilenchik, 2023; Mendes, Ringrose, & Keller, 2023; Abidin, 2024). Dengan demikian, resistensi kolektif dalam model ini dipahami sebagai akumulasi praktik komunikasi yang secara bertahap memperluas ruang pengakuan bagi identitas seksual dan gender yang sebelumnya terpinggirkan.

Terbentuknya solidaritas kolektif kemudian mengantar pada dimensi inti *Beyond the Closet Model*, yaitu *identity negotiation*. Berbeda dengan pendekatan yang memandang negosiasi identitas sebagai proses interpersonal semata, model ini menempatkan *identity negotiation* sebagai mekanisme sosial yang menghubungkan individu, komunitas, algoritma, dan tata kelola platform dalam satu proses yang berlangsung secara simultan. Identitas tidak dinegosiasikan hanya melalui interaksi antara pengguna dengan audiensnya, tetapi juga melalui logika algoritmik yang menentukan visibilitas konten, kebijakan moderasi yang mengatur batas-batas ekspresi, serta norma komunitas yang berkembang melalui interaksi digital. Dengan demikian, negosiasi identitas

merupakan hasil dari hubungan timbal balik antara agensi pengguna dan struktur digital yang terus berubah (Burke & Stets, 2009; Bucholtz, 2005; Gillespie, 2020).

Perspektif tersebut memperluas teori-teori klasik mengenai negosiasi identitas. Goffman menempatkan negosiasi identitas dalam konteks presentasi diri di hadapan audiens sosial, sedangkan Swann menekankan pentingnya proses verifikasi identitas melalui interaksi interpersonal. Dalam ekosistem platform digital, kedua proses tersebut tidak lagi berlangsung hanya melalui hubungan antarmanusia. Sistem rekomendasi, metrik interaksi, otomatisasi moderasi, serta kurasi algoritmik ikut menentukan apakah suatu representasi memperoleh visibilitas, diterima oleh komunitas, atau justru mengalami marginalisasi. Identitas digital karena itu tidak pernah sepenuhnya dikendalikan oleh individu, melainkan selalu dinegosiasikan bersama aktor-aktor nonmanusia yang bekerja melalui infrastruktur platform. Kajian terkini mengenai platform governance dan algorithmic mediation menunjukkan bahwa algoritma berfungsi sebagai mekanisme institusional yang secara aktif membentuk distribusi perhatian publik, peluang partisipasi, dan legitimasi berbagai bentuk identitas di ruang digital (van Dijck, Poell, & de Waal, 2018; Gillespie, 2020).

Hubungan antara collective resistance dan identity negotiation bersifat saling memperkuat. Solidaritas komunitas memperluas kesempatan individu untuk menampilkan identitasnya secara lebih terbuka, sementara keberhasilan negosiasi identitas menghasilkan representasi baru yang memperkaya sumber daya simbolik bagi komunitas. Sebaliknya, pengalaman sensor, penghapusan konten, ataupun serangan digital mendorong komunitas mengembangkan strategi komunikasi baru agar tetap dapat mempertahankan visibilitasnya. Siklus tersebut menunjukkan bahwa negosiasi identitas berlangsung sebagai proses rekursif yang terus diperbarui melalui pengalaman kolektif, bukan sebagai tahapan linear yang berhenti setelah identitas memperoleh pengakuan sementara. Literatur mengenai digital publics dan platform societies semakin menegaskan bahwa hubungan timbal balik antara komunitas, algoritma, dan tata kelola platform merupakan karakter utama kehidupan sosial di era platformisasi (Couldry & Hepp, 2023; van Dijck et al., 2018).

Sintesis kedua dimensi tersebut memperlihatkan bahwa level meso merupakan ruang tempat pengalaman personal bertransformasi menjadi dinamika sosial yang lebih luas. Collective resistance menyediakan fondasi bagi terbentuknya solidaritas, pengetahuan bersama, dan counterpublics,

sedangkan identity negotiation menjadi mekanisme yang menghubungkan praktik kolektif tersebut dengan logika platform dan struktur sosial yang lebih besar. Posisi ini menjadikan level meso sebagai jembatan antara pengalaman individual pada level mikro dan perubahan sosial pada level makro. Ketika proses negosiasi berlangsung secara berulang dan memperoleh dukungan yang semakin luas, identitas tidak lagi hanya menjadi milik komunitas tertentu, tetapi mulai memperoleh legitimasi sosial yang lebih besar dan berpotensi memengaruhi norma publik. Dinamika tersebut menjadi landasan bagi pembahasan pada level makro, yaitu bagaimana pengakuan sosial berkembang menjadi transformasi norma dalam masyarakat digital.

6.3.3 Macro-Level Outcomes: Social Recognition, Social Norm Transformation

Apabila proses pada level mikro menjelaskan bagaimana individu membangun representasi identitas, dan level meso memperlihatkan bagaimana representasi tersebut berkembang menjadi praktik kolektif melalui resistensi dan negosiasi identitas, maka level makro menunjukkan konsekuensi sosial yang muncul dari akumulasi

proses-proses tersebut. Beyond the Closet Model memandang bahwa negosiasi identitas digital tidak berhenti pada perubahan pengalaman individu maupun penguatan komunitas, tetapi secara bertahap dapat menghasilkan perubahan dalam pola pengakuan sosial dan norma yang mengatur kehidupan bersama. Oleh karena itu, social recognition dan social norm transformation diposisikan sebagai luaran (outcomes) dari keseluruhan mekanisme model, sekaligus menjadi titik awal bagi siklus negosiasi berikutnya melalui mekanisme umpan balik yang telah dijelaskan pada Bagian 6.2.5. Perspektif ini menegaskan bahwa transformasi sosial tidak lahir dari satu tindakan representasi ataupun satu bentuk aktivisme digital, melainkan dari akumulasi interaksi yang berlangsung secara terus-menerus antara individu, komunitas, platform digital, dan institusi sosial (Couldry & Hepp, 2023; Lupton, 2025; van Dijck, Poell, & de Waal, 2018).

Dalam Beyond the Closet Model, social recognition dipahami sebagai proses ketika identitas yang sebelumnya diposisikan sebagai penyimpangan mulai memperoleh legitimasi dalam ruang sosial. Pengakuan tersebut tidak hanya berupa penerimaan interpersonal, tetapi juga mencakup meningkatnya visibilitas publik, berkembangnya dukungan komunitas, munculnya representasi yang lebih

beragam, serta terbentuknya ruang dialog yang memungkinkan identitas seksual dan gender dibicarakan secara lebih terbuka. Dengan demikian, pengakuan sosial merupakan hasil dari interaksi antara praktik representasi, negosiasi identitas, dan respons masyarakat terhadap representasi tersebut. Pandangan ini sejalan dengan teori pengakuan Axel Honneth yang menempatkan pengakuan sebagai prasyarat berkembangnya identitas sosial, sekaligus memperluas gagasan Charles Taylor mengenai pentingnya pengakuan terhadap perbedaan sebagai dasar bagi kehidupan demokratis yang inklusif (Honneth, 1995; Taylor, 1994).

Lingkungan digital mengubah mekanisme pembentukan pengakuan sosial secara mendasar. Jika dalam ruang sosial konvensional pengakuan terutama diperoleh melalui institusi formal atau relasi tatap muka, maka pada masyarakat platform pengakuan juga dibentuk melalui distribusi visibilitas yang dimediasi oleh algoritma, pola interaksi pengguna, serta tata kelola platform. Jumlah interaksi, penyebaran konten, pembentukan jaringan, hingga keterhubungan antarkomunitas menjadi bagian dari proses yang menentukan apakah suatu identitas memperoleh legitimasi sosial atau tetap berada pada posisi marginal. Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa platform digital berfungsi sebagai arena tempat pengakuan

sosial diproduksi, diperdebatkan, sekaligus diperebutkan melalui hubungan yang kompleks antara pengguna, algoritma, dan kebijakan platform (Couldry & Hepp, 2023; Gillespie, 2020; Duguay & Chartrand, 2025). Dalam konteks tersebut, pengakuan tidak lagi dipahami sebagai kondisi yang bersifat tetap, tetapi sebagai hasil negosiasi yang selalu dapat berubah mengikuti dinamika komunikasi digital.

Meskipun demikian, *Beyond the Closet Model* tidak mengasumsikan bahwa meningkatnya visibilitas selalu menghasilkan pengakuan sosial yang lebih besar. Visibilitas juga dapat memperluas ruang pengawasan, memperkuat polarisasi, memunculkan serangan digital, atau memicu bentuk-bentuk moral policing yang baru. Algoritma platform cenderung memperbesar distribusi konten yang memicu keterlibatan pengguna, sehingga representasi identitas seksual dan gender sering kali memperoleh perhatian bersamaan dengan meningkatnya kontestasi publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan sosial bukanlah tujuan akhir yang stabil, melainkan posisi yang terus dinegosiasikan melalui hubungan dinamis antara dukungan, resistensi, serta mekanisme tata kelola platform. Temuan-temuan dalam kajian platform governance dan algorithmic visibility memperlihatkan bahwa legitimasi sosial di ruang digital selalu dibentuk oleh

kombinasi antara praktik sosial pengguna dan logika komputasional yang mengatur sirkulasi informasi (Gillespie, 2020; van Dijck et al., 2018).

Akumulasi proses pengakuan sosial selanjutnya membuka peluang terjadinya social norm transformation. Dalam model ini, transformasi norma dipahami sebagai perubahan bertahap terhadap cara masyarakat mendefinisikan, mengevaluasi, dan memperlakukan identitas seksual maupun gender. Perubahan tersebut tidak berlangsung melalui penggantian norma secara tiba-tiba, melainkan melalui reproduksi praktik komunikasi yang terus berulang sehingga batas antara identitas yang dianggap "normal" dan "menyimpang" mengalami pergeseran. Perspektif ini sejalan dengan konstruksionisme sosial Berger dan Luckmann yang memandang realitas sosial sebagai hasil institusionalisasi praktik-praktik yang terus direproduksi, serta dengan konsep performativitas Butler yang menjelaskan bahwa norma dipertahankan maupun diubah melalui pengulangan tindakan sosial (Berger & Luckmann, 1966; Butler, 1990; Butler, 2004). Dalam masyarakat digital, pengulangan tersebut berlangsung melalui representasi, interaksi, dan distribusi konten yang dimediasi platform sehingga transformasi norma menjadi bagian dari dinamika komunikasi sehari-hari.

Transformasi norma juga tidak hanya terjadi pada tingkat budaya, tetapi mencakup perubahan dalam praktik institusional dan tata kelola platform. Semakin kuat pengakuan terhadap keberagaman identitas, semakin besar pula tekanan terhadap platform untuk meninjau kebijakan moderasi, meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan, serta mengembangkan mekanisme tata kelola yang lebih adil dan inklusif. Pada saat yang sama, perubahan norma publik dapat memengaruhi diskursus hukum, pendidikan, media, maupun kebijakan sosial yang berkaitan dengan keberagaman seksual dan gender. Literatur mutakhir mengenai platform governance menunjukkan bahwa hubungan antara perubahan norma masyarakat dan perubahan kebijakan platform bersifat timbal balik. Platform tidak hanya merespons perubahan sosial, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk arah perubahan tersebut melalui desain algoritma, aturan komunitas, dan sistem moderasi konten (Gillespie, 2020; Gorwa, 2024; van Dijck et al., 2018).

Argumen tersebut memperlihatkan bahwa social norm transformation bukan sekadar konsekuensi dari meningkatnya visibilitas identitas, melainkan hasil dari interaksi yang berlangsung secara berulang antara pengalaman individual, solidaritas kolektif, pengakuan sosial, dan tata kelola platform.

Dengan demikian, perubahan norma dipahami sebagai proses rekursif yang terus berkembang melalui mekanisme umpan balik. Norma yang mengalami transformasi akan membentuk konteks sosial baru yang pada gilirannya memengaruhi tingkat stigma, strategi penyembunyian identitas, dan pola representasi digital generasi berikutnya. Siklus inilah yang menjelaskan mengapa Beyond the Closet Model tidak disusun sebagai model linear, tetapi sebagai sistem dinamis yang memperlihatkan hubungan timbal balik antara level mikro, meso, dan makro.

Melalui kerangka tersebut, Beyond the Closet Model menawarkan perspektif yang melampaui teori-teori yang hanya menempatkan pengakuan sebagai tujuan akhir perjuangan identitas. Model ini menunjukkan bahwa pengakuan sosial dan transformasi norma merupakan bagian dari siklus sosial yang terus berlangsung, di mana perubahan pada tingkat makro akan kembali membentuk kondisi struktural bagi proses negosiasi identitas berikutnya. Integrasi antara social recognition, social norm transformation, platform governance, dan mekanisme umpan balik menjadikan model ini mampu menjelaskan bagaimana identitas digital tidak hanya mencerminkan perubahan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu kekuatan yang secara aktif membentuk konfigurasi baru hubungan antara

kekuasaan, teknologi, dan kehidupan sosial. Dengan demikian, kontribusi utama Beyond the Closet Model terletak pada kemampuannya menghubungkan pengalaman individual, dinamika komunitas, dan transformasi institusional ke dalam satu kerangka analitis multilevel yang menjelaskan evolusi negosiasi identitas digital dalam masyarakat platform kontemporer.

Tabel 6.1. Karakteristik Dimensi dalam Beyond the Closet Model of Digital Identity Negotiation

Dimensi Model	Level Analisis	Aktor Dominan	Mekanisme Sosiologis	Luaran Sosial
Social Stigma	Makro	Masyarakat, agama, negara, media	Pelabelan, stereotip, eksklusi	Tekanan sosial terhadap identitas
Hidden Identity	Mikro	Individu	Concealment, self-protection, identity management	Penyembunian identitas
Digital Representation	Mikro	Individu dan platform	Presentasi diri, representas	Visibilitas identitas

Dimensi Model	Level Analisis	Aktor Dominan	Mekanisme Sosiologis	Luaran Sosial
Collective Resistance	Meso	Komunitas digital	i visual, narasi digital Solidaritas, counterpublic, collective action	Dukungan komunitas
Identity Negotiation	Meso	Individu dan komunitas	Negosiasi makna, adaptasi identitas	Penyesuaian identitas sesuai konteks
Social Recognition	Makro	Publik, media, institusi	Legitimasi, penerimaan, validasi sosial	Pengakuan identitas
Social Norm Transformation	Makro	Masyarakat	Perubahan norma, redefinisi batas sosial	Transformasi norma sosial

6.4 Dynamic Interactions among the Dimensions of Digital Identity Negotiation

Beyond the Closet Model berangkat dari asumsi bahwa negosiasi identitas digital tidak dapat dipahami sebagai rangkaian tahapan yang

berlangsung secara linear maupun sebagai hubungan sebab-akibat yang bersifat sederhana. Setiap dimensi dalam model ini membentuk sistem yang saling bergantung sehingga perubahan pada satu dimensi akan menghasilkan konsekuensi terhadap dimensi lainnya. Hubungan tersebut berlangsung melalui mekanisme interaksi yang bersifat dinamis, rekursif, dan multilevel, di mana pengalaman individu, praktik kolektif, tata kelola platform, serta struktur sosial terus saling memengaruhi sepanjang proses negosiasi identitas. Oleh karena itu, model ini tidak memandang social stigma, hidden identity, digital representation, collective resistance, identity negotiation, social recognition, dan social norm transformation sebagai komponen yang berdiri sendiri, tetapi sebagai elemen-elemen yang membentuk jaringan hubungan sosial yang terus berkembang (Couldry & Hepp, 2023; Lupton, 2025; van Dijck, Poell, & de Waal, 2018).

Interaksi tersebut dimulai ketika stigma sosial membentuk batas-batas keberterimaan identitas seksual dan gender dalam masyarakat. Norma heteronormatif, wacana agama, praktik institusional, maupun relasi kuasa yang berkembang dalam masyarakat menghasilkan tekanan sosial yang mendorong individu mengembangkan berbagai strategi untuk mengelola identitasnya. Akan tetapi,

hubungan ini tidak bersifat deterministik. Tingkat stigma yang sama tidak selalu menghasilkan strategi identitas yang seragam karena setiap individu melakukan evaluasi terhadap risiko sosial, peluang komunikasi, serta karakteristik platform yang digunakan. Dengan demikian, hidden identity bukan merupakan akibat otomatis dari stigma sosial, tetapi hasil refleksi yang berlangsung melalui interaksi antara pengalaman personal dan lingkungan sosial yang terus berubah (Foucault, 1978; Goffman, 1963; Duguay, 2022).

Strategi pengelolaan identitas tersebut kemudian berkembang menjadi representasi digital ketika individu mulai menggunakan berbagai affordances platform untuk menampilkan dirinya di ruang publik digital. Namun representasi digital tidak dapat dipahami hanya sebagai ekspresi personal. Setelah identitas dipublikasikan, representasi tersebut segera memasuki arena sosial yang dipenuhi oleh interaksi antarpengguna, mekanisme algoritmik, dan tata kelola platform. Setiap unggahan menghasilkan komentar, dukungan, kritik, penolakan, maupun distribusi algoritmik yang membentuk makna sosial baru terhadap identitas yang direpresentasikan. Dengan demikian, representasi digital selalu menjadi titik pertemuan antara agensi individu dan struktur digital yang

bekerja secara simultan (Hall, 1997; Highfield, 2023; Gillespie, 2020).

Interaksi yang terus berlangsung di ruang digital selanjutnya memungkinkan berkembangnya collective resistance melalui terbentuknya jaringan solidaritas, counterpublics, dan praktik komunikasi alternatif. Pengalaman yang pada awalnya bersifat personal mulai memperoleh dimensi kolektif ketika individu menemukan pengguna lain dengan pengalaman serupa, membangun rasa memiliki terhadap komunitas, serta memproduksi narasi yang menantang definisi dominan mengenai seksualitas dan gender. Counterpublics yang terbentuk dalam ruang digital tidak hanya menjadi tempat berbagi pengalaman, tetapi juga menghasilkan pengetahuan alternatif, norma komunitas, dan sumber daya simbolik yang memperkuat posisi kelompok marginal dalam menghadapi struktur dominan (Fraser, 1990; Warner, 2002; Jackson et al., 2023; Clark-Parsons, 2024).

Pada tahap inilah identity negotiation berfungsi sebagai mekanisme sentral yang menghubungkan seluruh dimensi model. Negosiasi identitas tidak berlangsung hanya melalui komunikasi antara individu dan komunitasnya, tetapi juga melalui interaksi yang melibatkan algoritma, sistem

rekomendasi, moderasi konten, metrik keterlibatan, serta kebijakan platform. Setiap perubahan pada representasi digital menghasilkan respons baru dari komunitas maupun sistem platform, sementara respons tersebut kembali memengaruhi strategi representasi individu pada interaksi berikutnya. Negosiasi identitas karena itu berlangsung sebagai proses adaptasi berkelanjutan yang terus menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan sosial maupun digital. Kajian terbaru mengenai *algorithmic mediation* menunjukkan bahwa algoritma tidak lagi berfungsi sebagai infrastruktur teknis yang netral, tetapi sebagai aktor institusional yang ikut menentukan peluang visibilitas, legitimasi, dan marginalisasi berbagai identitas di ruang digital (Bucher, 2018; Gillespie, 2020).

Proses negosiasi yang berlangsung secara terus-menerus kemudian membuka peluang terbentuknya *social recognition*. Dalam model ini, pengakuan sosial dipahami sebagai hasil sementara dari interaksi antara representasi identitas, dukungan komunitas, distribusi algoritmik, serta respons masyarakat yang lebih luas. Pengakuan tersebut tidak pernah bersifat permanen karena selalu berada dalam kondisi yang dapat diperdebatkan kembali melalui perubahan norma sosial, kebijakan platform, maupun konfigurasi diskursus publik. Identitas yang pada suatu waktu memperoleh legitimasi dapat

kembali mengalami stigmatisasi ketika terjadi perubahan politik, budaya, atau tata kelola platform. Sebaliknya, identitas yang sebelumnya berada pada posisi marginal dapat memperoleh ruang pengakuan yang lebih besar melalui akumulasi representasi dan solidaritas kolektif yang berlangsung secara berulang. Perspektif ini menunjukkan bahwa pengakuan sosial merupakan proses yang selalu dinegosiasikan, bukan kondisi yang telah selesai dicapai (Honneth, 1995; Taylor, 1994; Couldry & Hepp, 2023).

Akumulasi berbagai bentuk pengakuan tersebut secara bertahap menghasilkan social norm transformation. Transformasi norma dalam Beyond the Closet Model tidak dipahami sebagai perubahan revolusioner yang berlangsung dalam waktu singkat, melainkan sebagai hasil dari reproduksi praktik komunikasi yang terus-menerus menggeser batas-batas legitimasi sosial. Ketika representasi identitas semakin sering muncul, memperoleh dukungan komunitas, dan diterima dalam ruang publik digital, masyarakat mulai membangun interpretasi baru mengenai keberagaman seksual dan gender. Pada saat yang sama, perubahan norma tersebut mendorong institusi, media, maupun platform untuk menyesuaikan kebijakan dan praktik tata kelolanya. Dengan demikian, transformasi norma merupakan hasil kumulatif dari hubungan timbal

balik antara praktik sosial pengguna dan perubahan institusional yang berkembang secara bersamaan (Berger & Luckmann, 1966; Butler, 2004; van Dijk et al., 2018).

Hubungan antardimensi tersebut tidak berhenti pada transformasi norma. Norma sosial yang telah mengalami perubahan kembali membentuk kondisi struktural baru yang memengaruhi tingkat stigma, strategi penyembunyian identitas, pola representasi digital, serta bentuk resistensi yang akan berkembang pada periode berikutnya. Siklus tersebut menunjukkan bahwa setiap keluaran model sekaligus menjadi masukan bagi siklus negosiasi selanjutnya. Mekanisme inilah yang menjelaskan mengapa Beyond the Closet Model disusun sebagai sistem rekursif yang memiliki feedback loops, bukan sebagai model linear dengan titik awal dan titik akhir yang tetap. Perspektif ini sejalan dengan perkembangan teori sistem sosial, sosiologi digital, dan platform studies yang memandang perubahan sosial sebagai hasil interaksi berulang antara aktor manusia, teknologi, dan institusi yang terus saling membentuk (Couldry & Hepp, 2023; Lupton, 2025; Gillespie, 2020).

Melalui dinamika tersebut, Beyond the Closet Model menawarkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan tiga tingkat analisis ke dalam satu

sistem penjelasan yang utuh. Level mikro menjelaskan bagaimana pengalaman individu dibentuk oleh stigma, pengelolaan identitas, dan representasi digital. Level meso memperlihatkan bagaimana pengalaman tersebut berkembang menjadi solidaritas kolektif dan negosiasi identitas yang dimediasi oleh komunitas maupun platform. Level makro menunjukkan bagaimana akumulasi proses tersebut menghasilkan pengakuan sosial dan transformasi norma yang kemudian membentuk kembali kondisi struktural bagi proses negosiasi berikutnya. Integrasi lintas level ini membedakan Beyond the Closet Model dari teori-teori terdahulu yang umumnya menjelaskan salah satu dimensi secara terpisah. Dengan menempatkan relasi antara individu, komunitas, algoritma, platform, dan struktur sosial dalam satu mekanisme yang saling berinteraksi, model ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana identitas digital diproduksi, dinegosiasikan, dilegitimasi, dan ditransformasikan dalam masyarakat platform kontemporer.

6.5 Theoretical and Disciplinary Contributions of the Beyond the Closet Model

Beyond the Closet Model dikembangkan sebagai respons terhadap keterbatasan berbagai pendekatan yang selama ini digunakan untuk menjelaskan

identitas seksual dan gender di ruang digital. Sebagian besar teori klasik memberikan penjelasan yang kuat terhadap dimensi tertentu dari pembentukan identitas, tetapi belum sepenuhnya mampu menjelaskan bagaimana identitas diproduksi, dinegosiasikan, dan ditransformasikan melalui interaksi yang berlangsung secara simultan antara individu, komunitas, algoritma, tata kelola platform, dan struktur sosial. Model ini berupaya mengintegrasikan berbagai perspektif tersebut ke dalam satu kerangka analitis multilevel yang memandang negosiasi identitas digital sebagai proses yang bersifat dinamis, rekursif, dan dimediasi oleh platform. Dengan demikian, kontribusi utama *Beyond the Closet Model* tidak terletak pada pengenalan konsep-konsep baru secara terpisah, melainkan pada penyusunan mekanisme konseptual yang menghubungkan berbagai teori sosiologi, gender, dan media digital ke dalam satu sistem penjelasan yang utuh.

Kontribusi pertama model ini tampak pada pengembangan digital sociology. Kajian sosiologi digital selama dua dekade terakhir telah menunjukkan bahwa media digital tidak lagi dapat dipahami sebagai teknologi komunikasi yang bersifat netral, melainkan sebagai bagian dari infrastruktur sosial yang membentuk praktik kehidupan sehari-hari, hubungan sosial, dan

produksi pengetahuan (Lupton, 2025; Couldry & Hepp, 2023). Beyond the Closet Model memperluas perspektif tersebut dengan menunjukkan bahwa identitas digital merupakan hasil interaksi yang terus berlangsung antara pengalaman personal, praktik kolektif, logika algoritmik, dan tata kelola platform. Identitas tidak diposisikan sebagai atribut yang dibawa individu ke dalam ruang digital, tetapi sebagai konstruksi sosial yang diproduksi kembali melalui hubungan timbal balik antara manusia dan sistem digital. Perspektif ini memperkuat pergeseran dalam sosiologi digital dari pendekatan yang berpusat pada penggunaan teknologi menuju pendekatan relasional yang menempatkan teknologi sebagai bagian dari proses pembentukan realitas sosial. Dalam konteks tersebut, negosiasi identitas dipahami sebagai mekanisme sosial yang berlangsung di dalam masyarakat platform, bukan sekadar sebagai praktik komunikasi individual.

Model ini juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan gender studies dan queer studies. Literatur dalam kedua bidang tersebut telah lama menjelaskan bahwa identitas seksual dan gender merupakan konstruksi sosial yang terus diproduksi melalui performativitas, relasi kuasa, dan praktik representasi (Butler, 1990; Butler, 2004; Foucault, 1978). Akan tetapi, sebagian besar teori tersebut dikembangkan sebelum platform digital menjadi

infrastruktur utama komunikasi sosial. Beyond the Closet Model menunjukkan bahwa performativitas identitas pada era platformisasi tidak lagi hanya dipengaruhi oleh norma budaya maupun interaksi antarmanusia, tetapi juga oleh sistem rekomendasi, moderasi otomatis, metrik keterlibatan, dan logika algoritmik yang menentukan visibilitas representasi identitas. Dengan demikian, model ini memperluas konsep performativitas menuju apa yang dapat dipahami sebagai platform-mediated performativity, yaitu proses ketika produksi dan pengakuan identitas berlangsung melalui hubungan yang tidak terpisahkan antara agensi pengguna dan infrastruktur digital. Perspektif tersebut memperkaya kajian queer kontemporer dengan menempatkan algoritma dan tata kelola platform sebagai bagian dari struktur sosial yang ikut membentuk pengalaman seksualitas dan gender di ruang digital (Duguay, 2022; Cover, 2024; Abidin, 2024).

Kontribusi berikutnya diarahkan pada platform studies. Selama ini, kajian platform lebih banyak memusatkan perhatian pada persoalan tata kelola platform, ekonomi politik data, moderasi konten, atau distribusi informasi (van Dijck et al., 2018; Gillespie, 2020). Beyond the Closet Model menawarkan perluasan perspektif dengan menunjukkan bahwa platform tidak hanya berfungsi

sebagai infrastruktur komunikasi, tetapi juga sebagai aktor institusional yang berpartisipasi dalam pembentukan identitas sosial. Algoritma, kebijakan komunitas, sistem rekomendasi, dan mekanisme moderasi tidak hanya mengatur sirkulasi konten, tetapi juga memengaruhi peluang individu untuk memperoleh pengakuan sosial, membangun solidaritas kolektif, atau mengalami marginalisasi digital. Oleh karena itu, model ini menempatkan platform sebagai co-producer of identity, yaitu institusi digital yang secara aktif membentuk arah negosiasi identitas melalui mekanisme algoritmik dan tata kelola platform. Posisi tersebut memperluas diskusi dalam platform studies dengan menghubungkan analisis mengenai infrastruktur digital dengan proses produksi identitas dan perubahan sosial.

Integrasi antara digital sociology, gender studies, dan platform studies menghasilkan kontribusi teoretis yang lebih luas terhadap pengembangan teori mengenai identitas digital. *Beyond the Closet Model* menunjukkan bahwa tidak ada satu teori yang secara mandiri mampu menjelaskan keseluruhan dinamika negosiasi identitas dalam masyarakat platform. Perspektif Foucault menjelaskan relasi kuasa dan normalisasi, Goffman menerangkan presentasi diri, Barthes menguraikan produksi makna melalui representasi, Butler menjelaskan

performativitas identitas, Social Identity Theory menyoroti pembentukan identitas kelompok, sedangkan teori pengakuan menjelaskan pentingnya legitimasi sosial. Masing-masing perspektif memberikan penjelasan yang kuat terhadap dimensi tertentu, tetapi belum menghubungkan seluruh proses tersebut ke dalam satu mekanisme yang menjelaskan bagaimana individu, komunitas, algoritma, dan struktur sosial saling berinteraksi secara berulang. Beyond the Closet Model mengisi ruang konseptual tersebut melalui kerangka multilevel yang menghubungkan level mikro, meso, dan makro ke dalam sistem rekursif yang dimediasi oleh platform. Dengan demikian, model ini tidak menggantikan teori-teori sebelumnya, tetapi mengintegrasikan serta memperluas daya jelasnya dalam konteks masyarakat digital kontemporer.

Kontribusi tersebut sekaligus membuka arah baru bagi penelitian mengenai identitas digital. Model ini menunjukkan bahwa kajian mengenai seksualitas dan gender tidak lagi memadai apabila hanya berfokus pada pengalaman individu ataupun praktik representasi, tetapi perlu mempertimbangkan hubungan dinamis antara algoritma, tata kelola platform, komunitas digital, dan perubahan norma sosial. Pendekatan multilevel yang ditawarkan Beyond the Closet Model juga dapat diterapkan untuk memahami berbagai bentuk identitas lain

yang mengalami proses negosiasi dalam ruang digital, termasuk identitas agama, etnis, disabilitas, migrasi, maupun identitas politik. Hal ini membuka peluang bagi pengembangan studi komparatif lintas platform, lintas budaya, dan lintas konteks sosial guna menjelaskan bagaimana karakteristik platform serta konfigurasi budaya menghasilkan pola negosiasi identitas yang berbeda. Pada saat yang sama, perkembangan teknologi berbasis kecerdasan artifisial, sistem rekomendasi yang semakin adaptif, serta bentuk-bentuk baru tata kelola platform diperkirakan akan terus mengubah mekanisme pembentukan identitas digital. Kondisi tersebut menegaskan bahwa Beyond the Closet Model bukan diposisikan sebagai kerangka yang bersifat final, melainkan sebagai landasan konseptual yang dapat terus dikembangkan untuk menjelaskan dinamika hubungan antara identitas, teknologi, dan perubahan sosial dalam masyarakat platform.

Melalui keseluruhan kontribusi tersebut, Beyond the Closet Model menempatkan negosiasi identitas digital sebagai proses sosial yang berlangsung melalui hubungan timbal balik antara struktur sosial, agensi individu, komunitas digital, dan infrastruktur platform. Integrasi ketiga tingkat analisis serta mekanisme rekursif yang menghubungkan seluruh dimensi model menunjukkan bahwa identitas digital tidak hanya mencerminkan perubahan masyarakat,

tetapi juga menjadi salah satu mekanisme yang secara aktif membentuk konfigurasi baru kekuasaan, pengakuan sosial, dan transformasi norma pada era platformisasi. Perspektif inilah yang menjadi kontribusi konseptual utama buku ini terhadap pengembangan sosiologi digital, studi gender dan queer, serta kajian platform dalam memahami evolusi identitas pada masyarakat digital kontemporer.

6.6 Future Research Agenda: Beyond the Closet in an Evolving Digital Society

Beyond the Closet Model disusun sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan bagaimana identitas seksual dan gender dinegosiasikan dalam masyarakat yang semakin dipengaruhi oleh platform digital. Model ini tidak dimaksudkan sebagai formulasi yang bersifat final, melainkan sebagai landasan analitis yang dapat terus dikembangkan seiring dengan perubahan teknologi, konfigurasi sosial, dan bentuk-bentuk baru interaksi digital. Karakter masyarakat platform yang terus mengalami transformasi menunjukkan bahwa mekanisme pembentukan identitas juga akan terus berubah mengikuti perkembangan infrastruktur digital, kebijakan platform, serta praktik komunikasi yang berkembang di berbagai konteks sosial. Oleh

karena itu, nilai utama model ini terletak pada kemampuannya menyediakan kerangka yang cukup fleksibel untuk diuji, diperluas, dan disempurnakan melalui penelitian-penelitian berikutnya.

Salah satu agenda penelitian yang penting adalah menguji Beyond the Closet Model pada berbagai platform digital yang memiliki karakteristik arsitektur komunikasi yang berbeda. Buku ini banyak menempatkan TikTok sebagai ilustrasi utama karena platform tersebut memperlihatkan hubungan yang sangat kuat antara algoritma, visibilitas, dan pembentukan identitas. Namun, setiap platform memiliki logika teknis, tata kelola, dan budaya komunikasi yang tidak sepenuhnya sama. Instagram lebih menekankan representasi visual dan jaringan sosial, X memperlihatkan dinamika diskursus publik yang lebih terbuka, Reddit membangun anonimitas dan komunitas berbasis minat, sedangkan Discord atau Telegram memfasilitasi pembentukan komunitas yang relatif lebih tertutup. Perbedaan karakteristik tersebut memungkinkan setiap dimensi dalam Beyond the Closet Model bekerja dengan intensitas yang berbeda sehingga membuka peluang bagi penelitian komparatif mengenai hubungan antara desain platform dan mekanisme negosiasi identitas (van Dijk et al., 2018; Gillespie, 2020).

Agenda berikutnya berkaitan dengan perluasan konteks budaya dan geografis. Sebagian besar argumentasi dalam buku ini dibangun berdasarkan konteks masyarakat Indonesia yang memiliki konfigurasi sosial, agama, dan budaya yang khas. Meskipun berbagai mekanisme konseptual yang dijelaskan memiliki relevansi yang lebih luas, bentuk stigma, strategi penyembunyian identitas, pola representasi digital, maupun mekanisme pengakuan sosial sangat mungkin berkembang secara berbeda pada masyarakat dengan sistem hukum, budaya politik, dan norma sosial yang berbeda. Penelitian lintas negara maupun lintas kawasan akan memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi model yang bersifat universal sekaligus mengungkap aspek-aspek yang sangat dipengaruhi oleh konteks lokal. Pendekatan komparatif semacam ini akan memperkaya kajian mengenai identitas digital sekaligus memperluas kontribusi teori terhadap sosiologi global (Couldry & Hepp, 2023; Lupton, 2025).

Perkembangan kecerdasan artifisial juga menghadirkan agenda penelitian baru yang belum sepenuhnya tercakup dalam model ini. Sistem rekomendasi berbasis pembelajaran mesin, generative artificial intelligence, agen percakapan, konten sintetis, serta personalisasi algoritmik semakin menentukan bagaimana individu

memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi representasi identitas. Pada masa mendatang, negosiasi identitas kemungkinan tidak hanya berlangsung antara individu, komunitas, dan platform, tetapi juga melibatkan sistem kecerdasan artifisial yang mampu menghasilkan, memodifikasi, bahkan merepresentasikan identitas secara otomatis. Perubahan tersebut menuntut pengembangan konsep mengenai algorithmic agency dan artificial mediation agar analisis mengenai identitas digital tetap mampu menjelaskan dinamika masyarakat platform yang terus berkembang (Gillespie, 2020; Lupton, 2025).

Agenda penelitian lain yang tidak kalah penting adalah memperluas penerapan Beyond the Closet Model di luar kajian mengenai seksualitas dan gender. Mekanisme yang dijelaskan dalam model ini pada dasarnya berangkat dari hubungan antara stigma, representasi, negosiasi, pengakuan, dan transformasi norma. Hubungan tersebut juga ditemukan pada berbagai bentuk identitas sosial lain, seperti identitas agama, etnis, disabilitas, migrasi, masyarakat adat, maupun kelompok minoritas politik. Pengujian model pada konteks-konteks tersebut akan membantu mengevaluasi sejauh mana mekanisme yang ditawarkan memiliki daya jelas yang lebih luas, sekaligus membuka kemungkinan

penyempurnaan konsep melalui dialog dengan berbagai bidang ilmu sosial yang lain.

Pengembangan metodologi juga menjadi agenda yang penting. Kajian mengenai negosiasi identitas digital selama ini masih didominasi oleh pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis naratif, etnografi digital, atau studi kasus. Penelitian di masa depan dapat mengembangkan desain mixed methods, analisis jejaring sosial, computational social science, maupun analisis multimodal untuk menghubungkan pengalaman subjektif pengguna dengan pola interaksi digital dalam skala yang lebih besar. Integrasi antara metode interpretatif dan analisis komputasional akan memperkuat kemampuan peneliti dalam menjelaskan hubungan antara praktik komunikasi, distribusi algoritmik, dan perubahan sosial secara lebih komprehensif.

Pada akhirnya, buku ini berangkat dari satu premis sederhana bahwa identitas tidak pernah berhenti dinegosiasikan. Dalam masyarakat platform, proses tersebut menjadi semakin kompleks karena berlangsung melalui hubungan yang terus berubah antara individu, komunitas, teknologi, dan institusi sosial. Identitas digital bukan sekadar cerminan diri, melainkan arena tempat berbagai bentuk kekuasaan, pengakuan, resistensi, dan transformasi norma saling berinteraksi. Perubahan teknologi memang

mengubah cara manusia berkomunikasi, tetapi yang lebih mendasar adalah perubahan cara masyarakat mendefinisikan siapa yang dapat dilihat, siapa yang diakui, siapa yang disenyapkan, dan siapa yang memiliki ruang untuk membentuk makna tentang dirinya sendiri.

Beyond the Closet Model lahir dari upaya memahami dinamika tersebut melalui perspektif sosiologi. Model ini menunjukkan bahwa perjalanan dari identitas yang tersembunyi menuju pengakuan sosial bukanlah lintasan yang lurus maupun berakhir pada satu titik tertentu. Setiap bentuk pengakuan akan melahirkan konfigurasi sosial baru yang kembali membuka ruang bagi negosiasi identitas berikutnya. Dengan demikian, "beyond the closet" bukan sekadar perpindahan dari ruang privat menuju ruang publik digital, melainkan metafora sosiologis mengenai proses tanpa akhir ketika identitas, teknologi, dan masyarakat terus membentuk satu sama lain. Dalam pengertian inilah negosiasi identitas digital dipahami bukan sebagai fenomena yang sesaat, tetapi sebagai bagian dari transformasi sosial yang akan terus berkembang bersama evolusi masyarakat platform pada masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, C. (2021). Mapping internet celebrity on TikTok: Exploring attention economies and visibility labours. *Cultural Science Journal*, 12, 77–103.
<https://doi.org/10.5334/csci.140>

Abidin, C. (2022). Grief hypejacking: Influencers, #ThoughtsAndPrayers, and the commodification of grief on Instagram. *The Information Society*, 38(3), 174–187.

<https://doi.org/10.1080/01972243.2022.2071212>

Aggleton, P., Cover, R., Logie, C. H., Newman, C. E., & Parker, R. (Eds.). (2024). Routledge handbook of sexuality, gender, health and rights (2nd ed.). Routledge.

Badouard, R., & Bellon, A. (2025). Introduction to the special issue on content moderation on digital platforms. *Internet Policy Review*, 14(1).
<https://doi.org/10.14763/2025.1.2005>

Beagan, B. L., Bizzeth, S. R., Pride, T. M., & Sibbald, K. R. (2022). LGBTQ+ identity concealment and disclosure within the (heteronormative) health professions: "Do I? Do I not? And what are the potential consequences?" *SSM – Qualitative Research in Health*, 2, 100114.
<https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2022.100114>

Barthes, R. (1967). *Elements of semiology*. Hill and Wang.

Barthes, R. (1972). *Mythologies*. Hill and Wang.

Barthes, R. (1977). *Image–music–text*. Fontana Press.

Baym, N. K. (2015). *Personal connections in the digital age* (2nd ed.). Polity.

Beer, D. (2017). The social power of algorithms. *Information, Communication & Society*, 20(1), 1–13.
<https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1216147>

Bell, D., & Binnie, J. (2000). *The sexual citizen: Queer politics and beyond*. Polity.

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. *Information, Communication & Society*, 15(5), 739–768.
<https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661>

Berger, M. N., Taba, M., Marino, J. L., Lim, M. S. C., & Skinner, S. R. (2022). Social media use and health and well-being of lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer youth: Systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 24(9), e38449.
<https://doi.org/10.2196/38449>

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books.

Bhandari, A., & Bimo, S. (2022). Why's everyone on TikTok now? The algorithmized self and the future of self-making on social media. *Social Media + Society*, 8(1).
<https://doi.org/10.1177/20563051221086241>

Boczkowski, P. J., & Foot, K. A. (Eds.). (2020). *The Oxford handbook of digital journalism*. Oxford University Press.

Boellstorff, T. (2005). *The gay archipelago: Sexuality and nation in Indonesia*. Princeton University Press.

Bonilla, Y., & Rosa, J. (2015). #Ferguson: Digital protest, hashtag ethnography, and the racial politics of social media in the United States. *American Ethnologist*, 42(1), 4–17.
<https://doi.org/10.1111/amet.12112>

boyd, d. (2014). *It's complicated: The social lives of networked teens*. Yale University Press.

Bucher, T. (2018). *If...then: Algorithmic power and politics*. Oxford University Press.

Bucholtz, M., & Hall, K. (2005). Identity and interaction: A sociocultural linguistic approach.

Discourse Studies, 7(4–5), 585–614.
<https://doi.org/10.1177/1461445605054407>

Burke, P. J., & Stets, J. E. (2009). *Identity theory*. Oxford University Press.

Burr, V. (2015). *Social constructionism* (3rd ed.). Routledge.

Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.

Butler, J. (1993). *Bodies that matter: On the discursive limits of sex*. Routledge.

Butler, J. (2004). *Undoing gender*. Routledge.

Cass, V. C. (1979). Homosexual identity formation: A theoretical model. *Journal of Homosexuality*, 4(3), 219–235. https://doi.org/10.1300/J082v04n03_01

Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. Polity.

Chandler, D. (2017). *Semiotics: The basics* (3rd ed.). Routledge.

Collins, P. H. (2020). *Intersectionality as critical social theory*. Duke University Press.

Couldry, N., & Hepp, A. (2017). *The mediated construction of reality*. Polity.

Cover, R. (2016). *Digital identities: Creating and communicating the online self*. Academic Press.

Chan, R. C. H. (2023). Benefits and risks of LGBT social media use for sexual and gender minority individuals: An investigation of psychosocial mechanisms of LGBT social media use and well-being. *Computers in Human Behavior*, 139, 107531. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107531>

Döring, N., Bhana, D., & Albury, K. (2022). Digital sexual identities: Between empowerment and disempowerment. *Current Opinion in Psychology*, 48, 101466. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101466>

Gedro, J. A., & Rocco, T. S. (Eds.). (2024). *The Routledge handbook of LGBTQ identity in organizations and society*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003128151>

Noon, E. J., Yang, C.-C., Pesout, O., Stefanczyk, M. M., & Seiler, G. (2024). Insta-identity: The longitudinal reciprocal relationship between authentic and positive self-presentation on Instagram and the sexual identity development of sexual minority youth. *Computers in Human*

Behavior, 158, 108278.
<https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108278>

Russell, S. T., Bishop, M. D., & Fish, J. N. (2023). Expanding notions of LGBTQ+. *Annual Review of Sociology*, 49, 281–296.
<https://doi.org/10.1146/annurev-soc-030320-032256>

D'Augelli, A. R. (1994). Identity development and sexual orientation: Toward a model of lesbian, gay, and bisexual development. In E. J. Trickett, R. J. Watts, & D. Birman (Eds.), *Human diversity: Perspectives on people in context* (pp. 312–333). Jossey-Bass.

Davis, J. L., & Jurgenson, N. (2014). Context collapse: Theorizing context collusions and collisions. *Information, Communication & Society*, 17(4), 476–485.
<https://doi.org/10.1080/1369118X.2014.888458>

DeVito, M. A., Walker, A. M., & Birnholtz, J. (2018). Too gay for Facebook: Presenting LGBTQ+ identity throughout the personal social media ecosystem. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 2(CSCW), Article 44, 1–23.
<https://doi.org/10.1145/3274313>

Dreyfus, H. L., & Rabinow, P. (1983). *Michel Foucault: Beyond structuralism and hermeneutics* (2nd ed.). University of Chicago Press.

Duguay, S. (2016). "He has a way gayer Facebook than I do": Investigating sexual identity disclosure and context collapse on a social networking site. *New Media & Society*, 18(6), 891–907. <https://doi.org/10.1177/1461444814549930>

Duguay, S. (2016). Lesbian, gay, bisexual, trans, and queer visibility through selfies: Comparing platform mediators across Ruby Rose's Instagram and Vine presence. *Social Media + Society*, 2(2). <https://doi.org/10.1177/2056305116641975>

Duguay, S. (2022). *Personal but not private: Queer women, sexuality, and identity modulation on digital platforms*. Oxford University Press.

Duguay, S. (2023). TikTok's queer potential: Identity, methods, movements. *Social Media + Society*, 9(1). <https://doi.org/10.1177/20563051231157594>

Echaiz, L. F., Duguay, S., & Myles, D. (2023). Mapping the social implications of platform algorithms for LGBTQ+ communities. *Journal of Digital Social Research*, 5(4). <https://doi.org/10.33621/jdsr.v5i4.162>

Evolvi, G. (2022). *Blogging my religion, sex, and self: LGBTQ Muslims in the digital sphere*. Routledge.

Fisher, C. B., Tao, X., & Ford, M. (2024). Social media: A double-edged sword for LGBTQ+ youth. *Computers in Human Behavior*, 156, 108194. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108194>

Foucault, M. (1972). *The archaeology of knowledge and the discourse on language*. Pantheon Books.

Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Pantheon Books.

Foucault, M. (1978). *The history of sexuality: Volume 1: An introduction*. Pantheon Books.

Foucault, M. (1982). The subject and power. *Critical Inquiry*, 8(4), 777–795. <https://doi.org/10.1086/448181>

Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. *Social Text*, 25/26, 56–80. <https://doi.org/10.2307/466240>

Fraser, N. (2000). Rethinking recognition. *New Left Review*, 3, 107–120.

Fraser, N. (2003). Social justice in the age of identity politics: Redistribution, recognition, and

participation. In N. Fraser & A. Honneth (Eds.), *Redistribution or recognition? A political-philosophical exchange* (pp. 7–109). Verso.

Fraser, N., & Honneth, A. (2003). *Redistribution or recognition? A political-philosophical exchange*. Verso.

Geeng, C., Yee, S., & Roesner, F. (2021). Fake it 'til you make it: Understanding and supporting fake accounts on social media. In *Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (Article 541). Association for Computing Machinery.

<https://doi.org/10.1145/3411764.3445502>

García Rodríguez, D., & Murtagh, B. (2022). Situating anti-LGBT moral panics in Indonesia: Homophobia, criminalisation, acceptance, and religiosity. *Indonesia and the Malay World*, 50(146), 1–19.

<https://doi.org/10.1080/13639811.2022.2038871>

Giddens, A., & Sutton, P. W. (2021). *Sociology* (9th ed.). Polity.

Gillespie, T. (2018). *Custodians of the Internet: Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media*. Yale University Press.

Gillespie, T. (2020). Content moderation, AI, and the question of scale. *Big Data & Society*, 7(2).
<https://doi.org/10.1177/2053951720943234>

Goffman, E. (1959). *The presentation of self in everyday life*. Doubleday.

Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Prentice-Hall.

Goffman, E. (1967). *Interaction ritual: Essays on face-to-face behavior*. Anchor Books.

Gorwa, R. (2019). What is platform governance? *Information, Communication & Society*, 22(6), 854–871.
<https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1573914>

Gorwa, R., Binns, R., & Katzenbach, C. (2020). Algorithmic content moderation: Technical and political challenges in the automation of platform governance. *Big Data & Society*, 7(1).
<https://doi.org/10.1177/2053951719897945>

Gray, M. L. (2009). *Out in the country: Youth, media, and queer visibility in rural America*. New York University Press.

Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society* (T. Burger & F. Lawrence, Trans.). MIT Press.

Haimson, O. L., Delmonaco, D., Nie, G., & Wegner, A. (2022). Disproportionate removal: Social media platforms' repeated suspension of LGBTQ+ accounts. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 6(CSCW2), Article 517. <https://doi.org/10.1145/3555648>

Hall, S. (Ed.). (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage.

Henry, N., Flynn, A., & Powell, A. (2020). Technology-facilitated domestic and sexual violence: A review. *Violence Against Women*, 26(15–16), 1828–1854. <https://doi.org/10.1177/1077801219875821>

Highfield, T. (2016). *Social media and everyday politics*. Polity.

Hogg, M. A. (2016). Social identity theory. In S. McKeown, R. Haji, & N. Ferguson (Eds.), *Understanding peace and conflict through social identity theory* (pp. 3–17). Springer.

Honneth, A. (1995). *The struggle for recognition: The moral grammar of social conflicts*. MIT Press.

Hutchby, I. (2001). Technologies, texts and affordances. *Sociology*, 35(2), 441–456. <https://doi.org/10.1177/S0038038501000219>

Isin, E. F., & Nielsen, G. M. (Eds.). (2008). *Acts of citizenship*. Zed Books.

Isin, E., & Ruppert, E. (2015). *Being digital citizens*. Rowman & Littlefield.

Jackson, S. J., Bailey, M., & Foucault Welles, B. (2020). *Hashtag activism: Networks of race and gender justice*. MIT Press.

Jagose, A. (1996). *Queer theory: An introduction*. New York University Press.

Jenkins, R. (2014). *Social identity* (4th ed.). Routledge.

Karizat, N., Delmonaco, D., Eslami, M., & Haimson, O. L. (2021). Algorithmic folk theories and identity: How TikTok users co-produce knowledge of identity and algorithms. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 5(CSCW2), Article 305. <https://doi.org/10.1145/3476046>

Kitchin, R. (2017). Thinking critically about and researching algorithms. *Information, Communication & Society*, 20(1), 14–29. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1154087>

Lamont, M., & Molnár, V. (2002). The study of boundaries in the social sciences. *Annual Review of Sociology*, 28, 167–195.

<https://doi.org/10.1146/annurev.soc.28.110601.141107>

Leaver, T., Highfield, T., & Abidin, C. (2023). *Instagram: Visual social media cultures (2nd ed.)*. Polity.

Lloyd, M. (2007). *Judith Butler: From norms to politics*. Polity.

Lupton, D. (2015). *Digital sociology*. Routledge.

Macionis, J. J. (2022). *Sociology (18th ed.)*. Pearson.

Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class, and other essays*. Cambridge University Press.

Marwick, A. E. (2015). Instafame: Luxury selfies in the attention economy. *Public Culture*, 27(1), 137–160. <https://doi.org/10.1215/08992363-2798379>

McLean, K. C., & Syed, M. (Eds.). (2015). *The Oxford handbook of identity development*. Oxford University Press.

Milner, R. M. (2021). *The world made meme (Updated ed.)*. MIT Press.

Myles, D. (2023). *Fermenting queer anthropology: Field methods beyond identity*. Duke University Press.

OECD. (2024). *Developing the skills for the digital transition: OECD digital economy outlook 2024*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/5f3a9b25-en>

Oksala, J. (2005). *Foucault on freedom*. Cambridge University Press.

Pachankis, J. E. (2007). The psychological implications of concealing a stigma: A cognitive-affective-behavioral model. *Psychological Bulletin*, 133(2), 328–345. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.133.2.328>

Pain, P., Chen, G. M., & Campbell, V. (2022). TikTok as a public sphere for political expression: Political identity, activism, and participation among youth. *Social Media + Society*, 8(4).
<https://doi.org/10.1177/20563051221138780>

Papacharissi, Z. (2011). *A networked self: Identity, community, and culture on social network sites*. Routledge.

Papacharissi, Z. (2015). *Affective publics: Sentiment, technology, and politics*. Oxford University Press.

Plummer, K. (2021). *Critical humanism: A manifesto for the twenty-first century*. Polity.

Powell, A., Henry, N., Flynn, A., & Scott, A. J. (2020). Image-based sexual abuse: The extent, nature, and

predictors of perpetration in a community sample. *Computers in Human Behavior*, 109, 106227. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106227>

Reckwitz, A. (2002). Toward a theory of social practices. *European Journal of Social Theory*, 5(2), 243–263. <https://doi.org/10.1177/13684310222225432>

Roberts, S. T. (2019). *Behind the screen: Content moderation in the shadows of social media*. Yale University Press.

Mansell, R. (2024). Realigning incentives through formal media, communications and platform governance. In M. Puppis, R. Mansell, & H. Van den Bulck (Eds.), *Handbook of media and communication governance* (pp. 201–217). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800887206.00026>.

Rohlinger, D. A., & Sobieraj, S. (Eds.). (2022). *The Oxford handbook of digital media sociology*. Oxford University Press.

Salih, S. (2002). *Judith Butler*. Routledge.

Schatzki, T. R. (2002). *The site of the social: A philosophical account of the constitution of social life and change*. Pennsylvania State University Press.

Scott, J. C. (1990). *Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts*. Yale University Press.

Seaver, N. (2022). *Computing taste: Algorithms and the makers of music recommendation*. University of Chicago Press.

Soh, S., Talaifar, S., & Harari, G. M. (2024). Identity development in the digital context. *Social and Personality Psychology Compass*, 18(2), e12940. <https://doi.org/10.1111/spc3.12940>

Southerton, C., Marshall, D., Aggleton, P., Rasmussen, M. L., & Cover, R. (2021). Restricted modes: Social media, content classification and LGBTQ sexual citizenship. *New Media & Society*, 23(5), 920–938. <https://doi.org/10.1177/1461444820904362>

Strand, C. (2024). Understanding chilling effects in digital spaces: A study of Ugandan LGBT+ advocacy in the wake of the draconian 2023 Anti-Homosexuality Act. In W. Chigona, S. Kabanda, & L. F. Seymour (Eds.), *Implications of information and digital technologies for development: ICT4D 2024* (pp. 167–180). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-66982-8_12

Suzor, N. P. (2019). *Lawless: The secret rules that govern our digital lives*. Cambridge University Press.

Tajfel, H. (Ed.). (1978). *Differentiation between social groups: Studies in the social psychology of intergroup relations*. Academic Press.

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The social psychology of intergroup relations* (pp. 33–47). Brooks/Cole.

Talbot, C. V., Talbot, A., & Briggs, P. (2022). The management of LGBTQ+ identities on social media: A student perspective. *New Media & Society*, 24(8), 1729–1750.

<https://doi.org/10.1177/1461444820981009>

Taylor, C. (1994). The politics of recognition. In A. Gutmann (Ed.), *Multiculturalism: Examining the politics of recognition* (pp. 25–73). Princeton University Press.

Triastuti, E. (2021). Subverting mainstream in social media: Indonesian gay men's heterotopia creation through disidentification strategies. *Journal of International and Intercultural Communication*, 14(4), 284–304.

<https://doi.org/10.1080/17513057.2021.1952292>

Troiden, R. R. (1989). The formation of homosexual identities. *Journal of Homosexuality*, 17(1–2), 43–73. https://doi.org/10.1300/J082v17n01_02

Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.

Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., & Wetherell, M. S. (1987). *Rediscovering the social group: A self-categorization theory*. Basil Blackwell.

UNESCO. (2023). *Technology on her terms: Digital inclusion for women and girls*. UNESCO.
<https://unesdoc.unesco.org/>

van Dijck, J. (2013). *The culture of connectivity: A critical history of social media*. Oxford University Press.

van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). *The platform society: Public values in a connective world*. Oxford University Press.

Vivienne, S. (2016). *Digital identity and everyday activism: Sharing private stories with networked publics*. Palgrave Macmillan.

Wang, S. (2022). Migrant allies and sexual remittances: How international students change the sexual attitudes of those who remain behind. *Sociological Perspectives*, 65(2), 328–349.
<https://doi.org/10.1177/0731121421992801>

Warner, M. (1991). Introduction: Fear of a queer planet. *Social Text*, 29, 3–17.
<https://doi.org/10.2307/466295>

Warner, M. (2002). *Publics and counterpublics*. Zone Books.

Weeks, J. (2018). *Sexuality* (4th ed.). Routledge.

Wieringa, S. E. (2024). *A political biography of the Indonesian lesbian, bisexual and trans movement*. Bloomsbury Academic.
<https://doi.org/10.5040/9781350422834>

Wijaya, H. Y. (2020). *Intimate assemblages: The politics of queer identities and sexualities*. Palgrave Macmillan.

Wijaya, H. Y. (2022). Digital homophobia: Technological assemblages of anti-LGBT sentiment and surveillance in Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 50(146), 52–72.
<https://doi.org/10.1080/13639811.2022.2038881>

Yuval-Davis, N. (2011). *The politics of belonging: Intersectional contestations*. Sage.

Zeng, J., & Abidin, C. (2022). "#OkBoomer, TikTok, and the platformization of generational politics." *New Media & Society*, 24(12), 2458–2478.
<https://doi.org/10.1177/14614448211062134>

Zottola, S. A., Kaakinen, M., Oksanen, A., & Reinecke, L. (2024). Online hate, identity, and platform governance: A systematic review. *Computers in Human Behavior*, 151, 108027. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.108027>

Zulli, D., & Zulli, D. J. (2022). Extending the Internet meme: Conceptualizing technological mimesis and imitation publics on the TikTok platform. *New Media & Society*, 24(8), 1872–1890. <https://doi.org/10.1177/1461444820983603>

INDEKS

A

Afiliasi sosial
Affordances
Agama
Agency
Algorithmic mediation
Algorithmic visibility
Algoritma
Algoritma platform
Anonimitas digital
Audience management
Audiens

B

Barthes, Roland
Boundary-making
Budaya digital
Budaya populer
Butler, Judith

C

Citra diri
Closet
Collective identity
Collective resistance
Coming out
Community building
Counterpublic
Counterpublics
Cyberbullying

D

Digital activism
Digital citizenship

Digital culture
Digital identity
Digital literacy
Digital representation
Digital self
Digital sociology
Digital surveillance
Disiplin sosial
Diskriminasi
Diskursus
Doxxing
Dramaturgi

E

Eksklusi sosial
Ekspresi gender
Eksternalisasi
Empowerment
Engagement

F

Facebook
Feedback loops
Followers
Foucault, Michel
Front stage

G

Gender
Gender expression
Gender identity
Gillespie, Tarleton
Goffman, Erving
Governance platform

H

Hidden identity

Heteronormativitas

Homofobia

Humor digital

I

Identity management

Identity modulation

Identity negotiation

Identity performance

Identity work

Identitas digital

Identitas gender

Identitas kolektif

Identitas seksual

Inklusi sosial

Instagram

Institusi sosial

Interaksionisme simbolik

Interseksionalitas

J

Jejaring digital

Jejaring sosial

Judith Butler

K

Kategori sosial

Kekuasaan

Keluarga

Komunitas digital

Komunitas LGBTQA+

Komunikasi digital

Konstruksi sosial

Konstruksionisme sosial

Kontestasi sosial

Kontrol sosial

L

Labeling

Legitimasi

LGBTQA+

Likes

M

Marginalisasi

Media digital

Media sosial

Mekanisme pengakuan

Minoritas seksual

Mitos

Moral policing

N

Negosiasi identitas

Negosiasi identitas digital

Network society

Norma gender

Norma sosial

Normalisasi

O

Orientasi seksual

P

Papacharissi, Zizi

Partisipasi digital

Pelabelan

Pemantauan digital

Pengakuan sosial

Pengawasan algoritmik

Pengawasan digital

Pengelolaan audiens
Pengelolaan identitas
Pengelolaan visibilitas
Performativity
Performativity gender
Platform governance
Platform studies
Platformisasi
Politik pengakuan
Presentasi diri
Privasi digital
Produksi identitas
Produksi sosial
Public sphere

Q

Queer
Queer studies
Queer Theory

R

Recognition
Relasi kuasa
Representasi
Representasi digital
Representasi visual
Resistensi
Resistensi digital
Ruang digital
Ruang publik digital

S

Searchability
Self-presentation
Semiotika

Sense of belonging
Seks biologis
Seksualitas
Simbol
Social identity
Social Identity Theory
Social norm transformation
Social recognition
Social stigma
Solidaritas digital
Stigma
Stigma sosial
Struktur sosial
Surveillance
T
Tajfel, Henri
Teknologi digital
Teori identitas sosial
TikTok
Transformasi norma sosial
Transgender
Twitter/X
U
Ujaran kebencian
V
Van Dijck, José
Visibilitas
Visibilitas digital
W
Weeks, Jeffrey
X
X (Twitter)

GLOSARIUM

Affordances

Karakteristik atau fitur yang disediakan platform digital yang memungkinkan sekaligus membatasi cara pengguna berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun identitas.

Algorithmic Mediation

Proses ketika algoritma platform memengaruhi distribusi konten, visibilitas, interaksi, dan peluang suatu identitas memperoleh perhatian publik.

Algorithmic Visibility

Tingkat keterlihatan suatu konten atau identitas yang ditentukan oleh mekanisme algoritma platform digital.

Audience Management

Strategi mengatur siapa yang dapat melihat, mengakses, atau merespons representasi identitas di media sosial.

Beyond the Closet

Kerangka konseptual yang memandang identitas seksual dan gender bukan sebagai perjalanan linear menuju coming out, melainkan sebagai proses

negosiasi identitas yang terus berlangsung dalam berbagai konteks sosial dan digital.

Boundary-making

Proses sosial yang membentuk batas simbolik antara kelompok yang dianggap termasuk dan yang dianggap berada di luar suatu komunitas atau norma sosial.

Closet

Situasi sosial ketika individu menyembunyikan identitas seksual atau identitas gender karena adanya risiko stigma, diskriminasi, atau penolakan sosial.

Collective Identity

Identitas bersama yang berkembang melalui pengalaman, nilai, tujuan, dan solidaritas dalam suatu kelompok sosial.

Collective Resistance

Upaya bersama suatu kelompok untuk menolak stigma, diskriminasi, atau ketidaksetaraan melalui tindakan kolektif, baik secara luring maupun daring.

Coming Out

Proses mengungkapkan orientasi seksual atau identitas gender kepada individu atau kelompok lain. Dalam perspektif sosiologi, proses ini berlangsung secara bertahap, situasional, dan dapat terjadi berulang kali.

Counterpublic

Ruang komunikasi alternatif yang dibangun kelompok marginal untuk menghasilkan narasi, identitas, dan bentuk pengakuan di luar ruang publik dominan.

Cyberbullying

Bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital, termasuk penghinaan, intimidasi, ancaman, atau pelecehan berbasis identitas.

Digital Activism

Pemanfaatan media digital untuk mengorganisasi aksi kolektif, menyuarakan aspirasi, membangun solidaritas, dan mendorong perubahan sosial.

Digital Identity

Representasi diri yang dibangun melalui interaksi, komunikasi, simbol, dan aktivitas individu dalam ruang digital.

Digital Literacy

Kemampuan memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan memproduksi informasi secara kritis dalam lingkungan digital.

Digital Representation

Cara individu menampilkan identitas melalui teks, gambar, video, simbol, maupun bentuk komunikasi digital lainnya.

Digital Self

Identitas diri yang terbentuk melalui hubungan antara pengalaman personal, aktivitas digital, data, dan interaksi dalam jaringan.

Digital Sociology

Cabang sosiologi yang mengkaji bagaimana teknologi digital memengaruhi struktur sosial, hubungan sosial, identitas, budaya, dan kehidupan sehari-hari.

Digital Surveillance

Proses pemantauan perilaku individu melalui teknologi digital, baik oleh negara, perusahaan platform, maupun pengguna lain.

Discourse

Sistem pengetahuan dan praktik bahasa yang membentuk cara masyarakat memahami realitas sosial.

Double-edged Space

Karakter ruang digital yang secara bersamaan membuka peluang pemberdayaan sekaligus menghasilkan risiko pengawasan, diskriminasi, dan kekerasan digital.

Front Stage

Konsep Goffman yang menggambarkan ruang ketika individu secara sadar mengelola kesan di hadapan audiens.

Gender Expression

Cara individu menampilkan identitas gender melalui pakaian, perilaku, bahasa, penampilan, maupun simbol budaya.

Gender Identity

Pemahaman dan pengalaman subjektif seseorang mengenai identitas gendernya.

Heteronormativity

Sistem norma sosial yang menganggap heteroseksualitas dan identitas gender biner sebagai standar yang paling wajar dan sah.

Hidden Identity

Identitas yang sengaja disembunyikan untuk mengurangi risiko stigma, diskriminasi, atau kekerasan sosial.

Identity Modulation

Strategi individu menyesuaikan bentuk representasi identitas sesuai karakteristik audiens, platform, situasi sosial, dan tingkat keamanan.

Identity Negotiation

Proses dinamis ketika individu membangun, menyesuaikan, mempertahankan, atau mengubah identitasnya melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan digital.

Identity Performance

Cara individu memperlihatkan identitas melalui tindakan, simbol, bahasa, maupun komunikasi sehari-hari.

Identity Work

Serangkaian praktik reflektif dan sosial yang dilakukan individu untuk membangun, mempertahankan, atau mengubah identitasnya.

Intersectionality

Pendekatan yang menjelaskan bahwa pengalaman individu dipengaruhi oleh berbagai kategori sosial yang saling beririsan, seperti gender, seksualitas, kelas, agama, dan etnisitas.

LGBTQA+

Akronim bagi Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer atau Questioning, dan Aseksual, serta identitas seksual dan gender lain yang berada di luar norma heteroseksual dominan.

Moral Policing

Praktik pengawasan dan penilaian moral oleh individu atau kelompok terhadap perilaku orang lain berdasarkan norma sosial atau agama.

Network Society

Konsep Manuel Castells yang menggambarkan masyarakat yang hubungan sosialnya semakin dibangun melalui jaringan digital.

Normative Regulation

Proses ketika norma sosial mengarahkan dan membatasi perilaku individu melalui tekanan sosial maupun institusional.

Performativity

Konsep Judith Butler yang menjelaskan bahwa identitas gender diproduksi melalui tindakan sosial yang terus diulang sehingga tampak alamiah.

Platform Governance

Aturan, kebijakan, algoritma, dan mekanisme moderasi yang digunakan platform digital untuk mengatur aktivitas pengguna.

Platformization

Proses ketika berbagai aktivitas sosial semakin bergantung pada infrastruktur dan logika platform digital.

Presentation of Self

Konsep Erving Goffman mengenai cara individu mengelola kesan yang ditampilkan kepada orang lain dalam interaksi sosial.

Public Recognition

Pengakuan yang diberikan masyarakat terhadap keberadaan, identitas, atau hak suatu individu maupun kelompok.

Queer

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan identitas seksual atau gender yang berada di luar kategori heteroseksual dan biner.

Queer Studies

Bidang kajian yang menganalisis seksualitas, gender, heteronormativitas, dan relasi kuasa secara kritis.

Relasi Kuasa

Hubungan sosial yang memungkinkan individu, kelompok, atau institusi memengaruhi tindakan, pengetahuan, dan norma sosial.

Representation

Proses menghasilkan makna melalui bahasa, simbol, citra, maupun bentuk komunikasi lainnya.

Resistance

Berbagai tindakan individu atau kelompok untuk menolak dominasi, stigma, diskriminasi, maupun ketidaksetaraan sosial.

Safe Space

Ruang sosial maupun digital yang memberikan rasa aman bagi individu untuk mengekspresikan identitas tanpa takut mengalami diskriminasi atau kekerasan.

Self-presentation

Strategi individu dalam mengelola citra dirinya melalui komunikasi dan interaksi sosial.

Sense of Belonging

Perasaan diterima, dihargai, dan menjadi bagian dari suatu komunitas.

Sex

Karakteristik biologis yang berkaitan dengan kromosom, hormon, dan organ reproduksi.

Sexual Orientation

Pola ketertarikan emosional, romantis, atau seksual seseorang terhadap individu lain.

Sexuality

Dimensi sosial yang mencakup identitas seksual, orientasi seksual, ekspresi seksual, norma, dan relasi sosial mengenai seksualitas.

Social Identity

Bagian dari identitas individu yang berasal dari keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu.

Social Identity Theory

Teori yang menjelaskan bahwa identitas individu berkembang melalui proses kategorisasi, identifikasi kelompok, dan perbandingan sosial.

Social Recognition

Proses ketika identitas individu atau kelompok memperoleh legitimasi, penerimaan, dan penghargaan dalam masyarakat.

Social Stigma

Label negatif yang dilekatkan masyarakat kepada individu atau kelompok sehingga memengaruhi posisi sosial dan kesempatan hidupnya.

Symbolic Interaction

Perspektif sosiologi yang menjelaskan bahwa makna sosial dibentuk melalui interaksi menggunakan simbol.

TikTok

Platform media sosial berbasis video pendek yang menjadi arena utama analisis negosiasi identitas digital dalam buku ini.

Visibility Management

Strategi mengatur tingkat keterbukaan identitas melalui pemilihan konten, audiens, maupun pengaturan privasi.

Tentang Penulis

Dr. Refti Handini Listyani, S.Sos., M.Si. adalah Lektor pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Sosiologi di Universitas Gadjah Mada, serta Magister Sosiologi dan Doktor Ilmu Sosial di Universitas Airlangga. Bidang kepakarannya meliputi Sosiologi Gender, Sociology of the Body, Sosiologi Digital, dan Muslim Women Studies. Penelitian dan publikasinya berfokus pada identitas, seksualitas, budaya digital, migrasi, keluarga, serta perubahan sosial dalam masyarakat kontemporer.

Melalui pendekatan yang memadukan perspektif sosiologi, gender studies, cultural studies, dan kajian media digital, ia mengembangkan analisis mengenai relasi kuasa, representasi, pembentukan identitas, dan dinamika gender dalam masyarakat Indonesia. Perspektif tersebut menjadi landasan dalam memahami pengalaman sosial kelompok yang dinegosiasikan di tengah perubahan budaya dan teknologi digital.

Dr. M. Jacky, S.Sos., M.Si. merupakan Lektor Kepala pada Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Bidang kepakarannya meliputi sosiologi digital, metode penelitian digital, analisis wacana kritis, dan sosiologi politik. Penelitian dan publikasinya berfokus pada transformasi masyarakat di era digital, terutama mengenai demokrasi digital, komunikasi politik, komunitas virtual, kewargaan digital, serta relasi kuasa dalam ruang siber.

Melalui berbagai penelitian, publikasi ilmiah, dan pengembangan keilmuan sosiologi, ia berkontribusi pada penguatan kajian sosiologi digital di Indonesia. Perspektif tersebut menjadi pijakan dalam menganalisis bagaimana teknologi digital, tata kelola platform, dan dinamika ruang publik membentuk identitas, interaksi sosial, serta perubahan masyarakat kontemporer.

BEYOND THE CLOSET

NEGOSIASI IDENTITAS DIGITAL LGBTQA+ DI INDONESIA

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara mendasar cara masyarakat membangun hubungan sosial, memproduksi pengetahuan, dan membentuk identitas. Media sosial tidak lagi sekadar menjadi saluran komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang sosial yang memungkinkan berbagai identitas diproduksi, dipertahankan, diperdebatkan, dan memperoleh pengakuan. Perubahan tersebut menghadirkan tantangan baru bagi ilmu-ilmu sosial untuk menjelaskan bagaimana relasi antara individu, masyarakat, teknologi, dan kekuasaan mengalami transformasi dalam era platform digital.

Dalam konteks tersebut, kajian mengenai identitas seksual dan identitas gender memperoleh perhatian yang semakin besar dalam perkembangan sosiologi kontemporer. Akan tetapi, sebagian besar literatur masih didominasi oleh pengalaman masyarakat Barat, sedangkan kajian yang berangkat dari konteks sosial Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, masyarakat Indonesia memiliki karakteristik sosial, budaya, agama, dan kelembagaan yang membentuk dinamika identitas secara berbeda. Kondisi tersebut menjadikan kehadiran buku *Beyond the Closet: Negosiasi Identitas Digital LGBTQA+ di Indonesia* sebagai kontribusi yang penting dalam memperluas khazanah sosiologi Indonesia, khususnya pada bidang kajian masyarakat digital, gender, dan perubahan sosial.

REFTI H. LISTYANI

M. JACKY

